



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025



LEWOLEBA - 2026



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Dasar Hukum	1
1.1.1.	Penjelasan Umum	1
1.1.2.	Perencanaan Pembangunan Daerah	10
1.1.3.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	98
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
2.1.	Capaian Kinerja Makro	1
2.2.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3
2.2.1.	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan	3
2.2.2.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	4
2.2.3.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	4
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	1
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	1
4.1.	Urusan Pendidikan	1
4.1.1.	Jenis Pelayanan Dasar	1
4.1.2.	Target Pencapaian SPM	2
4.1.3.	Realisasi Pencapaian SPM	2
4.1.4.	Anggaran	3
4.1.5.	Dukungan Personil	3
4.1.6.	Permasalahan dan Solusi	4
4.2.	Urusan Kesehatan	4
4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar	4
4.2.2.	Target Pencapaian SPM	5
4.2.3.	Realisasi Pencapaian SPM	11
4.2.4.	Anggaran	22
4.2.5.	Dukungan Personil	22
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi	23
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	24
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	24
4.3.2.	Target Pencapaian SPM	24
4.3.3.	Realisasi Pencapaian SPM	25
4.3.4.	Anggaran	27
4.3.5.	Dukungan Personil	27
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	28

4.4. Urusan Perumahan Rakyat	29
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	29
4.4.2. Target Pencapaian SPM	30
4.4.3. Realisasi Pencapaian SPM	31
4.4.4. Anggaran	32
4.4.5. Dukungan Personil	32
4.4.6. Permasalahan dan Solusi.....	33
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	34
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	34
4.5.2. Target Pencapaian SPM	34
4.5.3. Realisasi Pencapaian SPM	40
4.5.4. Anggaran	52
4.5.5. Dukungan Personil	52
4.5.6. Permasalahan dan Solusi.....	52
4.6. Urusan Sosial.....	54
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	54
4.6.2. Target Pencapaian SPM	55
4.6.3. Realisasi Pencapaian SPM	61
4.6.4. Anggaran	74
4.6.5. Dukungan Personil	74
4.6.6. Permasalahan dan Solusi.....	75
4.7. Program dan Kegiatan Pelaksanaan SPM Tahun 2025	76
4.7.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pendidikan	76
4.7.2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Kesehatan.....	78
4.7.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum	79
4.7.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	79
4.7.5. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	80
4.7.6. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Sosial	81

BAB V PENUTUP.....	1
---------------------------	----------

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Konsolidasi) T.A. 2025 01 Januari – 31 Desember 2025
- Lampiran 2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 3 : Capaian IKK Outcome LPPD Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita naikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nya, penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah. Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat penerapan SPM urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi LPPD Kabupaten Lembata Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.7/989/OTDA Tanggal 12 Februari 2026 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Lembata yang kita cintai bersama ini. Semoga LPPD Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.



Lewoleba, 27 Maret 2026
Bupati Lembata,

P. KANISIUS TUAQ

LPPD LEMBATA 2025



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Lembata dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967).

b. Data Geografis Wilayah

1) Batas Administrasi Daerah

Secara astronomis Kabupaten Lembata terletak pada 08°, 04' - 08°, 40' LS dan antara 123°, 57' – 122°, 38' BT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Utara : Laut Flores;

Selatan : Laut Sawu;

Timur : Selat Merica (Kabupaten Alor);

Barat : Selat Boleng dan Selat Lamakera (Kabupaten Flores Timur).

2) Luas Wilayah dan Wilayah Administrasi Pemerintahan

Luas Wilayah Kabupaten Lembata adalah 4.620,375 km², dengan wilayah daratan seluas 1.266,39 km² (27,41%) dan lautan seluas 3.353,915 km² (72,59%) serta garis pantai sepanjang 492,80 km. Wilayah Kabupaten Lembata secara administratif meliputi 9 (sembilan) kecamatan, 7 (tujuh) kelurahan, dan 144 desa.

3) Kondisi Perumahan

Total rumah pada tahun 2025 sebanyak 43.015 rumah, di mana terdapat 36.550 rumah kondisi layak huni (kondisi semi permanen dan kondisi permanen) atau sebesar 84,97% dari total jumlah rumah.

Rincian jumlah dan kondisi bangunan tempat tinggal di Kabupaten Lembata sebagaimana pada tabel berikut.

Jumlah dan Kondisi Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Kondisi Perumahan			
		Darurat	Semi Permanen	Permanen	Jumlah
1	Nagawutung	789	1.699	658	3.146
2	Atadei	650	1.119	814	2.583
3	Ile Ape	346	2.895	1.126	4.367
4	Lebatukan	699	1.315	449	2.463
5	Nubatukan	457	8.135	3.410	12.002
6	Omesuri	1.036	1.918	1.275	4.229
7	Buyasuri	1.430	5.361	838	7.629
8	Wulandoni	775	2.575	676	4.026
9	Ile Ape Timur	283	2.016	271	2.570
JUMLAH		6.465	27.033	9.517	43.015

Sumber data: Dinas Permukiman Kab. Lembata

4) Topografis

Secara umum, Lembata merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri atas Pulau Lembata, Pulau Komba, Pulau Suanggi, dan beberapa pulau kecil tanpa nama lainnya. Dari pulau-pulau tersebut, Lembata merupakan pulau yang paling besar dan dihuni manusia. Sementara Pulau Komba sebagai pulau terbesar kedua yang merupakan pulau dengan gunung berapi aktif dan tidak berpenghuni, serta Pulau Suanggi yang juga tidak berpenghuni. Dari sisi topografi, tampak bahwa 37,60% wilayah Kabupaten Lembata merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng di atas 40% dan diapiti oleh beberapa gunung berapi seperti Gunung Hobal, Gunung Ile Werun, Gunung Batutara dan Gunung Lewotolok yang merupakan gunung api dengan puncak tertinggi yakni 1.913 mdpl. Selain itu, masih terdapat gunung tidak aktif lainnya seperti Gunung Uyelewun, Gunung Labalekang, Gunung Mauraja, Gunung Kimok, Gunung Adowajo dan Gunung Mingar. Sedangkan 55,60% wilayah kabupaten Lembata merupakan daerah pesisir, dengan tingkat kemiringan yang bervariasi antara 0-15% sampai dengan 40%. Kemiringan antara 0-15%



tersebut mendominasi wilayah dataran sepanjang tepi pantai. Sementara 6,8% merupakan daerah lembah/dataran. Kondisi alam yang demikian sangat berpengaruh terhadap area sebaran pemukiman/penduduk, termasuk letak kecamatan dan desa di mana terdapat 97 desa di pesisir, 54 desa bukan pesisir, 3 desa di lembah, 123 desa di lereng, dan 25 desa di dataran.

5) Keadaan Iklim

Kabupaten Lembata merupakan wilayah yang beriklim tropis Tipe D-F dengan musim kemarau panjang yang berkisar antara 8-9 bulan/tahun dan musim hujan yang relatif singkat antara 3-4 bulan/tahun dengan jumlah hari hujan sepanjang tahun 110 hari dan jumlah curah hujan tertinggi pada bulan Desember yakni 436,3 mm. Kelembaban udara rata-rata berkisar 69%-86% dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 27,3°C-30°C, serta kecepatan angin rata-rata berkisar antara 2m/det-4m/det.

c. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lembata kondisi 31 Desember 2025 sebanyak 153.116 jiwa yang tersebar di 9 Kecamatan atau 151 Desa/ Kelurahan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka jumlah penduduk mengalami peningkatan sebanyak 3.195 jiwa.

Apabila disandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Lembata yakni 1.266,39 km² maka tingkat kepadatan penduduk Lembata tahun 2025 adalah 121 jiwa/km². Data terinci tingkat kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk 31 Desember 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah Daratan (Km ²)	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Nagawutung	11.442	185,70	62
2	Atadei	8.411	150,42	56
3	Ile Ape	15.098	96,86	156
4	Lebatukan	10.957	241,90	45
5	Nubatukan	44.560	165,64	269
6	Omesuri	21.806	161,91	135
7	Buyasuri	23.922	104,26	229
8	Wulandoni	10.268	121,44	85



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah Daratan (Km ²)	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
9	Ile Ape Timur	6.652	38,26	174
TOTAL		153.116	1.266,39	121

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Lembata

Gambaran penduduk menurut komposisi masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1) Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 31 Desember 2025

No	Kecamatan	Laki – laki		Perempuan		Jmlh Penduduk	
		Jmlah	%	Jmlh	%	Jmlah	%
1	Nagawutung	5509	3,60	5933	3,87	11442	7,47
2	Atadei	3969	2,59	4442	2,90	8411	5,49
3	Ile ape	7138	4,66	7960	5,20	15098	9,86
4	Lebatukan	5276	3,45	5681	3,71	10957	7,16
5	Nubatukan	22105	14,44	22455	14,67	44560	29,10
6	Omesuri	10728	7,01	11078	7,24	21806	14,24
7	Buyasuri	11757	7,68	12165	7,94	23922	15,62
8	Wulandoni	4938	3,23	5330	3,48	10268	6,71
9	Ile Ape Timur	3150	2,06	3502	2,29	6652	4,34
TOTAL		74.570	48,70	78.546	51,30	153.116	100

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Lembata

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah kecamatan Nubatukan dengan jumlah penduduk sebanyak 44.560 jiwa atau sebesar 29,10% yang terdiri 14,44% laki-laki dan 14,67% perempuan. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Ile Ape Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 6.652 jiwa atau sebesar 4,34% yang terdiri 2,06% laki-laki dan 2,28% perempuan.

2) Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Jumlah dan Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025

No	Kecamatan	Belum Sklh	Tidak Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	D.II	D.III	D.IV/ S.I	S.II	S.III	Jmlh
1	Nagawutung	1389	1520	3470	1489	2914	42	96	521	1	0	11442
2	Atadei	909	1040	2879	1124	2027	32	77	320	3	0	8411
3	Ile Ape	1855	2036	4971	1550	3600	54	168	856	8	0	15098
4	Lebatukan	1400	1354	3265	1389	2915	54	110	464	6	0	10957



No	Kecamatan	Belum Sklh	Tidak Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	D.II	D.III	D.IV/ S.I	S.II	S.III	Jmlh
5	Nubatukan	6004	6058	6583	5552	13968	361	1318	4578	136	2	44560
6	Omesuri	3336	3311	6796	2579	4656	58	164	898	7	1	21806
7	Buyasuri	3543	3575	8072	2522	5096	70	133	906	5	0	23922
8	Wulandoni	1103	1374	3498	1238	2507	32	84	426	5	1	10268
9	Ile Ape Timur	876	828	2406	675	1537	16	68	245	1	0	6652
TOTAL		20.415	21.096	41.940	18.118	39.220	719	2.218	9.214	172	4	153.116

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Lembata

Dari sajian tabel di atas diketahui bahwa penduduk lulusan perguruan tinggi adalah sebanyak 12.327 orang atau 8,05% dari jumlah penduduk.

3) Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan

Komposisi penduduk berdasarkan Agama/Kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Jumlah dan Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan Per 31 Desember 2025

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu	Aliran Kepercayaan	Jmlh
1	Nagawutung	1648	53	9736	5	0	0	0	11442
2	Atadei	17	19	8375	0	0	0	0	8411
3	Ile Ape	4379	105	10614	0	0	0	0	15098
4	Lebatukan	617	91	10248	1	0	0	0	10957
5	Nubatukan	9915	1981	32608	53	3	0	0	44560
6	Omesuri	12161	127	9518	0	0	0	0	21806
7	Buyasuri	13464	49	10409	0	0	0	0	23922
8	Wulandoni	2437	10	7821	0	0	0	0	10268
9	Ile Ape Timur	426	43	6183	0	0	0	0	6652
TOTAL		45.064	2.478	105.512	59	3	0	0	153.116

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Lembata

Berdasarkan sajian data di atas, dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Lembata sebagian besar memeluk Agama Katolik yakni sebanyak 105.512 jiwa sementara penganut agam konghucu dan aliran kepercayaan tidak ada di Kabupaten Lembata.

4) Komposisi Penduduk berdasarkan Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua

Komposisi penduduk berdasarkan Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua dapat dilihat pada tabel berikut.

**Jumlah dan Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua
Per 31 Desember 2025**

No	Kecamatan	Usia Muda		jmlh	Usia Produktif		jmlh	Usia Tua		Jmlh
		L	P		L	P		L	P	
1	Nagawutung	1419	1353	2772	3650	3905	7555	440	675	1115
2	Atadei	827	846	1673	2686	2775	5461	456	821	1277
3	Ile Ape	1746	1580	3326	4677	5270	9947	715	1110	1825



No	Kecamatan	Usia Muda		jmlh	Usia Produktif		jmlh	Usia Tua		Jmlh
		L	P		L	P		L	P	
4	Lebatukan	1303	1215	2518	3524	3694	7218	449	772	1221
5	Nubatukan	6032	5458	11490	14928	15548	30476	1145	1449	2594
6	Omesuri	2983	2607	5590	6998	7347	14345	747	1124	1871
7	Buyasuri	3055	2730	5785	7829	8248	16077	873	1187	2060
8	Wulandoni	1143	1065	2208	3271	3465	6736	524	800	1324
9	Ile Ape Timur	798	712	1510	2043	2237	4280	309	553	862
TOTAL		19.306	17.566	36.872	49.606	52.489	102.095	5.658	8.491	14.149

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Lembata

d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan

Wilayah Kabupaten Lembata terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 7 (tujuh) kelurahan, dan 144 Desa. Adapun rincian jumlah desa per masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Luas Kecamatan, dan Jumlah Desa/ Kelurahan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas km2	Desa/ kelurahan
1	Nagawutung	Loang	185,70	18 Desa
2	Atadei	Kalikasa	150,42	15 Desa
3	Ile Ape	Waipukang	96,86	17 Desa
4	Lebatukan	Hadakewa	241,90	17 Desa
5	Nubatukan	Lewoleba	165,64	11 Desa dan 7 Kelurahan
6	Omesuri	Balauring	161,91	22 Desa
7	Buyasuri	Wairiang	104,26	20 Desa
8	Wulandoni	Wulandoni	121,44	15 Desa
9	Ile Ape Timur	Lamaau	38,26	9 Desa
Total	9 kecamatan		1.266,39	151 (144 desa dan 7 kelurahan)

Sumber data: BPS Kabupaten Lembata, diolah.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata, perangkat daerah di Kabupaten Lembata terdiri dari 2 (dua) sekretariat, Inspektorat, 20 Dinas, 6 (enam) Badan, 9 (sembilan) Kecamatan, dan RSUD. Adapun rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.



Perangkat Daerah, Urusan yang Dilaksanakan, dan Jumlah ASN Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan	Jumlah ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	16	58	147	221
2	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	5	4	72	81
3	Inspektorat	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	8	57	24	89
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	8	40	22	70
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	7	6	9	22
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	7	10	28	45
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	14	9	35	58
8	Badan Pendapatan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	12	6	35	53
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	7	13	13	33
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	15	171	85	271
11	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	8	31	46
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	15	22	42
13	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	7	21	26	54
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	6	8	28	42
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	3	7	16	26
16	Dinas Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	15	1935	235	2185



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
2026**

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan	Jumlah ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	7	9	18	34
18	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	8	851	222	1081
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	3	29	38
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	8	18	17	43
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	24	74	107
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	6	12	15	33
23	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	7	11	24	42
24	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha kecil dan menengah, Urusan Pemerintahan Bidang perdagangan, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	9	22	22	53
25	Dinas Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	6	17	25	48
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	7	175	110	292
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	5	6	15	26
28	Dinas Perhubungan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	10	5	83	98
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	5	28	39
30	Rumah Sakit Umum Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	14	253	102	369
31	Kecamatan Nubatukan	Unsur Kewilayahan	39	-	93	132
32	Kecamatan Lebatukan	Unsur Kewilayahan	9	-	21	30



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
2026**

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan	Jumlah ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
33	Kecamatan Ile Ape	Unsur Kewilayahan	8	1	20	29
34	Kecamatan Ile Ape Timur	Unsur Kewilayahan	9	-	16	25
35	Kecamatan Atadei	Unsur Kewilayahan	9	-	23	32
36	Kecamatan Nagawutung	Unsur Kewilayahan	8	-	24	32
37	Kecamatan Wulandoni	Unsur Kewilayahan	6	-	22	28
38	Kecamatan Omesuri	Unsur Kewilayahan	8	-	19	27
39	Kecamatan Buyasuri	Unsur Kewilayahan	7	-	18	25
JUMLAH			353	3.780	1.868	6.001

Sumber data: BKPSDMD Kab. Lembata



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah) sebagaimana **terlampir** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis yang digambarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lembata adalah sebagai berikut:

a. Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan peran strategis daerah belum dikelola secara optimal

Kabupaten Lembata memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai daerah kepulauan dengan dominasi morfologi berbukit dan perbukitan terjal dibandingkan dengan dataran rendah yang relatif datar. Kabupaten Lembata memiliki posisi strategis karena terletak di antara 2 (dua) kabupaten kepulauan yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor, serta menjadi bagian dari posisi Nusa Tenggara Timur di dalam kesatuan “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara. Kondisi ini belum dikelola secara optimal untuk membangun kerjasama antar daerah, pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan rantai pasok regional, peningkatan aksesibilitas wilayah, dan pengembangan infrastruktur. Penyebaran penduduk cenderung terkonsentrasi di wilayah pesisir utara dan wilayah dataran rendah, sementara daerah perbukitan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya cenderung berpenduduk jarang. Laju pertumbuhan penduduk Lembata stabil per tahun, namun angka ketergantungan masih cukup tinggi, artinya beban ekonomi penduduk usia produktif sangat besar. Proyeksi penduduk menunjukkan lonjakan signifikan, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan dasar dan infrastruktur, dikhawatirkan akan



menimbulkan tekanan besar terhadap ekosistem dan sistem pelayanan publik.

- 2) Potensi daerah belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal
Struktur ekonomi Lembata sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun demikian, potensi lahan produktif pertanian tidak tersebar merata. Beberapa kecamatan memiliki surplus produksi pangan, sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Nubatukan, Buyasuri, dan Omesuri justru mengalami defisit lahan. Potensi laut sangat besar, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan teknologi, infrastruktur, dan kelembagaan nelayan. Sumber daya hutan produksi, peternakan, hortikultura, tambang, dan energi baru (panas bumi) juga belum dikembangkan maksimal. Ancaman utama adalah konversi lahan, degradasi hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang belum sepenuhnya berprinsip keberlanjutan, sehingga memicu risiko lingkungan dan menurunkan daya saing jangka panjang.

- 3) Daya dukung dan daya tampung pada penyediaan air bersih dan lahan terbatas

Permasalahan utama pada aspek ini adalah mulai terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya untuk air bersih dan lahan, akibat eksploitasi, konversi lahan, dan degradasi penutup lahan. Sebaran cekungan air tanah sangat tidak merata, dengan ketergantungan yang tinggi pada 2 (dua) cekungan air tanah utama, sehingga jika terjadi eksploitasi berlebih, potensi krisis air, dan penurunan kualitas lingkungan semakin besar. Infrastruktur konservasi (seperti embung dan reboisasi) masih minim, memperparah risiko kekeringan di musim kemarau panjang. Pengelolaan limbah dan sanitasi belum memadai karena memiliki akses sanitasi layak, dan cakupan layanan sampah perkotaan sangat rendah.

- 4) Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan masih rendah
Ketahanan pangan di Lembata cenderung fluktuatif, dengan sebagian

besar kecamatan masih belum mampu swasembada. Ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah dan risiko gagal panen akibat variabilitas iklim menjadi masalah utama. Beberapa wilayah mengalami defisit air pada musim kemarau karena daerah aliran sungai tidak mampu menyimpan air secara optimal, antara lain akibat kerusakan penutup lahan (*land cover*), alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian, dan minimnya infrastruktur konservasi air seperti embung dan bendungan kecil. Akses air minum layak mengalami peningkatan, namun masih ada penduduk yang belum terlayani air minum layak, terutama di desa-desa terpencil dan daerah perbukitan. Ketahanan energi menunjukkan kemajuan elektrifikasi, meski masih terdapat desa/daerah yang belum teraliri listrik, dan potensi panas bumi belum dioptimalkan pemanfaatannya. Keterkaitan antara pangan, air, dan energi (FEW Nexus) sangat kuat, sehingga gangguan pada salah satu aspek dapat berdampak sistemik pada ketahanan hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

5) Lingkungan hidup berkualitas masih rendah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Lembata berada pada kategori “Baik”, tetapi kualitas air dan lahan masih menengah dan fluktuatif. Tekanan utama terhadap kualitas lingkungan adalah pencemaran air domestik, alih fungsi lahan, deforestasi, dan limbah pertanian. Pengelolaan keanekaragaman hayati, pengembangan ekonomi hijau dan biru, serta pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Akses rumah layak huni dan permukiman sehat pun masih rendah yang beresiko pada meningkatkan penyakit berbasis lingkungan. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, dapat menurunkan produktivitas, kualitas hidup, dan daya tarik investasi daerah.

6) Tingginya potensi bencana daerah

Kabupaten Lembata termasuk daerah yang memiliki potensi bencana dengan tingkat risiko bencana sangat tinggi di NTT, baik akibat faktor geologi (letusan gunung api, gempa, tsunami) maupun hidrometeorologi

(banjir, longsor, kekeringan, abrasi). Indeks Risiko Bencana memang turun dalam lima tahun terakhir, tetapi risiko laten tetap besar, terutama di kawasan perbukitan terjal, pesisir, dan daerah sekitar gunung api. Infrastruktur proteksi banjir dan abrasi masih minim, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum sistemik, serta pemulihan pascabencana sering lambat. Perubahan iklim memperparah siklus kekeringan-banjir, mengganggu pola tanam, dan suplai air bersih, sehingga perlu pendekatan pembangunan berbasis resiliensi dan adaptif pada tiap lini.

7) Kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata stabil, namun kepadatan dan distribusinya cenderung tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di perkotaan (Lewoleba Kecamatan Nubatukan) dan penurunan di desa-desa perbukitan atau terpencil. Angka ketergantungan cukup tinggi, menandakan beban ekonomi yang berat pada usia produktif. Rasio gender mulai membaik, tetapi kelompok rentan (anak, lansia, perempuan, disabilitas) masih membutuhkan perlindungan khusus. Jika tidak diimbangi pemerataan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal, ketimpangan wilayah dan sosial akan semakin lebar, memperbesar risiko kemiskinan dan pengangguran terbuka.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Tingkat kesejahteraan ekonomi masih rendah

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lembata masih berada di bawah rata-rata Provinsi NTT dan nasional. Struktur ekonomi Lembata masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, sementara kontribusi sektor industri pengolahan dan jasa masih sangat terbatas. Tingkat kemiskinan masih tinggi dan laju penurunan kemiskinan berjalan lambat. Di sisi lain, pengeluaran per kapita, daya beli, dan akses terhadap peluang ekonomi formal juga masih terbatas. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan signifikan.



2) Derajat kesehatan masyarakat masih rendah

Derajat kesehatan masyarakat Lembata masih menghadapi banyak tantangan. Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) memang mengalami peningkatan, tetapi prevalensi stunting dan kekurangan gizi pada balita masih cukup tinggi dan fluktuatif. Cakupan layanan kesehatan dasar memang meningkat, namun masih terdapat disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama terkait akses air bersih, sanitasi, serta fasilitas kesehatan. Angka kematian ibu dan bayi masih berfluktuasi, dan masih banyak keluarga yang belum menikmati pelayanan kesehatan berkualitas secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas juga belum optimal, serta masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular akibat perilaku hidup sehat yang belum membudaya.

3) Kualitas pendidikan masih rendah dan belum merata

Kualitas pendidikan di Kabupaten Lembata masih tergolong rendah dan belum merata di seluruh wilayah. Rata-rata lama sekolah sebagian besar masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP. Harapan lama sekolah memang meningkat, tetapi capaian literasi dan numerasi, terutama di sekolah dasar dan menengah, masih jauh dari target nasional. Terdapat kesenjangan kualitas antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, serta keterbatasan jumlah guru berkualifikasi dan fasilitas pendukung pembelajaran. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kualitas SDM Lembata dan memperlambat proses akselerasi pembangunan berbasis pengetahuan dan inovasi.

4) Perlindungan sosial yang kurang adaptif

Perlindungan sosial di Kabupaten Lembata dinilai masih kurang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan bencana. Jangkauan program jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang meningkat pesat, namun pelaksanaan perlindungan sosial lainnya, seperti

Jamsostek untuk pekerja informal, masih rendah cakupannya. Perlindungan bagi kelompok rentan, seperti anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana belum optimal dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal atau adaptif terhadap kondisi krisis (misalnya saat pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi). Ketersediaan data, sistem pendataan, dan mekanisme penyaluran bantuan juga belum terintegrasi secara efektif.

5) Pembangunan kebudayaan masih rendah

Indeks Pembangunan Kebudayaan, yang menjadi tolak ukur kemajuan kebudayaan dan pelestarian tradisi, masih berada pada tingkat menengah bawah. Berbagai ekspresi budaya lokal, kesenian, serta praktik tradisi masih belum terintegrasi secara optimal dalam program pembangunan. Dukungan terhadap lembaga kebudayaan, perlindungan warisan budaya, serta promosi nilai-nilai luhur daerah juga masih terbatas. Sedangkan kerukunan umat beragama secara umum terjaga dengan baik. Penguatan literasi budaya dan multikulturalisme di kalangan generasi muda perlu lebih didorong untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial.

6) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, pembangunan kepemudaan dan masyarakat inklusif masih rendah

Indeks Pembangunan Gender di Lembata menunjukkan tren positif, namun ketimpangan gender dalam berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik) masih cukup nyata. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga berkualitas dan pembangunan kepemudaan masih menghadapi banyak tantangan, termasuk tingginya angka pernikahan usia dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keterbatasan akses perempuan dan pemuda pada peluang ekonomi dan kepemimpinan. Indeks ketimpangan gender memang menurun, namun perlu upaya sistemik untuk memastikan perempuan, anak, dan kelompok marginal lain mendapatkan hak dan kesempatan yang setara. Program inklusi sosial untuk penyandang

disabilitas, anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya juga masih terbatas cakupannya.

c. Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya saing sumber daya manusia masih rendah

Kabupaten Lembata menghadapi tantangan serius dalam aspek daya saing sumber daya manusia. Beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif di Lembata masih sangat tinggi. Kondisi ini menekan kapasitas ekonomi dan sosial daerah, sebab pendapatan dan hasil produksi yang dihasilkan oleh kelompok usia produktif harus dibagi untuk menanggung beban kelompok usia tidak produktif yang tinggi. Selain itu, sebagian besar penduduk usia produktif belum memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas yang memadai untuk menopang ekonomi daerah secara optimal. Mayoritas angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP, sementara akses terhadap pendidikan menengah, vokasi, dan pendidikan tinggi masih terbatas. Program pengembangan keterampilan kerja dan kewirausahaan juga belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Akibatnya, banyak penduduk usia produktif terjebak pada pekerjaan informal, pertanian tradisional, atau sektor ekonomi berupah rendah. Kondisi ini menimbulkan siklus ketergantungan dan memperlambat peningkatan daya saing daerah.

2) Ilmu pengetahuan dan inovasi belum optimal mendukung produktivitas ekonomi

Produktivitas ekonomi di Kabupaten Lembata masih sangat didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ketergantungan terhadap sektor primer menyebabkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat dan sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan cuaca, dan bencana alam. Minimnya inovasi dan adopsi ilmu pengetahuan di sektor produktif menyebabkan hasil produksi belum memiliki nilai tambah yang signifikan.



Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan sumber daya alam belum berkembang, sehingga produk-produk unggulan Lembata banyak dijual dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Ekosistem inovasi daerah, termasuk kemitraan antara dunia usaha, pemerintah, dan perguruan tinggi, belum berjalan optimal. Akibatnya, peluang pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, kreativitas, dan diversifikasi produk lokal belum dapat diwujudkan secara maksimal.

3) Transformasi ekonomi hijau dan biru belum diterapkan secara optimal

Transformasi ke arah ekonomi hijau (berbasis pertanian berkelanjutan, konservasi hutan, pengelolaan sampah terpadu) dan ekonomi biru (pemanfaatan potensi laut yang ramah lingkungan, pengembangan wisata bahari) masih dalam tahap awal dan belum terintegrasi dalam kebijakan daerah. Aktivitas ekonomi yang masih mengandalkan eksploitasi sumber daya alam tradisional berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan dan mengancam keberlanjutan jangka panjang. Upaya konservasi, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penguatan ekonomi sirkular masih minim. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut belum menjadi gerakan kolektif.

4) Transformasi digital belum diterapkan secara optimal

Transformasi digital di Kabupaten Lembata masih menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi infrastruktur, akses, penggunaan, maupun keterampilan digital masyarakat. Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di NTT sendiri masih berada di level menengah bawah, dan Lembata sebagai wilayah kepulauan menghadapi hambatan lebih besar, seperti keterbatasan jaringan internet di desa terpencil, kurangnya perangkat digital, dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha, pelajar, maupun aparat pemerintah. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, pendidikan, pemasaran produk UMKM, dan inovasi sosial masih terbatas. Sebagian besar layanan publik belum terdigitalisasi secara penuh, dan integrasi sistem data lintas perangkat daerah belum berjalan.

Di tingkat rumah tangga, pemanfaatan internet dan perangkat digital lebih banyak bersifat konsumtif, belum produktif. Tanpa akselerasi pembangunan TIK (jaringan, perangkat, SDM digital), Kabupaten Lembata akan semakin tertinggal dalam persaingan ekonomi regional dan nasional.

5) Integrasi ekonomi domestik dan global masih terbatas

Konektivitas ekonomi Lembata dengan wilayah lain di Indonesia masih bersifat terbatas, baik karena posisi geografis kepulauan maupun keterbatasan moda transportasi dan logistik. Ekspor produk unggulan Lembata masih sangat minim, bahkan defisit neraca perdagangan barang dan jasa dengan luar daerah masih terjadi hampir setiap tahun. Kegiatan perdagangan besar, ekspor langsung, atau rantai pasok global belum berkembang. Produk lokal umumnya dipasarkan melalui perantara di wilayah provinsi atau luar pulau. Hal ini menyebabkan nilai tambah ekonomi Lembata sangat kecil dan masyarakat hanya memperoleh bagian kecil dari rantai nilai komoditas. Ketiadaan pelabuhan ekspor modern, keterbatasan fasilitas pendingin (*cold storage*), dan akses pembiayaan ekspor menjadi hambatan besar integrasi ekonomi global.

6) Ketersediaan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang belum optimal

Ketersediaan infrastruktur perkotaan dan perdesaan belum optimal, menyebabkan hasil produksi dari desa sulit dipasarkan secara efisien di kota atau luar daerah. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik memang meningkat, namun secara keseluruhan masih relatif rendah sehingga distribusi barang dan jasa terhambat, terutama di musim hujan atau di wilayah perbukitan. Akses rumah tangga terhadap hunian layak pun masih rendah, menandakan belum optimalnya program perumahan rakyat. Persentase desa mandiri sangat kecil dan mayoritas desa masih berstatus berkembang atau tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa strategi transformasi desa ke arah desa mandiri dan penguatan pusat pertumbuhan baru belum berjalan efektif.



7) Stabilitas ekonomi makro belum berjalan optimal

Fluktuasi harga kebutuhan dasar seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan bakar masih sering terjadi, terutama saat musim paceklik atau ketika ada gangguan distribusi dari luar daerah. Hal ini sangat berdampak pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat, serta sering kali menjadi pemicu inflasi musiman. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga sangat rendah yang mengakibatkan transfer pusat masih sangat tinggi, dan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas pembangunan secara mandiri sangat terbatas. Kapasitas fiskal rendah ini juga membatasi ruang gerak inovasi kebijakan, serta menyulitkan akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.

d. Aspek Pelayanan Umum

1) Belum optimalnya pelaksanaan prinsip tata kelola yang berintegritas dan adaptif

Hambatan utama terletak pada belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dan keterbatasan kapasitas birokrasi dalam mengelola urusan pemerintahan secara responsif, terbuka, dan inovatif. Indikator objektif dapat dilihat dari beberapa capaian indeks utama, seperti Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Reformasi Birokrasi (RB), dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Ketiganya masih menunjukkan skor yang relatif rendah jika dibandingkan dengan target nasional maupun rata-rata provinsi. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan belum menyeluruh dan integratif. Banyak layanan publik yang belum terdigitalisasi, sehingga masyarakat masih dihadapkan pada proses birokrasi yang panjang, lamban, dan rawan praktik maladministrasi. Keterbatasan kompetensi ASN, kurangnya budaya kerja profesional, serta lemahnya sistem *reward and punishment* menyebabkan perubahan perilaku birokrasi berjalan lambat. Akibatnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah masih rendah, terutama untuk layanan administrasi kependudukan,



perizinan, dan bantuan sosial, hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial.

- 2) Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansi belum berjalan efektif

Prinsip penegakan hukum yang berkeadilan di Kabupaten Lembata masih tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya angka kasus kriminalitas yang tercatat dan ditangani aparat penegak hukum setempat. Beberapa jenis tindak kriminal, seperti pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran lalu lintas, dan konflik lahan, masih sering terjadi setiap tahun. Tidak semua kasus tersebut dapat dituntaskan secara cepat dan adil. Selain itu, akses masyarakat khususnya kelompok rentan (perempuan, anak, dan masyarakat adat) terhadap bantuan hukum dan perlindungan masih terbatas. Lemahnya literasi hukum dan terbatasnya advokasi menjadi kendala utama dalam menciptakan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Keamanan Lembata relatif terjaga, tetapi masih rentan terhadap peredaran narkoba, penyelundupan, hingga konflik horizontal akibat sengketa lahan atau perbedaan kepentingan. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat dalam proses politik memang meningkat, namun belum sepenuhnya mencerminkan substansi demokrasi yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan HAM.

- 3) Masih rendahnya daya saing daerah

Kabupaten Lembata hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam aspek ini, yang tercermin dari rendahnya daya saing investasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Daya saing investasi yang rendah terlihat dari minimnya minat investasi asing maupun domestik, terbatasnya kemudahan perizinan, dan belum optimalnya promosi potensi daerah. Investor masih menghadapi kendala infrastruktur, perizinan yang belum efisien, serta keterbatasan insentif. Daya saing SDM pun masih tergolong rendah, sebagaimana diuraikan pada aspek sebelumnya: tingkat pendidikan rata-rata masih di bawah nasional, penguasaan keterampilan teknologi terbatas,

dan produktivitas kerja rendah. Infrastruktur pendukung, baik fisik (jalan, pelabuhan, listrik) maupun digital (internet dan TIK) belum memenuhi standar untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis industri maupun pariwisata. Kondisi ini menjadikan posisi Lembata kurang kompetitif dalam bersaing dengan daerah lain di NTT maupun kawasan timur Indonesia. Ketahanan pertahanan dan diplomasi daerah pun menjadi terbatas, karena tidak didukung oleh kekuatan ekonomi dan teknologi yang cukup.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun, sedangkan misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Lembata yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan merupakan penjabaran tahap pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan keselarasan visi dan misi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

a) Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

"Lembata Maju, Lestari, dan Berdaya Saing".

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Lembata Maju** adalah Lembata yang mampu mengembangkan kekuatan ekonomi, sosial, dan politik sebagai fondasi yang kuat untuk menjadi kabupaten *mandiri, inovatif, dan adil* dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.



Mandiri: Kabupaten Lembata yang mandiri bersifat multidimensi, yaitu mandiri secara ekonomi, mandiri secara politik (ukuran otonomi urusan dan otonomi fiskal), mandiri secara pangan, mandiri secara budaya (keunikan dan ketangguhan budaya serta etos kerja tinggi), dan mandiri secara demografis (pertumbuhan penduduk dan mutu sumber daya manusia). Mandiri juga menggambarkan kemampuan mengelola potensi dan sumber daya lokal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, keuletan dan ketangguhan, kemampuan mengembangkan kekuatan ekonomi, sosial, dan politik dalam menghadapi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan, dan tantangan pembangunan.

Inovatif: Sumber daya manusia Kabupaten Lembata yang berkualitas, berilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menciptakan inovasi dalam berbagai sektor, dan mampu menghasilkan produk-produk dan layanan yang memiliki daya saing tinggi.

Adil: Masyarakat Lembata dapat menikmati keadilan dalam berbagai aspek antara lain pendidikan, kesehatan, layanan publik, kesempatan kerja, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

2. **Lembata Lestari** adalah Lembata yang mampu mewujudkan pembangunan yang memberikan dampak positif dan seimbang dalam aspek lingkungan, sosial ekonomi, dan tata kelola (*Environment, social, and governance* atau ESG), juga mampu mewujudkan lima pilar SDGs yaitu Manusia (*People*), Planet (*planet*), Kemakmuran (*prosperity*), Kedamaian (*peace*), dan Kemitraan (*partnership*). Hal ini berarti pembangunan di Kabupaten Lembata akan memberikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) tanpa mengurangi kesempatan dan hak generasi mendatang.
3. **Lembata Berdaya Saing** adalah Lembata yang mampu mengelola berbagai sumber daya dan menciptakan inovasi dalam berbagai sektor untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah, daya saing iklim investasi, daya saing sumber daya manusia, daya saing infrastruktur wilayah, dan



tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, responsif berbasis teknologi serta layanan untuk mampu menghasilkan produk dan layanan yang memiliki daya saing tinggi.

b) Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan Visi Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif;
3. Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib;
4. Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata;
5. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya;
6. Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara *Good and Clean Governance* untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.

Penjelasan dari 6 (enam) Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar

Misi ini berfokus pada penguatan pondasi transformasi ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi daerah. Misi ini mencakup pemenuhan pangan, pengelolaan pertanian dan perikanan pola kawasan terintegrasi terutama pemenuhan infrastruktur dasar basis ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai landasan pembangunan ekonomi dan percepatan peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan, industri, pariwisata, usaha mikro kecil-menengah, ekonomi kreatif dan digital serta



ekspansi pasar. Pada misi ini pemerintah daerah juga mendorong kerja sama produsen dengan Usaha Mikro dengan mendorong pihak ketiga/lembaga dalam rangka memperkuat rantai pasok ekonomi hulu hilir termasuk intervensi pemerintah dalam mengkoordiver produk-produk/hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan dan kerja sama antar daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi ini berfokus pada penguatan fondasi transformasi sosial sektor pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat. Misi ini mencakup pemenuhan layanan dasar pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan layanan dasar kesehatan, peningkatan mutu kesehatan, peningkatan kompetensi dan pemerataan penyebaran tenaga pendidik, kependidikan, dan tenaga kesehatan serta pemenuhan layanan dasar dan peningkatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.

3. Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman, dan Tertib

Misi ini berfokus pada penguatan supremasi hukum dan peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro daerah sebagai landasan transformasi pembangunan. Misi ini mencakup peningkatan penegakan hukum terutama penegakan peraturan daerah, peningkatan kapabilitas lembaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini masyarakat, wawasan kebangsaan dan peningkatan penanganan bencana serta pengendalian inflasi untuk stabilitas ekonomi makro.

4. Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata

Misi ini berfokus pada peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas. Misi ini mencakup infrastruktur strategis dasar untuk mendorong pusat-pusat



pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban logistik dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan jasa meliputi infrastruktur jalan, listrik, air minum layak, air baku berkelanjutan, transportasi, komunikasi dan informatika, sanitasi layak, ketahanan energi dan ketahanan pangan serta perumahan dan permukiman yang layak.

5. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial, dan Budaya

Misi ini berfokus pada pembangunan yang inklusif sebagai landasan transformasi yang mencakup peningkatan peran serta masyarakat, perempuan, pemuda, dan keluarga serta anak dalam pembangunan; pembangunan kebudayaan untuk meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan berupa ekspresi budaya, warisan budaya, ketahanan sosial budaya, gender serta ekonomi budaya yang memiliki kekhasan; resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana; peningkatan lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi keanekaragaman hayati Lembata dalam pembangunan serta peran serta masyarakat dalam pola hidup yang berprespektif lingkungan.

6. Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan secara *Good and Clean Governance* untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif

Misi ini difokuskan pada transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan inovatif.

Misi ini mencakup kelembagaan tepat fungsi, peningkatan SDM aparatur yang cerdas, kompeten, berakhlak, inovatif, kreatif, transparan, peningkatan pelayanan publik prima berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peningkatan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.



Untuk mewujudkan Visi Lembata Maju, Lestari, dan Berdaya Saing Tahun 2025-2029 dengan 6 (enam) Misi Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan 8 (delapan) Tema Pembangunan sebagai pedoman kerja utama yang mencerminkan pembangunan lintas sektor sebagai berikut:

Tema 1 Lembata Mandiri, yaitu: Lembata yang mandiri secara ekonomi, mampu mengelola potensi sumber daya lokal dari hulu sampai hilir;

Tema 2 Lembata *Smart*, yaitu: Lembata yang SDM masyarakatnya cerdas dan berdaya saing;

Tema 3 Lembata Sehat, yaitu: Lembata yang Masyarakatnya sehat dan berbudaya hidup sehat;

Tema 4 Lembata Tertata, yaitu: Lembata yang mengoptimalisasikan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk mewujudkan ruang daerah yang mandiri, produktif dan lestari dan penyediaan infrastruktur berkualitas dan merata;

Tema 5 Lembata Subur, yaitu: Lembata yang masyarakatnya berbudaya hidup ramah lingkungan;

Tema 6 Lembata Unik, yaitu: Lembata yang masyarakatnya memiliki kekhasan ketahanan sosial budaya dan ekologi;

Tema 7 Lembata Sejahtera, yaitu: Lembata yang masyarakatnya memiliki kehidupan yang layak dari seluruh aspek kehidupan, aman, bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan;

Tema 8 Lembata Prima, yaitu: Pemerintahan Lembata yang prima dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Guna mewujudkan Visi Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing, maka Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 diperkuat oleh 20 Prioritas Unggulan dalam *Tagline* Nelayan-Tani- Ternak (NTT) yang merupakan langkah-langkah konkret sebagai peta jalan (road map) yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mempercepat perubahan dan mendukung pencapaian target pembangunan juga sebagai motor penggerak



perubahan nyata di tengah masyarakat. 20 Prioritas Unggulan #Nelayan-Tani-Ternak (NTT) sebagai berikut:

1. Penyediaan Infrastruktur pertanian, perkebunan dan peternakan.

Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:

- a) Ekspansi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan baik lahan kering maupun lahan basah berupa percontohan sawah, percontohan sawah/ perombakan pematang sawah di Waikomo untuk mendukung indeks pertanaman 200 ke 300 dan pembajakan lahan;
- b) Melakukan redistribusi lahan dan sertifikasi lahan untuk menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan tanah/lahan pertanian;
- c) Pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan Jalan Usaha Tani menuju kantong produksi;
- d) Pembangunan jalan usaha tani menuju Gunung Uyelewun sebagai akses pembuka ekonomi hijau kawasan pegunungan mendorong pertanian Lestari, ekowisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis lingkungan;
- e) Pembangunan bendungan, sumur bor, dan fasilitas pendukung;
- f) Pembangunan dan pengelolaan irigasi pertanian baik primer, sekunder dan tersier.

2. Penyediaan sarana produksi pertanian, penanganan pasca panen dan alat dan mesin pertanian mendukung ekonomi kerakyatan. Prioritas Unggulan ini difokuskan untuk:

- a) Menjamin ketersediaan dan akses pupuk, benih/bibit unggul dan pestisida (herbisida dan insektisida) yang ramah lingkungan serta penyediaan obat hewan ternak dan pakan ternak termasuk subsidi sarana produksi pertanian (saprodi) dan sarana produksi peternakan (saprotrak);



- b) Penyediaan/pemeliharaan/modifikasi alat dan mesin pertanian;
 - c) Menjamin penanganan pasca panen yang berkualitas untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani;
 - d) Membangun kerjasama kemitraan dan fasilitasi penyediaan permodalan berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk bantuan sosial/ hibah/ pinjaman baik dilakukan oleh pemerintah kerjasama dengan masyarakat maupun kerjasama dengan lembaga keuangan (bank).
3. Pengembangan klaster pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
Prioritas Unggulan ini difokuskan untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan wilayah dengan pola kemitraan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir sehingga dapat dikembangkan agrobisnis, agro industri dan agro wisata untuk menciptakan daya saing daerah. Prioritas unggulan ini akan dijelaskan lebih detail pada sub bagian arah pengembangan wilayah.
4. Penyediaan jaminan pemasaran komoditi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan (pengembangan Bukit Hog dan Bukit Ruminansia)
Prioritas Unggulan ini difokuskan pada ekspansi pasar melalui pola terintegrasi dan kebijakan afirmasi pengembangan Bukit Hog dan Bukit Ruminansia ternak besar dan ternak kecil sekaligus menjadikannya area wisata alam/agro wisata meliputi:
- a) Penyediaan sarana dan prasarana berupa penyediaan lahan, Pembangunan kandang dan pagar, penyediaan fasilitas pendukung berupa air dan listrik, penyediaan sarana produksi peternakan/sapronak (ternak, pakan, obat-obatan);
 - b) Fasilitasi penyediaan permodalan berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk bantuan sosial/hibah/pinjaman termasuk penyediaan barang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain



- baik dilakukan oleh pemerintah, kerja sama dengan masyarakat maupun kerja sama dengan lembaga keuangan (bank);
- c) Membangun kemitraan melalui pengaturan tata niaga;
 - d) Penguatan tim lalu lintas ternak;
 - e) Mengembangkan pemasaran berbasis teknologi digitalisasi termasuk melalui konten aplikasi;
 - f) Pengembangan padang penggembalaan ternak ruminansia dalam rangka pemberdayaan dan demonstrasi plot (demplot) sebagai sarana pembelajaran/sekolah lapang.
5. Hilirisasi komoditas unggulan daerah dan sumber daya alam.
- Prioritas Unggulan ini difokuskan pada pengembangan industri komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian masyarakat dengan mendorong terintegrasinya pembangunan hulu-hilir, membangun kemitraan dengan pihak ketiga/lembaga, akademisi, desa (BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih), dunia usaha dan kerjasama antar daerah dalam mendorong peningkatan investasi, perluasan jangkaun promosi, guna mendukung penyerapan tenaga kerja yang memadai serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prioritas ini mencakup:
- a) Pengembangan industri pakan ternak;
 - b) Pembangunan industri garam dan garam konsumsi;
 - c) Pembangunan pabrik es;
 - d) Pembangunan industri pengolahan pangan lokal beras porang;
 - e) Pembangunan industri pengolahan tepung ikan;
 - f) Pembangunan pabrik air mineral.
6. Pengembangan *Food Estate* lahan kering terintegrasi Botani (Bobu-Tanjung Leur-Tobotani) dengan pola desa transit.
- Prioritas Unggulan ini difokuskan pada pengembangan kawasan sentra produksi pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna di sepanjang kawasan terintegrasi Klaster Botani untuk memenuhi



kebutuhan dalam daerah maupun luar daerah, menjadikan desa transit sebagai titik pertumbuhan menuju desa mandiri.

7. Pembangunan SPBN ((Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan).

Prioritas Unggulan ini sebagai salah satu upaya agar para nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi tepat kebutuhan dengan harga terjangkau, sehingga dapat menekan biaya produksi.

8. Penguatan Usaha Mikro sektor unggulan dan koperasi

Prioritas Unggulan ini difokuskan pada penguatan usaha mikro dan koperasi yang bergerak di bidang pertanian, perikanan dan nonagro mencakup:

- a) Pengolahan dan pemasaran komoditi: pangan dan pangan lokal (jagung, kacang-kacangan, porang), perkebunan (mente, kemiri, kopi), peternakan (ayam pedaging, ayam petelur, ayam beku, sapi dan babi), perikanan (olahan ikan basah dan ikan kering);
- b) Pengolahan, pemasaran dan ekonomi kreatif (kain tenun, anyaman, kriya, kerajinan tangan, cendramata);
- c) Pelaksanaan sayembara motif tenun ikat khas Lembata;
- d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro melalui pelatihan, magang, studi banding;
- e) Penyediaan mesin dan peralatan pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan;
- f) Penyediaan bahan baku yang memadai;
- g) Desain dan kemasan;
- h) Membangun kerjasama kemitraan dan fasilitasi penyediaan permodalan berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk bantuan sosial/ hibah/ pinjaman baik dilakukan oleh pemerintah kerjasama dengan masyarakat maupun kerjasama dengan lembaga keuangan (bank);
- i) Pembangunan pusat oleh-oleh khas Lembata;



- j) Pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih untuk membangun ekonomi desa/kelurahan yang kuat dan mandiri;
 - k) Pendampingan dan pembinaan secara berkala.
9. Penguatan sektor pendukung pariwisata
- Prioritas Unggulan ini difokuskan pada pengembangan pariwisata melalui:
- a) Penguatan sektor pendukung dan melibatkan swasta untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
 - b) Promosi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event daerah, keikutsertaan pada event antar daerah dan promosi digital;
 - c) Sinergi pengembangan desa wisata dan pelaku usaha pariwisata;
 - d) Pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif;
 - e) Pembangunan ruang kreatif kota;
 - f) Pembangunan sarana prasarana pariwisata milik daerah berorientasi lingkungan dan tangguh bencana;
 - g) Penguatan/pembangunan situs-situs budaya sebagai wujud penghormatan sejarah dan leluhur mendukung tonggak baru pengembangan pariwisata budaya lokal.
10. Penyediaan Laboratorium Kesehatan Hewan dalam Mendukung Lalu lintas Ternak
- Prioritas Unggulan ini difokuskan menyediakan laboratorium kesehatan hewan beserta fasilitas pendukung, menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjamin kualitas hewan/ternak yang diekspor ke luar daerah, menjamin kesehatan masyarakat veteriner, serta meningkatkan PAD dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
11. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan sekaligus mendukung pengawasan perairan laut.
- Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:



- a) Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa pengadaan kapal nelayan dan alat tangkap ramah lingkungan (rumponisasi), *cool box dan cold storage*;
 - b) Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya berupa pembangunan tambak ikan, pengadaan benih/bibit, pakan ikan untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar, rumput laut, tripang dll;
 - c) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah;
 - d) Peningkatan kapasitas nelayan melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e) Pembangunan kapasitas nelayan melalui pendidikan dan pelatihan;
 - f) Optimalisasi Tempat Pendaratan Ikan (TPI).
12. Penguatan cadangan pangan daerah melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)
- Prioritas Unggulan ini difokuskan untuk menjamin ketersediaan pangan dalam daerah dengan meningkatkan produksi pangan dan menjamin stabilitas harga barang pokok melalui:
- a) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah di sektor pertanian, peternakan dan perikanan;
 - b) Pelaksanaan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) berupa bantuan, subsidi harga beras, jagung, dan pasar murah bekerjasama dengan Perum Bulog maupun produsen/penghasil dengan sasaran terutama kepada masyarakat menengah ke bawah;
 - c) Pelaksanaan Program SPHP komoditi bawang merah melalui kegiatan penanganan pasca panen dan pemasaran.
13. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan mendukung IPM
- Prioritas Unggulan ini difokuskan untuk:
- a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan formal dan non formal baik pada sekolah milik pemerintah maupun swasta;



- b) Pemberian bantuan hibah ke sekolah-sekolah dan bantuan sosial perlengkapan sekolah kepada peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem dan kelompok rentan lainnya;
 - c) Kerja sama pelayanan transportasi bagi siswa terutama di daerah terpencil;
 - d) Membangun kerjasama penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - e) Fasilitasi pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda;
 - f) Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pendidikan;
 - g) Peningkatan kompetensi dan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan baik pada sekolah pemerintah maupun swasta;
 - h) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan (bangunan Gedung beserta fasilitasnya, alat Kesehatan, dan obat-obatan);
 - i) Peningkatan SDM tenaga kesehatan baik kualitas maupun kuantitas;
 - j) Penyebaran tenaga kesehatan baik pada rumah sakit pemerintah maupun swasta;
 - k) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan bantuan belajar/beasiswa bagi dokter umum maupun spesialis;
 - l) Peningkatan status rumah sakit;
 - m) Pelatihan tenaga fungsional teknis pada berbagai bidang Pelatihan tenaga fungsional teknis pada berbagai bidang.
14. Pengembangan pertanian organik mendukung Lembata Sehat menuju Lembata Emas 2045
- Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:
- a) Penyediaan pangan sehat dan bergizi untuk pasien;
 - b) Kerja sama mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan *zero stunting* menuju Lembata Emas 2045 serta masyarakat umumnya;
 - c) Penyediaan lahan dan fasilitas pendukung pertanian organik dengan memanfaatkan lahan tidur dan lahan masyarakat;



- d) Penyediaan sarana produksi pertanian organik (benih/bibit bermutu, pupuk organik dan obat-obatan organik);
 - e) Menjamin pemasaran pertanian organik.
15. Pembangunan ketenagakerjaan dalam mendukung inovasi pemuda wirausaha mandiri.

Prioritas Unggulan ini difokuskan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, industrial dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, kompetitif melalui pendidikan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten dalam meningkatkan nilai tawar di pasar kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Prioritas ini mencakup:

- a) Fasilitasi Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah;
- b) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berusaha baik oleh pemerintah maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga diklat yang berkompeten termasuk BLK Karitas Peduli dan BLK swasta lainnya sebagai wadah inkubator wirausaha;
- c) Fasilitasi bantuan modal usaha bagi para pencari kerja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan / berkompeten termasuk kepada para purna migran (#BAPAK SENANG MAMA SENANG#);
- d) Fasilitasi penyediaan lahan pertanian dan bantuan alat dan mesin pertanian bagi petani buruh migran (#LAHAN MIGRAN#);
- e) Fasilitasi penyediaan jaminan sosial tenaga kerja dan atau asuransi tenaga kerja yang rentan bekerja di sektor riil sebagai nelayan, tani, ternak, dan buruh termasuk penangkap ikan paus dan pengiris tuak;
- f) Pengembangan sistem pendataan tenaga kerja berbasis digital, layanan keimigrasian dan kerjasama dengan pihak bank untuk menjamin keamanan dan kenyamanan kerja ke luar negeri serta fasilitasi pemulangan migran daerah yang meninggal maupun mengalami deportasi.



16. Perlindungan perempuan dan anak serta pembangunan kepemudaan dan olahraga

Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:

- a) Optimalisasi Pos Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (PPTPA);
- b) Pelaksanaan pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan bina keluarga remaja generasi berencana (GenRe), serta Bina Keluarga Balita holistik integratif;
- c) Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang perlindungan perempuan dan anak;
- d) Pembinaan keluarga baru melalui kerjasama dengan pihak keagamaan;
- e) Pembangunan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) beserta fasilitas pendukung;
- f) Pemberdayaan perempuan;
- g) Pembangunan pemuda dan olahraga berupa penyediaan sarana dan prasarana olahraga termasuk pembangunan stadion penyangga;
- h) Peningkatan sumber daya manusia olahraga;
- i) Pelaksanaan turnamen olahraga dalam daerah maupun keikutsertaan pada turnamen luar daerah;

17. Peningkatan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, adil dan merata melalui tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang profesional, partisipatif, dan berkeadilan Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:

- a) Pelaksanaan koordinasi, konsolidasi lintas sektor dan pemangku kepentingan secara periodik maupun insidental guna menangani masalah sosial, Pembangunan dan kemasyarakatan;
- b) Optimalisasi peran forum-forum antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama



(FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komite Inteligen Daerah (Kominda);

- c) Mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat;
- d) Reformasi birokrasi pada 8 area perubahan mencakup penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Kabupaten Lembata termasuk pembentukan bidang pemakaman dan kebersihan kota, penataan SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan kualitas pelayanan publik;
- e) Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f) Pemekaran dan penataan kecamatan dan desa/kelurahan.

18. Penataan Kota dan Persampahan

Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:

- a) Pengaturan moda transportasi kota melalui kerjasama dengan pihak ketiga termasuk angkutan umum dalam kota;
- b) Pengaturan dan penguatan terminal dalam kota;
- c) Optimalisasi pemanfaatan taman kota/taman publik/ruang kreatif kota;
- d) Penataan kawasan kumuh, penataan drainase kota, pembangunan kolam retensi, normalisasi DAS/Kanal/ Cekdam, biopori;
- e) Pemeliharaan jalan dalam kota;
- f) Pengembangan ruang terbuka hijau;
- g) Pengadaan lampu jalan;
- h) Penataan dan pengelolaan persampahan meliputi tata kelola, pengadaan sarana prasarana serta sumber daya manusia.

19. Penyediaan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar sekaligus mendukung akses pasar antar wilayah.

Prioritas unggulan ini difokuskan pada:

- a) Ketersediaan infrastruktur strategis jalan terutama ke kantong produksi, ke kawasan wisata, ke fasilitas umum, penanganan segmen-segmen kritis, jalur evakuasi pada zona merah dan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap ruas-ruas jalan kabupaten;



- b) Peningkatan jangkauan listrik terutama pada desa maupun dusun yang belum mendapatkan akses listrik;
- c) Menjamin ketersediaan air baku dan air bersih yang layak, aman dan terjangkau;
- d) Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni;
- e) Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah;
- f) Penyediaan sanitasi layak dan aman;
- g) Penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman;
- h) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara;
- i) Pembangunan pelabuhan rakyat Subak Wutun yang menghubungkan Lembata, Solor dan Adonara serta pelabuhan rakyat Leur yang menghubungkan Lembata dan Pantar Alor;
- j) Penyediaan sarana transportasi darat pantai selatan (Tobotani-Lodoblong-Lewoleba);
- k) Kerja sama untuk pembukaan jalur baru ekspedisi Lewoleba- Makasar, Lewoleba-Surabaya dan kerja sama kapal cepat Lewoleba-Kupang PP;
- l) Peningkatan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- m) Kerja sama penguatan jaringan seluler dengan telkomsel;
- n) Kerja sama pemerintah dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan media massa;
- o) Pembangunan/peningkatan/penataan pasar daerah maupun pasar rakyat;
- p) Optimalisasi dan revitalisasi pasar daerah maupun pasar rakyat dengan pembentukan badan pengelola pasar untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi wilayah, mendorong investasi dan kerjasama daerah;
- q) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

20. Ekologi berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan air

Prioritas Unggulan ini difokuskan pada perlindungan lingkungan dan sumber daya alam mencakup:

- a) Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pengembangan tanaman hortikultura di Uyelewun, Ile Ape dan dataran tinggi lainnya serta pengembangan terumbu karang dan bakau untuk menjadikan Lembata sebagai pusat karbon;
- b) Pelaksanaan konservasi, pembangunan cekdam, restorasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan serta pembangunan embung resapan dengan melibatkan masyarakat, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan;
- c) Penanaman barisan hijau Malapari sepanjang jalan utama, rumah penduduk dan lahan desa (satu desa satu hektar) untuk menyerap karbon guna mengatasi isu pemanasan global;
- d) Pelaksanaan inovasi #tebang satu tanam empat# untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan;
- e) Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- f) Pengembangan lingkungan berbasis kearifan lokal (muro dan duan);
- g) Pengembangan sumber daya genetik lokal pola tanaman sisip.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional, maka ditetapkan Program Prioritas Daerah sekaligus mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Adapun Program Strategis Nasional terdiri dari:

PSN 1: Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sekolah rakyat dan pembangunan rumah;



PSN 2: Ketahanan pangan dengan kegiatan pengadaan gabah/beras dan penyaluran cadangan beras pemerintah;

PSN 3: Kesehatan untuk semua dengan kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional dan Makan Bergizi Gratis;

PSN 4: Perluasan akses pendidikan dengan kegiatan revitalisasi pendidikan dasar;

PSN 5: Pertumbuhan ekonomi dengan kegiatan pengendalian inflasi, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan kemudahan perzinan di Daerah.

Adapun penetapan program prioritas daerah, dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Program Prioritas RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
Visi : Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing											
Misi I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri, dan Kepastian Pasar											
Tema 1 : Lembata Mandiri											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 1-12											
T.1	Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	S.1	Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor unggulan berbasis potensi daerah	1	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	1	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina, didampingi dan difasilitasi	1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 1 dan 5
				2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	2	Persentase usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2	Pengembangan UMKM	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 1 dan 5



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				3	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3	Produksi Tanaman Pangan, Produksi Hortikultura, Produksi Komoditas peternakan, dan Produksi perkebunan	3	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian dan Ketahanan Pangan	PSN 1
				4	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	4	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	4	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian dan Ketahanan Pangan	PSN 1
				5	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian dan Ketahanan Pangan	PSN 1



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				6	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	6	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	6	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan	PSN 1
				7	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7	Persentase peningkatan nilai tambah produk perikanan	7	Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Perikanan	PSN 1
				8	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	8	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	8	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PSN 1
				9	Meningkatnya jangkaun pemasaran pariwisata	9	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	9	Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PSN 1



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh ijin sesuai ketentuan	10	Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PSN 5
				11	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaku usaha	11	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka usaha.	11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PSN 5
				12	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	12	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	12	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	PSN 5



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				13	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	13	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	13	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 1
				14	Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Penggunaan alat UTPP sesuai ketentuan	14	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	14	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 5



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
		S.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	15	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	15	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir, persentase peningkatan perlindungan kawasan dari Abrasi Pantai dan Banjir Rob, Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	15	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1 dan 2
				16	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	16	Persentase Cadangan pangan	16	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	PSN 1 dan 2



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				17	Meningkatnya Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	17	Skor Pola Pangan Harapan	17	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pertanian dan Ketahanan Pangan	PSN 1 dan 2
		S.3	Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas	18	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	18	Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	18	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PSN 1
				19	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	19	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	19	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 5
		S.4	Meningkatnya kemandirian desa	20	Meningkatnya Desa yang melaksanakan Kerjasama antar Desa	20	Persentase Fasilitas Kerja Sama	20	Peningkatan Kerjasama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PSN 1



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
Misi II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif											
Tema 2 : Lembata Smart dan Tema 3 : Lembata Sehat											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 13-16											
T.2	Meningkatnya sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan	S.5	Meningkatnya Derajat pendidikan masyarakat	21	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	21	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	21	Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	PSN 1 dan 4
							Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD				
							Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP				
				22	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	22	Terselenggaranya Pendidikan Profesional Berkelanjutan	22	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	PSN 4



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				23	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan gerakan budaya gemar membaca	23	Persentase Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	23	Pembinaan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	PSN 4
		S.6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	24	Meningkatnya Kualitas Layanan Dasar Ibu, Anak, Usia Produktif dan Usia Lanjut	24	Rata rata Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir (BBLR), pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan usia lanjut	24	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah	PSN 1 dan 3



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				25	Meningkatnya Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan	25	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	25	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah	PSN 3
T.3	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	S.7	Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	26	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	26	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	26	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PSN 3
				27	Meningkatnya rehabilitasi sosial	27	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan serta PMKS lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	27	Rehabilitasi Sosial	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PSN 1



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				28	Meningkatnya pemberdayaan sosial	28	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	28	Pemberdayaan Sosial	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PSN 1
				29	Persentase Peselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) pada tahun anggaran	29	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	29	Hubungan Industrial	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PSN 1



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
Misi III : Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib											
Tema 7 : Lembata Sejahtera											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 17											
T.4	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan tertib	S.8	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kerukunan beragama dan demokrasi	30	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat serta meningkatnya kapasitas SDM PPNS	30	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya, Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan, Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas, Persentase cakupan perlindungan masyarakat	30	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	-



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				31	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	31	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	31	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
				32	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	32	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	32	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik	-



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				33	Meningkatnya etika dan budaya politik	33	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	33	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
Misi IV Meningkatkan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata											
Tema 4 : Lembata Tertata											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 18-19											
T.5	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan	S.9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan	34	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	34	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	34	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1 dan 2



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
							Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi pantai dan banjir Rob				
							Persentase luas layanan irigasi multikomoditas				
				35	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	35	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani baik melalui jaringan perpipaan maupun bukaan jaringan perpipaan	35	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1
				36	Meningkatnya layanan persampahan regional	36	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	36	Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				37	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	37	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik layak dan aman)	37	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1
				38	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	38	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	38	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
				39	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	39	Tingkat kemantapan jalan	39	Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1
				40	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	40	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah	40	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				41	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	41	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	41	Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN 1
							Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni				



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				42	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	42	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	42	Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN 1
				43	Terpeliharanya kualitas kawasan permukiman	43	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	43	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN 1
				44	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	44	Persentasi Permukiman yang suda Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	44	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN 1
				45	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	45	Konektivitas Darat	45	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	PSN 1



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
							Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota				
							Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten				
						46	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Laut	46	Konektivitas Laut	46	Pengelolaan Pelayaran



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
Misi V Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya											
Tema 5 : Lembata Unik dan Tema 6 : Lembata Subur											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 20											
T.6	Meningkatnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup	S.10	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	47	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	47	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	47	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Lingkungan Hidup	-
				48	Menurunnya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	48	Indeks kualitas air	48	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	-



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
							Indeks Kualitas Udara				
				49	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	49	Persentase RTH	49	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup	-
				50	Meningkatnya tata kelola persampahan	50	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	50	Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	-
T.7	Menurunnya risiko bencana	S.11	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	51	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	51	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	51	Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PSN 1
T.8	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya	S.12	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	52	Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	52	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	52	Pengembangan Kebudayaan	Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	-



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
		S.13	Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	53	Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	53	Persentase keluarga yang mendapatkan akses pada layanan berbasis kesetaraan gender	53	Peningkatan Kualitas Keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
				54	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di tingkat daerah	54	Persentase perangkat daerah yang menerapkan PUG melalui strategi perencanaan dan penganggaran responsif gender	54	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
				55	Meningkatnya proses fasilitasi potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda	55	Persentase Peningkatan Kemandirian, Kegiatan Karakter, dan Kontribusi Pemuda Terhadap Pembangunan	55	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	-



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				56	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga	56	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)	56	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
Misi VI Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara <i>Good and Clean Governance</i> untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.											
Tema 8 : Lembata Primer											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 17											
T.9	Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	S.14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan	57	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	57	Indeks Kematangan Organisasi	57	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah	PSN 1
							Persentase peningkatan Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik				



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
							Indeks Pelayanan Publik (%)				
							Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (%)				
							Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (%)				
				58	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	58	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	58	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
							Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				
							Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD				
				59	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	59	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	59	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA				
				60	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	60	Persentase Cakupan kepemilikan akte kelahiran pada penduduk usia 0-18 tahun	60	Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	PSN 1



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
							Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan				
							Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan				
							Persentase akte perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan				
				61	Meningkatnya Tatakelola Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	61	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	61	Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Daerah	-



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
					Meningkatnya Tatakelola Anggaran Daerah		Persentase SKPD yang menyusun Rencana Anggaran sesuai ketentuan				
					Meningkatnya Tatakelola Perbendaharaan Daerah		Persentase Penurunan SILPA				
				62	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah	62	Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	62	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	-
				63	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan anggaran, proses dan kewenangan	63	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1	63	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	-



Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				64	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	64	Indeks SPBE	64	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika	-
				65	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	65	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	65	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Komunikasi dan Informatika	-

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD

Program dan Kegiatan pembangunan daerah setiap tahun disusun secara sistematis dan terintegrasi di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD Tahun 2025 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 sebagai dokumen transisi. Namun demikian, selaras dengan dinamika pembangunan, implementasi program dan kegiatan pada tahun berjalan telah diselaraskan dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Periode 2025-2029. Langkah ini diambil untuk memastikan kesinambungan target kinerja pembangunan yang adaptif terhadap perubahan regulasi serta kebutuhan strategis daerah di masa depan. Pemerintah Daerah melakukan langkah strategis melalui sinkronisasi indikator kinerja untuk memastikan bahwa output kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tetap relevan dan mampu mengakomodasi visi-misi kepala daerah terpilih. Dengan demikian, deviasi antara target rencana transisi (RPD) dengan target rencana definitif (RPJMD) dapat diminimalisir guna menjamin keberlanjutan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang menjadi basis penilaian kinerja dalam LPPD ini, sehingga capaian kinerja yang dilaporkan mencerminkan realitas kebutuhan pembangunan yang sedang berjalan.

Program-program yang terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut.

Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



No	Kegiatan
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Dinas Kesehatan
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot
4)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga



No	Kegiatan
3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
5)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS LEWOLEBA
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS WAIPUKANG
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS LAMA'AU
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Kegiatan
3)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS HADAKEWA
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS BALAURING
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
3)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS WAIRIANG
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS LOANG
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Kegiatan
2)	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS WAIKNUIT
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS WULANDONI
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS PADA
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Kegiatan	
		PUSKESMAS BEAN
1		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3)		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PUSKESMAS AUTONAPOQ
1		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1)		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1)		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2)		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3)		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KESEHATAN
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2)		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Kegiatan	
	3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
	2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	4)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	4)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	6)	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	7)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
5		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



No	Kegiatan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
4)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
5)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
6)	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7)	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
1	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota



No	Kegiatan	
	3)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
	3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
7		BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
8		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENATAAN DESA
	1	Penyelenggaraan Penataan Desa
	3)	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
	1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
	4)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	5)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



No	Kegiatan	
	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
9		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	3)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	4)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	5)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	6)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	7)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
10		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



No	Kegiatan	
	1)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
	2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	2)	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
	1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
	3)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosia
	4)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	5)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	6)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	6)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	7)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)



No	Kegiatan	
	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
11		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	3)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	4)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	5)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	1	Penyimpanan sementara Limbah B3
	2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	6)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	7)	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
	1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
	8)	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Kegiatan	
	9)	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	10)	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	11)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	1	Pengelolaan Sampah
12		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2	Penataan Pendaftaran Penduduk
	3)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	1	Pelayanan Pencatatan Sipil
	2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
	4)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	5)	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	1	Penyusunan Profil Kependudukan
13		DINAS PERHUBUNGAN
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota



No	Kegiatan
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
15	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERAS
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota



No	Kegiatan	
	3)	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERAS
	1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	4)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	5)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	6)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	1	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
	7)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA
	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
	8)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
	9)	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasa
	10)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
16		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	3)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	4)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL



No	Kegiatan	
	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	5)	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
17		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	1)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	2)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN
	1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
	3)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	4)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	1	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
18		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota



No	Kegiatan	
	3)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	4)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
19		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
20		DINAS PERIKANAN
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
	2	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan



No	Kegiatan	
	4)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
	5)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
	2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
21		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	2)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
	2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	3)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
	3)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
	5)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	1	Pengembangan Prasarana Pertanian
	2	Pembangunan Prasarana Pertanian
	3	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
	6)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



No	Kegiatan
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
7)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
8)	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
1	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
9)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
3)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
4)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
5)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6)	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
23	SEKRETARIAT DAERAH
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



No	Kegiatan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
12	Penataan Organisasi
13	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1	Administrasi Tata Pemerintahan
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
3)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
10	Layanan Administrasi DPRD
2)	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	Peningkatan Kapasitas DPRD
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6	Fasilitasi Tugas DPRD
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



No	Kegiatan	
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	3)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (SDA)
	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	4)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
26		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
	2)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daera
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	3)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah



No	Kegiatan	
27		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
28		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
	2	Mutasi dan Promosi ASN
	3	Pengembangan Kompetensi ASN
	4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
29		INSPEKTORAT DAERAH
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	8	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	3)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI



No	Kegiatan	
	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
	2	Pendampingan dan Asistensi
30		KECAMATAN NUBATUKAN
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM
	4)	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	6)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		KELURAHAN LEWOLEBA BARAT
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		KELURAHAN LEWOLEBA
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		KELURAHAN SELANDORO



No	Kegiatan	
	3)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		KELURAHAN LEWOLEBA TIMUR
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		KELURAHAN LEWOLEBA UTARA
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
31		KECAMATAN LEBATUKAN
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



No	Kegiatan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
32	KECAMATAN OMESURI
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM



No	Kegiatan	
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	7)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
33		KECAMATAN BUYASURI
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	4)	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	6)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
34		KECAMATAN ATADEI
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN



No	Kegiatan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
35	KECAMATAN NAGAWUTUNG
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
36	KECAMATAN ILE APE
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



No	Kegiatan	
	2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama
	3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	4)	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	6)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
37		KECAMATAN WULANDONI
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
	4)	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	6)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
38		KECAMATAN ILE APE TIMUR
	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



No	Kegiatan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4)	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No	Kegiatan
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1.1.3.1 Latar Belakang

Arah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pasal 11 ayat 3 bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar; dan pasal 18 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor



2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, meliputi 6 (enam) urusan wajib yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Masing-masing pemerintah daerah tentunya memiliki kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, sehingga tiap daerah memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan Penerapan SPM.

Bahwa hakikat penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara untuk terpenuhi hak dasarnya supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri, maka pemenuhan SPM dan capaiannya menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat dalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.

1.1.3.2 Dasar Hukum

Pemerintah Kabupaten Lembata melaksanakan penerapan SPM berdasarkan:

1. Undang–Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Periode Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 315).

1.1.3.3 Kebijakan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam pemenuhan SPM 6 (enam) urusan pelayanan dasar dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Terdapat 7 (Tujuh) Perangkat Daerah yang mengampu 29 (dua puluh sembilan) jenis – jenis pelayanan dasar daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar dan Perangkat Daerah Pelaksana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	1. Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Pendidikan Dasar; dan 3. Pendidikan Kesetaraan.	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4. Pelayanan kesehatan balita; 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>)	
3	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	
4	Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten/ kota; dan 2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamomg Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; 2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4. Pelayanan informasi rawan bencana; dan 5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah
	korban bencana	
6	Urusan Sosial 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial; 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial; 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial; 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.1.3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kabupaten Lembata memiliki 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar;
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif;
- 3) Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib;
- 4) Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata;
- 5) Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya;



- 6) Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara *Good and Clean Governance* untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.

Arah kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan misi tersebut di atas yang berorientasi pada pemenuhan SPM dapat dilihat pada tabel berikut.



Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Berorientasi Pada Pemenuhan SPM

MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif	1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas pada setiap jenjang pendidikan dan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam mendukung pendidikan	1. Peningkatan manajemen satuan pendidikan dan kualitas layanan pendidikan; 2. Peningkatan kompetensi dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang merata baik pada sekolah pemerintah maupun swasta; 3. Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal sesuai standar; 4. Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan; 5. Pemberian bantuan hibah ke sekolah-sekolah dan bantuan sosial perlengkapan sekolah kepada peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan kelompok rentan lainnya; 6. Fasilitasi pemberian bantuan beasiswa, ijin belajar, dan bantuan keuangan bagi mahasiswa; 7. Pengembangan anak usia dini holistik-integratif baik milik pemerintah maupun swasta; 8. Fasilitasi penyelenggaraan sekolah unggul garuda dan sekolah rakyat; 9. Fasilitasi kerjasama penyelenggaraan perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi; 10. Fasilitasi dan kerjasama penyediaan makan bergizi gratis bagi anak usia sekolah; 11. Optimalisasi implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti di jenjang pendidikandasar dengan fokus pada penguatan dan adopsi nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum dan manajemen sekolah; 12. Peningkatan literasi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana literasi dan upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat; dan 13. Kerjasama pemerintah, pihak ketiga, akademisi, dan desa dalam peningkatan kualitas pendidikan.
		2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat dan jaminan kesehatan	1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar meliputi fasilitas kesehatan/rumah sakit dan puskesmas, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang sehat;



MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan		2. Peningkatan pelayanan keehatan masyarakat terhadap penyakit menular maupun tidak menular;
			3. Peningkatan status/akreditasi pelayanan kesehatan;
			4. Meningkatkan pemenuhan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan baik kualitas maupun kuantitas baik pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
			5. Membangun kerjasama bantuan belajar/beasiswa bagi dokter;
			6. Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas, dan LSM dalam penyelesaian masalah kesehatan; dan
			7. Menjamin kesehatan bagi seluruh penduduk melalui peningkatan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai UHC.
	3. Peningkatan perluasan program perlindungan sosial yang inklusi		1. Penguatan data terpadu, sistem dan kelembagaan kesejahteraan sosial;
			2. Peningkatan sinergitas perlindungan sosial antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, desa dan organisasi kemasyarakatan;
			3. Perlindungan, pemenuhan hak, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial terutama para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia, kaum rentan, dan marginal lainnya;
2	Mewujudkan Kabupaten Lembata yang adil, aman dan tertib	Penguatan penegakan hukum dan masyarakat sipil dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta	4. Penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui fasilitas jaminan sosial dan bantuan sosial kepada masyarakat rentan/miskin, migran korban tindak kekerasan, dan korban bencana;
			5. Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan penduduk miskin dan penurunan wilayah kantong kemiskinan yang dilakukan dengan prinsip tepat sasaran, keterpaduan dan kerjasama multi pihak; dan
			6. Fasilitasi penyelenggaraan sekolah rakyat bagi anak usia sekolah dari keluarga rentan.
			1. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum;
			2. Peningkatan kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini masyarakat, wawasan kebangsaan melalui optimalisasi peran forum-forum kemasyarakatan;



MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		peningkatan kualitas demokrasi dan wawasan kebangsaan	3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna menangani masalah sosial dan ekonomi kemasyarakatan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram; dan 4. Penguatan pendidikan politik, peran serta masyarakat, dan partai politik dalam berdemokrasi.
3	Meningkatkan akses masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang handal dan merata	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, penataan kota, dan pemukiman yang layak	1. Peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman; 2. Menjamin ketersediaan air baku dan air bersih yang layak, aman dan terjangkau; 3. Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni serta penyediaan sanitasi layak dan aman terutama bagi masyarakat rentan/miskin, korban bencana dan terkena realokasi akibat program pemerintah; 4. Fasilitasi pelaksanaan program nasional 3 juta rumah sesuai kewenangan daerah; 5. Penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman dan permukiman kumuh; 6. Fasilitasi kerjasama peningkatan jangkauan listrik terutama pada desa maupun dusun yang belum mendapatkan akses listrik; 7. Pembangunan dan peningkatan drainase kota, pembangunan kolam retensi dan normalisasi DAS/Kanal/Cek Dam; 8. Pemenuhan infrastruktur pengelolaan sumber daya air dan perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan abrasi Pantai; dan 9. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
4	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, berketahanan sosial dan budaya	Penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	1. Memperkuat budaya sadar bencana dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif dan adaptif menghadapi bencana; 2. Peningkatan penanganan bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan 3. Membangun infrastruktur dan sarana prasarana yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim.



MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5	Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Secara Good and Clean Governance untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.	Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik prima yang transparan, akuntabel dan inovatif berbasis teknologi, informasi dan komunikasi serta peningkatan kemampuan fiskal daerah	Pemenuhan hak setiap warga atas Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Dalam mengukur capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (Lembata Dalam Angka 2026), dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Lembata Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Capaian 2025	Laju (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,95	69,7	1,09
2	Persentase Penduduk Miskin	24,22%	23,27%	-3,92
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,18%	1,37%	-37,16
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,35%	4,47%	33,43
5	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	15.957 (ribu rupiah)	16.953 (ribu rupiah)	6,12
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,28	0,29	3,57

Berikut dapat kami gambarkan keterangan capaian kinerja makro sebagaimana terlihat pada tabel di atas:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM suatu wilayah menggambarkan tingkat pencapaian dalam beberapa sasaran pembangunan manusia yang telah ditentukan yakni angka harapan hidup yang tinggi, pendidikan yang memadai dan standar kehidupan yang layak.

IPM Kabupaten Lembata mengalami kenaikan dari 68,95 menjadi 69,70. Hal ini menunjukkan perbaikan pada akses kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lembata Tahun 2025 termasuk dalam Kategori Sedang.



b. Persentase Penduduk Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar atas makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 24,22% menjadi 23,27%. Meskipun masih tergolong tinggi, tren penurunan ini menunjukkan program pengentasan kemiskinan mulai membuahkan hasil.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang tinggi merupakan ancaman bagi pembangunan wilayah. TPT menunjukkan performa yang sangat baik dengan penurunan drastis dari 2,18% ke 1,37%. Ini mengindikasikan bahwa daya serap lapangan kerja di Lembata meningkat atau aktivitas ekonomi masyarakat mandiri semakin produktif.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan perkembangan nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dalam suatu kurun waktu di wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan alat atau pendekatan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada kurun waktu tersebut, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (tahun 2010) yang selanjutnya disebut sebagai tahun dasar. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat distribusi dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas



dasar harga konstan digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan PDRB, terjadi akselerasi pertumbuhan dari 3,35% menjadi 4,47%. Ini menandakan roda perekonomian di Lembata sedang bergerak lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

e. Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB per kapita pendapatan rata-rata per penduduk naik dari 15.975 (ribu rupiah) menjadi 16.953 (ribu rupiah). Secara nominal, daya beli masyarakat cenderung meningkat.

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini Ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

Gini ratio merupakan satu-satunya indikator yang mengalami sedikit pemburukan yakni dari 0,28 menjadi 0,29. Meskipun angka di bawah 0,3 masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah, kenaikan ini menunjukkan bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas dibandingkan kelompok bawah.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

Gambaran capaian kinerja masing-masing urusan pemerintahan daerah sesuai



dengan indikator untuk urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan terdapat pada ***lampiran*** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Gambaran capaian kinerja masing-masing urusan pemerintahan daerah sesuai dengan indikator untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan terdapat pada ***lampiran*** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Sebagai upaya memperhitungkan dan mengelola dampak pembangunan secara berkelanjutan, memprioritaskan kepentingan masyarakat, dan dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Lembata merumuskan kebijakan yang akan dicapai tahun 2025, dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada Tahun 2025 Kabupaten Lembata melakukan penyesuaian indikator dan target pada perjanjian kinerja sehingga indikator dan target mengalami perubahan sesuai dengan Target Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan Strategis 1			
Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 1.	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,51-3,56
IKTS 2.	Pendapatan perkapita	Juta/Rp	16,89-17,36
IKTS 3.	Indeks Gini	Angka	0,310-0,313
IKTS 4.	Tingkat Inflasi	%	1,10-1,11
Sasaran Strategis 1		Meningkatnya nilai tambah sektor - sektor berbasis potensi daerah	
IKSS 1.1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,31-0,36



IKSS 1.2	Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum	%	0,30-0,35
IKSS 1.3	Rasio PDRB perdagangan besar dan eceran	%	8,34-8,39
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan ketahanan pangan daerah			
IKSS 2.4	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	71,06-71,53
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan			
IKSS 3.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	83,79-83,84
IKSS 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,15-2,12
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kemandirian desa			
IKSS 4.7	Persentase Desa Mandiri	%	1,39
Tujuan Strategis 2			
Meningkatnya kualitas SDM pendidikan dan kesehatan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 5.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,16-69,24
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat			
IKSS 5.8	Rata-rata Lama Sekolah	%	8,42-8,45
IKSS 5.9	Harapan Lama Sekolah	%	12,50
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
IKSS 6.10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,57-73,67
IKSS 6.11	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,00
IKSS 6.12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	7,61-7,57
IKSS 6.13	Angka Kematian Ibu	/100.000 Kelahiran Hidup	5,71
Tujuan Strategis 3			
Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 6.	Tingkat Kemiskinan	%	23,62-23,67
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif			
IKSS 7.14	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	1,25-1,45
IKSS 7.15	Proporsi Peserta Program Jamsostek	%	55,24
Tujuan Strategis 4			
Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, dan tertib			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 7.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	%	64,03



Sasaran Strategis 8 Meningkatkan penyelenggaraan trantibumlinmas, kerukunan beragama dan demokrasi			
IKSS 8.16	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	37
IKSS 8.17	Indeks Demokrasi Indonesia Lembata	Angka	71,45
IKSS 8.18	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	75,43-75,45
Tujuan Strategis 5			
Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	72,00
Sasaran Strategis 9 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan			
IKSS 9.19	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	Angka	2,89-2,91
IKSS 9.20	Rasio konektivitas	%	0,27
Tujuan Strategis 6			
Meningkatnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 9	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0,10-0,11
Sasaran Strategis 10 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas			
IKSS 10.21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,18-72,23
Tujuan Strategis 7			
Menurunnya resiko bencana			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	122,5-124,97
Sasaran Strategis 11 Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim			
IKSS 11.22	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44
Tujuan Strategis 8			
Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 11	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	53,61-53,85
Sasaran Strategis 12 Meningkatkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak			
IKSS 12.23	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	63,00-63,50
IKSS 12.24	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,86-91,90



IKSS 12.25	Indeks Perlindungan Anak	Angka	55,13
Sasaran Strategis 13 Meningkatkan pelestarian warisan budaya			
IKSS 13.26	Indeks Dimensi Warisan Budaya	Angka	42,93
Tujuan Strategis 9			
Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
IKTS 12	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,40
Sasaran Strategis 14 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan			
IKSS 14.27	Nilai RB General	Angka	50,00
IKSS 14.28	Nilai RB Tematik	Angka	7,00
IKSS 14.29	Otonomi Fiskal Daerah	Angka	4,96-5,06
IKSS 14.30	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	0,848

2.2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata tercermin dari capaian 9 (sembilan) tujuan strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama tujuan, dan 14 (empat belas) sasaran strategis dengan 30 (tiga puluh) indikator kinerja utama sasaran, Gambaran progres capaian kinerja Kabupaten Lembata tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Tujuan Strategis 1					
Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 1.1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,51-3,56	4,47	125,56
IKTS 1.2	Pendapatan perkapita	Juta/Rp	16,89-17,36	16,953	97,65
IKTS 1.3	Indeks Gini	Angka	0,310-0,313	0,29	106,45
IKTS 1.4	Tingkat Inflasi	%	1,10-1,11	0,38	165,45
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan nilai tambah sektor - sektor berbasis potensi daerah					
IKSS 1.1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,31-0,36	0,24	66,67



IKSS 1.2	Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum	%	0,30-0,35	0,22	62,86
IKSS 1.3	Rasio PDRB perdagangan besar dan eceran	%	8,34-8,39	8,76	104,41
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan ketahanan pangan daerah					
IKSS 2.4	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	71,06-71,53	55,28	77,28
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan					
IKSS 3.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	83,79-83,84	77,08	91,94
IKSS 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,15-2,12	1,37	135,38
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kemandirian desa					
IKSS 4.7	Persentase Desa Mandiri	%	1,39	4,17	300
Tujuan Strategis 2					
Meningkatnya kualitas SDM pendidikan dan kesehatan					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 5.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,16-69,24	69,70	100,66
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat					
IKSS 5.8	Rata-rata Lama Sekolah	%	8,42-8,45	8,49	100,47
IKSS 5.9	Harapan Lama Sekolah	%	12,50	12,54	100,32
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
IKSS 6.10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,57-73,67	73,81	100,19
IKSS 6.11	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,00	68,17	69,56
IKSS 6.12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	7,61-7,57	10,65	59,31
IKSS 6.13	Angka Kematian Ibu	/100.000 Kelahiran Hidup	5,71	125,79	4,54
Tujuan Strategis 3					
Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 6.	Tingkat Kemiskinan	%	23,62-23,67	23,27	101,48
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif					
IKSS 7.14	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	1,25-1,45	1,49	80,8
IKSS 7.15	Proporsi Peserta Program Jamsostek	%	55,24	53,26	96,42



Tujuan Strategis 4					
Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, dan tertib					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 7.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	%	64,03	Belum Ekspos	
Sasaran Strategis 8		Meningkatnya penyelenggaraan trantibumlinmas, kerukunan beragama dan demokrasi			
IKSS 8.16	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	37	52,69	142,41
IKSS 8.17	Indeks Demokrasi Indonesia Lembata	Angka	71,45	71,44	99,99
IKSS 8.18	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	75,43-75,45	75,44	99,99
Tujuan Strategis 5					
Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	72,00	70,13	97,40
Sasaran Strategis 9		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan			
IKSS 9.19	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	Angka	2,89-2,91	0,68	23,37
IKSS 9.20	Rasio konektivitas	%	0,27	0,29	107,41
Tujuan Strategis 6					
Meningkatnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 9	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0,10-0,11	Belum Ekspos	
Sasaran Strategis 10		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas			
IKSS 10.21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,18-72,23	77,75	107,64
Tujuan Strategis 7					
Menurunnya resiko bencana					



Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	122,5-124,97	205,27	32,43
Sasaran Strategis 11		Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim			
IKSS 11.22	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44	0,51	115,91
Tujuan Strategis 8					
Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 11	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	53,61-53,85	53,04	98,50
Sasaran Strategis 12		Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak			
IKSS 12.23	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	63,00-63,50	63	99,21
IKSS 12.24	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,86-91,90	91,7	99,78
IKSS 12.25	Indeks Perlindungan Anak	Angka	55,13	54,86	99,51
Sasaran Strategis 13		Meningkatnya pelestarian warisan budaya			
IKSS 13.26	Indeks Dimensi Warisan Budaya	Angka	42,93	42,50	99,00
Tujuan Strategis 9					
Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
IKTS 12	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,40	60,9	100,83
Sasaran Strategis 14		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan			
IKSS 14.27	Nilai RB General	Angka	50,00	55,1	110,20
IKSS 14.28	Nilai RB Tematik	Angka	7,00	5,8	82,86
IKSS 14.29	Otonomi Fiskal Daerah	Angka	4,96-5,06	4,76	95,07
IKSS 14.30	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	0,848	0,006	0,71

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten yang diperjanjikan pada tahun 2025, 17 Indikator Kinerja Tujuan Strategis Dan 11 Indikator Kinerja Sasaran Strategis terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, selebihnya 6 Indikator Kinerja Tujuan Strategis dan 19 Indikator Sasaran Strategis belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Capaian Kinerja dibagi dalam 7 kriteria Capaian Kinerja.



Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1	AA	< 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	< 80 – 90	Memuaskan
3	BB	< 70 – 80	Sangat Baik
4	B	< 60 – 70	Baik
5	CC	< 50 – 60	Cukup (Memadai)
6	C	< 30 – 50	Kurang
7	D	< 0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Peraturan Menpan RB Nomor 88 Tahun 2021

2.2.3.3. Analisis Capaian Kinerja

2.2.3.3.1. Tujuan ke-1: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Upaya menjaga keberlanjutan pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Lembata pada tahun 2025 melalui pembangunan dan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan tetap menjaga indikator laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata tetap positif, Pendapatan perkapita, Indeks Gini, dan Tingkat Inflasi. 4 (empat) indikator ini menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan didukung oleh tingkat produktivitas dan daya saing potensi unggulan serta meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga.

1. IKTS 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,51-3,56	4,47	125,56	4,39-4,67	95,72

Laju Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian daerah Kabupaten Lembata yang diukur melalui Produk



Domestik Regional Bruto (PDRB). Realisasi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 4,47% mencapai 125,56% dengan target laju pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 3,56%. Dengan demikian, capaian ini masih masuk dalam kategori kinerja “Sangat Memuaskan”. Realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 4,39-4,67% di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 95,72%.

Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025, jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 sebesar 3,35% maka terjadi kenaikan 1,12%.

2. IKTS 2: Pendapatan Perkapita

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Pendapatan Perkapita	16,89-17,36	16,953	97,65	21,51-23,89	70,96

Pendapatan Perkapita merupakan ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu wilayah atau negara dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indikator ini digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk dan mengevaluasi standar hidup serta kualitas hidup masyarakat. Realisasi pendapatan perkapita tahun 2025 sebesar Rp.16.953.000,00 mencapai 97,65% dengan target pendapatan perkapita tahun 2025 sebesar Rp.16,89-17,36 juta. Dengan demikian, capaian ini masuk dalam kategori kinerja “Sangat Memuaskan”. Realisasi tahun 2025, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar Rp.21,51-23,89 juta di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 70,96%.

Realisasi Pendapatan Perkapita tahun 2025, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.15.975.000,00 maka terjadi peningkatan



sebesar Rp.978.000,00. Peningkatan Pendapatan Perkapita di Kabupaten Lembata dipengaruhi oleh kombinasi antara pertumbuhan ekonomi riil dan kebijakan strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal.

3. IKTS 3: Indeks Gini

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Gini	0,310-0,313	0,29	106,45	0,288-0,302	99,31

Indeks Gini adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Realisasi Indeks Gini tahun 2025 sebesar angka 0,29 mencapai 106,45% dengan target indeks gini tahun 2025 sebesar angka 0,310-0,313. Dengan demikian, capaian ini masuk dalam kategori kinerja “Sangat Memuaskan”. Realisasi tahun 2025, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar angka 0,288-0,302 di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 99,31%.

Realisasi Indeks Gini tahun 2025, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yakni sebesar 0,28, maka terjadi sedikit “pemburukan” (kenaikan). Hal ini menunjukkan distribusi pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas dibandingkan kelompok bawah.

4. IKTS 4: Tingkat Inflasi

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Tingkat Inflasi	1,10-1,11	0,38	165,45	1,03-1,06	161,17

Inflasi merupakan suatu kondisi ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kondisi stabilitas ekonomi makro diukur melalui indikator



tingkat inflasi. Laju Inflasi diperoleh dari data BPS Kabupaten Sikka. Realisasi Tingkat Inflasi tahun 2025 sebesar 0,38% mencapai 165,45%, dengan target tingkat inflasi tahun 2025 sebesar 1,10-1,11%. Dengan demikian, capaian ini masuk dalam kategori kinerja “Sangat Memuaskan”. Realisasi tahun 2025, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 1,03-1,06 di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 161,17%.

Tingkat Inflasi tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,65% maka terjadi penurunan sebesar 2,27%. Penurunan ini berarti bahwa stabilitas harga barang dan jasa secara umum dapat dikendalikan sehingga mengurangi beban konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan tetapi inflasi yang terlalu rendah juga mengindikasikan ada masalah pada daya beli masyarakat atau pasokan yang berlebihan.

Tujuan Strategis Pertama dengan 4 (empat) indikator kinerja selanjutnya diterjemahkan ke dalam 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 7 Indikator, meliputi:

1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Nilai Tambah Sektor-Sektor Berbasis Potensi Daerah

a. IKSS 1.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Rasio PDRB Industri Pengolahan	0,31-0,36	0,24	66,67	0,65-0,89	26,97

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun



atas dasar harga konstan. Kinerja sektor industri Kabupaten Lembata pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum mencapai target dengan capaian indikator sebesar 66,67%, dengan realisasi yang dicapai tahun 2025 adalah 0,24% dari target 0,31-0,36%. Dengan capaian ini menjadikan indikator kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan sebagai indikator dengan kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 0,65-0,89% di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 26,97%.

Realisasi PDRB Industri Pengolahan tahun 2025, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0,23% maka terjadi peningkatan di sektor industri sebesar 0,01%. Peningkatan ini menunjukkan adanya strategi hilirisasi lokal dalam mendukung Rasio PDRB Industri Pengolahan. Meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka realisasi Rasio PDRB Industri Pengolahan tahun 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Dengan capaian kinerja 79,55%, sektor industri pengolahan Kabupaten Lembata masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah tantangan ekonomi regional maupun global. Ke depan, optimalisasi kebijakan inovatif dan peningkatan daya saing sektor industri pengolahan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Lembata telah mengimplementasikan berbagai program yang mendukung sektor-sektor kunci dalam PDRB Industri Pengolahan. Beberapa program maupun strategi tersebut meliputi:



- (1) Hilirisasi Produk Perikanan dan Kelautan dengan
 - a. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan.
 - b. program pengembangan kemasan ikan kering.
- (2) Penguatan Sektor Perdagangan dan Industri Kreatif
- (3) Pengolahan Komoditas Pertanian dan Perkebunan:
 - a. Mengolah jagung menjadi pakan ternak (pakan mandiri) di tingkat lokal meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan luar dan meningkatkan nilai ekonomi jagung dari sekadar bahan mentah menjadi produk antara/jadi.
 - b. Memfasilitasi produksi minyak kelapa murni (VCO).
- (4) Penguatan Infrastruktur Pendukung.
- (5) Penguatan Sumber Daya Manusia dan Akses Modal dengan melakukan pelatihan kewirausahaan, melakukan kemudahan dalam memperoleh izin berusaha dan memfasilitasi akses ke perbankan atau lembaga keuangan untuk pengadaan mesin produksi bagi UMKM.

Meskipun Rasio PDRB Industri Pengolahan mengalami peningkatan namun masih ada hambatan-hambatan yang dialami yakni:

- (1) Terbatasnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mampu melakukan pengolahan bahan baku menjadi produk bernilai tambah.
- (2) Keterbatasan akses teknologi dan peralatan produksi, sehingga sebagian besar pelaku usaha masih memasarkan produk dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi.
- (3) Keterbatasan akses permodalan dan pasar, yang menyebabkan pertumbuhan industri pengolahan berjalan relatif lambat.
- (4) Keterbatasan infrastruktur pendukung industri, termasuk fasilitas

produksi dan distribusi yang memadai.

- (5) Masih banyak industri kecil yang belum terdaftar secara resmi dalam basis data industri (SIINas), sehingga kontribusi ekonomi mereka tidak terpotret sepenuhnya dalam perhitungan PDRB oleh BPS

Beberapa strategi perbaikan akan diterapkan, antara lain:

- (1) Penguatan pertanian dan perikanan berbasis hilirisasi. Modernisasi alat pertanian, sistem irigasi, dan penerapan smart farming terus ditingkatkan guna meningkatkan produktivitas. Hilirisasi hasil pertanian dan perikanan diperkuat dengan pengembangan industri pengolahan, termasuk peningkatan produk perikanan olahan.
- (2) Percepatan transformasi digital dan pengembangan industri kreatif. Digitalisasi layanan publik dioptimalkan untuk mempercepat perizinan usaha dan investasi. UMKM didorong untuk memanfaatkan e-commerce dan mendapatkan akses ke pasar nasional maupun internasional, sementara industri kreatif dikembangkan melalui program inkubasi dan pelatihan.

b. IKSS 1.2: Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum	0,30-0,35	0,22	62,86	0,64-0,88	34,38

Realisasi Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2025 sebesar 0,22% masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 0,30-0,35% dengan capaian 62,86%



kategori "Baik". Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 0,64-0,88 % di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 34,38%.

Dalam mendukung capaian ini terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya:

- (1) Penyelenggaraan festival tahunan seperti Festival Lamaholot maupun Festival Tradisi Penangkapan Paus di Lamalera menarik kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang membutuhkan penginapan dan jasa kuliner.
- (2) Pengembangan infrastruktur menuju destinasi unggulan (Pantai Mingar, Bukit Cinta, dsb.) memicu munculnya usaha penginapan (homestay) dan rumah makan baru di sekitar lokasi wisata.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum, Pemerintah Kabupaten Lembata juga menemukan tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian khusus, antara lain:

- (1) Kurangnya usaha perhotelan yang layak inap.
- (2) Belum memadai pembenahan di bidang transportasi dan kuliner dalam rangka menarik minat wisatawan.
- (3) Kurangnya pemanfaatan media digital marketing, media sosial, dan influencer pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.
- (4) Kurangnya kerja sama dengan agen perjalanan untuk membuat paket wisata menarik yang bisa meningkatkan jumlah kunjungan.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk meningkatkan kinerja



sektor pariwisata dalam mendukung indikator ini, meliputi:

- (1) Melakukan pembenahan di bidang perhotelan dengan mendorong pihak swasta untuk membangun usaha perhotelan yang layak inap.
- (2) Melakukan pembenahan di bidang transportasi dan kuliner dalam rangka menarik minat wisatawan.
- (3) Peningkatan Promosi dan Branding Destinasi:
 - a. Memanfaatkan digital marketing, media sosial, dan influencer pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan
 - b. Mengadakan event skala nasional/internasional untuk menarik wisatawan
 - c. Bekerja sama dengan agen perjalanan untuk membuat paket wisata menarik yang bisa meningkatkan jumlah kunjungan
- (4) Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Destinasi Wisata
 - a) Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di destinasi wisata agar lebih nyaman dan menarik bagi wisatawan
 - b) Memperbaiki aksesibilitas ke lokasi wisata, seperti transportasi umum dan infrastruktur jalan.
 - c) Menyediakan layanan wisata berbasis teknologi, seperti aplikasi pemesanan tiket atau pemandu digital.

c. IKSS 1.3: Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Rasio PDRB perdagangan besar dan eceran	8,34-8,39	8,76	104,41	9,07-9,31	94,09



Kinerja sektor Perdagangan Kabupaten Lembata pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan capaian indikator Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 104,41%, dengan realisasi yang dicapai sebesar 8,76% dari target 8,34-8,39% yang telah ditetapkan. Dengan capaian ini menjadikan indikator kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan sebagai indikator dengan kategori "Sangat Memuaskan". Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 9,07-9,31% di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 94,09%.

Realisasi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2025, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 8,16% maka terjadi peningkatan sebesar 0,6%. Peningkatan ini menunjukkan adanya strategi penguatan sektor perdagangan dalam mendukung indikator ini.

Keberhasilan ini didukung oleh implementasi berbagai program unggulan, diantaranya:

- (1) Penguatan sektor perdagangan dan industri kreatif yang mendorong pelaku usaha kecil menengah agar usahanya semakin berkembang.
- (2) Adanya pembangunan dan pemeliharaan gedung pasar sarana distribusi perdagangan.
- (3) Adanya pelaksanaan pasar murah subsidi di 9 kecamatan yang meliputi 144 desa.

Dalam upaya meningkatkan kinerja indikator ini, Pemerintah Kabupaten Lembata menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian khusus yakni Sarana distribusi perdagangan yang kurang memadai.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerja sektor perdagangan dalam mendukung indikator ini, meliputi:

- (1) Revitalisasi dan penguatan pengelolaan pasar rakyat agar lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun konsumen.
- (2) Penguatan sistem distribusi barang kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
- (3) Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan, termasuk pemanfaatan perdagangan berbasis digital.
- (4) Penguatan promosi dan pemasaran produk lokal, sehingga mampu memperluas jangkauan pasar.
- (5) Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok secara berkala, melalui koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

a. IKSS 2.4: Indeks Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Ketahanan Pangan	71,06-71,53	55,28	77,28	74,85-77,23	71,58

Realisasi Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Lembata pada tahun 2025 pada angka 55,25 masih di bawah target yang ditetapkan sebesar angka 71,06-71,53 dengan persentase capaiannya 77,28% dengan kategori "Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu angka 74,85-77,23 di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 71,58%.

Pada tahun 2024 Indeks Ketahanan Pangan mencapai 70,11 dan mengalami penurunan menjadi 55,28 di tahun 2025 atau penurunan



sebesar 14,83%. Terjadinya penurunan kinerja ini disebabkan:

- (1) Luas lahan fungsional yang mengalami penurunan.
- (2) Keterbatasan sarana prasarana penyedia pangan.
- (3) Keterbatasan daya beli karena kemiskinan.
- (4) Terbatasnya akses terhadap air bersih.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan Lembata yakni:

- (1) Pembukaan lahan baru, peningkatan infrastruktur pertanian, pemanfaatan air, penyediaan sarana produksi, pendampingan petani serta kemudahan akses kemitraan dan permodalan UMKM.
- (2) Pemberdayaan ekonomi produktif, perluasan akses ke sentra produksi, peningkatan akses permodalan, serta pemberian bantuan sosial.
- (3) Pembangunan infrastruktur air bersih dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola air minum.

3) Sasaran Strategis: Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkelanjutan

a. IKSS 3.5: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83,79-83,84	77,08	91,94	84,85-85,07	90,61

Kinerja sektor ketenagakerjaan Kabupaten Lembata pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 91,94%, dengan realisasi



sebesar 77,08% dari target 83,79-83,84%. Dengan capaian ini menjadikan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masuk kategori “Sangat Memuaskan”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 84,85-85,07% di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 90,61%. TPAK Kabupaten Lembata mengalami penurunan di tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 83,53% maka terjadi penurunan sebesar 6,45%.

Beberapa faktor dan strategi yang mendukung TPAK Kabupaten Lembata Tahun 2025 antara lain:

- (1) Kemudahan dalam pendaftaran pencari kerja digital mempercepat pemetaan suplai tenaga kerja di Lembata.
- (2) Fasilitasi penempatan tenaga kerja yang terstruktur membantu mengurangi angka pengangguran.
- (3) Penyederhanaan regulasi perizinan mendorong pelaku usaha untuk membuka cabang atau memperluas bisnis di wilayah Lembata, yang secara otomatis meningkatkan angka partisipasi ekonomi.
- (4) Program bantuan modal atau kemudahan akses perbankan bagi UMKM di Lembata memicu munculnya wirausaha baru.
- (5) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan kewirausahaan sehingga meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Selanjutnya kami gambarkan beberapa permasalahan dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Lembata, diantaranya:

- (1) Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh penduduk yang bekerja di kegiatan informal. Ketergantungan pada sektor informal tersebut perlu diintervensi dengan peningkatan keterampilan



tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

- (2) Lembata memiliki keterbatasan dalam diversifikasi ekonomi, yang menyebabkan kurangnya variasi lapangan kerja. Sektor pertanian dan perikanan mendominasi, sementara sektor industri dan jasa masih terbatas dan kurangnya investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- (3) Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum optimal, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berkembang.
- (4) Akses informasi mengenai lowongan kerja dan peluang usaha yang terbatas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.
- (5) Infrastruktur yang belum memadai, seperti akses internet dan transportasi, menghambat pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk meningkatkan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meliputi:

- (1) Pengembangan sektor potensial seperti mendorong investasi di sektor pertanian, perikanan, Peternakan, dan pariwisata, dengan memberikan insentif bagi investor, mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan.
- (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan



- keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- (3) Peningkatan akses informasi pasar kerja dengan memperkuat peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan informasi dan layanan ketenagakerjaan.
 - (4) Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas dengan meningkatkan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi untuk memperlancar mobilitas tenaga kerja dan distribusi informasi.
 - (5) Mendorong program pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat dapat berwirausaha secara mandiri.

b. IKSS 3.6: Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,15-2,12	1,37	135,38	2,02-1,90	127,89

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan target TPT sebesar 2,15-2,12%. Realisasi TPT menunjukkan angka 1,37%, yang berarti capaian kinerja mencapai 135,38% dari target yang telah ditetapkan dengan predikat “sangat memuaskan”. Realisasi TPT tahun 2025 jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 2,02-1,90%, maka mencapai 127,89%. Mengingat bahwa semakin kecil nilai TPT mencerminkan semakin baiknya kondisi ketenagakerjaan, capaian ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

TPT tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,18%, maka terjadi penurunan sebesar 0,81%. Kondisi tersebut menunjukkan tren positif dalam perkembangan ketenagakerjaan di



Kabupaten Lembata.

Keberhasilan ini didukung oleh implementasi berbagai program unggulan, diantaranya:

- (1) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan kewirausahaan sehingga meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- (2) Fasilitasi penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),
- (3) Peningkatan investasi pada sektor pariwisata yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Melalui promosi potensi wisata, sektor ini kembali berkembang dengan menciptakan peluang kerja baru di bidang perhotelan, restoran, dan ekonomi kreatif.
- (4) Optimalisasi program padat karya serta peningkatan akses terhadap informasi ketenagakerjaan juga berkontribusi dalam pencapaian target tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa tantangan utama dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Lembata meliputi:

- (1) Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, dan perikanan dengan metode yang masih tradisional sehingga produktifitas rendah karena ketergantungan pada musim dan alat yang sederhana. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh penduduk yang bekerja di kegiatan informal.
- (2) Masih adanya warga yang berangkat bekerja ke luar negeri (seperti Malaysia) tanpa dokumen resmi maupun non prosedural, yang meningkatkan resiko eksploitasi.
- (3) Masih banyak perusahaan yang belum memberlakukan gaji sesuai UMP.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan



ketenagakerjaan, diperlukan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, produktif, dan berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

- (1) Intervensi peningkatan keterampilan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata melalui:
 - a. Penguatan pelatihan dan sertifikasi sesuai kualifikasi tenaga kerja standar industri.
 - b. Pemberdayaan UMKM.
 - c. Meningkatkan investasi berorientasi padat karya seperti agribisnis, dan pariwisata berkelanjutan.
- (2) Intervensi melalui program pemberdayaan masyarakat untuk keseimbangan pasar kerja dengan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi.
 - b) Pemberdayaan kelompok rentan.
 - c) Penguatan sistem informasi pasar kerja.

4) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kemandirian Desa

a. IKSS 4.7: Persentase Desa Mandiri

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Persentase Desa Mandiri	1,39	4,17	300	2,78-3,47	120,17



Pada tahun 2025, capaian Persentase Desa Mandiri Kabupaten Lembata telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,39% dengan realisasi sebesar 4,17% dan tingkat capaian mencapai 300% dengan kategori capaian kinerja “Sangat Memuaskan”. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 2,78-3,47%, realisasi Persentase Desa Mandiri telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 120,17%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) desa yang telah memenuhi kriteria 6 dimensi yakni Tata kelola pemerintahan, Layanan dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Aksesibilitas yang menunjukkan bahwa desa tersebut mampu mengelola potensi lokal, pelayanan publik yang baik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Desa-desa dengan status Desa Mandiri antara lain Desa Hadakewa, Desa Laranwutun, Desa Kolontobo, Desa Balauring, Desa Pada, dan Desa Beutaran. Desa mandiri meningkat dari sebelumnya di tahun 2024 sebanyak 1 Desa menjadi 6 Desa di Tahun 2025. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dikarenakan adanya dukungan dari Tenaga Pendamping P3MD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berperan aktif dalam mendampingi perangkat desa dalam perencanaan dan penggunaan dana desa, sehingga dapat meningkatkan persentase desa mandiri di Kabupaten Lembata.

2.2.3.3.2. Tujuan Ke-2: Meningkatnya Kualitas SDM Pendidikan dan Kesehatan

1. IKTS 5: Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Pembangunan Manusia	69,16-69,24	69,70	100,66	70,02-70,39	99,02



Keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Lembata diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan perbaikan pada akses pendidikan, akses kesehatan, dan standar hidup layak.

Kinerja IPM Kabupaten Lembata pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan Capaian kinerja 100,66%, yang masuk dalam kategori "Sangat Memuaskan". Target IPM yang ditetapkan sebesar angka 69,16-69,24 dapat terlampaui dengan hasil nyata sebesar angka 69,70. Realisasi kinerja tahun 2025, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 yaitu sebesar angka 70,02-70,39 di tahun 2029, maka realisasi kinerja mencapai 99,02%.

Realisasi kinerja tahun 2025, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar angka 68.95 maka terjadi peningkatan angka 0,75.

Tujuan Strategis Kedua dengan 1 (satu) indikator kinerja selanjutnya diterjemahkan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 Indikator meliputi:

1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

a. IKSS 5.8: Rata-rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Rata-rata Lama Sekolah	8,42-8,45	8,49	100,47	9,04-9,16	92,69

Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah sebesar 100,47%, dengan realisasi yang dicapai sebesar 8,49 tahun dari target 8,42-8,45 tahun. Dengan capaian ini menunjukkan indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah sebagai indikator dengan kategori "Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 9,04-9,16 di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai



92,69%.

Capaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- (1) Dinas Pendidikan telah melakukan validasi dan pemutakhiran data kependudukan dalam kartu keluarga, dikarenakan masih terdapat data penduduk yang telah menyelesaikan studi S1 namun pada data kependudukan masih tertulis lulus SMA;
- (2) Adanya Program beasiswa lanjutan yang membantu biaya bagi mahasiswa atau pelajar di tingkat akhir untuk memastikan yang bersangkutan lulus sehingga tidak menambah daftar penduduk yang tidak tamat;
- (3) Adanya keberhasilan program pendidik kesetaraan yang menyasar orang dewasa yang putus sekolah untuk mengikuti ujian paket A, B dan C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah, antara lain sebagai berikut:

- (1) Masih terdapat angka putus sekolah di Kabupaten Lembata. Walaupun sedikit, angka putus sekolah dapat berpotensi mengurangi rata-rata lama sekolah di masa depan;
- (2) Minimnya sosialisasi pendidik kesetaraan, sehingga masih terdapat orang dewasa yang putus sekolah yang tidak mengetahui adanya kesempatan melanjutkan studi melalui jalur non formal secara gratis;
- (3) Adanya keterbatasan ekonomi bagi masyarakat pra sejahtera untuk melanjutkan studi yang meningkatkan angka putus sekolah.

Adapun solusi yang dapat ditempuh dalam mengatasi beberapa kendala tersebut di atas antara lain:

- (1) Mempermudah akses ke perguruan tinggi atau pendidikan vokasi bagi lulusan SMA agar dapat mengurangi angka putus sekolah;
- (2) Melakukan sinkronisasi data antara Dinas Pendidikan dan Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memetakan kantong-kantong penduduk dengan pendidikan rendah; dan

- (3) Mengalokasikan anggaran untuk beasiswa penuh termasuk ujian dan modul pada program paket A, B dan C bagi masyarakat usia produktif yang putus sekolah.

b. IKSS 5.9: Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Harapan Lama Sekolah	12,50	12,54	100,32	12,66	99,05

Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan capaian indikator sebesar 100,32%, dengan realisasi yang dicapai sebesar 12,54 tahun dari target 12,50 tahun. Dengan capaian ini menunjukkan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah sebagai indikator dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 12,66 di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 99,05%.

Realisasi Harapan Lama Sekolah tahun 2025, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 12,47 tahun maka terjadi peningkatan sebesar 0,07 tahun.

Berbagai kegiatan yang mendukung capaian Harapan Lama Sekolah antara lain sebagai berikut:

- (1) Program Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun.
- (2) Pemberian Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan sekolah.
- (3) Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan 1 Desa 1



PAUD.

(4) Kegiatan Layanan Pendidikan Non-Formal (Paket A, B, dan C).

Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya:

- (1) Banyak siswa di Desa terpencil harus menempuh perjalanan jauh dengan medan yang sulit untuk mencapai sekolah tingkat menengah (SMP/SMA).
- (2) Masalah ekonomi menjadi pemicu utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Pendidikan tinggi terkadang belum dianggap sebagai investasi masa depan yang krusial, terutama jika dibandingkan dengan bekerja segera setelah lulus pendidikan dasar.

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

a. IKSS 6.10: Usia Harapan Hidup (UHH)

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Usia Harapan Hidup (UHH)	73,57-73,67	73,81	100,19	74,46-74,93	98,51

Pada tahun 2025, realisasi usia harapan hidup telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 73,57-73,67 Tahun dengan realisasi sebesar 73,81 Tahun dan tingkat capaian mencapai 100,19% dengan kategori capaian kinerja “Sangat Memuaskan”. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 74,46-74,93 Tahun, maka capaian Usia Harapan Hidup mencapai 98,51%. Adapun keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh:

- (1) Pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG);
- (2) Pelaksanaan program Good Pagi; dan
- (3) Pusling sebagai kegiatan promotif dan preventif oleh tenaga kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan dasar maupun

pemeriksaan kebersihan lingkungan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Meskipun Usia Harapan Hidup naik namun adapun kendala yang dihadapi yakni upaya promotif dan preventif yang belum maksimal. Sehingga upaya perbaikan ke depan perlu adanya penguatan integrasi pelayanan primer sesuai siklus hidup.

b. IKSS 6.11: Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,00	68,17	69,56	98,40	69,28

Pada tahun 2025, realisasi Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 98,00% dengan realisasi sebesar 68,17% dan tingkat capaian mencapai 69,56% dengan kategori capaian kinerja “Baik”. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 98,40%, maka realisasi Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 69,28%.

Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- (1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya program JKN dan manfaatnya, biaya premi yang masih dianggap mahal oleh sebagian masyarakat.
- (2) Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan terutama di daerah terpencil.

Meskipun tidak mengalami peningkatan namun ada upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata yakni:



- (1) Peningkatan kesadaran masyarakat;
- (2) Kerja sama lintas sektor terkait, peningkatan kepesertaan mandiri melalui program subsidi premi bagi masyarakat miskin dan tidak mampu; dan
- (3) Peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Adapun upaya untuk meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di tahun berikutnya yakni dengan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan akses, peningkatan kepesertaan mandiri, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan sistem informasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan program pencegahan.

c. IKSS 6.12: Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	7,61-7,57	10,65	59,31	6,44-6,24	29,33

Pada tahun 2025, realisasi Prevalensi Stunting masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 7,61-7,57% dengan realisasi sebesar 10,65% dan tingkat capaian mencapai 59,31% dengan kategori capaian kinerja “Baik”. Persentase capaian indikator prevalensi stunting dihitung menggunakan pendekatan deviasi terhadap target karena indikator ini bersifat semakin rendah semakin baik. Prevalensi stunting di Kabupaten Lembata tahun 2024 mencapai 6,8% dan meningkat menjadi 10,65% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Lembata semakin tinggi



dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga Intervensi gizi yang lebih intensif, termasuk edukasi gizi bagi ibu hamil dan peningkatan akses pangan bergizi menjadi prioritas utama dalam menekan prevalensi stunting di Kabupaten Lembata. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 6,44-6,24%, maka realisasi Prevalensi Stunting mencapai 29,33%. Adapun permasalahan yang dihadapi yakni Koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting belum optimal terutama dalam pelaksanaan intervensi sensitif. Melihat permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lembata akan melakukan upaya perbaikan di tahun berikutnya dengan Meningkatkan integrasi intervensi spesifik dan sensitif, dengan memperkuat kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ketahanan pangan, dan sanitasi dalam penanganan keluarga berisiko stunting.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka penurunan angka stunting yakni meningkatkan integrasi intervensi spesifik dan sensitif, dengan memperkuat kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ketahanan pangan, dan sanitasi dalam penanganan keluarga berisiko stunting.

d. IKSS 6.13: Angka Kematian Ibu

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Angka Kematian Ibu	5,71	125,79	4,54	4,57	3,63

Pada tahun 2025, target angka kematian ibu sebesar 5,71 per 100.000 kelahiran hidup tidak tercapai secara signifikan, dengan realisasi sebesar 125,79 per 100.000 kelahiran hidup atau setara 2 kasus kematian ibu dari 1.590 kelahiran hidup. Berdasarkan metode

pengukuran indikator dengan karakteristik “semakin rendah semakin baik”, capaian kinerja hanya sebesar 4,54%, yang menunjukkan deviasi sangat tinggi dari target. Secara angka absolut, 2 kasus terlihat kecil, namun karena basis kelahiran rendah (1.590), rasio menjadi sangat tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, keterlambatan penanganan kasus (delay), faktor geografis, serta belum optimalnya deteksi dini risiko kehamilan. Dampaknya mencerminkan masih rendahnya kualitas layanan kesehatan maternal dan menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja daerah. Untuk itu, diperlukan penguatan deteksi dini melalui pelayanan antenatal terpadu, peningkatan efektivitas sistem rujukan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta peningkatan edukasi masyarakat dan intervensi berbasis wilayah.

2.2.3.3.3. Tujuan Ke-3: Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. IKTS 5: Tingkat Kemiskinan

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Tingkat Kemiskinan	23,62-23,67	23,27	101,48	21,22-21,46	90,34

Untuk mengetahui Tingkat Kemiskinan indikator yang digunakan adalah Persentase Penduduk Miskin. Realisasi Persentase Penduduk Miskin tahun 2025 sebesar 23,27% dengan capaian 101,48% dari target tahun 2025 sebesar 23,62-23,67%. Dengan demikian, capaian ini masih masuk dalam kategori kinerja “Sangat Memuaskan”. Realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 21,22-21,46 di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 90,34%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 24,22, maka



Persentase Penduduk Miskin mengalami penurunan sebesar 0,95 persen. Capaian ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menekan angka kemiskinan yakni dengan menetapkan strategi Peningkatan perluasan program perlindungan sosial yang inklusi dengan beberapa arah kebijakan seperti:

- (1) Penguatan data terpadu, sistem dan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- (2) Peningkatan sinergitas perlindungan sosial antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, desa dan organisasi kemasyarakatan;
- (3) Perlindungan, pemenuhan hak, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial terutama para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia, kaum rentan, dan marginal lainnya;
- (4) Penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui fasilitas jaminan sosial dan bantuan sosial kepada masyarakat rentan/miskin, migran korban tindak kekerasan, dan korban bencana;
- (5) Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan penduduk miskin dan penurunan wilayah kantong kemiskinan yang dilakukan dengan prinsip tepat sasaran, keterpaduan dan kerjasama multi pihak; dan
- (6) Fasilitasi penyelenggaraan sekolah rakyat bagi anak usia sekolah dari keluarga rentan.

Indikator Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lembata diterjemahkan ke dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Dasar Perlindungan Sosial yang Adaptif Dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis.



1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Meningkatnya Layanan Dasar Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. IKSS 7.14: Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	1,25-1,45	1,49	80,80	0,60-0,70	-48,33

Capaian penurunan kemiskinan juga diukur melalui indikator Angka Kemiskinan Ekstrem yang merupakan persentase penduduk miskin ekstrem terhadap jumlah penduduk seluruhnya dalam satu wilayah. Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau memiliki pendapatan kurang dari Rp.322.170,00 perkapita per bulan. Kemiskinan ekstrem merupakan salah satu indikator strategis untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial ekonomi daerah.

Kemiskinan ekstrem menggambarkan kemiskinan secara mikro yang ditunjukkan dengan data rumah tangga sasaran sangat miskin (*By name by address* terutama berada pada Desil 1.

RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 menetapkan target Angka Kemiskinan Ekstrem sebesar 1,25-1,45%, akan tetapi capaian penurunan kemiskinan ekstrem Kabupaten Lembata Tahun 2025 masih menggunakan data capaian 2024 sebesar 1,49%.

Dalam mendukung capaian penurunan tingkat kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Lembata melaksanakan berbagai inovasi yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain:

(1) Inovasi “Saber DO (Sapu Bersih DO)” Inovasi ini difokuskan untuk



- menekan angka putus sekolah dan mendorong keberlanjutan belajar siswa pada semua jenjang pendidikan dasar dan kesetaraan.
- (2) Inovasi “BOS Fasilitas Sekolah Melalui penguatan pengelolaan Dana BOS dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan/PAUD), inovasi ini bertujuan:
- Memberikan dukungan operasional yang berkelanjutan untuk kegiatan pendidikan pada SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal.
 - Meringankan beban pembiayaan keluarga miskin dalam penyediaan perlengkapan sekolah, buku, serta kegiatan belajar-mengajar harian.
- (3) SALAM DIMAS (Persalinan Anak di Puskesmas) Program ini lebih menasar penduduk usia produktif dan kelompok berisiko melalui layanan promotif dan preventif, termasuk:
- Pemeriksaan dan pengelolaan kesehatan usia sekolah, usia kerja, dan lanjut usia.
 - Penanganan penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes), gangguan jiwa, serta risiko HIV/AIDS dan TBC.
 - Kesehatan lingkungan, olahraga, dan NAPZA.
- (4) Kartu Lembata Sehat Merupakan program jaminan kesehatan lokal yang melengkapi skema nasional seperti BPJS. Fokus utamanya adalah: Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang belum terdaftar dalam skema nasional atau yang mengalami kendala administrasi.
- (5) Inovasi Pemenuhan Kebutuhan Lansia dan Disabilitas pada program Rehabilitasi Sosial, difokuskan pada keluarga penyandang disabilitas, anak-anak dan Lansia terlantar, serta



- gelandangan dan para pengemis.
- (6) Inovasi DUDUK SEMEJA untuk memastikan bahwa seluruh penduduk, terutama kelompok miskin dan rentan, memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, sah, dan terkini
 - (7) Inovasi JAMSOSTEK PKK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pelatihan Keterampilan Kompetensi) dirancang untuk menjawab tantangan utama masyarakat miskin dan pencari kerja, yaitu keterbatasan keterampilan kerja, tidak adanya perlindungan sosial ketenagakerjaan, dan lemahnya daya saing tenaga kerja lokal.
 - (8) Inovasi SATE PUAN merupakan pendekatan strategis dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa, dengan fokus khusus pada penguatan kelompok usaha perempuan. Inisiatif ini selaras dengan prinsip pengentasan kemiskinan berkelanjutan, karena menysasar perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan komunitas, khususnya di wilayah pedesaan dan kantong-kantong kemiskinan.
 - (9) Inovasi SUPER T (Sentra Usaha Perikanan Terpadu) merupakan strategi yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan pembudi daya ikan, yang umumnya termasuk dalam kelompok masyarakat miskin dan rentan terhadap kemiskinan ekstrem. Inovasi ini menempatkan sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis sumber daya alam unggulan daerah
 - (10) Inovasi MELATI MEKAR (Membangun Lahan Tidur Menuju Masyarakat Sejahtera) bertujuan untuk mengaktifkan kembali lahan-lahan tidur atau tidak produktif menjadi lahan pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan



- Masyarakat, dengan implementasi kebijakan; Diversifikasi pangan berbasis lokal, seperti umbi-umbian, jagung, dan hortikultura.
- a. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian, termasuk irigasi sederhana, embung, dan jalan usaha tani.
 - b. Pendampingan penggunaan sarana pertanian agar efisien dan ramah lingkungan.
 - c. Pemantauan kerawanan pangan melalui pemetaan daerah rawan dan penyusunan strategi intervensi.
- (11) Inovasi MADER APUNG, ASMARA, dan IB (Inovasi Skala Rumah Tangga) Merupakan inovasi pendukung yang mengintegrasikan pertanian keluarga, peternakan kecil, dan penguatan ketahanan gizi dengan program pendukung penyuluhan Pertanian dan Sekolah Lapang untuk memperkuat kapasitas teknis petani dan kelembagaan kelompok tani
- (12) Inovasi ASI MAS (Air Bersih untuk Masyarakat) berfokus pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum pada sub-kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan, yang dapat menjangkau desa miskin dan kantong-kantong kemiskinan.
- (13) Inovasi GESERLANI (Gerakan Seribu Rumah Layak Huni) dirancang sebagai respons terhadap kondisi ketimpangan hunian di Kabupaten Lembata dengan pendekatan rehabilitasi dan relokasi berbasis wilayah prioritas kemiskinan dan kerentanan bencana.
- (14) Inovasi KADES (Kabar Desa) ini, bertujuan untuk Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam hal kerja sama, pengelolaan keuangan, dan perencanaan pembangunan; Memperkuat koordinasi antar desa, terutama dalam pelaksanaan



program bersama yang menjangkau wilayah miskin dan terpencil; dan Mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang berkontribusi langsung pada penanggulangan kemiskinan.

Dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain:

- (1) Belum optimalnya keterpaduan kebijakan dan anggaran lintas sektor.
- (2) Keterbatasan akurasi dan pemutakhiran data DTSEN.
- (3) Kompleksitas penanganan kemiskinan akibat faktor multidimensi.
- (4) Keterbatasan kapasitas pemantauan dan evaluasi yang terukur.
- (5) Lemahnya koordinasi kelembagaan di tingkat daerah.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut serta perbaikan ke depan dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, antara lain:

- (1) Integrasi kebijakan dan anggaran lintas sektor agar program lebih terpadu dan tidak tumpang tindih.
- (2) Optimalisasi program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, bantuan pangan, dan subsidi dan bantuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan program padat karya tunai desa yang meningkatkan serapan tenaga kerja di tingkat lokal.
- (4) Peningkatan akses layanan dasar, seperti penyediaan air bersih, sanitasi yang semakin membaik, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- (5) Dukungan pemberdayaan ekonomi produktif skala mikro berbasis rumah tangga.
- (6) Peningkatan kualitas data melalui pemutakhiran DTSEN dan verifikasi lapangan.

- (7) Pendekatan multidimensi dengan intervensi sesuai karakteristik kelompok rentan.
- (8) Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator terukur dan sistem digital.
- (9) Penguatan koordinasi kelembagaan melalui kejelasan peran dan peningkatan kapasitas SDM.

b. IKSS 7.15: Proporsi Peserta Program Jamsostek

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Proporsi Peserta Program Jamsostek	55,24	53,26	96,42	64,19	82,97

Realisasi Proporsi Peserta Program Jamsostek pada tahun 2025 sebesar 53,26% masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 55,24% dengan persentase capaiannya 96,42% dan kategori "Sangat Memuaskan". Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 64,19% di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 82,97%.

Realisasi di tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2024. Tahun 2024 proporsi peserta program jamsostek mencapai 53,38% atau menurun sebesar 0,12 persen di tahun 2025.

Penurunan capaian ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- (1) Tingginya jumlah pekerja bukan penerima upah (Petani, Nelayan, Pedagang kecil yang memiliki pendapatan tidak tetap.
- (2) Tingginya angka keluar masuk pekerja di sektor swasta yang menyebabkan data kepesertaan tidak stabil atau menurun saat terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (3) Sebagian masyarakat masih menganggap jamsostek sebagai



beban biaya (potong gaji) dari pada sebagai investasi perlindungan risiko sosial.

Meskipun capaian kinerja mengalami penurunan namun pemerintah kabupaten Lembata telah melakukan beberapa hal dalam meningkatkan kepesertaan jamsotek meliputi:

- (1) Melaksanakan program sosialisasi kepada pemberi kerja/perusahaan mengenai kewajiban pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial.
- (2) Upaya menyisipkan syarat kepesertaan jamsostek dalam proses pengurusan izin usaha.

Adapun langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja sektor ketenagakerjaan dalam mendukung Proporsi Peserta Program Jamsostek meliputi:

- (1) Mendorong regulasi yang mewajibkan seluruh pekerja ekosistem desa dan pekerja rentan untuk terlindungi melalui alokasi dana desa atau perusahaan.
- (2) Memperkuat sinergi antara Disnakertrans, BPJS Ketenagakerjaan, dan DPMPTSP dalam pengawasan kepatuhan perusahaan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi.
- (3) Melakukan Sosialisasi, Identifikasi dan Seleksi Peserta BPJS Tenaga Kerja di Kecamatan.
- (4) Memberikan Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.



2.2.3.3.4. Tujuan Ke-4: Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tenteram, dan Tertib

1. IKTS 7: Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya	64,03	Belum Dipublikasi		67,43	

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya adalah salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat keamanan publik dan kualitas hidup di suatu wilayah. Realisasi indikator Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya tahun 2025.

Indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya di Kabupaten Lembata diterjemahkan ke dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas, Kerukunan Beragama dan Demokrasi dengan 3 Indikator Kinerja.

1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas, Kerukunan Beragama Dan Demokrasi

a. IKSS 8.16: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	37	52,69	142,41	41,00	128,51



Realisasi Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas pada tahun 2025 sebesar 52,69% sudah berada di atas target yang ditetapkan sebesar 37% dengan persentase capaiannya 142,41% dengan kategori "Sangat Memuaskan". Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 41,00% di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 128,51%.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi maupun capaian tahun-tahun sebelumnya hal ini karena indikator ini baru dilaksanakan pada tahun 2025. Pencapaian kinerja Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas ini didukung dengan pemenuhan kebutuhan pegawai pada Sat-Pol PP serta koordinasi baik antar unit kerja di Kecamatan, Kelurahan maupun instansi terkait.

Meskipun indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan namun masih terdapat tantangan dalam penyelenggaraannya, meliputi:

- (1) Luas wilayah yang mencakup pesisir dan pegunungan menyulitkan mobilisasi personel Satpol PP untuk melakukan respons cepat terhadap gangguan trantibum di kecamatan yang jauh dari pusat kabupaten (Lewoleba).
- (2) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah di wilayah pelosok seringkali terhambat oleh keterbatasan sarana transportasi darat.
- (3) Peran Satuan Pelindungan Masyarakat di Desa-desa belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam sistem deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.
- (4) Gangguan ketertiban yang dipicu oleh konsumsi minuman keras lokal masih menjadi tantangan rutin yang memerlukan pendekatan persuasif namun tegas dari aparat di lapangan.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk meningkatkan capaian indikator ini, antara lain:

- (1) Meningkatkan peran Satuan Pelindungan Masyarakat di Desa-desa sehingga terintegrasi secara sistematis dalam sistem deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.
- (2) Pendekatan humanis, penguatan koordinasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat serta fokus utamanya adalah beralih dari sekedar penindakan menuju tindakan preventif dan edukatif.

b. IKSS 8.17: Indeks Demokrasi Indonesia Lembata

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Demokrasi Indonesia Lembata	71,45	71,44	99,99	72,57	98,44

Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia Lembata pada tahun 2025 sebesar 71,44% masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 71,45% dengan persentase capaiannya 99,99% dengan kategori "Sangat Memuaskan". Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 72,57% di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 98,44%.

Pada tahun 2024 Indeks Demokrasi Indonesia Lembata sebesar 71,39% dan mengalami kenaikan menjadi 71,44 % di tahun 2025 atau mengalami peningkatan sebesar 0,05%. Terjadinya peningkatan kinerja ini disebabkan:

- (1) Melakukan Musrenbang mulai dari dusun, desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan melibatkan kelompok rentan, perempuan, pemuda, dan tokoh adat di Lembata.



- (2) Adanya peningkatan pengawasan yang dilakukan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi konstituen yang konstruktif terhadap kinerja eksekutif.
- (3) Memastikan tidak ada hambatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau melakukan aksi damai sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- (4) Memastikan kebijakan daerah memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang.

Meskipun terjadi peningkatan kinerja namun masih terdapat tantangan yang dihadapi, antara lain:

- (1) Keberadaan kanal pengaduan SP4N-LAPOR! belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Lembata, atau respons dari OPD terkait yang terkadang lambat sehingga menurunkan kepercayaan publik.
- (2) Pemahaman masyarakat mengenai fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah masih kurang sehingga perlu ditingkatkan agar kontrol sosial berjalan efektif dan objektif.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk meningkatkan indikator ini adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan program transformasi digital dan keterbukaan Informasi.
- (2) Penguatan Integritas Lembaga Demokrasi.
- (3) Melaksanakan program edukasi politik di tingkat desa yang bekerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama.



c. IKSS 8.18: Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,43-75,45	75,44	99,99	79,27-79,39	95,02

Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun 2025 sebesar 75,44% masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 75,43-75,45% dengan persentase capaiannya 99,99% dengan kategori "Sangat Memuaskan". Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 79,27-79,39% di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 95,02%. Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 74,47% maka terjadi peningkatan sebesar 0,97%. Terjadinya peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ini disebabkan oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

- (1) Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (2) Menyelenggarakan pertemuan rutin antara tokoh agama untuk membahas isu-isu kemasyarakatan sebelum menjadi potensi konflik.
- (3) Membentuk Desa Pancasila.
- (4) Mendukung kegiatan keagamaan yang melibatkan partisipasi lintas iman, seperti keterlibatan pemuda lintas agama dalam pengamalan hari raya (Paskah, Idul Fitri, Natal) dan acara syukuran adat.

Meskipun terjadi peningkatan kinerja namun masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mendukung Indeks

Demokrasi Indonesia Lembata meliputi :

- (1) Kontestasi politik terkadang tanpa sengaja menarik garis pemisah berdasarkan identitas tertentu. Menjaga agar perbedaan pilihan politik tidak bergeser menjadi sentimen keagamaan adalah tantangan besar bagi pemerintah daerah.
- (2) Penyebaran Hoaks dan Isu SARA.
- (3) FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) belum sampai ke tingkat kecamatan.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yakni dengan Penguatan Peran FKUB dan Kelembagaan.

2.2.3.3.5. Tujuan Ke-5: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkelanjutan

1. IKTS 8: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	72,00	70,13	97,40	76,00	92,28

Pada tahun 2025, target Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ditetapkan sebesar 72,00, dengan realisasi pada 70,13. Angka realisasi tahun 2025 ini masih menggunakan angka realisasi tahun sebelumnya karena angka Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur belum dapat dilakukan perhitungan, sehingga capaian kinerja masih menggunakan capaian tahun 2024 yakni 97,40%.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Lembata diterjemahkan ke dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yakni Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan 2 Indikator kinerja.

1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas yang Berkualitas dan Berkelanjutan

a. IKSS 9.19: Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	2,89-2,91	0,68	23,37	3,05-3,07	22,15

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 2,89-2,91 dengan realisasi sebesar 0,68 dan tingkat capaian mencapai 23,37% dengan kategori capaian kinerja “Sangat Kurang”. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024 sebesar 2,86, maka di tahun 2025 terjadi penurunan sebesar 2 poin. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 3,05-3,07, realisasi tahun 2025 masih di bawah target akhir renstra dengan capaian 22,15%.

Adapun penyebab kegagalan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- (1) Kualitas infrastruktur yang rendah diakibatkan oleh minimnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- (2) Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sehingga menyebabkan infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan

masyarakat;

- (3) Penggunaan teknologi yang tidak *up to date* sehingga menyebabkan infrastruktur yang tidak efisien dan tidak efektif;
- (4) Belum adanya kerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan investasi dan kualitas infrastruktur;
- (5) Minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola infrastruktur.

Terhadap penyebab kegagalan pencapaian kinerja di atas, adapun solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- (1) Menambah alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur untuk memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (3) Menggunakan teknologi yang *up to date* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas infrastruktur;
- (4) Melakukan kerja sama dengan swasta untuk meningkatkan investasi dan kualitas infrastruktur; dan
- (5) Mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan infrastruktur.

b. IKSS 9.20: Rasio Konektivitas

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Rasio Konektivitas	0,27	0,29	107,41	0,36	80,56

Pada tahun 2025, realisasi Rasio Konektivitas telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,27% dengan realisasi sebesar 0,29% dan tingkat capaian mencapai 107,41% dengan kategori capaian kinerja



“Sangat Memuaskan”. Pada tahun 2024 realisasi Rasio Konektivitas mencapai 0,23% dan meningkat menjadi 0,29% pada tahun 2025. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 0,36%, realisasi tahun 2025 masih di bawah target akhir renstra dengan capaian 80,56%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena pada tahun 2025 terdapat Penambahan jumlah trayek yang terisi sebanyak 4 (empat) trayek yang sebelumnya hanya 34 trayek menjadi 38 trayek.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat dipengaruhi oleh minat masyarakat dalam memilih bidang usaha angkutan umum, serta kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan angkutan umum untuk mengisi trayek-trayek yang belum terisi. Pada tahun 2025 kontribusi masyarakat sangat baik dalam mendukung pencapaian indikator ini, yang mana terdapat penyedia jasa angkutan umum yang berperan aktif dalam mengisi kekosongan trayek yang tersedia. Walaupun realisasi Indikator ini melampaui target, namun masih terdapat kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini antara lain:

- (1) Minimnya minat masyarakat dalam memilih bidang usaha khususnya pada dibidang transportasi; dan
- (2) Keterbatasan anggaran, alokasi anggaran yang sangat minim menyebabkan Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan pengadaan kendaraan angkutan umum untuk mengisi kekosongan trayek yang tersedia, serta melakukan optimalisasi pemenuhan kebutuhan akan sarana dan vasilitas yang mendukung pencapaian indikator ini tidak maksimal, yakni melakukan pekerjaan dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran. Sarana dan Prasarana terminal masih banyak yang



mengalami kerusakan, seperti fasilitas umum, termasuk kamar mandi, ruang tunggu, atap plafon, dan drainase.

Terhadap kendala ini, adapun solusi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Lembata dalam hal ini Dinas Perhubungan antara lain:

- (1) Memberikan kemudahan kepada pemilik kendaraan angkutan umum untuk mendapatkan izin trayek; dan
- (2) Melakukan peningkatan kualitas pelayanan angkutan dengan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dan pengguna jasa transportasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata melalui Dinas Perhubungan akan melakukan beberapa hal antara lain:
 - a. Mengupayakan pemberian pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan baik, seperti melaksanakan pemeliharaan alat uji, kalibrasi alat uji, serta pembaruan/kalibrasi alat- alat uji yang sudah melebihi umur teknis maupun aplikasi yang sudah *out of date* hingga pelaksanaan SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala untuk menjaga kualitas layanan uji laik jalan kendaraan bermotor; dan
 - b. Mengupayakan peningkatan kualitas layanan angkutan umum melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian ketertiban perizinan angkutan umum serta operasi laik jalan. Semua itu diupayakan dengan harapan, dapat meningkatkan keselamatan masyarakat pengguna jasa transportasi.



2.2.3.3.6. Tujuan Ke-6: Meningkatnya Keseimbangan dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

1. IKTS 8: Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,10-0,11	Belum Dipublikasi	-	0,18-0,22	-

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Daerah adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menjaga, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya alam hayati (tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) beserta ekosistemnya secara berkelanjutan di wilayah administratif tertentu. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ini angka realisasi tahun 2025 belum diekspos.

Indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah di Kabupaten Lembata diterjemahkan ke dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dengan 1 (satu) Indikator Kinerja.

1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

a. IKSS 10.21: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,18-72,23	77,75	107,64	73,94-74,19	104,80



Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lembata pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan Capaian kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lembata tahun 2025 mencapai 107,64%, yang masuk dalam kategori "Sangat Memuaskan". Target IKLH yang ditetapkan sebesar 72,18-72,23 terlampaui dengan realisasi sebesar 77,75. Realisasi kinerja tahun 2025, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 73,94-74,19 di tahun 2029, maka capaian sebesar 104,80%.

Realisasi IKLH tahun 2025, jika dibandingkan dengan IKLH tahun 2024 sebesar angka 71,74 maka terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup sebesar 6,01 poin. Hal ini karena Lembata memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari pegunungan, perbukitan, hutan, hingga pesisir yang luas, yang membuatnya sangat potensial. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kualitas lingkungan memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam. Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Lembata tahun 2025 dilakukan untuk meninjau kondisi lingkungan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan.

Sebagai daerah yang terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, Kabupaten Lembata telah melaksanakan berbagai langkah strategis sebagai upaya mendukung upaya tersebut.

- (1) Melakukan pemantauan kualitas air yang rawan tercemar fekal coliform sebagai parameter utama dalam menilai kualitas air, dilakukan secara berkala baik pada musim kemarau maupun musim penghujan dan melakukan pemantauan kualitas udara,



dan kualitas lahan secara rutin.

- (2) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penegakan hukum terhadap kegiatan industri juga diperkuat guna memastikan bahwa pengelolaan kualitas udara dilakukan dengan baik, serta meningkatkan sistem pengendalian pencemaran udara di sektor industri.
- (3) Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian utama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Upaya pengurangan sampah oleh masyarakat didorong, sementara penanganan sampah dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Kabupaten Lembata melalui kerjasama multi-stakeholder, yang melibatkan masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha.
- (4) Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Lingkungan Hidup mencanangkan Program Adiwiyata untuk menciptakan budaya sekolah yang peduli terhadap lingkungan secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Lembata:

- (1) Peningkatan pengelolaan sampah dengan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), penambahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan bekerja sama dengan komunitas Bank Sampah dalam pengelolaan sampah kering.
- (2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat. Kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, pengelolaan limbah, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan berkontribusi terhadap peningkatan nilai indeks.

- (3) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi dalam pengelolaan tataguna lahan, upaya pengurangan lahan kritis dan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hutan mangrove serta penanaman kembali di sempadan.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi, pembinaan pengelolaan sampah, dan kolaborasi dengan sekolah (sekolah adiwiyata) untuk mempraktikkan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan di tingkat lokal.

2.2.3.3.7. Tujuan Ke-7: Menurunnya Resiko Bencana

1. IKTS 10: Indeks Resiko Bencana (IRB)

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Resiko Bencana (IRB)	122,5-124,97	205,27	32,43	108,07-119,98	10,06

IRB berfungsi sebagai navigasi strategis untuk menentukan sejauh mana suatu wilayah terancam oleh bencana dan apa yang harus diprioritaskan. Realisasi Indeks Resiko Bencana tahun 2025 sebesar angka 205,27 mencapai 32,43% dengan target Indeks Resiko Bencana tahun 2025 sebesar angka 122,5-124,97. Dengan demikian, capaian ini masuk dalam kategori kinerja “Kurang”. Realisasi tahun 2025, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 yaitu sebesar 108,07-119,98% di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 10,06%.

Tujuan Strategis Ketujuh dengan 1 (satu) Indikator Kinerja selanjutnya diterjemahkan ke dalam 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 1 Indikator.



1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim

a. IKSS 11.22: Indeks Ketahanan Daerah

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Ketahanan Daerah	0,44	0,51	115,91	0,52	98,08

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai kapasitas atau kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, menyerap, dan memulihkan diri dari dampak bencana Kinerja Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar angka 115,91%, dengan realisasi yang dicapai tahun 2025 adalah 0,51 dari target 0,44. Dengan capaian ini menjadikan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah sebagai indikator dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 0,52 di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 98,08%. Pada tahun 2024 capaian IKD adalah sebesar 0,42 dan mengalami kenaikan menjadi 0,51 atau peningkatan sebesar 0,09 poin di tahun 2025.

Dalam peningkatan indeks Ketahanan Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya:

- (1) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu Sebagai langkah mitigasi, Kabupaten Lembata telah menyusun peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas untuk seluruh ancaman bencana



di wilayahnya. Peta-peta ini digunakan dalam perencanaan mitigasi, tanggap darurat, serta rekonstruksi pasca-bencana. Rencana Penanggulangan Bencana yang berbasis pada hasil kajian ini memastikan kesiapsiagaan yang lebih efektif dalam menghadapi potensi bencana.

- (2) Pengembangan Sistem Informasi, pelatihan dan Logistik Pemerintah daerah terus mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang dapat diakses masyarakat. Sosialisasi pencegahan bencana serta pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga tanggap darurat juga dilakukan secara berkala. Penyediaan logistik menjadi fokus utama, dengan pembangunan gudang logistik yang terorganisir serta sistem *supply chain* yang siap digunakan dalam situasi darurat. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang merupakan bagian dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Lembata bersama *stakeholder* yang ada di Lembata untuk meningkatkan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat.
- (3) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Lembata telah menyiapkan rencana kontinjensi untuk setiap jenis ancaman bencana serta mengembangkan sistem peringatan dini. Jalur dan tempat evakuasi sementara telah ditetapkan, bersama dengan sistem komando 72 operasi darurat yang memastikan koordinasi cepat dan tepat saat terjadi bencana. Tim Rekasi Cepat Tim Penyelamatan telah dilatih dan siap diterjunkan ke lokasi bencana dalam waktu singkat.
- (4) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Pasca-bencana, pemulihan pelayanan dasar pemerintah dan infrastruktur penting



menjadi prioritas utama. Rehabilitasi rumah penduduk yang terdampak serta pemulihan penghidupan masyarakat dilakukan melalui berbagai program bantuan dan dukungan ekonomi. Tahun 2025, upaya ini semakin diperkuat dengan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

(5) Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana dan melaksanakan rapat koordinasi Sistem Informasi Bencana Lembata (SIBELA).

(6) Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).

Meskipun Kapasitas Kabupaten Lembata dalam peningkatan ketahanan daerah terus meningkat, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana di Kabupaten Lembata, antara lain:

- (1) Kesiapan dalam penyusunan Rencana Kontinjensi untuk setiap ancaman bencana.
- (2) Sistem peringatan dini yang belum optimal untuk setiap jenis ancaman.
- (3) Ketersediaan jalur dan tempat evakuasi sementara yang memadai.
- (4) Mekanisme penentuan status tanggap darurat dan penerapan sistem komando operasi darurat.
- (5) Peningkatan efektivitas dalam pengerahan Tim Reaksi Cepat dan Tim Penyelamatan Korban.
- (6) Tantangan dalam pengorganisasian bantuan bagi masyarakat terdampak di wilayah terpencil.

Strategi kinerja ke depan akan diterapkan sebagai bagian dari langkah perbaikan berkelanjutan terutama diarahkan pada Ketahanan Daerah dengan meningkatkan kerja sama multi-sektor

sehingga risiko bencana dapat diminimalkan secara efektif dan berkelanjutan.

2.2.3.3.8. Tujuan Ke-8: Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Budaya

1. IKTS 11: Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,61-53,85	53,04	98,50	55,89-57,08	92,92

Pembangunan Kebudayaan adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan unsur-unsur budaya. Pada tahun 2025, target Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Lembata ditetapkan sebesar 53,61-53,85, dengan realisasi 53,04, angka realisasi tahun 2025 ini masih menggunakan angka realisasi tahun 2024 karena angka Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) belum diekspos, sehingga capaian kinerja masih menggunakan capaian tahun 2024 yakni sebesar 98,50%.

Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Lembata diterjemahkan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis yakni Sasaran Strategis Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis Meningkatnya Penguatan Warisan Budaya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja.



1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

a. IKSS 12.23: Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,00-63,50	63,00	99,21	68,00-68,50	91,97

Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan capaian sebesar 99,21% dengan realisasi yang dicapai sebesar 63,00 dari target 63,00-63,50. Dengan capaian ini menunjukkan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga sebagai indikator dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 68,00-68,50 di tahun 2029, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 91,97%.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Lembata tahun 2025, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar angka 62,24 maka terjadi kenaikan kinerja sebesar angka 0,76.

Kenaikan kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa program yang dilakukan, antara lain:

- (1) Penguatan Dimensi Ketenteraman (Aspek Legalitas & Keharmonisan) dengan Mempermudah layanan administrasi kependudukan (KTP, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak) hingga ke tingkat desa agar setiap keluarga memiliki status hukum yang jelas; Sosialisasi masif mengenai pendewasaan usia perkawinan guna menekan angka perceraian dan risiko kesehatan pada ibu



dan anak;

- (2) Penyuluhan Keagamaan dengan mendorong peran tokoh agama dan adat dalam menjaga harmoni keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.
- (3) Program Perlindungan Perempuan dan Anak dengan memperkuat unit layanan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk memastikan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman.

Meskipun Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) terus meningkat, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya peningkatan yakni tantangan geografis dan aksesibilitas layanan dan aspek kemandirian ekonomi keluarga masih menjadi titik lemah yang signifikan.

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Lembata, antara lain:

- (1) Mendorong setiap desa memiliki produk turunan unggulan (seperti pengolahan ikan kering, keripik pisang, atau minyak kelapa) sehingga ibu rumah tangga memiliki penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan rumah.
- (2) Memperluas jangkauan layanan keliling hingga ke wilayah pelosok untuk memastikan setiap keluarga memiliki Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan KIA (Kartu Identitas Anak) secara gratis dan cepat.
- (3) Penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA dengan menyediakan layanan konseling keluarga yang mudah diakses untuk menangani konflik domestik dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan.



b. IKSS 12.24: Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Pembangunan Gender	91,86-91,90	91,70	99,78	92,49-92,72	98,90

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan gender melalui berbagai kebijakan dan program yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik. Pada tahun 2025, target Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lembata ditetapkan sebesar 91,86-91,90, dengan realisasi pada 91,70 dan capaian sebesar 99,78%. Angka realisasi tahun 2025 ini masih menggunakan angka realisasi tahun 2024 karena angka Indeks Pembangunan Gender belum dapat dilakukan perhitungan.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mendukung pelaksanaan pencapaian indikator ini, diantaranya:

- (1) Integrasi data kasus melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang lebih real-time.
- (2) Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan memberikan andil terhadap seberapa besar peran perempuan dapat menduduki posisi strategis pada sektor pemerintahan, legislasi dan dunia usaha.



- (3) Akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi seperti dalam hal modal usaha, kepemilikan aset, serta kesempatan kerja.
 - (4) Akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan
 - (5) Tingkat beban ganda bagi perempuan yakni tanggung jawab pekerjaan dan rumah tangga akibat kurang dukungan lingkungan
- Berbagai kegiatan di Kabupaten Lembata mendukung responsif gender telah dilaksanakan seperti:

- (1) Penguatan kapasitas perempuan dalam perencanaan pembangunan desa dan mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Peningkatan akses perempuan terhadap ekonomi produktif melalui program PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan dukungan bagi keluarga pekerja migran.
- (3) Penguatan peran perempuan dalam UMKM dan ekonomi kreatif melalui pelatihan wirausaha, dan akses permodalan.

Dengan langkah-langkah yang berkelanjutan, diharapkan IPG Kabupaten Lembata dapat terus meningkat, mencerminkan semakin kuatnya peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Lembata.

c. IKSS 12.25: Indeks Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Perlindungan Anak	55,13	54,86	99,51	56,23	97,56

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,



berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuannya bukan sekadar menjaga keselamatan fisik, tetapi untuk memastikan anak Indonesia menjadi manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak dasar anak.

Pada tahun 2025, target Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Lembata ditetapkan sebesar 55,13, dengan realisasi pada 54,86, angka realisasi tahun 2025 ini masih menggunakan angka realisasi tahun 2023 karena angka Indeks Perlindungan Anak belum dapat dilakukan perhitungan, sehingga capaian kinerja masih 99,51%.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah masih terdapat kasus yang "didiamkan" di tingkat keluarga atau masyarakat karena stigma sosial, sehingga data yang muncul di permukaan belum mencerminkan kondisi sebenarnya.

Berbagai kegiatan di Kabupaten Lembata mendukung perlindungan anak telah dilaksanakan seperti:

- (1) Adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung perlindungan anak.
- (2) Integrasi data kasus melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang lebih real-time.
- (3) Edukasi ke sekolah-sekolah (Sekolah Ramah Anak) dan lingkungan keluarga untuk memutus rantai kekerasan sejak dini.

Dengan langkah-langkah yang berkelanjutan, diharapkan Indeks Perlindungan Kabupaten Lembata dapat terus meningkat, mencerminkan semakin kuatnya peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Lembata.



2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya

a. IKSS 13.26: Indeks Dimensi Warisan Budaya

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Dimensi Warisan Budaya	42,93	42,50	99,00	44,63	95,23

Warisan budaya merupakan seluruh peninggalan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan identitas suatu kelompok atau bangsa. Warisan ini bukan sekadar benda mati, melainkan jejak peradaban yang diturunkan dari generasi sebelumnya untuk dijaga dan diteruskan.

Pada tahun 2025, target Indeks Dimensi Warisan Budaya Kabupaten Lembata ditetapkan sebesar 42,93, dengan realisasi 42,50, angka realisasi tahun 2025 ini masih menggunakan angka realisasi tahun 2024 karena angka Indeks Dimensi Warisan Budaya belum dapat dilakukan perhitungan, sehingga capaian kinerja masih 99,00% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun kendala peningkatan kinerja Indeks Dimensi Warisan Budaya yakni:

- (1) Banyak ritual adat, motif tenun ikat (seperti sarung *Kewatek*), dan situs sejarah yang dipraktikkan secara turun-temurun namun belum didokumentasikan secara tertulis atau digital sesuai standar nasional.
- (2) Proses pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) ke tingkat nasional memerlukan kajian akademis dan historis yang mendalam, yang seringkali terkendala oleh keterbatasan tenaga ahli di daerah.

- (3) Penurunan minat generasi muda untuk mempelajari detail ritual, bahasa adat, dan teknik tradisional (seperti pembuatan *Pledang*) dapat mengancam keberlangsungan warisan ini dalam jangka panjang.

2.2.3.3.9. Tujuan Ke-9: Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. IKTS 12. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	60,4	60,9	100,83	71,7	84,94

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Lembata telah mencapai 60,9 dari target 60,4 atau mencapai 100,83% dengan kategori capaian kinerja “Sangat Memuaskan”. Pada tahun 2024 realisasi IRB sebesar 52,83, dan meningkat menjadi 60,9 pada tahun 2025. Hasil evaluasi Indeks RB kabupaten Lembata pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lembata masuk pada kategori “B” yang menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata telah memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 71,7, realisasi Indeks RB masih di bawah target dengan selisih sebesar 10,8 poin.

Keberhasilan pencapaian Indeks RB ini disebabkan oleh beberapa hal



antara lain:

- (1) Telah menyusun dan menetapkan Rencana Aksi RB melalui Keputusan Bupati Lembata Nomor 811 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2025;
- (2) Telah menyampaikan Rencana Aksi RB Tahun 2025 pada <https://portalrb.menpan.go.id/>;
- (3) Telah melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi dan telah melaporkan realisasi rencana aksi pada <https://portalrb.menpan.go.id/>.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lembata, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu:

- (1) Kurangnya ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan indikator penilaian RB General dan RB Tematik;
- (2) Belum ada tim pengelola RB tingkat Kabupaten;
- (3) Perangkat Daerah penanggung jawab indikator belum sepenuhnya memahami Indikator Penilaian RB.

Dengan memperhatikan kendala-kendala di atas maka dapat disampaikan alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan indikator kinerja ini antara lain:

- (1) Menambahkan anggaran yang mendukung secara langsung pencapaian indikator penilaian RB General dan RB Tematik;
- (2) Membentuk tim pengelola RB tingkat Kabupaten agar pelaksanaan penyusunan rencana aksi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi dapat lebih efektif;
- (3) Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah penanggungjawab indikator penilaian RB General dan RB Tematik.

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Lembata diterjemahkan ke dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yakni Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja.

1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan

a. IKSS 14.27: Nilai RB General

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Nilai RB General	50	55,1	110,2	61,65	89,38

Pada tahun 2025, capaian Nilai RB General Kabupaten Lembata telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 50,00 dengan realisasi sebesar 55,1 dan tingkat capaian mencapai 110,2% dengan kategori capaian kinerja “Sangat Memuaskan”. Pada tahun 2024 realisasi Nilai RB General sebesar 46,63, dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 55,1. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 61,65, realisasi Nilai RB General mencapai 89,38%.

Terhadap indikator penilaian RB General dengan capaian bobot terendah, Pemerintah Kabupaten Lembata akan menindaklanjuti catatan hasil evaluasi untuk meningkatkan capaian indikator RB General.

Pencapaian Nilai RB general ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- (1) Telah menyusun dan menetapkan Rencana Aksi RB melalui Keputusan Bupati Lembata Nomor 811 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah



Kabupaten Lembata Tahun 2025;

- (2) Telah menyampaikan Rencana Aksi RB Tahun 2025 pada <https://portalrb.menpan.go.id/>;
- (3) Telah melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi dan telah melaporkan realisasi rencana aksi pada <https://portalrb.menpan.go.id/>.

Walaupun Nilai RB General telah melampaui target, tetapi masih terdapat catatan hasil evaluasi antara lain:

- (1) Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Keputusan Menteri PANRB nomor 182 Tahun 2024);
- (2) Penetapan target dan informasi realisasi baik output atau anggaran pada beberapa rencana aksi masih ada yang belum sesuai dengan catatan output yang diberikan;
- (3) Informasi terkait dengan besaran anggaran yang digunakan pada rencana aksi hanya sebagian kecil.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, adapun rekomendasi yang harus ditindaklanjuti antara lain:

- (1) Memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Keputusan Menteri PANRB nomor 182 Tahun 2024);
- (2) Memastikan setiap informasi yang menggambarkan target dan realisasi atas rencana aksi meliputi output dan anggaran memberikan informasi sesuai dengan kondisi riil yang terjadi pada periode monev yang dilakukan;
- (3) Melakukan identifikasi terhadap besaran anggaran yang dibutuhkan pada pelaksanaan rencana aksi.

b. IKSS 14.28: Nilai RB Tematik

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Nilai RB Tematik	7,00	5,8	82,86	10,05	57,71

Pada tahun 2025, Nilai RB Tematik Kabupaten Lembata masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 7,00 dengan realisasi sebesar 5,8 dan tingkat capaian mencapai 82,86% dengan kategori capaian kinerja “Memuaskan”. Pada tahun 2024 realisasi Nilai RB Tematik sebesar 6,2 dan menurun pada tahun 2025 menjadi 5,8. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 10,05, realisasi Nilai RB Tematik mencapai 57,71%.

Terhadap indikator penilaian RB Tematik dengan capaian bobot terendah, Pemerintah Kabupaten Lembata akan menindaklanjuti catatan hasil evaluasi untuk meningkatkan capaian indikator dampak RB Tematik.

Pencapaian Nilai RB Tematik ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- (1) Telah menyusun dan menetapkan Rencana Aksi RB melalui Keputusan Bupati Lembata Nomor 811 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2025;
- (2) Telah menyampaikan Rencana Aksi RB Tahun 2025 pada <https://portalrb.menpan.go.id/>;
- (3) Telah melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi dan telah melaporkan realisasi rencana aksi pada <https://portalrb.menpan.go.id/>.



Walaupun capaian kinerja berada pada kategori “Memuaskan”, tetapi masih terdapat catatan hasil evaluasi yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan capaian RB Tematik. Catatan tersebut antara lain:

- (1) Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait;
- (2) Terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup;
- (3) Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah;
- (4) Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi;
- (5) Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan;
- (6) Capaian realisasi output RB tematik belum dilakukan pengisian secara berkala.

Terhadap catatan tersebut di atas, adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas RB Tematik adalah:

- (1) Menetapkan sasaran untuk menjawab permasalahan utama tema terkait;
- (2) Menentukan indikator sasaran yang lebih SMART dan Cukup;
- (3) Menyusun rencana aksi yang lebih logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah;



- (4) Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sistematis pada aspek perencanaan, proses bisnis, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi, sehingga perbaikan tata kelola benar-benar menghasilkan perubahan nyata dalam kinerja organisasi;
- (5) Menyusun rencana aksi yang memuat kolaborasi dengan pihak yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema;
- (6) Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi dan melakukan pengisian secara berkala pada portal RB Nasional.

c. IKSS 14.29: Otonomi Fiskal Daerah

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Otonomi Fiskal Daerah	4,96-5,06	4,76	94,07	5,97-6,45	73,80

Pada tahun 2025, Realisasi Otonomi Fiskal Daerah masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 4,96-5,06% dengan realisasi sebesar 4,76% dan tingkat capaian mencapai 94,07% dengan kategori capaian kinerja “Sangat Memuaskan”. Pada tahun 2024 realisasi sebesar 4,71% dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 4,76. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 5,97-6,45%, realisasi indeks otonomi fiskal daerah masih di bawah target dengan capaian sebesar 73,80%. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya otonomi fiskal daerah di Kabupaten Lembata antara lain:

- (1) Basis Pajak dan Retribusi daerah yang sempit akibat belum maksimalnya penggalan potensi/obyek pajak dan retribusi potensi;



- (2) Kelemahan kelembagaan dalam pendataan dan pengawasan wajib pajak/retribusi termaksud koordinasi lintas sektor untuk penmbahan obyek pajak/retribusi yang baru;
- (3) Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah akibat keterbatasan legalitas dan perencanaan pemanfaatan;
- (4) Belum efektifitasnya digitalisasi pemungutan pajak melalui penerapan metode pembayaran elektronik untuk perbaikan tata kelola pemungutan PAD.

Solusi/strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah adalah:

- (1) Digitalisasi pajak/retribusi daerah (*e-payment, e-billing, QRIS*) untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak/retribusi dan efisiensi pemungutan;
- (2) Pengelolaan aset daerah dan BUMD secara berkelanjutan sehingga dapat berkontribusi terhadap PAD;
- (3) Memperkuat dan meningkatkn struktur ekonomi daerah untuk memperluas basis pajak/retribusi daerah;
- (4) Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan melalui investasi dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendorong tumbuhnya potensi pendapatan daerah yang potensial.

d. IKSS 14.30: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,848	0,006	0,71	1,214	0,49

Pada tahun 2025, Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Daerah masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 0,848 dengan realisasi sebesar 0,006 dan tingkat capaian mencapai 0,71% dengan kategori



capaian kinerja “Sangat Kurang”. Pada tahun 2024 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah mencapai 0,756 dan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 0,006. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 1,214, realisasi indeks otonomi fiskal daerah mencapai 0,49%.

Kegagalan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh:

- (1) PAD Sangat Terbatas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lembata masih minim yang dipengaruhi oleh hasil pajak dan retribusi daerah yang belum maksimal;
- (2) Ketergantungan Tinggi pada Dana Transfer Pusat: Struktur APBD Kabupaten Lembata masih sangat didominasi oleh dana transfer (Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK) dari Pemerintah Pusat, yang mencerminkan kemandirian fiskal yang masih terbatas;
- (3) Struktur Belanja yang Tidak Efisien: Terdapat kecenderungan alokasi anggaran yang lebih memprioritaskan belanja operasi (termasuk belanja pegawai) daripada belanja modal. Hal ini mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong PAD;
- (4) Potensi Ekonomi Belum Optimal: Sektor utama penggerak ekonomi (pertanian, kehutanan, perikanan) belum memberikan kontribusi fiskal maksimal, serta minimnya inovasi dalam peningkatan retribusi.

Solusi/strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah:

- (1) Strategi Peningkatan Pendapatan (PAD)
 - a. Intensifikasi Pajak dan Retribusi dengan digitalisasi pemungutan pajak/retribusi daerah untuk mengurangi



- kebocoran dan mempermudah wajib pajak;
- b. Optimalisasi BUMD dengan mengaktifkan kembali atau memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkontribusi nyata pada PAD; dan
- c. Inovasi Potensi Wisata & Perikanan dengan memanfaatkan potensi kelautan dan pariwisata yang belum tergarap maksimal dengan regulasi yang memudahkan investasi.

(2) Strategi Efisiensi Belanja (Penghematan)

- a. Restrukturisasi APBD dengan menggeser belanja operasi secara bertahap menuju belanja modal yang produktif (infrastruktur yang memicu perputaran uang); dan
- b. Kebijakan Hemat Pegawai dengan menyesuaikan belanja pegawai agar tidak melampaui batas sesuai dengan arahan kebijakan pusat.

(3) Strategi Tata Kelola

- a. Penyelesaian Aset Daerah dengan menyelesaikan masalah aset yang tertunda agar laporan keuangan membaik dan menaikkan skor tata kelola yang berdampak pada penilaian fiskal; dan
- b. Peningkatan SDM Pengelola Keuangan dengan menguatkan kapasitas aparat dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2.3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tujuan atau hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan cara yang paling optimal. Dalam berbagai bidang, seperti manajemen, pendidikan, dan kebijakan publik, efektivitas menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan suatu strategi atau

program. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas meliputi perencanaan yang matang, penggunaan sumber daya yang efisien, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan pencapaian target. Tanpa efektivitas, upaya yang dilakukan bisa menjadi sia-sia karena tidak menghasilkan dampak yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan efektivitas melalui inovasi, pengukuran kinerja, serta penyesuaian strategi berdasarkan data dan evaluasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.02/ 2017, efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas anggaran} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja total}}{\text{Pagu belanja anggaran total}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900-237 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, kriteria penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat Efektif: Efektivitas > 100%
- 2) Efektif: 90% ≤ Efektivitas ≤ 100%
- 3) Cukup Efektif: 80% ≤ Efektivitas < 90%
- 4) Kurang Efektif: 60% ≤ Efektivitas < 80%
- 5) Tidak Efektif: 0% ≤ Efektivitas < 60%.

Nilai efektivitas ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka proses dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Analisis Efisiensi anggaran pada tahun 2025 juga dilakukan berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Perbandingan alokasi



anggaran dan realisasi anggaran serta perbandingan capaian kinerja dan realisasi anggaran.

No	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya nilai tambah sektor - sektor berbasis potensi daerah	14.084.815.234,00	13.323.315.828,00	94,59
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	856.015.965,00	804.111.750,00	93,94
3	Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan	1.374.334.412,00	1.374.125.296,00	99,98
4	Meningkatnya kemandirian desa	37.924.950,00	36.174.650,00	95,38
5	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	41.172.136.426,00	15.914.941.872,00	38,65
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	76.424.718.208,00	73.252.625.551,00	95,85
7	Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	1.180.846.719,00	925.454.280,00	78,37
8	Meningkatnya penyelenggaraan trantibumlinmas, kerukunan beragama dan demokrasi	2.090.560.449,00	2.079.934.444,00	99,49
9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan	23.887.052.980,00	22.805.988.799,00	95,47
10	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	591.600.545,00	441.803.073,00	74,68
11	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	910.368.227,00	883.923.608,00	97,10
12	Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	1.841.878.108,00	1.826.582.625,00	99,17
13	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	316.131.467,00	316.129.917,00	100,00
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan	22.992.893.446,00	21.781.141.386,00	94,73

Berdasarkan tabel di atas secara umum kinerja program telah berjalan dengan baik, dengan mayoritas capaian kinerja mendekati 100%. Secara keseluruhan, program-program yang dianalisis memiliki tingkat efektivitas



anggaran yang tinggi, dengan sebagian besar mencapai kategori "Efektif" berdasarkan capaian kinerja di atas 90%. Ada 1 program bahkan mencapai realisasi 100%, menunjukkan kesesuaian antara target dan realisasi kinerja. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat realisasi anggarannya tidak efektif. Sedangkan Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Dasar Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas, realisasi anggarannya kurang efektif.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Salah satu asas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah adalah tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, sedangkan penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta penugasan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari aspek penugasan urusan pemerintahan, merupakan implementasi dari ketentuan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf c dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, yang meliputi: *pertama*, tugas pembantuan yang diterima, dan *kedua*, tugas pembantuan yang diberikan.

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tidak mendapatkan tugas pembantuan atau memberikan tugas pembantuan.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 serta peraturan menteri teknis pengampu urusan wajib pelayanan dasar.

SPM diartikan sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar disebutkan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum;
4. Urusan Perumahan Rakyat;
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Urusan Sosial.

Capaian Pelaksanaan Penerapan SPM Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.



4.1.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Target Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	3.126
		1 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	69,78
		2 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	86,02
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	24.112
		SD		
		1 Kemampuan literasi	Nilai	64,65
		2 Kemampuan numerasi	Nilai	57,65
		3 Indeks iklim keamanan	Nilai	71,56
		4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,4
		5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,78
		SMP		
		1 Kemampuan literasi	Nilai	75,51
		2 Kemampuan numerasi	Nilai	68,14
		3 Indeks iklim keamanan	Nilai	67,67
		4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71,56
		5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55,54
3	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	734
		1 Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	2,10

4.1.3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi capaian SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PARIPURNA			100
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	3.126	3.186	100
		1 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	69.78	69.80	100
		2 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	86.02	87,00	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PARIPURNA			100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	24.112	24.112	100
		SD				
		1 Kemampuan literasi	Nilai	64.65	64.65	100
		2 Kemampuan numerasi	Nilai	57.65	57.65	100
		3 Indeks iklim keamanan	Nilai	71.56	71.56	100
		4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.4	72.4	100
		5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.78	57.78	100
		SMP				
		1 Kemampuan literasi	Nilai	75,51	75,51	100
		2 Kemampuan numerasi	Nilai	68,14	68,14	100
		3 Indeks iklim keamanan	Nilai	67,67	67,67	100
		4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71,56	71,56	100
		5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55,54	55,54	100
3	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	734	734	
		1 Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	2.10	2.10	100

4.1.4. Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung capaian SPM ini adalah sebesar Rp.29.340.972.749,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.331.152.599,00 atau 76,11%.

4.1.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM ini adalah sebagai berikut:

Personil Pelaksana Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	DUKUNGAN PERSONIL	
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	8 PNS dan 2 PPPK	
2	Pendidikan Dasar		
	a. Sekolah Dasar (SD)	8 PNS dan 2 PPPK	
	b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	8 PNS dan 4 PPPK	
3	Pendidikan Kesenjangan	3 PNS dan 1 PPK	
NO	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH GURU
1	PAUD	149	279
2	SD	160	1.081
3	SMP	52	658
4	Kesenjangan	5	26
Jumlah			2044

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
Pengumpulan Data		
1	Kurangnya SDM yang memahami pendataan	Verifikasi dan validasi data secara berkala
2	Data tidak sinkron dengan kondisi lapangan	Melibatkan sekolah dalam pengumpulan data
Perhitungan Kebutuhan		
1	Kurangnya tenaga Pengawas Sekolah Jenjang PAUD, SD dan SMP	Melaksanakan ujian kompetensi untuk pengawas PAUD/TK, SD dan SMP
2	Kurangnya tenaga Pamong Belajar	Penempatan tenaga ASN struktural pada tiap satuan pendidikan.
3	Terdapat ASN Pendidik yang diperbantukan pada satuan pendidik swasta	Pendataan Guru PNS pada sekolah - sekolah swasta untuk selanjutnya dilakukan pengalihan data
4	Keterbatasan jumlah guru yang terampil dan berkualitas	Sudah dilaksanakan pemetaan dan pendistribusian pendidik pada sekolah sekolah yang lowong
Perencanaan		
1	Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari bidang teknis yang akurat untuk kebutuhan perencanaan	Dilakukan pembenahan kembali administrasi pada setiap bidang
Pelaksanaan		
1	Pelaporan terlambat	Evaluasi capaian SPM setiap triwulan

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;



11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Hamil Ibu	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1.221
		1 Vaksin <i>Tetanus Difteri</i> (Td)	Ampul	122
		2 Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	219.780
		3 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket	1.221
		4 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	1.221
		5 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	1.221
		6 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	183
		7 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: <i>Skrining triple</i> eliminasi dengan tes cepat <i>Hepatitis B</i> dan <i>Sifilis</i> dan HIV	Paket	1.221
		8 Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	1.221
		9 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1.221
		10 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	163
		11 Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	82
		12 Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	23
		13 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385
		14 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248
		15 Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	25
		16 Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang	34
		17 Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	1.221
2	Pelayanan Kesehatan Bersalin Ibu	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1681
		1 Formulir partograf	Formulir	1681
		2 Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	1681
		3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	1681



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	163
		5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	23
		6	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385
		7	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248
		8	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	25
		9	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang	34
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	1681
		1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Vaksin	1681
		2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	1681
		3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	1681
		4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	1681
		5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	5.043
		6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1681
		7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	163
		8	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	23
		9	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385
		10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248
		11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	25
		12	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	14
		13	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34
		14	Kader Kesehatan	Orang	1.863
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	8.998
		1	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	8.998
		2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	8.998
		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	8.998
		4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	1.683
		5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	6.705
		6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2.318
		7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	3.352
		8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2.351
		9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	3.114
		10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	2.175
		11	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin	2.501
		12	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin	2.175
		13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	24.195
		14	Peralatan Anafilaktik	Paket	695
		15	Formula terapi gizi buruk	Paket	700
		16	Tenaga medis: Dokter	Orang	23
		17	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	18	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248
		19	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34
		20	Guru PAUD	Orang	264
		21	Kader kesehatan	Orang	1.863
		Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	12.607
		1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	1.099
		2	Form pencatatan/buku pemantauan Kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	1.105
		3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	3.643
		4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)	Formulir	3.172
		5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	1.826
		6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	105.732
		7	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	24
		8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	2.788
		9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	329
		10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	1.275
		11	Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang	23
		12	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385
		13	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248
		14	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		15	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	25
		16	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25
		17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang	106
		18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	1.863
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	21.072
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	163
		2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	329
		3	Alat: Tensimeter	Unit	163
		4	Alat: Glukometer	Unit	163
		5	Alat: Alat pemeriksa Hb	Unit	12
		6	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	5.013
		7	Alat: KIT IVA Tes	Unit	3.863
		8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	200
		9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	3
		10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK	Dokumen	15.728
		11	Alat Pelayanan KB	Unit	626
		a.	Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	126
		b.	Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	500
		c.	Vasektomi set	Unit	0
		12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	24
		13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	65
		14	Tenaga medis: Dokter	Orang	23
		15	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385
		16	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248
		17	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34
		18	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25
		19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1.863
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	17.166
		1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	329
		2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	163
		3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	163



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	17.166
		5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	17.166
		6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	17.166
		7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	329
		8	Tenaga medis: Dokter	Orang	23
		9	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385
		10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248
		11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34
		12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25
		13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1.863
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	3.988
		1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	12
		2	Obat Hipertensi	Paket	67.798
		3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	58
		4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	247
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	13
		6	Tenaga medis: Dokter	Orang	23
		7	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385
		8	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248
		9	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34
		10	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	14
		11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	25
		12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	1.497
		1	Obat Diabetes Melitus	Paket	47.000
		2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	47
		3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	3.894
		4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK	Formulir	151



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		(Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)		
		5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman	12
		6 Tenaga medis: Dokter	Orang	23
		7 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385
		8 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248
		9 Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	25
		10 Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25
		11 Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34
		12 Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	30
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	236
		1 Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	12
		2 Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	49
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	3 Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	1.079
		4 Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi Kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	144
		5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	12
		6 Tenaga medis: Dokter	Orang	23
		7 Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	12
		8 Tenaga profesional lainnya	Orang	8
		9 Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	3
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	3241
		1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	400
		2 Reagen Zn TB	Kit	250
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3 Masker bedah dan Masker N95	Paket	571
		4 Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	2.400
		5 Katrid tes cepat molekuler	Tes	3.622



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	700
		7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	185
		8	Tuberkulin	Vial	150
		9	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	23
		10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	215
		11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	29
		12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25
		13	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	30
		14	Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang	0
		15	Kader Kesehatan	Orang	1.863
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	2.155
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	24
		2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	2.570
		3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1.500
		4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	2.155
		5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	23
		6	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385
		7	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248
		8	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	30
		9	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	25
		10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	20

4.2.3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi capaian SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS UTAMA		92.77	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1.221	1.042	85,34
		1 Vaksin <i>Tetanus Difteri</i> (Td)	Ampul	122	83	68,03
		2 Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	219.780	299.160	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		3 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket	1.221	1.622	100
		4 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	1.221	1.622	100
		5 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	1.221	1.622	100
		6 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	183	243	100
		7 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: <i>Skrining triple</i> eliminasi dengan tes cepat <i>Hepatitis B</i> dan <i>Sifilis</i> dan HIV	Paket	1.221	1.622	100
		8 Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	1.221	1.622	100
		9 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1.221	1.622	100
		10 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	163	163	100
		11 Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	82	82	100
		12 Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	23	23	100
		13 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385	385	100
		14 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248	248	100
		15 Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	25	25	100
		16 Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang	34	34	100
		17 Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	1.221	1.042	85,34
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1681	1.573	93,58
		1 Formulir partograf	Formulir	1681	1.573	93,58
		2 Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	1681	1.573	93,58
		3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila	Buku	1681	1.573	93,58



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		belum dapat pada masa kehamilan)				
		4 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	163	163	100
		5 Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	23	23	100
		6 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385	385	100
		7 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248	248	100
		8 Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	25	25	100
		9 Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang	34	34	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1681	1.554	92,44
		1 Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Vaksin	1681	1.554	92,44
		2 Vitamin K1 Injeksi	Ampul	1681	1.429	85,01
		3 Salep/tetes mata antibiotik	Orang	1681	1.554	92,44
		4 Formulir bayi baru lahir	Formulir	1681	1.554	92,44
		5 Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	5.043	4.662	92,44
		6 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1681	1.681	100
		7 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	163	163	100
		8 Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	23	23	100
		9 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385	385	100
		10 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248	248	100
		11 Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	100
		12 Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	14	14	100
		13 Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34	34	100
		14 Kader Kesehatan	Orang	1.863	1.863	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	8.998	7.869	87,45
		1 Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	8.998	7.869	87,45
		2 Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	8.998	7.869	87,45



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	8.998	7.935	88,19
		4 Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	1.683	1.388	82,47
		5 Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	6.705	6.362	94,88
		6 Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2.318	1.527	65,88
		7 Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	3.352	6.213	100
		8 Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2.351	3.066	100
		9 Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	3.114	5.925	100
		10 Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	2.175	1.595	73,33
		11 Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin	2.501	1.771	70,81
		12 Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin	2.175	1.689	77,66
		13 Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	24.195	4.200	17,36
		14 Peralatan Anafilaktik	Paket	695	11	1,58
		15 Formula terapi gizi buruk	Paket	700	510	72,86
		16 Tenaga medis: Dokter	Orang	23	23	100
		17 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385	385	100
		18 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248	248	100
		19 Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34	34	100
		20 Guru PAUD	Orang	264	264	100
		21 Kader kesehatan	Orang	1.863	1.863	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	12.607	14.566	100
		1 Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	1.099	1.099	100
		2 Form pencatatan/buku pemantauan Kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	1.105	1.105	100
		3 Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	3.643	3.643	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		4 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)	Formulir	3.172	3.172	100
		5 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	1.826	1.826	100
		6 Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	105.732	105.732	100
		7 Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	24	24	100
		8 Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	2.788	788	100
		9 Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	329	329	100
		10 Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	1.275	275	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		11 Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang	23	23	100
		12 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385	385	100
		13 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248	248	100
		14 Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34	34	100
		15 Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	100
		16 Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	100
		17 Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang	106	106	100
		18 Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	1.863	1.863	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	21.072	23.198	100
		1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	163	163	100
		2 Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	329	329	100
		3 Alat: Tensimeter	Unit	163	163	100
		4 Alat: Glukometer	Unit	163	163	100
		5 Alat: Alat pemeriksa Hb	Unit	12	12	100
		6 Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	5.013	1.861	37,12
		7 Alat: KIT IVA Tes	Unit	3.863	1.154	29,87
		8 Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	200	200	100
		9 Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	3	3	100
		10 Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	15.728	15.061	95,76
		11 Alat Pelayanan KB	Unit	626	626	66,67
		a. Set pemasangan dan pencabutan Alat	Unit	126	126	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)				
		b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	500	500	100
		c. Vasektomi set	Unit	0	0	0
		12 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	24	24	100
		13 Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	65	37	56,92
		14 Tenaga medis: Dokter	Orang	23	23	100
		15 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385	385	100
		16 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248	248	100
		17 Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34	34	100
		18 Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	100
		19 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1.863	1.863	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	17.166	16.744	97,54
		1 Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	329	329	100
		2 Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	163	163	100
		3 Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	163	163	100
		4 Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	17.166	13.483	78,54
		5 Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	17.166	13.483	78,54
		6 Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	17.166	13.483	78,54
		7 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	329	329	100
		8 Tenaga medis: Dokter	Orang	23	23	100
		9 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385	385	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		10 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248	248	100
		11 Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34	34	100
		12 Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	100
		13 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1.863	1.863	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	3.988	2.375	59,55
		1 Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	12	12	100
		2 Obat Hipertensi	Paket	67.798	2.375	3,50
		3 Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	58	58	100
		4 Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	247	247	100
		5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	13	13	100
		6 Tenaga medis: Dokter	Orang	23	23	100
		7 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385	385	100
		8 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248	248	100
		9 Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34	34	100
		10 Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	14	14	100
		11 Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	100
		12 Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1.497	2.045	100
		1 Obat Diabetes Melitus	Paket	47.000	2.045	4,35
		2 Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	47	47	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	3.894	2.045	100
		4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	151	151	100
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman	12	12	100
		6	Tenaga medis: Dokter	Orang	23	23	100
		7	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385	385	100
		8	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248	248	100
		9	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	100
		10	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	100
		11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	34	34	100
		12	Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	30	30	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	236	225	95,34
		1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	12	12	100
		2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/ medikasi)	Paket	49	48	97,96



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		3 Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	1.079	225	20,85
		4 Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi Kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	144	144	100
		5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	12	12	100
		6 Tenaga medis: Dokter	Orang	23	23	100
		7 Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	12	12	100
		8 Tenaga profesional lainnya	Orang	8	8	100
		9 Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	3	3	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	3241	4.124	100
		1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	400	400	100
		2 Reagen Zn TB	Kit	250	250	100
		3 Masker bedah dan Masker N95	Paket	571	571	100
		4 Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	2.400	2.400	100
		5 Katrid tes cepat molekuler	Tes	3.622	3.622	100
		6 Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	700	700	100
		7 Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	185	185	100
		8 Tuberkulin	Vial	150	150	100
		9 Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	23	23	100
		10 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	215	215	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		11 Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	29	29	100
		12 Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	100
		13 Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	30	30	100
		14 Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang	0	5	0
		15 Kader Kesehatan	Orang	1.863	1.863	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2.155	2.318	100
		1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	24	24	100
		2 Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	2.570	2.318	90,19
		3 Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1.500	1.500	100
		4 Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	2.155	2.318	100
		5 Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	23	23	100
		6 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	385	385	100
		7 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	248	248	100
		8 Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	30	30	100
		9 Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	25	25	100
		10 Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	20	20	100



4.2.4. Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung capaian SPM ini adalah sebesar Rp.2.992.732.261,00 dengan realisasi Rp.2.538.253.535,00 atau 84,81%.

4.2.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM ini adalah sebagai berikut.

Personil Pelaksana Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	DUKUNGAN PERSONIL
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	13 PNS
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	13 PNS
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	13 dan 1863 Kader
4	Pelayanan kesehatan balita	13 dan 1863 Kader
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	13 dan 1863 Kader
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	13 dan 1863 Kader
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	13 dan 1863 Kader
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	9 PNS dan 4 PPPK
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	9 PNS dan 4 PPPK
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	5 PNS dan 3 PPPK
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	13 dan 1863 Kader
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	13 PNS
NO	JENIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	JUMLAH
1	Dokter Umum	21
2	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	2
3	Ahli Tenaga Laboratorium Medik (ATLM)	30
4	Dokter Gigi	2
5	Perawat	248
6	Bidan	385
7	Tenaga Kefarmasian	25
8	Tenaga Gizi	34
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	25
10	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	14
11	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dibidang kesehatan jiwa	12
12	Tenaga Analis Teknik Laboratorium Medik	30
13	Tenaga lain yang terlatih dibidang kesehatan jiwa	3



NO	JENIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	JUMLAH
14	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih);	12
15	Tenaga Profesional lainnya	8
16	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	3
17	Kader Kesehatan	1.863
Jumlah		2.717

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
Pengumpulan Data		
1	Data tidak akurat, tidak update, atau tidak tersedia hal ini disebabkan karena masih banyak data yang tidak terinput di Aplikasi ASIK (Hipertensi dan Diabetes Melitus) dan Data ODGJ (SIMKESWA).	Memberi perhatian khusus kepada masing-masing pengelola untuk mengoptimalkan digitalisasi segala bentuk pelaporan berdasarkan aplikasi yang sudah disiapkan pada masing-masing pengelola.
Perhitungan Kebutuhan		
1	Keterbatasan SDM dalam menganalisis/ menghitung data dan masih terjadi kesenjangan (GAP) yang cukup jauh antara target dan capaian di lapangan. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman terhadap pedoman teknis Standar Pelayanan Minimal.	Pelatihan intensif bagi Tim SPM di tingkat Daerah, Dinas maupun Puskesmas mengenai teknik penghitungan dan analisis kebutuhan baik kebutuhan barang maupun kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Perencanaan		
1	Perencanaan dan anggaran untuk masing-masing indikator sudah dalam sub kegiatan masing - masing pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan (Renstra dan Renja)	-
Pelaksanaan		
1	Keterbatasan sarana/prasarana, dan kendala geografis.	Optimalisasi anggaran, perbaikan manajemen operasional, dan pemanfaatan teknologi/kerja sama lintas sektor.
2	Pelaporan sering terlambat, tidak sesuai format (link) yang dibuat oleh Kemeterian Kesehatan serta lemahnya data dukung yang mendukung validitas data yang dilaporkan	Membentuk Sekretariat Bersama/ Tim SPM, menggunakan aplikasi pelaporan yang terintegrasi
3	Evaluasi perencanaan dan pencapaian SPM yang masih rendah	Evaluasi berkala (bulanan/triwulanan).



4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	4.420
		Jaringan Perpipaan		
		KUANTITAS SPAM		
		1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1.105
		KUALITAS SPAM		
		2 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	1.105
		Bukan Jaringan Perpipaan		
		KUANTITAS SPAM		
		1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0
		KUALITAS SPAM		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1.276
		1 SPALD Kabupaten/Kota		
		KUANTITAS SPALD		
		Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah	Rumah Tangga	319



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik		
		KUALITAS SPALD		
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)		
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/KABUPATEN	Rumah Tangga	0
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)		
		a. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perKABUPATENan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/KABUPATEN	Rumah Tangga	0
		b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0

4.3.3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi capaian SPM Urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS UTAMA		95	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	4.420	4.420	100
		Jaringan Perpipaaan				
		KUANTITAS SPAM				
		1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan	Rumah Tangga	1.105	1.105	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)				
		KUALITAS SPAM				
		2 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	1.105	1.105	100
		Bukan Jaringan Perpipaan				
		KUANTITAS SPAM				
		1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	100
		KUALITAS SPAM				
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	2 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	100
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1.276	1.276	100
		1 SPALD Kabupaten/Kota				
		KUANTITAS SPALD				
		Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	319	319	100
		KUALITAS SPALD				
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)				
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang	Rumah Tangga	0	0	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		tersambung ke SPALD-T Kabupaten/KABUPATEN				
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)				
		a. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perKABUPATENan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/KABUPATEN	Rumah Tangga	0	0	100
		b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	100

4.3.4. Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung capaian SPM ini adalah sebesar Rp.13.737.335.320,00 dengan realisasi Rp.12.732.512.804,00 atau 92,69%.

4.3.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Personil Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	DUKUNGAN PERSONIL
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan	16 PNS dan 13 PPPK



2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik.	16 PNS, 13 PPPK dan 10 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
---	--	--

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
Pengumpulan Data		
1	Pengumpulan data belum mencakup sampai pada nama kepala rumah tangga dan NIK juga nama anggota keluarga atau rumah tangga MBR atau bukan MBR (hanya sampai pada jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga);	Melakukan pengumpulan data dari desa ke desa BNBA (<i>by name by address</i>);
2	Air minum dan sanitasi air limbah domestik yang menjadi SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sebelumnya juga dikelola oleh Dinas Perumahan sehingga data-data yang ada belum terupdate dengan baik.	Melakukan pendataan ulang terhadap 144 desa dan 7 kelurahan untuk mendapatkan kondisi pelayanan air minum dan air limbah domestik sesuai kondisi existing. Agar dalam perencanaan pembangunan harus di prioritaskan bagi orang yang benar-benar membutuhkan.
Perhitungan Kebutuhan		
1	Tingkat kesulitan masyarakat yang mengakses air non perpipaan cenderung kurang dari standar 60 liter/orang/hari karena harus mengambil dari sumur terlindung atau mata air terlindung dengan jarak yang cukup jauh, oleh karena permukiman diatas bukit dan sumber air dibawah lembah;	Akan diupayakan opsi sumur bor dan dengan menggunakan mesin pompa untuk membawa air ke daerah layanan dan mencari sumber – sumber air diluar desa untuk dialirkan ke desa yang kesulitan air;
2	Tingkat kepadatan penduduk desa yang tinggi (> 25 jiwa/hektar) maka masyarakat wajib mengakses sanitasi aman seperti wilayah perkotaan, oleh karena itu butuh biaya yang besar untuk mencapai target SPM.	Butuh kolaborasi Dinas PUPR sebagai dinas teknis yang dapat mengalokasikan anggaran baik DAK maupun DAU tetapi juga harus didukung oleh masing-masing desa dengan sumber anggaran yang lain seperti dana desa dan dukungan LSM yang bergerak di bidang penyehatan lingkungan untuk mempercepat target 100 % SPM.
Perencanaan		
1	Belum semua stake holder mempunyai visi yang sama akan pentingnya SPM (butuh edukasi yang masif pada setiap kesempatan dari berbagai elemen pembangunan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam mencapai target nasional pelayanan air minum dan sanitasi air limbah domestik);	Melakukan sosialisasi dari semua pihak antara lain pemerintah, LSM dan tokoh masyarakat;
2	Gep layanan air minum layak masih tinggi yaitu 16,80% sementara tren peningkatan layanan setiap tahun lebih kurang 3 % kondisi yang sama juga terjadi	Adanya intervensi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	pada sanitasi air limbah domestik yang gepnya masih lebih tinggi;	dan Penataan Ruang harus lebih memihak kepada pencapaian SPM pada urusan Pekerjaan Umum.
3	Butuh penanganan kolektif dari berbagai sumber anggaran dan tidak bisa hanya mengandalkan sumber anggaran DAU dan DAK tetapi Dana Desa atau CSR jika memungkinkan diprioritaskan untuk SPM.	Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemerintah desa bersama masyarakat akan pemenuhan SPM air minum dan sanitasi merupakan prioritas kebutuhan sehari - hari sehingga perlu intervensi anggaran melalui dana desa.
Pelaksanaan		
1	Tahun 2025 Dinas PUPR mengalokasikan anggaran pembangunan tangki septik sebanyak 12 desa sasaran. Dengan rincian 10 desa yang bersumber dari dana DAK dengan jumlah 25 unit untuk masing – masing desa dan 2 desa yang bersumber dari dana DID dengan jumlah 69 unit sebagai contoh peningkatan akses dasar menjadi akses layak sesuai standar SPM. Dengan harapan jika masih ada kesenjangan layanan pada masyarakat maka dialokasikan pembangunan menggunakan sumber anggaran yang lain di desa, namun hal ini tidak berjalan sesuai harapan untuk percepatan akses 100 % layanan sanitasi air limbah domestik;	Prinsip dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah stimulan. Oleh karena itu butuh dukungan sumber anggaran yang lain untuk mempercepat akses sanitasi 100% layak dan target 30% akses aman air limbah domestik sesuai RPJMN 2025-2029.
2	Untuk desa-desa/kecamatan yang tidak ada sumber air atau yang memiliki sumber air permukaan tetapi topografi permukiman diatas bukit sedangkan mata air jauh dibawah lembah butuh penanganan khusus dengan biaya yang besar.	Melakukan pemetaan agar desa – desa yang sudah mengakses air minum perpipaan namun belum semuanya terlayani sambungan rumah maka dialokasikan pengembangan sambungan rumah sampai 100% menggunakan dana desa sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkonsentrasi pada desa-desa yang belum mengakses air minum menggunakan jaringan perpipaan karena membutuhkan anggaran yang besar.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten/ kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.



4.4.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2
		Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat		
		1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	2
		2 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0
		3 Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0
		4 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0
		Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)		
		1 Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Form Tahapan	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	0
		Ada Relokasi Program Pemerintah		
		1 Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan		
		a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	0
		b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah	0
		c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	0
		2 Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	0
		Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah		
		Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Form Tahapan	-



4.4.3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PARIPURNA			100
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2	2	100
		Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat				
		1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	2	2	100
		2 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	100
		3 Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	100
		4 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	100
		Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)				
		1 Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Form Tahapan	-	-	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	0	0	100
		Ada Relokasi Program Pemerintah				
		1 Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan				
		a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang	Unit Rumah	0	0	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Daerah Kabupaten/Kota	diatur dalam Rencana Aksi;				
		b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah	0	0	100
		c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	0	0	100
		2 Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	0	0	100
		Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah				
		Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Form Tahapan	-	-	-

4.4.4. Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung capaian SPM ini adalah sebesar Rp.131.978.281,00 dengan realisasi Rp.131.978.281,00 atau 100%.

4.4.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Personil Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	DUKUNGAN PERSONIL
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	8 PNS, 1 PPPK dan 2 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
Pengumpulan Data		
1	SK Bencana yang di tandatangi Kepala Daerah yang belum ditetapkan saat terjadi Bencana mempengaruhi kecepatan dalam penanganan SPM Perumahan Rakyat	Kordinasi lintas sektor demi mempercepat penerbitan SK terkait
2	SK Bencana yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat dalam penanganannya hanya dibatasi 3 tahun untuk diselesaikan menyebabkan banyak Korban Bencana kejadian tahun-tahun sebelumnya yang belum tertangani	Pemerintah Daerah memperbarui Tahun Surat Keputusan Bencana dan/atau Korban Bencana kejadian tahun-tahun sebelumnya yang belum tertangani tetap ditangani melalui program kegiatan lain yang bukan termasuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar
Perhitungan Kebutuhan		
1	Minimnya Pemahaman tentang SPM serta Pelaporan SPM di SKPD terkait	Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Pusat mengadakan pelatihan dan sosialisasi kegiatan berkaitan dengan SPM
Perencanaan		
1	Keterbatasan Anggaran Daerah serta minimnya alokasi Dana untuk kegiatan dan program terkait SPM	Pemerintah Daerah memperhatikan Anggaran Khususnya menyangkut Kegiatan –Kegiatan yang berkaitan dengan Penerapan Layanan Dasar SPM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengampu SPM
Pelaksanaan		
1	Anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan SPM masih tidak mencukupi dengan kebutuhan penangan sesuai SK Bencana sehingga Jumlah penanganan tiap tahunnya relatif kecil	Pemerintah Daerah memperhatikan anggaran yang dialokasikan untuk dapat mencakup kebutuhan penanganan sesuai dengan SK Bencana.
2	Belum ada regulasi struktur tim yang serius dalam menangani percepatan Pemenuhan SPM di Daerah maupun SKPD terkait	Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan mengenai Tim Percepatan SPM yang mencakup sampai dengan SKPD Pengampu urusan terkait



4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan informasi rawan bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Target Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025**

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	13.053
		1 Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	43
		2 Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	8
		3 Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah	Orang	1.125



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)		
		4 Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1
		5 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	Orang	1
		6 Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	Orang	1
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	20.001
		1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)		-
		Tidak ada		
		Ada: Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)		
		a.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	-
		b.Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	-
		Ada: Baru dibuat Tahun 2025		
		a.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	-
		b.Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik	Dokumen	-
		c.Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Dokumen	-
		d.Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-
		e.Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-
		2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana		
		a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	144
		b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	144
		c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15
		d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	344
		2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia		
		a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	4
		b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	20
		c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	15
		d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15
		e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5
		3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik		
		a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	1.332
		b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	1.332
		c. Tersedianya Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan)	Orang	7
		d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-
		e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	33
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	20.001
		1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		
		Tidak Ada		
		Ada: Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)		
		a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	Dokumen	-
		b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	Dokumen	-
		Ada: Baru dibuat Tahun 2025		
		a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	Dokumen	-



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen	-
		c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	Dokumen	-
		d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-
		e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-
		2 Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		
		a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	2
		b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Dokumen	4
		c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	60
		d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	110
		3 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi		
		1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur		
		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5
		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	8
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	144
		d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	27
		e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10
		f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	344
		2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara		
		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5
		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	12
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	144
		d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	20
		e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5
		4 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
		1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)		



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	15
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1
		c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25
		2) Gladi Lapangan		
		a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	25
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3
		c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	200
		5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
		1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
		a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	365
		b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	7
		c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1
		d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8
		e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8
		2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana		
		a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	7
		b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	7
		c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	6
		d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	5
		3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast		
		a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1
		b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		4)Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat		
		a.Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3
		b.Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1
		6 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
		a.Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5
		b.Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5
		c.Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5
		d.Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3
		4		
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	20.001
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)		
		Kejadian Bencana		
		1 Respon Cepat Darurat Bencana		
		a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	10
		b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	144
		2 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		
		a.Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1
		b.Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3
		c.Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1.329
		d.Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	10
		e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	10
		f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5
		h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	10
		1 Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	11
		2 Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	Dokumen	1
		Sarana prasarana pemadam kebakaran yang tersedia s.d tahun lalu (hanya sebagai informasi)	Unit	45
		3 Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	Unit	6
		4 Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	25
		5 Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	5
		6 Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	8

4.5.3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Realiasi Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2025**

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS UTAMA			97,41
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	13.053	13.053	100
		1 Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	43	43	100
		2 Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	8	8	100
		3 Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan	Orang	1.125	1.125	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)				
		4 Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	100
		5 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	Orang	1	1	100
		6 Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	Orang	1	1	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	20.001	20.001	100
		1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)		-	-	-
		Tidak ada			-	-
		Ada: Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)			-	-
		a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	-	-	-
		b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	-	-	-
		Ada: Baru dibuat Tahun 2025				



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	-	-	-
		b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik	Dokumen	-	-	-
		c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Dokumen	-	-	-
		d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-	-	-
		e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-	-	-
		2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
		1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				
		a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	144	144	100
		b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	144	144	100
		c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	100
		d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	344	344	100
		2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				
		a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	4	4	100
		b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	20	20	100
		c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	15	15	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		d.Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	100
		e.Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100
		3)Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				
		a.Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	1.332	1.332	100
		b.Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	1.332	1.332	100
		c.Tersedianya Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan)	Orang	7	7	100
		d.Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	100
		e.Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	33	33	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	20.001	20.001	100
		1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
		Tidak Ada				
		Ada: Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)				
		a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	Dokumen	-	-	-
		b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	Dokumen	-	-	-
		Ada: Baru dibuat Tahun 2025				
		a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	Dokumen	-	-	-
		b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen	-	-	-
		c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	Dokumen	-	-	-



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-	-	-
		e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-	-	-
		2 Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)				
		a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	2	2	100
		b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Dokumen	4	4	100
		c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	60	60	100
		d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	110	110	100
		3 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi				
		1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				
		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100
		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	8	8	100
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	144	144	100
		d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	27	27	100
		e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	100
		f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	344	344	100
		2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100
		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	12	12	100
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	144	144	100
		d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	20	20	100
		e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100
		4 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
		1) Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)				
		a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	15	15	100
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100
		c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25	100
		2) Gladi Lapang				
		a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	25	25	100
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3	3	100
		c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	200	200	100
		5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
		a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	365	365	100
		b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	7	7	100
		c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1	1	100
		d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8	8	100
		e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8	8	100
		2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				
		a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	7	7	100
		b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	7	7	100
		c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	6	6	100
		d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	5	5	100
		3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				
		a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100
		b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3	3	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		4)Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat				
		a.Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3	3	100
		b.Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100
		6 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
		a.Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100
		b.Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100
		c.Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100
		d.Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3	3	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	20.001	20.001	100
		Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)				
		Kejadian Bencana				
		1 Respon Cepat Darurat Bencana				
		a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	10	10	100
		b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	144	144	100
		2 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				
		a.Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3	3	100
		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1.329	1.329	100
		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	10	10	100
		e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	10	10	100
		f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100
		g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100
		h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	100
		Status Tanggap Darurat				
		1 Respon Cepat Darurat Bencana				
		a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	15	15	100
		b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	5	5	100
		c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	144	144	100
		2 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100
		b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100
		c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100
		d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100
		e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100
		3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				
		a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100
		b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3	3	100
		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1.329	1.329	100
		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	10	10	100
		e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	10	10	100
		f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100
		g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur	Orang	5	5	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)				
		h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	100
		Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM				
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	10	11	100
		1 Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	11	11	100
		2 Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	Dokumen	1	1	100
		Sarana prasarana pemadam kebakaran yang tersedia s.d tahun lalu (hanya sebagai informasi)	Unit	45	-	-
		3 Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	Unit	6	6	100
		4 Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah	Orang	25	38	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)				
		5 Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	5	5	100
		6 Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	8	8	100

4.5.4. Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung capaian SPM ini adalah sebesar Rp.1.108.416.843,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.080.146.551,00 atau 97,45%

4.5.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM ini adalah sebagai berikut.

Personil Pelaksana Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	DUKUNGAN PERSONIL
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	129 PNS dan 49 PPPK
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	27 PNS, 6 PPPK dan 144 TRC
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	27 PNS, 6 PPPK dan 144 TRC
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	27 PNS, 6 PPPK dan 144 TRC
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	32 PNS dan 6 PPPK

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
Pengumpulan Data		
1	Kesulitan mendapatkan data riil jumlah warga terdampak gangguan Trantibum akibat data	Menempatkan personil di kelurahan agar lebih mudah mendapatkan data jumlah warga



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	kependudukan yang tidak diperbarui secara berkala, sehingga penghitungan cakupan layanan menjadi tidak akurat	
2	Petugas Damkar lebih banyak fokus pada teknis lapangan, sehingga pendataan dianggap tugas sekunder dan sering kali tidak terisi maksimal.	Menugaskan staf khusus untuk melakukan dokumentasi serta melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan
3	Untuk Sub Urusan Kebencanaan terkait data penduduk lebih kepada <i>by name by address</i> dimana data yang diberikan dari kecamatan atau desa yang berlokasi atau wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana, data penduduk yang diberikan kadang tidak lengkap atau salah satu indikator kelengkapan dokumen tidak ada, seperti NIK dan/atau KK	Koordinasi lintas sektor dalam melakukan pendataan. Pihak aparat Desa lebih memperhatikan data kelengkapan penduduk atau warga yang berada di wilayah tersebut
Perhitungan Kebutuhan		
1	Kesulitan dalam menghitung jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum karena cakupan kegiatan yang luas (patroli, penertiban, penanganan aduan)	Untuk kegiatan selanjutnya akan lebih dimaksimalkan lagi dalam mendata jumlah warga di lokasi penertiban sehingga perhitungan kebutuhan lebih maksimal
2	Jumlah mobil pemadam kebakaran (kapasitas 3000-5000 liter) tidak sebanding dengan luas wilayah cakupan, menyebabkan keterlambatan <i>response time</i>	Mengajukan proposal permohonan penambahan mobil pemadam kebakaran agar lebih efisien dalam penanganan
3	Untuk Sub Urusan Bencana lebih kepada masalah anggaran karena wilayah kabupaten lembata merupakan daerah yang berdampak bencana dimana 9 Kecamatan masuk dalam zona daerah rawan bencana	Menganjurkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan tambahan anggaran agar dari 151.571 warga / penduduk dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lembata yang merupakan daerah atau kecamatan yang berada di kawasan rawan bencana bisa mendapatkan edukasi, informasi, dan pelatihan terkait bencana alam
4	Dokumen KRB dan Dokumen RPB merupakan dokumen yang penting dalam bidang kebencanaan, BPBD Kab. Lembata pernah memiliki Dokumen tersebut tapi masa keaktifan dokumen tersebut sudah berakhir dan untuk mengaktifkan kembali atau membuat baru perlu adanya anggaran,	BPBD mengaktifkan kembali dokumen KRB dan Dokumen RPB dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Perencanaan		
1	Perencanaan sering kali tidak didasarkan pada data akurat mengenai jumlah warga negara yang berhak menerima pelayanan, lokasi, atau aset yang perlu dilindungi. Hal ini	Lebih riil dalam merencanakan kegiatan penertiban dalam kaitannya dengan penetapan lokasi penertiban

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	mengakibatkan target "warga negara yang memperoleh layanan" tidak tercapai.	
2	Perencanaan lokasi pos damkar sering belum mencakup seluruh kecamatan/wilayah rawan, menyebabkan respon time (>15 menit) sulit tercapai	Mengajukan anggaran untuk membangun pos damkar di wilayah kecamatan
3	Anggaran Badan Penanggulangan Bencana yang tidak memadai sehingga Standar Pelayanan Minimal masih banyak yang belum dilaksanakan dan dipenuhi, Penanggulangan Bencana belum terlaksana secara terencana, terkoordinir, terpadu, serta menyeluruh tidak tuntas dan penanggulangan bencana dan mitigasi bencana berbasis masyarakat belum dilakukan secara maksimal.	Menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan
Pelaksanaan		
1	Kesulitan dalam mendata warga negara yang berhak menerima layanan SPM secara akurat (data penerima layanan tidak update)	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data warga sehingga selalu terupdate
2	Kurangnya pos pemadam kebakaran, terutama di wilayah pelosok atau kecamatan terpencil, menyebabkan waktu tempuh ke lokasi kebakaran melebihi standar.	Berusaha untuk berkoordinasi dengan relawan kebakaran di masing-masing desa agar lebih aktif dalam membantu penanganan kebakaran
3	Dalam melaksanakan Kegiatan SPM Sub Urusan Bencana banyak kendala yang di hadapi mulai dari, Pengambilan dan Pengumpulan Data, Pelaksanaan Kegiatan, dan juga daerah yang di jangkau contoh seperti infrastruktur dan kendaraan operasional yang terbatas, hal seperti ini merupakan faktor utama dalam urusan kebencanaan untuk itu diharapkan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih melihat lagi faktor tersebut.	Diharapkan Pemerintah Pusat dan Daerah memperhatikan masalah ini

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Bencana adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;



4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Urusan Sosial di Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	222
		1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	100
		2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	100
		3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	100
		4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	140
		5 Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	50
		6 Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0
		7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan	Orang	222



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial		
		8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	222
		9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0
		10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	222
		11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0
		12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0
		13 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	84
		1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	84
		2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	0



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	0
		4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5
		5 Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0
		6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/ gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	84
		7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	84
		8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0
		9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	84
		10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0
		11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	5
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	2.751
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	196
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	0
		3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	66
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	0
		5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	0
		6	Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/ gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	2.751



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	2.751
		9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0
		10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2751
		11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0
		12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0
		13 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	0
		1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0
		2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	0
		3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	0
		4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang	Orang	0



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)		
		5 Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0
		6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	0
		7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	0
		8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	0
		9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0
		10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0
		11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0
		12 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	5
		Ya Terjadi Bencana		
		1 Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan	Orang	5



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
	Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)		
		2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	5
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	0
		5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	0
		Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)			
		1	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%		
		2	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Form	-

4.6.3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi capaian SPM Urusan Sosial di Kabupaten Lembata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
KATEGORI PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PRATAMA			75,58
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	222	222	100
		1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	100	100	100
		2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	100	100	100
		3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	100	100	100
		4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami	Orang	140	140	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		5	Orang	50	50	100
		6	Orang	0	0	-
		7	Orang	222	222	100
		8	Orang	222	222	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
		9 Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	-
		10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	222	222	100
		11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	-
		12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	-
		13 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	-
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	84	84	100
		1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar	Orang	84	84	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
		2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	0	0	-
		3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	0	0	-
		4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5	5	100
		5 Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	-



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/ gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	84	84	100
		7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	84	84	100
		8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	-
		9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	84	84	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	-
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	-
		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	5	5	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani		Orang	2.751	2.751	100
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	196	2.751	100
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan	Orang	0	0	-



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		3				
		3	Orang	66	66	100
		4	Orang	0	0	100
		5	Orang	0	0	100
		6	Orang	0	0	100
		7	Orang	2.751	2.751	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial				
		8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	2.751	2.751	100
		9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	100
		10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2751	2751	100
		11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	100



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	100
		13 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	0	0	-
		1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0	0	-
		2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	0	0	-
		3 Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat	Orang	0	0	-



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		4	Orang	0	0	-
		5	Orang	0	0	-
		6	Orang	0	0	-
		7	Orang	0	0	-



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
		8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	-
		9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0	0	-
		10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	-
		11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	-
		12 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	-



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	5	5	100
		Ya Terjadi Bencana				
		1 Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	5	5	100
		2 Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100
		3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	5	5	100
		4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	0	0	-
		5 Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial	Orang	0	0	-



NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)				
		Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)				
		1 Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6, 6B7, 6C3) - 100%				
		2 Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Form	-	-	-

4.6.4. Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung capaian SPM ini adalah sebesar Rp.231.501.520,00 dengan realisasi sebesar Rp.231.501.520,00 atau 100%.

4.6.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM ini adalah sebagai berikut:

Personil Pelaksana Urusan Sosial Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	DUKUNGAN PERSONIL
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;	5 PNS dan 1 PPPK
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;	5 PNS dan 2 PPPK
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;	5 PNS dan 2 PPPK
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.	5 PNS dan 23 Tagana

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
Pengumpulan Data		
1	Data sasaran SPM Dinas Sosial (fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, korban bencana dan korban tindak kekerasan) belum sepenuhnya akurat dan mutakhir.	Perlu dilakukan verifikasi dan validasi data agar data yang digunakan benar-benar akurat dan mutakhir.
2	Perbedaan data antara sumber pusat (DTSEN) dengan hasil pendataan daerah.	Sinkronisasi data antara DTSEN hasil pendataan daerah
3	Validasi dan verifikasi data belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh.	Secara berkala dilakukan verifikasi dan validasi data.
4	Keterbatasan SDM pendata dan operator sistem informasi kesejahteraan sosial.	Peningkatan kapasitas SDM pendata dan operator melalui bimbingan teknis.
5	Pemanfaatan data desa/kelurahan belum optimal.	Optimalisasi data yang ada di desa/kelurahan
Perhitungan Kebutuhan		
1	Belum tersedianya perhitungan kebutuhan SPM berbasis jumlah sasaran riil dan standar teknis.	Sinkronisasi Kebutuhan SPM dengan sasaran riil dan standar teknis yang ada.
2	Perhitungan kebutuhan anggaran belum mengacu pada costing SPM yang jelas.	Penyesuaian anggaran yang tersedia dengan costing SPM
3	Keterbatasan pemahaman teknis petugas terhadap metode perhitungan capaian SPM.	Peningkatan kapasitas petugas teknis melalui bimbingan teknis.
4	Perubahan data sasaran berdampak pada ketidaktepatan perhitungan kebutuhan layanan.	Dilakukan validasi data secara berkala agar tidak mempengaruhi perhitungan kebutuhan layanan.
Perencanaan		
1	Target capaian SPM belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra OPD, RKPD).	Perlu dilakukan sinkronisasi antara target capaian SPM dengan dokumen perencanaan daerah.
2	Perencanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya berbasis hasil pendataan dan perhitungan SPM.	Perencanaan program kedepan harus berbasis hasil pendataan dan perhitungan SPM.
3	Keterbatasan anggaran menyebabkan prioritas pemenuhan SPM belum optimal.	Mendorong semua stekholder untuk memberi atensi anggaran yang cukup dalam pemenuhan SPM
4	Sinkronisasi perencanaan antara Dinas Sosial dengan OPD terkait dan pemerintah desa belum maksimal.	Perlu dilakukan secara berkala.
Pelaksanaan		
1	Pelaksanaan pelayanan SPM belum menjangkau seluruh sasaran akibat keterbatasan anggaran dan SDM.	Mendorong semua stekholder untuk memberi atensi anggaran yang cukup untuk menjangkau sasaran.
2	Sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memenuhi standar pelayanan minimal.	Perlu dukungan sarana dan prasarana



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.	Perlu dilakukan secara berkala agar pelaksanaan SPM optimal.
4	Penanganan pengaduan masyarakat terkait pelayanan sosial belum terintegrasi dengan baik.	Kedepan perlu ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) agar penanganan pengaduan lebih terintegrasi.

4.7. Program dan Kegiatan Pelaksanaan SPM Tahun 2025

4.7.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			2) Pembangunan Ruang Kelas Baru
			3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
			4) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
			5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			6) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			7) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1) Penambahan Unit Sekolah Baru (USB)
			2) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			3) Pembangunan Ruang Kelas Baru
			4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			5) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
			6) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			7) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			8) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			9) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			10) Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			11) Penyelenggaraan Proses bagi Peserta Didik
			12) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Dasar
			13) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			14) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			15) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			16) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			17) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
			18) Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			19) Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			20) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			21) Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Seluruh Pendidikan Untuk pencegahan perundungan Kekerasan dan Intoleransi
			22) Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			23) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			24) Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Seluruh Pendidikan Untuk pencegahan perundungan Kekerasan dan Intoleransi
			25) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			26) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			27) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
			3) Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			4) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			5) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			6) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			7) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			8) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
			9) Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			11) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			12) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			13) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
			14) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			15) Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			16) Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			17) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			18) Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi
			19) Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			20) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			21) Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi
			22) Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			23) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			24) Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

4.7.2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
			6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
			7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
			8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
			11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.7.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

4.7.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
			2) Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
			3) Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
			4) Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada Masyarakat /sukarelawan tanggap bencana



4.7.5. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
			2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
			3) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
			4) Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			5) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
			6) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
			7) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
			8) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	1) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			2) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			3) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
			4) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			5) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
			2) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
2	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Kab/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zooniosis Prioritas



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Evakuasi Korban Bencana	
3	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat

4.7.6. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1) Penyediaan Permakanan
			2) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun sebagai media untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lembata. Laporan ini juga menjadi wujud tanggung jawab dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

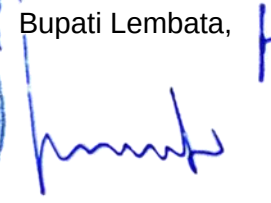
Secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup pelaksanaan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan, yang merupakan konsekuensi logis dari penerapan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah kemudian mengonversinya ke dalam kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam pembangunan Kabupaten Lembata. Semua yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan tiga tujuan utama otonomi daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, Kepala Daerah memiliki tugas memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan urusan pemerintahan ini secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan oleh Kepala Daerah, dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan secara berjenjang. Pada akhirnya, Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan ini kepada berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyampaikan LPPD kepada Pemerintah Pusat, yang juga berfungsi sebagai media evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah. Hasil evaluasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.



Demikianlah LPPD Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur. Semoga berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu Leluhur *Leu Auq Lewotana* Lembata selalu menyertai kita semua, dengan limpahan berkat dalam perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lembata.

Lewoleba, 27 Maret 2026
Bupati Lembata, 

P. KANISIUS TUAQ



PEMERINTAHAN KAB. LEMBATA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	835.762.238.964,00	808.828.174.703,73	96,77	857.318.481.537,67
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.155.373.488,00	39.327.712.421,73	100,44	30.486.515.366,67
4.1.01	Pajak Daerah	13.379.409.840,00	11.450.913.505,00	85,58	9.632.455.789,59
4.1.01.06	Pajak Hotel	46.250.000,00	107.364.000,00	232,13	98.485.500,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	41.250.000,00	72.774.000,00	176,42	65.220.500,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	41.250.000,00	72.774.000,00	176,42	65.220.500,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000,00	34.590.000,00	691,80	33.265.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000,00	34.590.000,00	691,80	33.265.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	885.000.000,00	1.455.491.309,00	164,46	1.653.311.049,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	30.000.000,00	24.925.000,00	83,08	26.300.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	30.000.000,00	24.925.000,00	83,08	26.300.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	55.000.000,00	47.875.500,00	87,04	36.850.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	55.000.000,00	47.875.500,00	87,04	36.850.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	800.000.000,00	1.382.690.809,00	172,83	1.590.161.049,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	800.000.000,00	1.382.690.809,00	172,83	1.590.161.049,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.500.000,00	4.040.000,00	161,60	3.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.500.000,00	4.040.000,00	161,60	3.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.500.000,00	4.040.000,00	161,60	3.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	102.038.440,00	169.589.784,00	166,20	185.076.591,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	85.575.000,00	111.240.594,00	129,99	106.742.703,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	85.575.000,00	111.240.594,00	129,99	106.742.703,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	15.463.440,00	56.067.940,00	362,58	76.052.638,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	15.463.440,00	56.067.940,00	362,58	76.052.638,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00	2.281.250,00	228,12	2.281.250,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00	2.281.250,00	228,12	2.281.250,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.376.102.528,00	3.943.059.614,00	90,10	3.922.123.881,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.376.102.528,00	3.943.059.614,00	90,10	3.922.123.881,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.376.102.528,00	3.943.059.614,00	90,10	3.922.123.881,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	5.000.000,00	5.832.000,00	116,64	5.184.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	5.000.000,00	5.832.000,00	116,64	5.184.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	5.000.000,00	5.832.000,00	116,64	5.184.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.407.187.500,00	714.975.719,00	50,80	1.613.131.452,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	625.000.000,00	157.571.831,00	25,21	252.671.348,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	625.000.000,00	157.571.831,00	25,21	252.671.348,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	781.250.000,00	327.773.790,00	41,95	338.060.709,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	781.250.000,00	327.773.790,00	41,95	338.060.709,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	937.500,00	2.029.682,00	216,49	14.853.838,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	937.500,00	2.029.682,00	216,49	14.853.838,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	227.600.416,00	0,00	1.007.545.557,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	227.600.416,00	0,00	1.007.545.557,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.175.000.000,00	1.960.423.977,00	90,13	1.575.863.516,59
4.1.01.15.01	PBBP2	2.175.000.000,00	1.960.423.977,00	90,13	1.575.863.516,59
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.175.000.000,00	1.960.423.977,00	90,13	1.575.863.516,59
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000,00	319.625.165,00	91,32	576.279.800,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	350.000.000,00	319.625.165,00	91,32	576.279.800,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	350.000.000,00	319.625.165,00	91,32	576.279.800,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.077.925.290,00	1.437.071.650,00	69,15	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	2.077.925.290,00	1.437.071.650,00	69,15	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	2.077.925.290,00	1.437.071.650,00	69,15	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.952.406.082,00	1.333.440.287,00	68,29	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	1.952.406.082,00	1.333.440.287,00	68,29	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	1.952.406.082,00	1.333.440.287,00	68,29	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	19.583.068.784,00	21.416.763.807,00	109,36	14.475.227.444,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	18.316.298.000,00	20.308.468.727,00	110,87	13.272.526.153,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	(650.000,00)	0,00	0,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	(650.000,00)	0,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.683.010.000,00	19.856.128.477,00	112,28	12.801.688.653,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.440.970.000,00	1.396.539.942,00	96,91	1.176.320.458,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	16.242.040.000,00	18.459.588.535,00	113,65	11.625.368.195,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	146.600.000,00	126.896.000,00	86,55	121.188.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	146.600.000,00	126.896.000,00	86,55	121.188.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.120.000,00	17.727.000,00	35,36	17.973.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.120.000,00	17.727.000,00	35,36	17.973.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	436.568.000,00	308.367.250,00	70,63	331.676.500,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	109.272.000,00	43.141.500,00	39,48	84.410.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	327.296.000,00	265.225.750,00	81,03	247.266.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.239.662.784,00	1.053.122.070,00	84,95	1.095.607.651,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	398.524.784,00	374.737.670,00	94,03	461.152.637,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	107.648.000,00	112.928.000,00	104,90	121.488.537,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	30.077.920,00	28.059.000,00	93,28	37.248.600,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	11.012.500,00	250.000,00	2,27	8.012.500,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	19.500.000,00	24.185.000,00	124,02	20.866.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	40.536.364,00	36.282.382,00	89,50	108.987.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	158.850.000,00	158.333.288,00	99,67	152.250.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	30.900.000,00	14.700.000,00	47,57	12.300.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	162.000.000,00	145.322.000,00	89,70	70.056.000,00
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	162.000.000,00	145.322.000,00	89,70	70.056.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	420.800.000,00	218.437.800,00	51,91	320.675.302,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	420.800.000,00	218.437.800,00	51,91	320.675.302,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	80.018.000,00	120.513.000,00	150,60	71.915.712,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	80.018.000,00	120.513.000,00	150,60	71.915.712,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	35.000.000,00	0,00	0,00	13.812.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	35.000.000,00	0,00	0,00	13.812.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	133.320.000,00	169.215.600,00	126,92	157.056.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	39.800.000,00	31.000.000,00	77,88	13.396.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	42.390.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	66.020.000,00	110.715.600,00	167,70	101.270.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	10.000.000,00	24.896.000,00	248,96	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	10.000.000,00	24.896.000,00	248,96	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	27.108.000,00	55.173.010,00	203,53	107.093.640,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	27.108.000,00	55.173.010,00	203,53	105.693.640,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	27.108.000,00	55.173.010,00	203,53	105.693.640,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.896.492.897,00	3.896.492.897,00	100,00	2.131.463.061,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.896.492.897,00	3.896.492.897,00	100,00	2.131.463.061,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.896.492.897,00	3.896.492.897,00	100,00	2.131.463.061,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.896.492.897,00	3.896.492.897,00	100,00	2.131.463.061,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.296.401.967,00	2.563.542.212,73	111,63	4.247.369.072,08
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.365.000,00	8.265.000,00	129,85	120.435.500,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.365.000,00	1.365.000,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.365.000,00	1.365.000,00	100,00	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	5.000.000,00	6.900.000,00	138,00	120.435.500,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	5.000.000,00	6.900.000,00	138,00	6.300.000,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00	0,00	114.135.500,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	42.500.000,00	2.800.000,00	6,58	11.750.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	42.500.000,00	2.800.000,00	6,58	11.750.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	42.500.000,00	2.800.000,00	6,58	11.750.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	204.240.000,00	228.280.582,78	111,77	207.588.496,63
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	148.650.000,00	150.576.273,26	101,29	123.484.817,13
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	148.650.000,00	150.576.273,26	101,29	123.484.817,13
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	34.750.000,00	44.260.034,18	127,36	40.170.063,37
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	34.750.000,00	44.260.034,18	127,36	40.170.063,37
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	500.000,00	385.131,14	77,02	477.945,13
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	500.000,00	385.131,14	77,02	477.945,13
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	20.340.000,00	33.059.144,20	162,53	43.455.671,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	20.340.000,00	33.059.144,20	162,53	43.455.671,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	401.560.000,00	479.978.597,00	119,52	1.195.531.523,52
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	401.560.000,00	479.978.597,00	119,52	1.195.531.523,52
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	401.560.000,00	479.978.597,00	119,52	1.195.531.523,52
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	505.871.255,00	630.201.075,47	124,57	1.721.790.699,51
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	10.000.000,00	3.600.000,00	36,00	80.300.367,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	10.000.000,00	3.600.000,00	36,00	80.300.367,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	495.871.255,00	626.601.075,47	126,36	1.641.490.332,51
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	495.871.255,00	626.601.075,47	126,36	1.641.490.332,51
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	390.750.000,00	370.551.224,33	94,83	393.724.744,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	390.750.000,00	370.551.224,33	94,83	393.724.744,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	390.750.000,00	370.551.224,33	94,83	393.724.744,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	68.180.935,00	96.028.972,15	140,84	79.912.624,42
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	68.180.935,00	96.028.972,15	140,84	79.912.624,42
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	68.180.935,00	96.028.972,15	140,84	79.912.624,42
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	21.655,00	0,00	1.376.086,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	21.655,00	0,00	1.376.086,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	21.655,00	0,00	1.376.086,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	5.243.243,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	5.243.243,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	5.243.243,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	676.934.777,00	670.415.106,00	99,03	510.016.155,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	35.265.000,00	36.385.000,00	103,17	257.269.677,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	35.265.000,00	36.385.000,00	103,17	158.146.384,00
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	99.123.293,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	240.727.918,00	390.715.606,00	162,30	99.827.241,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	190.151.274,00	326.644.066,00	171,78	99.827.241,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	5.037.944,00	20.329.388,00	403,52	0,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	43.004.000,00	42.004.000,00	97,67	0,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	2.534.700,00	1.738.152,00	68,57	0,00
4.1.04.15.11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	131.367.500,00	48.450.000,00	36,88	0,00
4.1.04.15.11.0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD	131.367.500,00	48.450.000,00	36,88	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	269.574.359,00	194.864.500,00	72,28	152.621.137,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	269.574.359,00	194.864.500,00	72,28	0,00
4.1.04.15.16.0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	0,00	0,00	152.621.137,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	298.100,00
4.1.04.15.61.0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00	298.100,00
4.1.04.23	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	77.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.23.01	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	77.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.23.01.0001	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	77.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.155.373.488,00	39.327.712.421,73	100,44	30.486.515.366,67
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	787.278.227.619,00	760.738.792.597,00	96,62	820.368.582.963,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.748.987.017,00	743.028.067.811,00	96,65	797.501.327.728,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	651.493.196.728,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	5.705.687.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	449.219.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	2.036.066.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	77.848.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	127.970.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	352.236.900,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	4.122.100,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	2.658.225.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	492.472.730.549,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	393.066.290.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	14.927.154.549,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	33.557.241.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	33.618.404.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	15.903.641.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	69.862.606.968,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	859.472.400,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	6.919.926.565,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	4.581.858.722,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	514.781.250,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	527.650.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	9.800.000.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	5.688.778.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	9.816.065.800,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.401.703.261,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.916.899.000,00
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	4.800.916.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	15.034.555.970,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	83.452.172.211,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	22.017.995.695,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	905.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	32.432.840.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.427.750.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	4.199.747.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	1.546.482.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	0,00	0,00	0,00	307.600.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	0,00	0,00	0,00	6.579.918.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	8.492.048.178,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	3.803.497.738,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	649.293.600,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.994.338.000,00	3.954.526.337,00	79,18	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	2.974.544.000,00	1.806.155.337,00	60,72	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	692.964.000,00	381.545.000,00	55,05	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.119.096.000,00	1.175.307.337,00	55,46	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	80.089.000,00	0,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	162.484.000,00	169.214.000,00	104,14	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	2.019.794.000,00	2.148.371.000,00	106,36	0,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	37.387.000,00	164.812.000,00	440,82	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	12.000,00	1.047.000,00	8.725,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.301.000,00	4.418.000,00	102,72	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.978.094.000,00	1.978.094.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	488.606.135.000,00	481.418.185.041,00	98,52	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	409.310.456.000,00	409.310.456.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	409.310.456.000,00	409.310.456.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	79.295.679.000,00	72.107.729.041,00	90,93	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	24.996.961.000,00	17.809.011.041,00	71,24	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	34.786.016.000,00	34.786.016.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	18.112.702.000,00	18.112.702.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	138.696.444.017,00	134.319.788.477,00	96,84	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	32.644.667.421,00	30.910.664.940,00	94,68	0,00
4.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.784.278.000,00	4.869.427.800,00	84,18	0,00
4.2.01.09.01.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.009.868.421,00	4.009.868.421,00	100,00	0,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	21.204.300.000,00	20.390.264.699,00	96,16	0,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	1.040.181.000,00	1.039.680.900,00	99,95	0,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	242.863.000,00	239.572.030,00	98,64	0,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	234.277.000,00	234.170.600,00	99,95	0,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	128.900.000,00	127.680.490,00	99,05	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	106.051.776.596,00	103.409.123.537,00	97,50	0,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.486.413.000,00	21.405.391.424,00	99,62	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	891.250.000,00	891.250.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.587.300.000,00	1.563.598.000,00	98,50	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	319.100.000,00	290.449.500,00	91,02	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	576.024.000,00	576.024.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.378.557.206,00	9.128.925.706,00	97,33	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.820.911.390,00	9.655.482.606,00	89,22	0,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	49.506.858.000,00	48.786.549.600,00	98,54	0,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	653.000.000,00	334.500.000,00	51,22	0,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	5.339.818.000,00	5.382.332.500,00	100,79	0,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.455.512.000,00	4.357.587.201,00	97,80	0,00
4.2.01.09.02.0040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	287.087.000,00	287.087.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	749.946.000,00	749.946.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	632.296.917.017,00	619.692.499.855,00	98,00	651.493.196.728,00
4.2.01.05	Dana Desa	112.346.928.000,00	99.230.425.956,00	88,32	124.526.039.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	112.346.928.000,00	99.230.425.956,00	88,32	124.526.039.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	112.346.928.000,00	99.230.425.956,00	88,32	124.526.039.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	24.105.142.000,00	24.105.142.000,00	100,00	21.482.092.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	21.482.092.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	21.482.092.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	24.105.142.000,00	24.105.142.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	24.105.142.000,00	24.105.142.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	136.452.070.000,00	123.335.567.956,00	90,38	146.008.131.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.529.240.602,00	17.710.724.786,00	95,58	22.867.255.235,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	18.529.240.602,00	17.710.724.786,00	95,58	22.867.255.235,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.529.240.602,00	17.710.724.786,00	95,58	22.867.255.235,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.458.150.236,00	150.593.927,00	10,32	4.183.304.424,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	435.041.453,00	435.041.453,00	100,00	2.321.381.840,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.316.201.047,00	7.148.474.936,00	113,17	6.734.145.705,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.946.012,00	8.003.807,00	100,72	9.690.926,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.311.901.854,00	9.968.610.663,00	96,67	9.618.732.340,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	18.529.240.602,00	17.710.724.786,00	95,58	22.867.255.235,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	787.278.227.619,00	760.738.792.597,00	96,62	820.368.582.963,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.328.637.857,00	8.761.669.685,00	93,92	6.463.383.208,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.328.637.857,00	8.761.669.685,00	93,92	6.463.383.208,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	904.206.743,00	904.206.743,00	100,00	0,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	904.206.743,00	904.206.743,00	100,00	0,00
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	904.206.743,00	904.206.743,00	100,00	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.424.431.114,00	7.857.462.942,00	93,26	6.463.383.208,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.424.431.114,00	7.857.462.942,00	93,26	6.463.383.208,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.424.431.114,00	7.857.462.942,00	93,26	6.463.383.208,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.328.637.857,00	8.761.669.685,00	93,92	6.463.383.208,00
	JUMLAH PENDAPATAN	835.762.238.964,00	808.828.174.703,73	96,77	857.318.481.537,67
5	BELANJA DAERAH	823.493.539.413,00	785.510.494.976,81	95,38	826.670.685.838,95
5.1	BELANJA OPERASI	601.341.218.913,00	580.215.271.609,81	96,48	570.355.753.999,21
5.1.01	Belanja Pegawai	410.111.816.803,00	398.706.650.196,00	97,21	355.839.140.584,21
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	321.698.258.712,00	314.548.152.414,00	97,77	289.319.638.335,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	247.176.738.964,00	242.294.244.602,00	98,02	222.294.240.481,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	190.516.730.975,00	190.329.738.620,00	99,90	187.934.938.621,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	56.660.007.989,00	51.964.505.982,00	91,71	34.359.301.860,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.717.068.275,00	21.748.664.608,00	95,73	20.545.116.602,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.612.495.215,00	17.611.915.923,00	99,99	17.914.618.841,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.104.573.060,00	4.136.748.685,00	81,04	2.630.497.761,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.406.119.950,00	5.406.119.950,00	100,00	5.610.929.949,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.406.119.950,00	5.406.119.950,00	100,00	5.610.929.949,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.618.601.066,00	14.330.341.338,00	98,02	14.152.411.350,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.314.721.590,00	10.309.621.590,00	99,95	10.764.944.350,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.303.879.476,00	4.020.719.748,00	93,42	3.387.467.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.765.227.900,00	4.233.600.711,00	88,84	2.876.817.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.437.929.900,00	3.436.324.900,00	99,95	2.876.817.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.327.298.000,00	797.275.811,00	60,06	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.915.291.745,00	13.513.879.755,00	97,11	12.339.686.836,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.366.488.450,00	10.366.126.350,00	99,99	10.403.639.940,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.548.803.295,00	3.147.753.405,00	88,69	1.936.046.896,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.772.810.918,00	1.694.940.962,00	95,60	1.358.578.793,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.528.695.954,00	1.527.439.833,00	99,91	1.288.511.269,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	244.114.964,00	167.501.129,00	68,61	70.067.524,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.351.932,00	3.312.526,00	98,82	3.131.912,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.583.167,00	2.580.811,00	99,90	2.751.843,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	768.765,00	731.715,00	95,18	380.069,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.341.918.346,00	9.341.918.346,00	100,00	8.338.728.340,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.296.410.177,00	8.296.410.177,00	100,00	8.338.728.340,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.045.508.169,00	1.045.508.169,00	100,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	495.284.780,00	495.284.780,00	100,00	450.000.193,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	495.284.780,00	495.284.780,00	100,00	450.000.193,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.485.844.836,00	1.485.844.836,00	100,00	1.349.996.879,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.485.844.836,00	1.485.844.836,00	100,00	1.349.996.879,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	76.619.782.406,00	72.430.138.094,00	94,53	4.312.469.475,21

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.323.111.264,00	3.123.210.040,00	93,98	4.312.469.475,21
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.000.962.304,00	2.807.881.582,00	93,56	4.312.469.475,21
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	322.148.960,00	315.328.458,00	97,88	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	75.248.000,00	75.248.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	75.248.000,00	75.248.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73.221.423.142,00	69.231.680.054,00	94,55	0,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	3.718.750,00	3.718.750,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	45.400.000,00	45.400.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	95.625,00	95.625,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	3.825.000,00	3.825.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	212.500,00	212.500,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	57.486.047,00	57.485.942,00	99,99	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28.825.000,00	28.825.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	21.250.000,00	21.250.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	55.095.661.520,00	53.599.059.300,00	97,28	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.696.542.700,00	5.718.363.100,00	100,38	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.500.750.000,00	681.250.000,00	27,24	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.820.311.000,00	8.180.635.837,00	92,74	0,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	947.345.000,00	891.559.000,00	94,11	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	11.877.600,00	0,00	50.247.895.482,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	672.425.000,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	672.425.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	29.058.276.860,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	29.058.276.860,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	11.877.600,00	0,00	3.862.805.400,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	11.877.600,00	0,00	3.862.805.400,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.516.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.516.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	7.990.768.222,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	7.990.768.222,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	6.050.337.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	5.171.037.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	877.450.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	1.097.283.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	28.930.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	1.068.353.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.238.224.390,00	11.213.343.585,00	99,77	11.471.149.830,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	560.070.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	560.070.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.038.400,00	51.038.400,00	100,00	47.245.800,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.038.400,00	51.038.400,00	100,00	47.245.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.832.800,00	60.832.800,00	100,00	56.487.600,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.832.800,00	60.832.800,00	100,00	56.487.600,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	48.132.000,00	85,71	47.985.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	48.132.000,00	85,71	47.985.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	812.101.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	812.101.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.315.610,00	87.878.700,00	84,24	65.330.475,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.315.610,00	87.878.700,00	84,24	65.330.475,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	315.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	315.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	6.384.020,00	6.048.765,00	94,74	216.363,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	6.384.020,00	6.048.765,00	94,74	216.363,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.561.626.560,00	2.561.539.920,00	99,99	2.675.278.092,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	48.919.248,00	48.919.248,00	100,00	48.671.532,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.155.168,00	1.155.168,00	100,00	1.151.640,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.552.144,00	3.465.504,00	97,56	3.454.920,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.508.000.000,00	2.508.000.000,00	100,00	2.622.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.659.600.000,00	4.659.600.000,00	100,00	4.765.500.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.659.600.000,00	4.659.600.000,00	100,00	4.765.500.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	235.935.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	235.935.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	200.237.078,00	155.327.892,00	77,57	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	42.900.000,00	78,57	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	42.900.000,00	78,57	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.232.000,00	5.148.000,00	62,53	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.232.000,00	5.148.000,00	62,53	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	77.220.000,00	78,57	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	77.220.000,00	78,57	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00	4.779.720,00	58,92	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00	4.779.720,00	58,92	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.860.072,00	870.931,00	30,45	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.860.072,00	870.931,00	30,45	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	148.160,00	1.080,00	0,72	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	148.160,00	1.080,00	0,72	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.523.840,00	4.555.200,00	82,46	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.523.840,00	4.555.200,00	82,46	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	93.600,00	83,33	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	93.600,00	83,33	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	280.800,00	83,33	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	280.800,00	83,33	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	22.032.686,00	19.478.561,00	88,40	0,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	656.250,00	656.250,00	100,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	8.310.000,00	5.755.875,00	69,26	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	16.875,00	16.875,00	100,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	675.000,00	675.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	37.500,00	37.500,00	100,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.829.063,00	7.829.063,00	100,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	757.998,00	757.998,00	100,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	355.314.217,00	347.810.611,00	97,88	487.987.462,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	92.400.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	92.400.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	244.434.217,00	236.930.611,00	96,93	395.587.462,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	244.434.217,00	236.930.611,00	96,93	395.587.462,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.473.900.575,00	160.720.925.253,81	94,27	155.916.396.246,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01	Belanja Barang	50.914.467.523,00	48.705.584.940,00	95,66	51.178.945.256,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.843.270.218,00	48.659.862.514,00	95,70	51.085.530.256,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	45.567.085,00	40.596.907,00	89,09	129.086.666,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	70.980.000,00	70.872.500,00	99,84	489.330.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.517.646.348,00	1.431.157.747,00	94,30	2.572.300.318,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	60.977.520,00	60.877.520,00	99,83	46.902.875,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	426.320.000,00	424.425.000,00	99,55	248.285.335,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.665.856.220,00	1.613.862.000,00	96,87	1.142.384.869,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	20.800.000,00	20.050.000,00	96,39	54.181.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	846.633.020,00	793.894.399,00	93,77	1.119.681.562,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.024.067.481,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	103.976.522,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.062.159.312,00	1.021.188.870,00	96,14	1.383.760.308,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	701.019.748,00	682.642.088,00	97,37	902.337.425,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.671.887.938,00	2.610.350.672,00	97,69	2.713.739.881,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	152.241.450,00	150.229.245,00	98,67	144.143.437,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.175.861.629,00	1.154.813.121,00	98,20	1.372.791.498,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	559.275.393,00	548.171.223,00	98,01	520.968.273,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	189.513.319,00	173.871.956,00	91,74	173.633.474,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	86.083.453,00	85.594.428,00	99,43	119.075.750,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	78.462.866,00	75.576.038,00	96,32	64.950.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	148.110.104,00	147.904.800,00	99,86	135.250.585,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.974.737.743,00	9.962.512.366,00	99,87	5.090.101.618,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.628.608.103,00	2.628.013.665,00	99,97	4.586.528.267,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.829.640.163,00	5.483.930.269,00	94,06	5.625.815.561,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.855.426.681,00	3.352.855.535,00	86,96	5.035.613.012,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.876.185.070,00	2.717.819.888,00	94,49	2.504.409.145,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	90.555.000,00	90.365.000,00	99,79	60.073.040,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	65.317.000,00
5.1.02.01.01.0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00	71.421.182,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.154.364.604,00	4.948.885.218,00	96,01	5.454.056.143,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	711.894.570,00	687.143.728,00	96,52	361.605.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.442.935.900,00	2.345.069.157,00	95,99	2.661.344.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.294.308.013,00	1.203.396.457,00	92,97	1.271.206.969,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.846.697.000,00	3.815.928.000,00	99,20	2.916.553.160,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	365.449.800,00	65.379.000,00	17,89	602.886.500,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	29.637.160,00	29.637.160,00	100,00	14.818.520,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00	205.985.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	17.098.320,00	17.098.320,00	100,00	5.699.440,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	77.000.000,00	70.298.551,00	91,29	45.000.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	21.237.500,00	21.237.500,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	11.398.880,00	11.398.880,00	100,00	5.699.440,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	89.360.000,00	88.775.000,00	99,34	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	9.900.306,00	9.900.306,00	100,00	30.400.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	71.197.305,00	45.722.426,00	64,21	93.415.000,00
5.1.02.01.04.0091	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	875.000,00	875.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0109	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	6.160.000,00	5.503.558,00	89,34	0,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.077.525,00	6.052.525,00	99,58	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	812.750,00	785.000,00	96,58	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(I),Home Use],	787.500,00	780.000,00	99,04	0,00
5.1.02.01.04.0127	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	10.453.700,00	10.450.000,00	99,96	0,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	24.720.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0278	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	310.830,00	276.343,00	88,90	0,00
5.1.02.01.04.0463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	93.415.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	58.535.980.552,00	55.288.928.984,98	94,45	56.137.706.040,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	45.271.948.349,00	42.644.173.744,98	94,19	42.297.220.940,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	25.870.000,00	15.200.000,00	58,75	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.110.800.000,00	983.580.000,00	88,54	1.973.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.683.596.025,00	4.366.471.250,00	93,22	5.273.895.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	23.750.000,00	11.250.000,00	47,36	26.250.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	369.200.000,00	369.200.000,00	100,00	334.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	26.000.000,00	13.200.000,00	50,76	34.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	407.490.000,00	364.090.000,00	89,34	120.250.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	323.725.000,00	323.725.000,00	100,00	230.425.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	827.500.000,00	784.800.000,00	94,83	839.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	913.600.000,00	910.400.000,00	99,64	35.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.816.960.220,00	9.819.048.961,98	100,02	7.319.194.831,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	200.900.000,00	131.626.842,00	65,51	153.365.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	476.000.000,00	423.125.600,00	88,89	658.446.001,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	283.200.000,00	283.200.000,00	100,00	2.742.800.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	81.600.000,00	81.600.000,00	100,00	172.800.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	124.800.000,00	124.800.000,00	100,00	288.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	145.600.000,00	140.800.000,00	96,70	345.600.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.528.456.500,00	1.215.450.000,00	79,52	875.864.064,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	39.525.000,00	39.525.000,00	100,00	53.290.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.796.800.000,00	2.750.400.000,00	98,34	5.521.840.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	342.000.000,00	329.200.000,00	96,25	636.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	924.797.155,00	922.339.080,00	99,73	340.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.254.811.912,00	1.018.561.912,00	81,17	2.417.363.632,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	590.400.000,00	571.200.000,00	96,74	992.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	450.800.000,00	424.400.000,00	94,14	674.200.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	572.000.000,00	544.100.000,00	95,12	926.350.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	89.600.000,00	89.600.000,00	100,00	219.200.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	38.400.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	91.200.000,00	91.200.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	19.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	29.000.000,00	15.800.000,00	54,48	22.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	60.000.000,00	10.000.000,00	16,66	20.631.631,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	303.919.425,00	299.226.561,00	98,45	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	272.838.000,00	250.491.331,00	91,80	952.080.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00	130.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	43.390.000,00	39.160.000,00	90,25	14.450.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	492.000.000,00	254.250.000,00	51,67	746.250.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	182.056.000,00	182.000.000,00	99,96	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	313.785.000,00	302.682.500,00	96,46	55.972.500,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	332.676.000,00	273.905.408,00	82,33	268.334.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.438.988.497,00	2.244.686.345,00	92,03	2.213.355.364,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.700.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.897.926.778,00	1.760.987.574,00	92,78	1.393.282.541,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	570.002.000,00	539.074.757,00	94,57	267.606.180,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	5.056.350,00	5.056.350,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	529.697.377,00	404.041.589,00	76,27	318.165.341,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	192.000.000,00	167.393.519,00	87,18	178.553.925,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.259.238.110,00	2.231.048.165,00	98,75	2.343.135.430,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.272.093.000,00	6.042.476.000,00	96,33	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	365.650.000,00	293.000.000,00	80,13	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	69.750.000,00	67.600.000,00	96,91	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.367.524.880,00	5.128.513.080,00	95,54	4.796.460.582,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.364.104.280,00	1.251.587.000,00	91,75	1.131.095.542,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.863.445.600,00	3.807.655.600,00	98,55	3.578.481.200,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	48.300.000,00	23.763.600,00	49,20	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	91.675.000,00	45.506.880,00	49,63	86.883.840,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.164.054.157,00	1.126.309.535,00	96,75	851.577.500,00
5.1.02.02.04.0001	Belanja Sewa Tractor	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	368.000.000,00	368.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.000.000,00	6.603.433,00	82,54	15.828.500,00
5.1.02.02.04.0024	Belanja Sewa Mesin Bor	109.800.000,00	109.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	110.500.000,00	94.351.102,00	85,38	156.300.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	113.800.000,00	113.800.000,00	100,00	36.700.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	124.957.000,00	116.308.000,00	93,07	116.500.000,00
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	0,00	0,00	7.214.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	108.400.157,00	98.350.000,00	90,72	139.040.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	25.397.000,00	23.897.000,00	94,09	37.895.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	142.000.000,00
5.1.02.02.04.0201	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	119.500.000,00
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	37.950.000,00	37.950.000,00	100,00	64.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.007.295.040,00	934.622.897,00	92,78	984.876.520,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	162.126.040,00	153.275.520,00	94,54	155.525.520,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	830.169.000,00	766.347.377,00	92,31	829.351.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.489.983.126,00	1.376.739.728,00	92,39	2.573.716.985,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	18.000.000,00	17.810.000,00	98,94	35.792.597,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	483.000.000,00	427.809.450,00	88,57	374.330.418,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	33.247.876,00	33.247.023,00	99,99	146.789.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	6.000.000,00	5.930.000,00	98,83	386.820.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	576.295.600,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	171.585.250,00	158.186.800,00	92,19	330.943.570,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	335.000.000,00	316.118.000,00	94,36	58.980.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	482.497.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	171.750.000,00	155.292.200,00	90,41	181.268.000,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	248.400.000,00	244.346.255,00	98,36	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	494.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	494.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.205.675.000,00	4.049.070.000,00	96,27	4.139.853.513,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	53.250.000,00	53.250.000,00	100,00	382.152.500,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	3.104.000.000,00	2.964.745.000,00	95,51	3.580.820.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.048.425.000,00	1.031.075.000,00	98,34	176.881.013,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.645.965.769,00	6.338.603.139,00	95,37	5.987.388.033,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	40.142.269,00	40.142.269,00	100,00	308.890.800,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	40.142.269,00	40.142.269,00	100,00	109.450.800,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	199.440.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.660.425.117,00	4.430.076.792,00	95,05	2.209.871.718,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	193.980.000,00	172.234.698,00	88,78	0,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	0,00	162.221.771,00
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	25.000.000,00	24.999.700,00	99,99	191.715.033,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.339.014.500,00	2.239.164.699,00	95,73	837.945.313,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	36.550.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	445.494.883,00	408.568.140,00	91,71	53.088.378,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	106.120.000,00	66.926.749,00	63,06	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	229.544.660,00	186.082.023,00	81,06	132.760.000,00
5.1.02.03.02.0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	92.039.901,00	91.825.005,00	99,76	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	447.787.500,00	447.787.344,00	99,99	0,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	10.570.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	159.930.000,00	159.292.500,00	99,60	212.736.205,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	78.080.000,00	77.054.432,00	98,68	77.649.450,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	299.878.845,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	352.363.500,00	377.075.002,00	107,01	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	72.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29.200.173,00	18.810.000,00	64,41	75.256.723,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	89.870.000,00	88.256.500,00	98,20	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.035.297.024,00	988.963.261,00	95,52	1.348.924.497,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	595.998.637,00	584.786.907,00	98,11	1.145.380.229,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	39.262.080,00	39.262.000,00	99,99	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	63.032.000,00	63.028.980,00	99,99	33.564.268,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	91.004.307,00	90.237.820,00	99,15	99.980.000,00
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	246.000.000,00	211.647.554,00	86,03	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	910.101.359,00	879.420.817,00	96,62	2.119.701.018,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	445.510.000,00	441.994.500,00	99,21	1.054.494.300,00
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	25.000.000,00	14.385.000,00	57,54	0,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	21.000.000,00	20.975.200,00	99,88	0,00
5.1.02.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	199.950.000,00
5.1.02.03.04.0062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	0,00	0,00	0,00	30.315.000,00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	15.000.000,00	14.981.000,00	99,87	0,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	47.161.000,00	41.551.117,00	88,10	26.997.000,00
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	117.000.000,00	116.950.000,00	99,95	0,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	33.245.000,00	32.500.000,00	97,75	0,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	49.559.369,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	29.002.359,00	28.730.000,00	99,06	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	152.183.000,00	142.354.000,00	93,54	615.893.000,00
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	0,00	0,00	0,00	41.139.849,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	101.352.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.019.386.595,00	25.922.820.938,00	92,51	27.516.913.730,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.019.386.595,00	25.922.820.938,00	92,51	27.516.913.730,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.230.015.250,00	14.096.035.938,00	92,55	16.632.412.530,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.785.255.075,00	11.826.785.000,00	92,50	10.695.201.200,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.116.270,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	189.300.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.424.127.000,00	12.237.556.400,00	91,16	2.705.782.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.732.000.000,00	9.820.285.400,00	91,50	432.300.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	320.000.000,00	318.000.000,00	99,37	429.100.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	10.242.000.000,00	9.332.285.400,00	91,11	3.200.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.692.127.000,00	2.417.271.000,00	89,79	2.273.482.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.692.127.000,00	2.417.271.000,00	89,79	2.273.482.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	88.785.700,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	88.785.700,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	88.785.700,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	12.933.973.136,00	12.227.430.851,83	94,53	12.300.875.487,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	12.484.396.113,00	11.826.685.007,00	94,73	11.954.984.887,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	11.839.801.113,00	11.290.639.215,00	95,36	11.792.475.887,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	644.595.000,00	536.045.792,00	83,16	162.509.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	382.886.523,00	368.588.344,83	96,26	223.738.100,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	382.886.523,00	368.588.344,83	96,26	223.738.100,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	66.690.500,00	32.157.500,00	48,21	122.152.500,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	66.690.500,00	32.157.500,00	48,21	68.263.800,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00	53.888.700,00
5.1.03	Belanja Bunga	9.276.440.251,00	9.376.320.576,00	101,07	11.566.232.871,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	9.276.440.251,00	9.376.320.576,00	101,07	11.566.232.871,00
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	9.276.440.251,00	9.376.320.576,00	101,07	11.566.232.871,00
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	9.276.440.251,00	9.376.320.576,00	101,07	11.566.232.871,00
5.1.04	Belanja Subsidi	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	514.000.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	514.000.000,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	514.000.000,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	514.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.779.061.284,00	9.711.375.584,00	99,30	37.253.866.298,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	661.200.000,00	661.200.000,00	100,00	27.820.295.770,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	661.200.000,00	661.200.000,00	100,00	17.962.315.770,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	661.200.000,00	661.200.000,00	100,00	17.962.315.770,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	9.857.980.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	9.857.980.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	611.005.284,00	611.005.284,00	100,00	537.669.108,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	611.005.284,00	611.005.284,00	100,00	537.669.108,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	611.005.284,00	611.005.284,00	100,00	537.669.108,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.436.856.000,00	8.369.170.300,00	99,19	8.895.901.420,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	7.077.156.000,00	7.061.759.300,00	99,78	7.393.619.420,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	7.077.156.000,00	7.061.759.300,00	99,78	7.393.619.420,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.119.900.000,00	1.096.261.000,00	97,88	1.259.082.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.119.900.000,00	1.096.261.000,00	97,88	1.259.082.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	239.800.000,00	211.150.000,00	88,05	243.200.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	239.800.000,00	211.150.000,00	88,05	243.200.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	9.266.118.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	14.718.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	14.718.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	14.718.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	9.251.400.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	9.251.400.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	9.251.400.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	601.341.218.913,00	580.215.271.609,81	96,48	570.355.753.999,21

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2	BELANJA MODAL	51.303.500.328,00	50.046.933.466,00	97,55	77.495.925.681,74
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.219.524.126,00	12.548.517.519,00	94,92	25.194.744.259,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	975.950.316,00	925.324.000,00	94,81	205.250.100,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	499.400.000,00	497.474.000,00	99,61	106.449.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	499.400.000,00	497.474.000,00	99,61	106.449.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	476.550.316,00	427.850.000,00	89,78	98.801.100,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	476.550.316,00	427.850.000,00	89,78	0,00
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	98.801.100,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.249.236.282,00	1.170.554.415,00	93,70	4.369.759.400,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.249.236.282,00	1.170.554.415,00	93,70	4.369.759.400,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	1.420.576.400,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	373.436.282,00	370.799.415,00	99,29	261.183.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	875.800.000,00	799.755.000,00	91,31	2.688.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	252.218.000,00	235.173.881,00	93,24	38.339.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	252.218.000,00	235.173.881,00	93,24	38.339.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	252.218.000,00	235.173.881,00	93,24	38.339.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	974.848.859,00	561.352.680,00	57,58	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	974.848.859,00	561.352.680,00	57,58	0,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	297.246.173,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	7.715.436,00	7.714.500,00	99,98	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	669.887.250,00	553.638.180,00	82,64	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.407.364.100,00	3.315.697.425,00	97,30	3.648.047.977,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	375.375.337,00	341.556.473,00	90,99	277.769.462,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	103.187.590,00	82.752.441,00	80,19	128.780.364,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	272.187.747,00	258.804.032,00	95,08	148.989.098,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.012.535.592,00	2.954.701.352,00	98,08	3.370.278.515,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.033.514.205,00	1.980.100.411,00	97,37	2.732.251.861,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	14.700.000,00	14.652.000,00	99,67	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	187.523.886,00	187.090.192,00	99,76	108.619.662,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	330.510.032,00	328.630.000,00	99,43	15.624.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	446.287.469,00	444.228.749,00	99,53	445.282.992,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	68.500.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19.453.171,00	19.439.600,00	99,93	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	18.003.171,00	17.989.600,00	99,92	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	246.399.273,00	227.794.590,00	92,44	2.989.815.750,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	179.621.773,00	175.162.790,00	97,51	10.861.500,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	146.237.047,00	145.712.790,00	99,64	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	33.384.726,00	29.450.000,00	88,21	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.861.500,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	66.777.500,00	52.631.800,00	78,81	8.954.250,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	66.777.500,00	52.631.800,00	78,81	8.954.250,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	2.970.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	2.970.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	332.571.000,00	331.351.490,00	99,63	8.277.197.270,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	328.071.000,00	326.851.490,00	99,62	7.119.547.270,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	39.972.700,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	128.071.000,00	126.851.490,00	99,04	7.079.574.570,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	1.157.650.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	1.157.650.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.203.600.100,00	2.199.805.113,00	99,82	654.951.250,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.203.600.100,00	2.199.805.113,00	99,82	654.951.250,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	578.600.100,00	578.325.000,00	99,95	49.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	1.625.000.000,00	1.621.480.113,00	99,78	499.951.250,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.138.893.631,00	2.059.085.260,00	96,26	2.640.792.613,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.872.352.345,00	1.809.661.925,00	96,65	1.555.098.478,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	239.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.872.352.345,00	1.809.661.925,00	96,65	1.278.598.478,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	266.541.286,00	249.423.335,00	93,57	1.085.694.135,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	17.495.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	266.541.286,00	249.423.335,00	93,57	796.873.637,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	256.325.498,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	199.160.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	199.160.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	199.160.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	14.350.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	14.350.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	98.346.000,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	98.346.000,00
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	98.346.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	57.000.120,00	37.100.000,00	65,08	83.900.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	57.000.120,00	37.100.000,00	65,08	83.900.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	57.000.120,00	37.100.000,00	65,08	83.900.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	391.879.900,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	391.879.900,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	391.879.900,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	1.381.442.445,00	1.485.278.665,00	107,51	1.582.954.999,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.339.829.345,00	1.432.561.015,00	106,92	1.582.954.999,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.339.829.345,00	1.432.561.015,00	106,92	1.582.954.999,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	41.613.100,00	50.407.650,00	121,13	0,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	41.613.100,00	50.407.650,00	121,13	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.847.389.427,00	24.853.373.878,00	96,15	20.056.183.928,74
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.484.141.063,00	24.496.405.964,00	96,12	19.528.358.642,74
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.782.891.063,00	24.168.879.557,00	97,52	16.690.088.642,74
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	141.210.000,00	140.000.000,00	99,14	0,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	406.145.998,00	401.800.000,00	98,92	0,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	13.705.900.000,00	13.462.857.000,00	98,22	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.998.370.312,00	4.750.335.921,00	95,03	3.774.319.220,74
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.089.600.832,00	3.989.035.886,00	97,54	9.087.452.122,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	203.201.065,00	202.230.000,00	99,52	1.863.646.300,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	149.900.000,00
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	137.728.000,00	137.500.000,00	99,83	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	293.596.856,00	293.300.000,00	99,89	356.030.000,00
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	216.388.000,00	216.302.000,00	99,96	389.700.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	223.500.000,00	208.821.000,00	93,43	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	281.450.000,00	281.350.000,00	99,96	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	869.147.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	55.800.000,00	55.350.000,00	99,19	199.894.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	29.997.750,00	99,99	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	701.250.000,00	327.526.407,00	46,70	2.838.270.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	2.838.270.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	701.250.000,00	327.526.407,00	46,70	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	363.248.364,00	356.967.914,00	98,27	527.825.286,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	363.248.364,00	356.967.914,00	98,27	527.825.286,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	322.648.364,00	316.367.914,00	98,05	527.825.286,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.458.152.275,00	10.419.849.219,00	99,63	29.180.797.208,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.098.583.814,00	8.090.027.019,00	99,89	28.224.514.545,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	8.046.983.814,00	8.038.527.019,00	99,89	27.071.234.545,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	7.484.605.840,00	7.477.049.037,00	99,89	23.186.368.860,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	562.377.974,00	561.477.982,00	99,83	3.884.865.685,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	51.600.000,00	51.500.000,00	99,80	1.153.280.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	51.600.000,00	51.500.000,00	99,80	0,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	1.153.280.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	506.019.500,00	499.704.200,00	98,75	645.419.163,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	200.047.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	200.047.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	414.435.000,00	408.119.700,00	98,47	365.706.663,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	365.706.663,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	362.300.000,00	355.984.700,00	98,25	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	52.135.000,00	52.135.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	91.584.500,00	91.584.500,00	100,00	79.665.500,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	91.584.500,00	91.584.500,00	100,00	79.665.500,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	186.600.000,00	186.470.000,00	99,93	187.406.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	186.600.000,00	186.470.000,00	99,93	112.900.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	186.600.000,00	186.470.000,00	99,93	112.900.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	74.506.000,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	74.506.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.666.948.961,00	1.643.648.000,00	98,60	123.457.500,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.098.888.000,00	1.098.260.000,00	99,94	123.457.500,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.098.888.000,00	1.098.260.000,00	99,94	123.457.500,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	568.060.961,00	545.388.000,00	96,00	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	568.060.961,00	545.388.000,00	96,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.778.434.500,00	2.225.192.850,00	125,12	3.064.200.286,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	180.460.000,00	177.901.800,00	98,58	1.483.231.848,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	180.460.000,00	177.901.800,00	98,58	1.483.231.848,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	28.660.000,00	28.606.800,00	99,81	0,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	151.800.000,00	149.295.000,00	98,34	1.483.231.848,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	82.300.000,00	82.250.000,00	99,93	0,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	82.300.000,00	82.250.000,00	99,93	0,00
5.2.05.03.02.0001	Belanja Modal Ternak Potong	82.300.000,00	82.250.000,00	99,93	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	19.850.000,00	19.760.000,00	99,54	0,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	19.850.000,00	19.760.000,00	99,54	0,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	19.850.000,00	19.760.000,00	99,54	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	77.293.300,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	77.293.300,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	77.293.300,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.495.824.500,00	1.945.281.050,00	130,04	1.503.675.138,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.439.363.100,00	1.852.017.450,00	128,66	1.503.675.138,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	1.439.363.100,00	1.852.017.450,00	128,66	1.503.675.138,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	48.361.400,00	48.431.100,00	100,14	0,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	48.361.400,00	48.431.100,00	100,14	0,00
5.2.05.89.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	8.100.000,00	44.832.500,00	553,48	0,00
5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	8.100.000,00	44.832.500,00	553,48	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	51.303.500.328,00	50.046.933.466,00	97,55	77.495.925.681,74
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	66,86	957.097.223,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	66,86	957.097.223,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	66,86	957.097.223,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	66,86	957.097.223,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	66,86	957.097.223,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	66,86	957.097.223,00
5.4	BELANJA TRANSFER	165.792.215.263,00	151.867.177.699,00	91,60	177.861.908.935,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.101.488.363,00	3.292.952.843,00	80,28	3.351.905.735,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.819.105.164,00	1.332.925.933,00	73,27	1.294.986.551,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.819.105.164,00	1.332.925.933,00	73,27	1.294.986.551,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.819.105.164,00	1.332.925.933,00	73,27	1.294.986.551,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.282.383.199,00	1.960.026.910,00	85,87	2.056.919.184,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.282.383.199,00	1.960.026.910,00	85,87	2.056.919.184,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.282.383.199,00	1.960.026.910,00	85,87	2.056.919.184,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.690.726.900,00	148.574.224.856,00	91,88	174.510.003.200,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	174.510.003.200,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	174.510.003.200,00
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	174.510.003.200,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	161.690.726.900,00	148.574.224.856,00	91,88	0,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	161.690.726.900,00	148.574.224.856,00	91,88	0,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	161.690.726.900,00	148.574.224.856,00	91,88	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	165.792.215.263,00	151.867.177.699,00	91,60	177.861.908.935,00
	JUMLAH BELANJA	823.493.539.413,00	785.510.494.976,81	95,38	826.670.685.838,95
	SURPLUS/DEFISIT	12.268.699.551,00	23.317.679.726,92	190,05	30.647.795.698,72
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(12.268.699.551,00)	(12.271.959.294,42)	100,02	(19.141.687.323,05)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.506.108.375,00	11.502.848.631,58	99,97	12.724.723.244,95
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.506.108.375,00	11.502.848.631,58	99,97	12.720.528.244,95
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	19.376.901,50	0,00	0,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0,00	6.861.350,59	0,00	0,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	6.861.350,59	0,00	0,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	0,00	10.155.812,91	0,00	0,00
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	0,00	10.155.812,91	0,00	0,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	2.359.738,00	0,00	0,00
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	0,00	2.359.738,00	0,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	7.265.278.220,00	5.160.417.900,00	71,02	2.436.466.822,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	7.265.278.220,00	5.160.417.900,00	71,02	2.436.466.822,00
6.1.01.02.01.0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	2.436.466.822,00
6.1.01.02.01.0172	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	5.588.803.520,00	4.812.509.700,00	86,10	0,00
6.1.01.02.01.0173	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.319.750.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0174	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	356.724.700,00	347.908.200,00	97,52	0,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.323.993.066,59
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.323.993.066,59
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.323.993.066,59
6.1.01.05	Penghematan Belanja	2.226.287.499,00	2.811.580,00	0,12	8.954.847.538,21
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	2.226.287.499,00	2.801.580,00	0,12	5.568.649.326,96
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	3.123.743.546,00
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	2.405.023.380,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	2.226.287.499,00	2.801.580,00	0,12	0,00
6.1.01.05.01.0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	39.882.400,96
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0,00	10.000,00	0,00	3.386.198.211,25
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	1.761.722.044,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	1.153.280.000,00
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0,00	10.000,00	0,00	471.196.167,25
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	2.014.542.656,00	6.320.242.250,08	313,73	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.014.542.656,00	6.320.242.250,08	313,73	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.014.542.656,00	6.320.242.250,08	313,73	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.220.818,15
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	9.796,00
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	9.796,00
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	5.211.022,15
6.1.01.08.04.0003	Sisa Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	5.211.022,15
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	4.195.000,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.195.000,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.195.000,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.195.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.506.108.375,00	11.502.848.631,58	99,97	12.724.723.244,95
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.774.807.926,00	23.774.807.926,00	100,00	31.866.410.568,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.774.807.926,00	22.774.807.926,00	100,00	30.366.410.568,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	22.774.807.926,00	22.774.807.926,00	100,00	30.366.410.568,00
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	22.774.807.926,00	22.774.807.926,00	100,00	30.366.410.568,00
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	22.774.807.926,00	22.774.807.926,00	100,00	30.366.410.568,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.774.807.926,00	23.774.807.926,00	100,00	31.866.410.568,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(12.268.699.551,00)	(12.271.959.294,42)	100,02	(19.141.687.323,05)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	11.045.720.432,50	0,00	11.506.108.375,67

KAB. LEMBATA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN
BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	415.105.775.678,00	405.355.240.750,81	374.448.004.300,00	365.371.588.213,81	40.657.771.378,00	39.983.652.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	218.973.233.120,00	214.300.326.227,83	208.691.184.929,00	203.631.479.564,83	10.282.048.191,00	10.668.846.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000		DINAS PENDIDIKAN	218.973.233.120,00	214.300.326.227,83	208.691.184.929,00	203.631.479.564,83	10.282.048.191,00	10.668.846.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	179.194.200.827,00	175.681.327.622,00	179.130.829.477,00	175.619.396.622,00	63.371.350,00	61.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.858.250,00	6.858.250,00	6.858.250,00	6.858.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.174.950,00	1.174.950,00	1.174.950,00	1.174.950,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	738.500,00	738.500,00	738.500,00	738.500,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.199.800,00	1.199.800,00	1.199.800,00	1.199.800,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	862.400,00	862.400,00	862.400,00	862.400,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.745.100,00	1.745.100,00	1.745.100,00	1.745.100,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	178.859.776.757,00	175.368.906.629,00	178.859.776.757,00	175.368.906.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	178.541.947.757,00	175.059.751.379,00	178.541.947.757,00	175.059.751.379,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	305.351.000,00	296.716.000,00	305.351.000,00	296.716.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.128.500,00	3.128.500,00	3.128.500,00	3.128.500,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	9.349.500,00	9.310.750,00	9.349.500,00	9.310.750,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.837.900,00	49.685.150,00	52.837.900,00	49.685.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.632.900,00	1.632.900,00	1.632.900,00	1.632.900,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.205.000,00	48.052.250,00	51.205.000,00	48.052.250,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.484.300,00	2.484.300,00	2.484.300,00	2.484.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.484.300,00	2.484.300,00	2.484.300,00	2.484.300,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.365.200,00	35.603.890,00	43.365.200,00	35.603.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.665.200,00	3.665.200,00	3.665.200,00	3.665.200,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.700.000,00	31.938.690,00	39.700.000,00	31.938.690,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.371.350,00	61.931.000,00	0,00	0,00	63.371.350,00	61.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	13.340.092,00	13.331.000,00	0	0	13.340.092,00	13.331.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.031.258,00	48.600.000,00	0	0	50.031.258,00	48.600.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.091.070,00	85.622.650,00	88.091.070,00	85.622.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.215.450,00	4.087.450,00	4.215.450,00	4.087.450,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.875.620,00	81.535.200,00	83.875.620,00	81.535.200,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.416.000,00	70.235.753,00	77.416.000,00	70.235.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.132.000,00	44.951.753,00	52.132.000,00	44.951.753,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.284.000,00	25.284.000,00	25.284.000,00	25.284.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	39.629.030.293,00	38.474.299.325,83	29.410.353.452,00	27.867.383.662,83	10.218.676.841,00	10.606.915.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.381.087.115,00	19.934.015.148,00	16.512.267.759,00	13.673.725.481,00	5.868.819.356,00	6.260.289.667,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	213.477.050,00	209.327.050,00	11.477.050,00	7.327.050,00	202.000.000,00	202.000.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	182.509.000,00	173.990.000,00	182.509.000,00	173.990.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	393.596.081,00	384.907.300,00	201.596.081,00	197.217.300,00	192.000.000,00	187.690.000,00	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	407.470.825,00	365.071.495,00	95.205.500,00	86.576.500,00	312.265.325,00	278.494.995,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	137.006.090,00	115.037.113,00	137.006.090,00	115.037.113,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	935.434.425,00	918.775.566,00	935.434.425,00	918.775.566,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	44.511.050,00	40.300.950,00	44.511.050,00	40.300.950,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.657.906.558,00	11.933.163.801,00	13.657.906.558,00	12.273.307.863,00	10.037.421.686,00	1.384.598.695,00	1.895.742.115,00	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	283.247.250,00	272.639.135,00	231.797.250,00	230.039.131,00	51.450.000,00	42.600.004,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	27.406.550,00	26.294.700,00	27.406.550,00	26.294.700,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	41.964.050,00	40.954.500,00	41.964.050,00	40.954.500,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52.770.300,00	39.763.700,00	52.770.300,00	39.763.700,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	362.277.575,00	58.893.125,00	362.277.575,00	58.893.125,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	839.900.150,00	824.089.550,00	2.100.150,00	2.100.150,00	837.800.000,00	821.989.400,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	99.651.600,00	96.310.600,00	1.563.600,00	1.563.600,00	98.088.000,00	94.747.000,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	94.235.025,00	83.194.550,00	94.235.025,00	83.194.550,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	19.963.400,00	17.023.400,00	19.963.400,00	17.023.400,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.909.097.136,00	2.663.874.770,00	1.555.029.800,00	1.359.921.430,00	1.354.067.336,00	1.303.953.340,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.678.663.000,00	1.670.403.843,00	242.113.000,00	237.331.030,00	1.436.550.000,00	1.433.072.813,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11.903.091.948,00	13.326.082.407,00	9.665.535.925,00	11.105.738.507,00	2.237.556.023,00	2.220.343.900,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	109.684.500,00	107.284.500,00	3.084.500,00	3.084.500,00	106.600.000,00	104.200.000,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	803.889.400,00	796.087.206,00	592.289.400,00	591.787.206,00	211.600.000,00	204.300.000,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	292.961.500,00	286.935.950,00	367.500,00	367.500,00	292.594.000,00	286.568.450,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	188.751.350,00	188.708.650,00	301.350,00	301.350,00	188.450.000,00	188.407.300,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	82.064.650,00	80.134.150,00	82.064.650,00	80.134.150,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.077.219.050,00	1.017.728.925,00	1.077.219.050,00	1.017.728.925,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	24.162.950,00	24.102.950,00	24.162.950,00	24.102.950,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.748.328.000,00	10.309.858.971,00	7.358.244.250,00	8.921.022.621,00	1.390.083.750,00	1.388.836.350,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	111.408.873,00	96.810.280,00	91.840.600,00	77.385.280,00	19.568.273,00	19.425.000,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	35.654.275,00	33.680.975,00	35.654.275,00	33.680.975,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	14.126.800,00	13.216.800,00	14.126.800,00	13.216.800,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	47.284.650,00	34.572.350,00	47.284.650,00	34.572.350,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	28.326.900,00	27.189.400,00	28.326.900,00	27.189.400,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	48.494.450,00	37.477.450,00	48.494.450,00	37.477.450,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	56.457.600,00	38.602.000,00	56.457.600,00	38.602.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	234.277.000,00	233.691.850,00	205.617.000,00	205.085.050,00	28.660.000,00	28.606.800,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.990.102.325,00	4.893.521.340,83	2.890.410.863,00	2.814.381.744,83	2.099.691.462,00	2.079.139.596,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	203.142.296,00	189.436.946,00	17.296.800,00	13.144.400,00	185.845.496,00	176.292.546,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	127.432.600,00	121.900.000,00	0	0	127.432.600,00	121.900.000,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	625.186.820,00	606.012.200,00	625.186.820,00	606.012.200,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	41.087.800,00	37.464.510,00	41.087.800,00	37.464.510,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.592.761.023,00	1.563.688.094,83	1.502.786.523,00	1.464.849.344,83	89.974.500,00	98.838.750,00	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	41.077.310,00	36.047.310,00	41.077.310,00	36.047.310,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.394.950,00	18.809.950,00	20.394.950,00	18.809.950,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.802.620,00	26.585.120,00	26.802.620,00	26.585.120,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.116.097.900,00	1.102.046.200,00	1.297.900,00	1.297.900,00	1.114.800.000,00	1.100.748.300,00	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	67.329.496,00	64.708.030,00	64.290.730,00	61.673.030,00	3.038.766,00	3.035.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	66.608.510,00	65.142.080,00	66.608.510,00	65.142.080,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.062.181.000,00	1.061.680.900,00	483.580.900,00	483.355.900,00	578.600.100,00	578.325.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	354.748.905,00	320.680.430,00	342.138.905,00	273.537.930,00	12.610.000,00	47.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	873.600,00	873.600,00	873.600,00	873.600,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	319.100.500,00	290.450.000,00	306.490.500,00	243.307.500,00	12.610.000,00	47.142.500,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.866.855,00	6.744.355,00	10.866.855,00	6.744.355,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	23.907.950,00	22.612.475,00	23.907.950,00	22.612.475,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	150.002.000,00	144.699.280,00	150.002.000,00	144.699.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.002.000,00	144.699.280,00	150.002.000,00	144.699.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	84.375.750,00	83.540.400,00	84.375.750,00	83.540.400,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.626.250,00	61.158.880,00	65.626.250,00	61.158.880,00	0	0	0	0	0	0
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	155.205.181.220,00	151.597.101.247,98	133.749.081.374,00	131.187.429.185,98	21.456.099.846,00	20.409.672.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	92.094.077.140,00	90.252.548.616,00	71.535.326.824,00	70.544.794.288,00	20.558.750.316,00	19.707.754.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.342.904.155,00	50.280.154.610,00	50.342.904.155,00	50.280.154.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.061.700,00	11.061.700,00	11.061.700,00	11.061.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.846.550,00	1.846.550,00	1.846.550,00	1.846.550,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.846.500,00	1.846.500,00	1.846.500,00	1.846.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.839.750,00	1.839.750,00	1.839.750,00	1.839.750,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.344.450,00	2.344.450,00	2.344.450,00	2.344.450,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.481.350,00	1.481.350,00	1.481.350,00	1.481.350,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.703.100,00	1.703.100,00	1.703.100,00	1.703.100,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.994.631.185,00	49.955.371.217,00	49.994.631.185,00	49.955.371.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.210.935.085,00	49.171.675.117,00	49.210.935.085,00	49.171.675.117,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	765.852.000,00	765.852.000,00	765.852.000,00	765.852.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.021.850,00	1.021.850,00	1.021.850,00	1.021.850,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.549.500,00	15.549.500,00	15.549.500,00	15.549.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.272.750,00	1.272.750,00	1.272.750,00	1.272.750,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	86.956.600,00	82.185.000,00	86.956.600,00	82.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.213.200,00	0,00	1.213.200,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	85.743.400,00	82.185.000,00	85.743.400,00	82.185.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.312.350,00	10.229.750,00	16.312.350,00	10.229.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.312.350,00	10.229.750,00	16.312.350,00	10.229.750,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.388.682,00	49.421.450,00	53.388.682,00	49.421.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.624.982,00	7.500.000,00	7.624.982,00	7.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	572.250,00	0,00	572.250,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.611.450,00	21.611.450,00	21.611.450,00	21.611.450,00	0	0	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.580.000,00	20.310.000,00	23.580.000,00	20.310.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.310.367,00	89.241.678,00	97.310.367,00	89.241.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.324.000,00	9.724.000,00	16.324.000,00	9.724.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.986.367,00	79.517.678,00	80.986.367,00	79.517.678,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.243.271,00	82.643.815,00	83.243.271,00	82.643.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.060.271,00	58.528.383,00	59.060.271,00	58.528.383,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.700.000,00	20.632.432,00	20.700.000,00	20.632.432,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.483.000,00	3.483.000,00	3.483.000,00	3.483.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	39.601.234.499,00	37.978.972.109,00	19.042.484.183,00	18.271.217.781,00	20.558.750.316,00	19.707.754.328,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.093.603.363,00	27.209.279.311,00	8.410.653.047,00	8.301.279.983,00	19.682.950.316,00	18.907.999.328,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	20.523.650.316,00	19.648.101.778,00	1.040.700.000,00	940.102.450,00	19.482.950.316,00	18.707.999.328,00	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	201.750.000,00	201.050.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	182.760.000,00	179.595.263,00	182.760.000,00	179.595.263,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.021.984.872,00	7.021.359.680,00	7.021.984.872,00	7.021.359.680,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	163.458.175,00	159.172.590,00	163.458.175,00	159.172.590,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.368.807.926,00	10.644.279.588,00	10.493.007.926,00	9.844.524.588,00	875.800.000,00	799.755.000,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	568.769.550,00	486.863.992,00	568.769.550,00	486.863.992,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	225.123.767,00	92.923.950,00	225.123.767,00	92.923.950,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.999.450,00	14.999.450,00	14.999.450,00	14.999.450,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.999.350,00	10.549.350,00	14.999.350,00	10.549.350,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.254.650,00	21.656.199,00	22.254.650,00	21.656.199,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.999.450,00	14.999.450,00	14.999.450,00	14.999.450,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.099.322,00	35.706.322,00	36.099.322,00	35.706.322,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14.948.250,00	14.948.250,00	14.948.250,00	14.948.250,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.994.000,00	14.994.000,00	14.994.000,00	14.994.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.995.000,00	14.995.000,00	14.995.000,00	14.995.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	38.730.500,00	38.720.500,00	38.730.500,00	38.720.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	42.772.322,00	42.772.322,00	42.772.322,00	42.772.322,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	67.499.500,00	67.499.104,00	67.499.500,00	67.499.104,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	128.966.900,00	128.960.900,00	128.966.900,00	128.960.900,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	453.129.550,00	292.762.783,00	453.129.550,00	292.762.783,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.296.458.950,00	1.220.413.950,00	420.658.950,00	420.658.950,00	875.800.000,00	799.755.000,00	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	13.780.900,00	13.780.900,00	13.780.900,00	13.780.900,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	102.995.000,00	93.050.000,00	102.995.000,00	93.050.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	123.700.050,00	122.520.050,00	123.700.050,00	122.520.050,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.015.685.255,00	7.777.426.906,00	8.015.685.255,00	7.777.426.906,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8.140.000,00	8.040.000,00	8.140.000,00	8.040.000,00	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	43.850.000,00	33.630.000,00	43.850.000,00	33.630.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	82.066.210,00	82.066.210,00	82.066.210,00	82.066.210,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	36.020.085,00	22.785.085,00	36.020.085,00	22.785.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	36.020.085,00	22.785.085,00	36.020.085,00	22.785.085,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.803.125,00	102.628.125,00	102.803.125,00	102.628.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	20.000.000,00	19.855.000,00	20.000.000,00	19.855.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	48.500.050,00	48.500.050,00	48.500.050,00	48.500.050,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	34.303.075,00	34.273.075,00	34.303.075,00	34.273.075,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.167.054.246,00	1.023.625.295,00	1.167.054.246,00	1.023.625.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	32.762.000,00	27.026.000,00	32.762.000,00	27.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	32.762.000,00	27.026.000,00	32.762.000,00	27.026.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.134.292.246,00	996.599.295,00	1.134.292.246,00	996.599.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.134.292.246,00	996.599.295,00	1.134.292.246,00	996.599.295,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	287.086.600,00	285.772.862,00	287.086.600,00	285.772.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36.021.750,00	35.720.000,00	36.021.750,00	35.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36.021.750,00	35.720.000,00	36.021.750,00	35.720.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	140.562.900,00	140.107.347,00	140.562.900,00	140.107.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	140.562.900,00	140.107.347,00	140.562.900,00	140.107.347,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	110.501.950,00	109.945.515,00	110.501.950,00	109.945.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	110.501.950,00	109.945.515,00	110.501.950,00	109.945.515,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	695.797.640,00	684.023.740,00	695.797.640,00	684.023.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	450.271.820,00	438.647.920,00	450.271.820,00	438.647.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	450.271.820,00	438.647.920,00	450.271.820,00	438.647.920,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.170,00	24.850.170,00	25.000.170,00	24.850.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	25.000.170,00	24.850.170,00	25.000.170,00	24.850.170,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.525.650,00	220.525.650,00	220.525.650,00	220.525.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	220.525.650,00	220.525.650,00	220.525.650,00	220.525.650,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		PUSKESMAS LEWOLEBA	2.865.215.876,00	2.591.183.767,00	2.760.848.475,00	2.491.935.350,00	104.367.401,00	99.248.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.807.341.176,00	2.535.909.067,00	2.702.973.775,00	2.436.660.650,00	104.367.401,00	99.248.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.797.741.176,00	2.529.249.067,00	2.693.373.775,00	2.430.000.650,00	104.367.401,00	99.248.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.000.000,00	28.600.000,00	35.000.000,00	28.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	29.100.000,00	26.800.000,00	29.100.000,00	26.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.200.000,00	16.800.000,00	17.200.000,00	16.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	265.421.000,00	265.421.000,00	265.421.000,00	265.421.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.400.000,00	11.200.000,00	12.400.000,00	11.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.899.750,00	14.699.750,00	16.899.750,00	14.699.750,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	107.110.000,00	106.110.000,00	107.110.000,00	106.110.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.121.910.426,00	1.871.318.317,00	2.017.543.025,00	1.772.069.900,00	104.367.401,00	99.248.417,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	83.700.000,00	79.300.000,00	83.700.000,00	79.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.600.000,00	6.660.000,00	9.600.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.600.000,00	6.660.000,00	9.600.000,00	6.660.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.874.700,00	55.274.700,00	57.874.700,00	55.274.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.874.700,00	55.274.700,00	57.874.700,00	55.274.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	57.874.700,00	55.274.700,00	57.874.700,00	55.274.700,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS WAIPUKANG	1.798.389.404,00	1.698.172.044,00	1.669.533.520,00	1.581.752.660,00	128.855.884,00	116.419.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.791.200.154,00	1.690.982.794,00	1.662.344.270,00	1.574.563.410,00	128.855.884,00	116.419.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.781.600.154,00	1.682.102.794,00	1.652.744.270,00	1.565.683.410,00	128.855.884,00	116.419.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.650.000,00	29.850.000,00	31.650.000,00	29.850.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	236.824.000,00	233.424.000,00	236.824.000,00	233.424.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34.400.000,00	32.700.000,00	34.400.000,00	32.700.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	82.956.332,00	69.900.000,00	82.956.332,00	69.900.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.043.469.822,00	963.928.794,00	914.613.938,00	847.509.410,00	128.855.884,00	116.419.384,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	42.300.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	175.500.000,00	175.500.000,00	175.500.000,00	175.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.600.000,00	8.880.000,00	9.600.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.600.000,00	8.880.000,00	9.600.000,00	8.880.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.189.250,00	7.189.250,00	7.189.250,00	7.189.250,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.189.250,00	7.189.250,00	7.189.250,00	7.189.250,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.189.250,00	7.189.250,00	7.189.250,00	7.189.250,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS LAMA"AU	1.338.510.708,00	1.262.716.990,00	1.286.334.116,00	1.215.322.644,00	52.176.592,00	47.394.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.338.303.708,00	1.262.509.990,00	1.286.127.116,00	1.215.115.644,00	52.176.592,00	47.394.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.338.303.708,00	1.262.509.990,00	1.286.127.116,00	1.215.115.644,00	52.176.592,00	47.394.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.599.200,00	32.599.200,00	32.599.200,00	32.599.200,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	71.797.300,00	71.798.400,00	71.797.300,00	71.798.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	48.399.300,00	48.399.300,00	48.399.300,00	48.399.300,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	49.198.250,00	49.198.250,00	49.198.250,00	49.198.250,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.775.000,00	18.775.000,00	18.775.000,00	18.775.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	250.597.750,00	195.127.300,00	250.597.750,00	195.127.300,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22.999.600,00	22.999.600,00	22.999.600,00	22.999.600,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.199.750,00	15.775.100,00	16.199.750,00	15.775.100,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.224.350,00	101.649.600,00	101.224.350,00	101.649.600,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	694.113.608,00	673.788.640,00	641.937.016,00	626.394.294,00	52.176.592,00	47.394.346,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.499.800,00	9.499.800,00	9.499.800,00	9.499.800,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.699.800,00	3.699.800,00	3.699.800,00	3.699.800,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS HADAKEWA	1.573.942.636,00	1.540.823.406,00	1.526.541.903,00	1.508.192.406,00	47.400.733,00	32.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.560.136.736,00	1.527.017.506,00	1.512.736.003,00	1.494.386.506,00	47.400.733,00	32.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.560.136.736,00	1.527.017.506,00	1.512.736.003,00	1.494.386.506,00	47.400.733,00	32.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.400.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	247.772.000,00	247.772.000,00	247.772.000,00	247.772.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.900.000,00	22.899.650,00	22.900.000,00	22.899.650,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	116.399.900,00	116.399.900,00	116.399.900,00	116.399.900,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	924.445.436,00	891.326.556,00	877.044.703,00	858.695.556,00	47.400.733,00	32.631.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.744.400,00	3.744.400,00	3.744.400,00	3.744.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.175.000,00	16.175.000,00	16.175.000,00	16.175.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	60.600.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.805.900,00	13.805.900,00	13.805.900,00	13.805.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.805.900,00	13.805.900,00	13.805.900,00	13.805.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.805.900,00	13.805.900,00	13.805.900,00	13.805.900,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		PUSKESMAS BALAURING	1.889.512.416,00	1.692.983.909,00	1.813.553.592,00	1.620.336.883,00	75.958.824,00	72.647.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.885.712.416,00	1.691.283.909,00	1.809.753.592,00	1.618.636.883,00	75.958.824,00	72.647.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.885.712.416,00	1.691.283.909,00	1.809.753.592,00	1.618.636.883,00	75.958.824,00	72.647.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	53.800.000,00	56.200.000,00	53.800.000,00	56.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.600.000,00	7.200.000,00	9.600.000,00	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	273.460.000,00	270.848.000,00	273.460.000,00	270.848.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.600.000,00	16.500.000,00	16.600.000,00	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.600.000,00	3.600.000,00	4.600.000,00	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	59.200.000,00	56.800.000,00	59.200.000,00	56.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.301.652.416,00	1.112.735.909,00	1.225.693.592,00	1.040.088.883,00	75.958.824,00	72.647.026,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.400.000,00	3.000.000,00	5.400.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	8.400.000,00	7.200.000,00	8.400.000,00	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.200.000,00	23.600.000,00	26.200.000,00	23.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	64.800.000,00	73.600.000,00	64.800.000,00	73.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.800.000,00	1.700.000,00	3.800.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.800.000,00	1.700.000,00	3.800.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.800.000,00	1.700.000,00	3.800.000,00	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		PUSKESMAS WAIRIANG	1.838.138.871,00	1.764.257.408,00	1.809.399.042,00	1.740.162.408,00	28.739.829,00	24.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.793.139.011,00	1.719.257.548,00	1.764.399.182,00	1.695.162.548,00	28.739.829,00	24.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.783.459.011,00	1.710.377.548,00	1.754.719.182,00	1.686.282.548,00	28.739.829,00	24.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.000.000,00	44.000.000,00	46.000.000,00	44.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.405.000,00	28.405.000,00	28.405.000,00	28.405.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	84.620.000,00	83.620.000,00	84.620.000,00	83.620.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	257.265.000,00	253.660.000,00	257.265.000,00	253.660.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.800.000,00	18.200.000,00	18.800.000,00	18.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.600.000,00	96.600.000,00	99.600.000,00	96.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.136.769.011,00	1.080.292.548,00	1.108.029.182,00	1.056.197.548,00	28.739.829,00	24.095.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	21.800.000,00	21.600.000,00	21.800.000,00	21.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.680.000,00	8.880.000,00	9.680.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.680.000,00	8.880.000,00	9.680.000,00	8.880.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	44.999.860,00	44.999.860,00	44.999.860,00	44.999.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.999.860,00	44.999.860,00	44.999.860,00	44.999.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	44.999.860,00	44.999.860,00	44.999.860,00	44.999.860,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		PUSKESMAS LOANG	1.631.041.647,00	1.529.305.782,00	1.604.017.679,00	1.504.838.137,00	27.023.968,00	24.467.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.623.841.647,00	1.522.105.782,00	1.596.817.679,00	1.497.638.137,00	27.023.968,00	24.467.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.610.521.647,00	1.508.785.782,00	1.583.497.679,00	1.484.318.137,00	27.023.968,00	24.467.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.750.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.000.000,00	25.800.000,00	26.000.000,00	25.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	61.375.000,00	56.575.000,00	61.375.000,00	56.575.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	28.100.250,00	28.100.250,00	28.100.250,00	28.100.250,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32.050.000,00	32.050.000,00	32.050.000,00	32.050.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	197.618.000,00	188.279.261,00	197.618.000,00	188.279.261,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.600.000,00	16.500.000,00	16.600.000,00	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.400.000,00	11.300.000,00	11.400.000,00	11.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	135.717.650,00	130.782.000,00	135.717.650,00	130.782.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	940.860.747,00	861.799.271,00	913.836.779,00	837.331.626,00	27.023.968,00	24.467.645,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	28.700.000,00	25.500.000,00	28.700.000,00	25.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		PUSKESMAS WAIKNUIT	1.250.107.384,00	1.210.538.784,00	1.224.112.934,00	1.188.858.783,00	25.994.450,00	21.680.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.242.207.384,00	1.202.638.784,00	1.216.212.934,00	1.180.958.783,00	25.994.450,00	21.680.001,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.242.207.384,00	1.202.638.784,00	1.216.212.934,00	1.180.958.783,00	25.994.450,00	21.680.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.900.000,00	34.900.000,00	34.900.000,00	34.900.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	189.174.800,00	189.174.800,00	189.174.800,00	189.174.800,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.304.800,00	17.999.800,00	23.304.800,00	17.999.800,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	108.299.500,00	107.799.500,00	108.299.500,00	107.799.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	706.028.484,00	675.264.684,00	680.034.034,00	653.584.683,00	25.994.450,00	21.680.001,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	7.499.800,00	4.500.000,00	7.499.800,00	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		PUSKESMAS WULANDONI	1.518.226.890,00	1.449.850.655,00	1.457.765.408,00	1.391.251.481,00	60.461.482,00	58.599.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.465.333.390,00	1.396.957.155,00	1.404.871.908,00	1.338.357.981,00	60.461.482,00	58.599.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.465.333.390,00	1.396.957.155,00	1.404.871.908,00	1.338.357.981,00	60.461.482,00	58.599.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.800.000,00	4.400.000,00	8.800.000,00	4.400.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.328.850,00	17.289.550,00	17.328.850,00	17.289.550,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.728.500,00	11.728.500,00	11.728.500,00	11.728.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	178.681.900,00	176.957.900,00	178.681.900,00	176.957.900,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.500.000,00	7.310.450,00	14.500.000,00	7.310.450,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.450.000,00	105.100.000,00	105.450.000,00	105.100.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	870.819.140,00	825.845.755,00	810.357.658,00	767.246.581,00	60.461.482,00	58.599.174,00	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	35.325.000,00	35.325.000,00	35.325.000,00	35.325.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	133.800.000,00	124.100.000,00	133.800.000,00	124.100.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	52.893.500,00	52.893.500,00	52.893.500,00	52.893.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.893.500,00	52.893.500,00	52.893.500,00	52.893.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	52.893.500,00	52.893.500,00	52.893.500,00	52.893.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		PUSKESMAS PADA	1.145.028.341,00	1.090.339.776,00	1.124.882.565,00	1.072.404.500,00	20.145.776,00	17.935.276,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.113.701.891,00	1.059.072.826,00	1.093.556.115,00	1.041.137.550,00	20.145.776,00	17.935.276,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.102.101.891,00	1.047.472.826,00	1.081.956.115,00	1.029.537.550,00	20.145.776,00	17.935.276,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.470.000,00	52.350.000,00	52.470.000,00	52.350.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	172.631.250,00	172.383.500,00	172.631.250,00	172.383.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.828.650,00	31.420.900,00	32.828.650,00	31.420.900,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	135.842.600,00	122.412.300,00	135.842.600,00	122.412.300,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	597.211.641,00	558.688.376,00	577.065.865,00	540.753.100,00	20.145.776,00	17.935.276,00	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	35.817.750,00	34.917.750,00	35.817.750,00	34.917.750,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31.326.450,00	31.266.950,00	31.326.450,00	31.266.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.326.450,00	31.266.950,00	31.326.450,00	31.266.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.326.450,00	31.266.950,00	31.326.450,00	31.266.950,00	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		PUSKESMAS BEAN	1.807.948.447,00	1.608.132.915,00	1.733.457.592,00	1.535.475.985,00	74.490.855,00	72.656.930,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.791.948.447,00	1.592.132.915,00	1.717.457.592,00	1.519.475.985,00	74.490.855,00	72.656.930,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.791.948.447,00	1.592.132.915,00	1.717.457.592,00	1.519.475.985,00	74.490.855,00	72.656.930,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	132.000.000,00	111.160.000,00	132.000.000,00	111.160.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	61.200.000,00	59.400.000,00	61.200.000,00	59.400.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	80.000.000,00	68.000.000,00	80.000.000,00	68.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	87.700.000,00	87.700.000,00	87.700.000,00	87.700.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	541.454.095,00	487.067.996,00	541.454.095,00	487.067.996,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	60.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00	45.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.300.000,00	25.200.000,00	26.300.000,00	25.200.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.599.900,00	32.599.900,00	36.599.900,00	32.599.900,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	116.779.650,00	113.779.650,00	116.779.650,00	113.779.650,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	579.914.902,00	496.725.469,00	505.424.047,00	424.068.539,00	74.490.855,00	72.656.930,00	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	44.899.900,00	40.399.900,00	44.899.900,00	40.399.900,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		PUSKESMAS AUTONAPOQ	1.132.524.678,00	1.119.815.152,00	1.098.679.921,00	1.090.144.867,00	33.844.957,00	29.670.285,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.117.716.902,00	1.105.007.176,00	1.083.871.945,00	1.075.336.891,00	33.844.957,00	29.670.285,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.112.016.902,00	1.099.307.176,00	1.078.171.945,00	1.069.636.891,00	33.844.957,00	29.670.285,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	201.210.000,00	201.210.000,00	201.210.000,00	201.210.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	46.189.300,00	38.900.000,00	46.189.300,00	38.900.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	107.200.000,00	107.200.000,00	107.200.000,00	107.200.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	551.117.602,00	545.697.176,00	517.272.645,00	516.026.891,00	33.844.957,00	29.670.285,00	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.807.976,00	14.807.976,00	14.807.976,00	14.807.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.807.976,00	14.807.976,00	14.807.976,00	14.807.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.807.976,00	14.807.976,00	14.807.976,00	14.807.976,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	43.322.516.582,00	42.786.432.043,98	43.104.627.803,00	42.701.958.793,98	217.888.779,00	84.473.250,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.168.611.460,00	19.085.145.266,00	19.119.997.285,00	19.036.555.016,00	48.614.175,00	48.590.250,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.694.230,00	13.864.500,00	14.694.230,00	13.864.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.224.750,00	2.091.000,00	2.224.750,00	2.091.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.226.850,00	2.150.500,00	2.226.850,00	2.150.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.051.300,00	2.975.000,00	3.051.300,00	2.975.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.746.800,00	2.710.500,00	2.746.800,00	2.710.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.075.500,00	1.936.000,00	2.075.500,00	1.936.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.369.030,00	2.001.500,00	2.369.030,00	2.001.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.979.927.180,00	18.956.697.416,00	18.979.927.180,00	18.956.697.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.759.663.957,00	18.750.105.193,00	18.759.663.957,00	18.750.105.193,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	214.212.000,00	200.541.000,00	214.212.000,00	200.541.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.229.487,00	3.229.487,00	3.229.487,00	3.229.487,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2.821.736,00	2.821.736,00	2.821.736,00	2.821.736,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.817.000,00	46.315.000,00	55.817.000,00	46.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.661.250,00	2.537.500,00	2.661.250,00	2.537.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.155.750,00	43.777.500,00	53.155.750,00	43.777.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.327.875,00	5.122.500,00	5.327.875,00	5.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.327.875,00	5.122.500,00	5.327.875,00	5.122.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.414.175,00	50.390.250,00	1.800.000,00	1.800.000,00	48.614.175,00	48.590.250,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.414.175,00	50.390.250,00	1.800.000,00	1.800.000,00	48.614.175,00	48.590.250,00	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.431.000,00	12.755.600,00	62.431.000,00	12.755.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.431.000,00	12.755.600,00	62.431.000,00	12.755.600,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.005.814.247,00	16.638.728.897,00	16.836.539.643,00	16.602.845.897,00	169.274.604,00	35.883.000,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.656.159.519,00	9.383.142.294,00	9.493.812.619,00	9.353.142.294,00	162.346.900,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	941.714.886,00	940.329.461,00	941.714.886,00	940.329.461,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	352.363.500,00	352.355.002,00	352.363.500,00	352.355.002,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	162.346.900,00	30.000.000,00	0	0	162.346.900,00	30.000.000,00	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.199.734.233,00	8.060.457.831,00	8.199.734.233,00	8.060.457.831,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.349.654.728,00	7.255.586.603,00	7.342.727.024,00	7.249.703.603,00	6.927.704,00	5.883.000,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	144.152.054,00	142.985.425,00	137.224.350,00	137.102.425,00	6.927.704,00	5.883.000,00	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.325.218.864,00	5.325.218.784,00	5.325.218.864,00	5.325.218.784,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.384.813.235,00	1.315.347.866,00	1.384.813.235,00	1.315.347.866,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	495.470.575,00	472.034.528,00	495.470.575,00	472.034.528,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.884.662.000,00	6.800.838.157,98	6.884.662.000,00	6.800.838.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.884.662.000,00	6.800.838.157,98	6.884.662.000,00	6.800.838.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	6.884.662.000,00	6.800.838.157,98	6.884.662.000,00	6.800.838.157,98	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	263.428.875,00	261.719.723,00	263.428.875,00	261.719.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.198.950,00	88.866.100,00	89.198.950,00	88.866.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	89.198.950,00	88.866.100,00	89.198.950,00	88.866.100,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.229.925,00	172.853.623,00	174.229.925,00	172.853.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	174.229.925,00	172.853.623,00	174.229.925,00	172.853.623,00	0	0	0	0	0	0
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.758.991.538,00	25.666.611.413,00	18.174.816.743,00	17.091.105.223,00	8.584.174.795,00	8.575.506.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.758.991.538,00	25.666.611.413,00	18.174.816.743,00	17.091.105.223,00	8.584.174.795,00	8.575.506.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.920.277.249,00	4.882.250.155,00	4.920.277.249,00	4.882.250.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.773.965.259,00	4.753.864.884,00	4.773.965.259,00	4.753.864.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.655.228.484,00	4.640.143.884,00	4.655.228.484,00	4.640.143.884,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	118.736.775,00	113.721.000,00	118.736.775,00	113.721.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.525.000,00	27.720.250,00	29.525.000,00	27.720.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.525.000,00	27.720.250,00	29.525.000,00	27.720.250,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.457.829,00	20.430.950,00	30.457.829,00	20.430.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.706.044,00	4.699.050,00	4.706.044,00	4.699.050,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.951.785,00	3.946.900,00	3.951.785,00	3.946.900,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.800.000,00	11.785.000,00	21.800.000,00	11.785.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.177.718,00	17.861.100,00	23.177.718,00	17.861.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.177.718,00	17.861.100,00	23.177.718,00	17.861.100,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.151.443,00	62.372.971,00	63.151.443,00	62.372.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.151.443,00	62.372.971,00	63.151.443,00	62.372.971,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.474.279.792,00	7.512.793.620,00	7.283.807.292,00	6.322.949.120,00	1.190.472.500,00	1.189.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.474.279.792,00	7.512.793.620,00	7.283.807.292,00	6.322.949.120,00	1.190.472.500,00	1.189.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.474.279.792,00	7.512.793.620,00	7.283.807.292,00	6.322.949.120,00	1.190.472.500,00	1.189.844.500,00	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.263.055.528,00	5.219.719.184,00	5.263.055.528,00	5.219.719.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.263.055.528,00	5.219.719.184,00	5.263.055.528,00	5.219.719.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.263.055.528,00	5.219.719.184,00	5.263.055.528,00	5.219.719.184,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	8.051.378.969,00	8.007.170.655,00	657.676.674,00	621.508.965,00	7.393.702.295,00	7.385.661.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8.051.378.969,00	8.007.170.655,00	657.676.674,00	621.508.965,00	7.393.702.295,00	7.385.661.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	6.617.798.206,00	6.579.697.930,00	558.320.911,00	523.436.240,00	6.059.477.295,00	6.056.261.690,00	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.433.580.763,00	1.427.472.725,00	99.355.763,00	98.072.725,00	1.334.225.000,00	1.329.400.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	50.000.000,00	44.677.799,00	50.000.000,00	44.677.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	44.677.799,00	50.000.000,00	44.677.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	50.000.000,00	44.677.799,00	50.000.000,00	44.677.799,00	0	0	0	0	0	0
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.353.838.426,00	3.331.598.902,00	3.344.380.736,00	3.322.598.902,00	9.457.690,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.353.838.426,00	3.331.598.902,00	3.344.380.736,00	3.322.598.902,00	9.457.690,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.312.284.939,00	2.295.103.712,00	2.302.827.249,00	2.286.103.712,00	9.457.690,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.531.148,00	8.531.148,00	8.531.148,00	8.531.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.028.212,00	1.028.212,00	1.028.212,00	1.028.212,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.182.586,00	1.182.586,00	1.182.586,00	1.182.586,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.394.650,00	1.394.650,00	1.394.650,00	1.394.650,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.449.600,00	1.449.600,00	1.449.600,00	1.449.600,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.480.700,00	1.480.700,00	1.480.700,00	1.480.700,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.995.400,00	1.995.400,00	1.995.400,00	1.995.400,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.093.402.092,00	2.090.731.410,00	2.093.402.092,00	2.090.731.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.985.533.720,00	1.984.303.038,00	1.985.533.720,00	1.984.303.038,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.480.000,00	104.040.000,00	105.480.000,00	104.040.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.388.086,00	1.388.086,00	1.388.086,00	1.388.086,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.000.286,00	1.000.286,00	1.000.286,00	1.000.286,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.645.650,00	13.925.650,00	20.645.650,00	13.925.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.645.650,00	13.925.650,00	20.645.650,00	13.925.650,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.938.761,00	47.524.241,00	47.938.761,00	47.524.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.529.544,00	2.529.544,00	2.529.544,00	2.529.544,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.069.385,00	3.069.385,00	3.069.385,00	3.069.385,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.894.832,00	3.894.832,00	3.894.832,00	3.894.832,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.445.000,00	38.030.480,00	38.445.000,00	38.030.480,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.457.690,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.457.690,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.457.690,00	9.000.000,00	0	0	9.457.690,00	9.000.000,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.683.104,00	105.866.337,00	110.683.104,00	105.866.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.755.840,00	87.950.000,00	92.755.840,00	87.950.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.537.400,00	16.526.473,00	16.537.400,00	16.526.473,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.389.864,00	1.389.864,00	1.389.864,00	1.389.864,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.626.494,00	19.524.926,00	21.626.494,00	19.524.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.626.494,00	19.524.926,00	21.626.494,00	19.524.926,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	131.978.281,00	131.470.381,00	131.978.281,00	131.470.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.582.050,00	9.562.050,00	9.582.050,00	9.562.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2.524.150,00	2.524.150,00	2.524.150,00	2.524.150,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	2.299.100,00	2.299.100,00	2.299.100,00	2.299.100,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	2.299.100,00	2.299.100,00	2.299.100,00	2.299.100,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.459.700,00	2.439.700,00	2.459.700,00	2.439.700,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.321.150,00	3.271.150,00	3.321.150,00	3.271.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	3.321.150,00	3.271.150,00	3.321.150,00	3.271.150,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	119.075.081,00	118.637.181,00	119.075.081,00	118.637.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	119.075.081,00	118.637.181,00	119.075.081,00	118.637.181,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	140.650.350,00	136.249.953,00	140.650.350,00	136.249.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	140.650.350,00	136.249.953,00	140.650.350,00	136.249.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	140.650.350,00	136.249.953,00	140.650.350,00	136.249.953,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	768.924.856,00	768.774.856,00	768.924.856,00	768.774.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	768.924.856,00	768.774.856,00	768.924.856,00	768.774.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	768.924.856,00	768.774.856,00	768.924.856,00	768.774.856,00	0	0	0	0	0	0
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.017.130.039,00	6.923.206.133,00	6.691.139.183,00	6.602.578.511,00	325.990.856,00	320.627.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.013.007.434,00	3.955.387.273,00	3.840.216.578,00	3.787.800.998,00	172.790.856,00	167.586.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.139.605.133,00	3.111.369.633,00	2.997.226.828,00	2.970.238.358,00	142.378.305,00	141.131.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.454.500,00	15.454.500,00	15.454.500,00	15.454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.321.750,00	2.321.750,00	2.321.750,00	2.321.750,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.306.750,00	2.306.750,00	2.306.750,00	2.306.750,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.306.750,00	2.306.750,00	2.306.750,00	2.306.750,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.306.750,00	2.306.750,00	2.306.750,00	2.306.750,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.538.250,00	3.538.250,00	3.538.250,00	3.538.250,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.674.250,00	2.674.250,00	2.674.250,00	2.674.250,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.739.817.873,00	2.725.110.503,00	2.739.817.873,00	2.725.110.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.598.684.573,00	2.597.765.203,00	2.598.684.573,00	2.597.765.203,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.703.300,00	123.915.300,00	137.703.300,00	123.915.300,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.306.750,00	2.306.750,00	2.306.750,00	2.306.750,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.123.250,00	1.123.250,00	1.123.250,00	1.123.250,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.008.750,00	20.228.500,00	24.008.750,00	20.228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.689.500,00	1.689.500,00	1.689.500,00	1.689.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.319.250,00	18.539.000,00	22.319.250,00	18.539.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.166.250,00	4.166.250,00	4.166.250,00	4.166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.889.500,00	1.889.500,00	1.889.500,00	1.889.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.276.750,00	2.276.750,00	2.276.750,00	2.276.750,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.621.350,00	122.165.450,00	122.621.350,00	122.165.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.472.478,00	2.472.478,00	2.472.478,00	2.472.478,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.613.872,00	14.603.372,00	14.613.872,00	14.603.372,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.837.000,00	12.837.000,00	12.837.000,00	12.837.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.698.000,00	92.252.600,00	92.698.000,00	92.252.600,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148.455.830,00	147.183.800,00	6.077.525,00	6.052.525,00	142.378.305,00	141.131.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.455.830,00	147.183.800,00	6.077.525,00	6.052.525,00	142.378.305,00	141.131.275,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.989.820,00	16.911.821,00	19.989.820,00	16.911.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.795.650,00	2.784.000,00	2.795.650,00	2.784.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.097.400,00	13.031.051,00	16.097.400,00	13.031.051,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.096.770,00	1.096.770,00	1.096.770,00	1.096.770,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.090.760,00	60.148.809,00	65.090.760,00	60.148.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.825.000,00	47.883.809,00	52.825.000,00	47.883.809,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.965.760,00	4.965.000,00	4.965.760,00	4.965.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	721.788.051,00	707.864.710,00	691.375.500,00	681.409.710,00	30.412.551,00	26.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	556.490.350,00	550.961.210,00	556.490.350,00	550.961.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3.399.250,00	3.369.250,00	3.399.250,00	3.369.250,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.699.250,00	3.299.250,00	3.699.250,00	3.299.250,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	24.112.250,00	24.112.250,00	24.112.250,00	24.112.250,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.264.250,00	2.263.950,00	2.264.250,00	2.263.950,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	83.822.250,00	80.878.410,00	83.822.250,00	80.878.410,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	418.630.100,00	417.465.100,00	418.630.100,00	417.465.100,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	18.395.500,00	17.405.500,00	18.395.500,00	17.405.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	2.167.500,00	2.167.500,00	2.167.500,00	2.167.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	152.279.201,00	145.155.400,00	121.866.650,00	118.700.400,00	30.412.551,00	26.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.636.500,00	1.636.500,00	1.636.500,00	1.636.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.443.250,00	1.443.250,00	1.443.250,00	1.443.250,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	30.412.551,00	26.455.000,00	0	0	30.412.551,00	26.455.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.448.250,00	10.373.250,00	10.448.250,00	10.373.250,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	108.338.650,00	105.247.400,00	108.338.650,00	105.247.400,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	13.018.500,00	11.748.100,00	13.018.500,00	11.748.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4.754.250,00	3.549.250,00	4.754.250,00	3.549.250,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	8.264.250,00	8.198.850,00	8.264.250,00	8.198.850,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	151.614.250,00	136.152.930,00	151.614.250,00	136.152.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.459.000,00	24.434.000,00	24.459.000,00	24.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.459.000,00	24.434.000,00	24.459.000,00	24.434.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	127.155.250,00	111.718.930,00	127.155.250,00	111.718.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	127.155.250,00	111.718.930,00	127.155.250,00	111.718.930,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.004.122.605,00	2.967.818.860,00	2.850.922.605,00	2.814.777.513,00	153.200.000,00	153.041.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.093.754.378,00	2.083.895.252,00	2.093.754.378,00	2.083.895.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.217.500,00	2.217.500,00	2.217.500,00	2.217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0002	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0004	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.854.855.430,00	1.850.471.772,00	1.854.855.430,00	1.850.471.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.745.847.430,00	1.745.704.372,00	1.745.847.430,00	1.745.704.372,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.008.000,00	104.767.400,00	109.008.000,00	104.767.400,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.109.750,00	14.805.400,00	18.109.750,00	14.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.109.750,00	14.805.400,00	18.109.750,00	14.805.400,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.362.906,00	54.210.580,00	54.362.906,00	54.210.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.238.941,00	2.235.000,00	2.238.941,00	2.235.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.718.415,00	8.587.080,00	8.718.415,00	8.587.080,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.720.550,00	9.719.600,00	9.720.550,00	9.719.600,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.685.000,00	33.668.900,00	33.685.000,00	33.668.900,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.498.792,00	100.493.000,00	102.498.792,00	100.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84.031.000,00	84.030.000,00	84.031.000,00	84.030.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.401.400,00	15.463.000,00	17.401.400,00	15.463.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.066.392,00	1.000.000,00	1.066.392,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.710.000,00	61.697.000,00	61.710.000,00	61.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.710.000,00	61.697.000,00	61.710.000,00	61.697.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	910.368.227,00	883.923.608,00	757.168.227,00	730.882.261,00	153.200.000,00	153.041.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	155.286.894,00	154.062.200,00	155.286.894,00	154.062.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	155.286.894,00	154.062.200,00	155.286.894,00	154.062.200,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	79.727.648,00	78.455.061,00	79.727.648,00	78.455.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	79.727.648,00	78.455.061,00	79.727.648,00	78.455.061,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	675.353.685,00	651.406.347,00	522.153.685,00	498.365.000,00	153.200.000,00	153.041.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0010	Kordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	675.353.685,00	651.406.347,00	522.153.685,00	498.365.000,00	153.200.000,00	153.041.347,00	0	0	0	0
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.797.401.335,00	3.536.396.827,00	3.797.401.335,00	3.536.396.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.797.401.335,00	3.536.396.827,00	3.797.401.335,00	3.536.396.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.631.030.648,00	2.625.323.309,00	2.631.030.648,00	2.625.323.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.479.200,00	3.478.150,00	3.479.200,00	3.478.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.925.350,00	1.925.350,00	1.925.350,00	1.925.350,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.553.850,00	1.552.800,00	1.553.850,00	1.552.800,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.470.507.283,00	2.465.957.233,00	2.470.507.283,00	2.465.957.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.334.208.883,00	2.334.208.883,00	2.334.208.883,00	2.334.208.883,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134.066.000,00	129.516.000,00	134.066.000,00	129.516.000,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2.232.400,00	2.232.350,00	2.232.400,00	2.232.350,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.940.100,00	19.890.100,00	20.940.100,00	19.890.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.940.100,00	19.890.100,00	20.940.100,00	19.890.100,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.320.080,00	2.317.000,00	2.320.080,00	2.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.05.0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.320.080,00	2.317.000,00	2.320.080,00	2.317.000,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.702.691,00	11.617.291,00	11.702.691,00	11.617.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.685.051,00	1.684.851,00	1.685.051,00	1.684.851,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.337.640,00	1.337.440,00	1.337.640,00	1.337.440,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.680.000,00	8.595.000,00	8.680.000,00	8.595.000,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.012.294,00	74.999.414,00	75.012.294,00	74.999.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.400.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.993.130,00	9.980.250,00	9.993.130,00	9.980.250,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.619.164,00	2.619.164,00	2.619.164,00	2.619.164,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.069.000,00	47.064.121,00	47.069.000,00	47.064.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.200.000,00	41.195.121,00	41.200.000,00	41.195.121,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.709.000,00	2.709.000,00	2.709.000,00	2.709.000,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	125.720.400,00	122.089.730,00	125.720.400,00	122.089.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	125.720.400,00	122.089.730,00	125.720.400,00	122.089.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	125.720.400,00	122.089.730,00	125.720.400,00	122.089.730,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.040.650.287,00	788.983.788,00	1.040.650.287,00	788.983.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.040.650.287,00	788.983.788,00	1.040.650.287,00	788.983.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	769.825.800,00	518.365.550,00	769.825.800,00	518.365.550,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	192.520.708,00	192.382.079,00	192.520.708,00	192.382.079,00	0	0	0	0
1.06	2.08.2.14.1.06.01.0000	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	78.303.779,00	78.236.159,00	78.303.779,00	78.236.159,00	0	0	0	0
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	45.247.410.915,00	44.251.525.097,00	43.022.627.542,00	42.088.225.802,00	2.224.783.373,00	2.163.299.295,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.555.717.634,00	3.463.736.095,00	3.516.451.203,00	3.424.485.595,00	39.266.431,00	39.250.500,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.555.717.634,00	3.463.736.095,00	3.516.451.203,00	3.424.485.595,00	39.266.431,00	39.250.500,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.771.801.750,00	1.760.210.345,00	1.751.442.068,00	1.739.866.345,00	20.359.682,00	20.344.000,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.359.933,00	10.359.633,00	10.359.933,00	10.359.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.285.132,00	4.284.832,00	4.285.132,00	4.284.832,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.535.153,00	1.535.153,00	1.535.153,00	1.535.153,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.196.049,00	1.196.049,00	1.196.049,00	1.196.049,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.328.040,00	1.328.040,00	1.328.040,00	1.328.040,00	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	958.194,00	958.194,00	958.194,00	958.194,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.057.365,00	1.057.365,00	1.057.365,00	1.057.365,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.660.335.512,00	1.657.456.208,00	1.660.335.512,00	1.657.456.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.556.657.780,00	1.556.202.101,00	1.556.657.780,00	1.556.202.101,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	101.304.000,00	98.904.000,00	101.304.000,00	98.904.000,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.207.521,00	1.183.896,00	1.207.521,00	1.183.896,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/ Semesteran SKPD	1.166.211,00	1.166.211,00	1.166.211,00	1.166.211,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.608.453,00	13.603.383,00	13.608.453,00	13.603.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.168.787,00	1.168.787,00	1.168.787,00	1.168.787,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.439.666,00	12.434.596,00	12.439.666,00	12.434.596,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	986.602,00	986.602,00	986.602,00	986.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	986.602,00	986.602,00	986.602,00	986.602,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.452.507,00	33.237.107,00	33.452.507,00	33.237.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	642.950,00	642.950,00	642.950,00	642.950,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.133.557,00	2.133.557,00	2.133.557,00	2.133.557,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.361.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.315.000,00	29.099.600,00	29.315.000,00	29.099.600,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.359.682,00	20.344.000,00	0,00	0,00	20.359.682,00	20.344.000,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	7.389.458,00	7.374.000,00	0	0	7.389.458,00	7.374.000,00	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.970.224,00	12.970.000,00	0	0	12.970.224,00	12.970.000,00	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.931.561,00	10.581.698,00	16.931.561,00	10.581.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.203.345,00	1.203.345,00	1.203.345,00	1.203.345,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.501.114,00	8.152.300,00	14.501.114,00	8.152.300,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.227.102,00	1.226.053,00	1.227.102,00	1.226.053,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.767.500,00	13.641.714,00	15.767.500,00	13.641.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.767.500,00	13.641.714,00	15.767.500,00	13.641.714,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1.917.307,00	1.917.307,00	1.917.307,00	1.917.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1.917.307,00	1.917.307,00	1.917.307,00	1.917.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	1.917.307,00	1.917.307,00	1.917.307,00	1.917.307,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.758.993.194,00	1.678.708.330,00	1.740.086.445,00	1.659.801.830,00	18.906.749,00	18.906.500,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.758.993.194,00	1.678.708.330,00	1.740.086.445,00	1.659.801.830,00	18.906.749,00	18.906.500,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.758.993.194,00	1.678.708.330,00	1.740.086.445,00	1.659.801.830,00	18.906.749,00	18.906.500,00	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	8.529.351,00	8.519.351,00	8.529.351,00	8.519.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	3.363.889,00	3.363.889,00	3.363.889,00	3.363.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	3.363.889,00	3.363.889,00	3.363.889,00	3.363.889,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	5.165.462,00	5.155.462,00	5.165.462,00	5.155.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	5.165.462,00	5.155.462,00	5.165.462,00	5.155.462,00	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	14.476.032,00	14.380.762,00	14.476.032,00	14.380.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.682.695,00	9.662.425,00	9.682.695,00	9.662.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	9.682.695,00	9.662.425,00	9.682.695,00	9.662.425,00	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	4.793.337,00	4.718.337,00	4.793.337,00	4.718.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.02.0000	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.793.337,00	4.718.337,00	4.793.337,00	4.718.337,00	0	0	0	0
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.945.695.278,00	2.916.577.805,00	2.836.628.015,00	2.807.963.950,00	109.067.263,00	108.613.855,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.945.695.278,00	2.916.577.805,00	2.836.628.015,00	2.807.963.950,00	109.067.263,00	108.613.855,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.655.163.802,00	1.652.173.669,00	1.655.163.802,00	1.652.173.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.861.350,00	6.861.350,00	6.861.350,00	6.861.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.327.750,00	1.327.750,00	1.327.750,00	1.327.750,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.599.150,00	1.599.150,00	1.599.150,00	1.599.150,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.448.550,00	1.448.550,00	1.448.550,00	1.448.550,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.161.950,00	1.161.950,00	1.161.950,00	1.161.950,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.323.950,00	1.323.950,00	1.323.950,00	1.323.950,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.497.837.589,00	1.496.432.974,00	1.497.837.589,00	1.496.432.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.400.474.739,00	1.399.070.124,00	1.400.474.739,00	1.399.070.124,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.908.000,00	95.908.000,00	95.908.000,00	95.908.000,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.454.850,00	1.454.850,00	1.454.850,00	1.454.850,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.058.950,00	18.058.950,00	18.058.950,00	18.058.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.058.950,00	18.058.950,00	18.058.950,00	18.058.950,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.216.536,00	3.216.536,00	3.216.536,00	3.216.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.685.800,00	1.685.800,00	1.685.800,00	1.685.800,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.530.736,00	1.530.736,00	1.530.736,00	1.530.736,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.822.327,00	39.662.009,00	39.822.327,00	39.662.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.458.627,00	8.458.627,00	8.458.627,00	8.458.627,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.815.700,00	3.815.700,00	3.815.700,00	3.815.700,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.548.000,00	27.387.682,00	27.548.000,00	27.387.682,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.387.050,00	49.961.850,00	51.387.050,00	49.961.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.254.250,00	4.250.000,00	4.254.250,00	4.250.000,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.307.800,00	13.886.850,00	15.307.800,00	13.886.850,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.825.000,00	31.825.000,00	31.825.000,00	31.825.000,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.980.000,00	37.980.000,00	37.980.000,00	37.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.980.000,00	37.980.000,00	37.980.000,00	37.980.000,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	484.848.697,00	484.763.797,00	484.848.697,00	484.763.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	56.641.697,00	56.566.797,00	56.641.697,00	56.566.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	56.641.697,00	56.566.797,00	56.641.697,00	56.566.797,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	428.207.000,00	428.197.000,00	428.207.000,00	428.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	428.207.000,00	428.197.000,00	428.207.000,00	428.197.000,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	269.202.495,00	258.680.648,00	199.118.043,00	188.637.593,00	70.084.452,00	70.043.055,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	269.202.495,00	258.680.648,00	199.118.043,00	188.637.593,00	70.084.452,00	70.043.055,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	269.202.495,00	258.680.648,00	199.118.043,00	188.637.593,00	70.084.452,00	70.043.055,00	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	233.597.739,00	219.091.428,00	194.614.928,00	180.520.628,00	38.982.811,00	38.570.800,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.871.319,00	84.121.319,00	87.871.319,00	84.121.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	87.871.319,00	84.121.319,00	87.871.319,00	84.121.319,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	145.726.420,00	134.970.109,00	106.743.609,00	96.399.309,00	38.982.811,00	38.570.800,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.754.884,00	83.083.573,00	44.772.073,00	44.512.773,00	38.982.811,00	38.570.800,00	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.971.536,00	51.886.536,00	61.971.536,00	51.886.536,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	136.544.116,00	135.604.837,00	136.544.116,00	135.604.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	136.544.116,00	135.604.837,00	136.544.116,00	135.604.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	136.544.116,00	135.604.837,00	136.544.116,00	135.604.837,00	0	0	0	0
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	166.338.429,00	166.263.426,00	166.338.429,00	166.263.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	166.338.429,00	166.263.426,00	166.338.429,00	166.263.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	166.338.429,00	166.263.426,00	166.338.429,00	166.263.426,00	0	0	0	0
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	914.079.315,00	840.737.450,00	530.764.315,00	458.483.450,00	383.315.000,00	382.254.000,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	914.079.315,00	840.737.450,00	530.764.315,00	458.483.450,00	383.315.000,00	382.254.000,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	856.015.965,00	803.176.750,00	472.700.965,00	420.922.750,00	383.315.000,00	382.254.000,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	563.560.665,00	538.864.200,00	180.245.665,00	156.610.200,00	383.315.000,00	382.254.000,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	536.641.215,00	513.305.550,00	153.326.215,00	131.051.550,00	383.315.000,00	382.254.000,00	0	0
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	6.255.900,00	6.065.500,00	6.255.900,00	6.065.500,00	0	0	0	0
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	20.663.550,00	19.493.150,00	20.663.550,00	19.493.150,00	0	0	0	0
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	292.455.300,00	264.312.550,00	292.455.300,00	264.312.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	292.455.300,00	264.312.550,00	292.455.300,00	264.312.550,00	0	0	0	0
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	30.877.800,00	26.377.800,00	30.877.800,00	26.377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	30.877.800,00	26.377.800,00	30.877.800,00	26.377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	30.877.800,00	26.377.800,00	30.877.800,00	26.377.800,00	0	0	0	0	0	0
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	27.185.550,00	11.182.900,00	27.185.550,00	11.182.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	27.185.550,00	11.182.900,00	27.185.550,00	11.182.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	27.185.550,00	11.182.900,00	27.185.550,00	11.182.900,00	0	0	0	0	0	0
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	307.867.200,00	307.456.390,00	267.267.200,00	266.856.390,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	307.867.200,00	307.456.390,00	267.267.200,00	266.856.390,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	307.867.200,00	307.456.390,00	267.267.200,00	266.856.390,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	307.867.200,00	307.456.390,00	267.267.200,00	266.856.390,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	307.867.200,00	307.456.390,00	267.267.200,00	266.856.390,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0	0	0	0
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.732.132.041,00	3.452.076.495,00	3.649.655.091,00	3.391.426.495,00	82.476.950,00	60.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.732.132.041,00	3.452.076.495,00	3.649.655.091,00	3.391.426.495,00	82.476.950,00	60.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.069.793.556,00	2.051.811.309,00	2.069.793.556,00	2.051.811.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.185.060,00	7.185.060,00	7.185.060,00	7.185.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.336.400,00	1.336.400,00	1.336.400,00	1.336.400,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	442.850,00	442.850,00	442.850,00	442.850,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.762.600,00	1.762.600,00	1.762.600,00	1.762.600,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	545.550,00	545.550,00	545.550,00	545.550,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.492.155,00	1.492.155,00	1.492.155,00	1.492.155,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.605.505,00	1.605.505,00	1.605.505,00	1.605.505,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.818.229.680,00	1.812.315.706,00	1.818.229.680,00	1.812.315.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.706.543.780,00	1.702.590.806,00	1.706.543.780,00	1.702.590.806,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.596.000,00	97.646.000,00	99.596.000,00	97.646.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.789.300,00	10.781.300,00	10.789.300,00	10.781.300,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.300.600,00	1.297.600,00	1.300.600,00	1.297.600,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.440.675,00	22.060.675,00	24.440.675,00	22.060.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.600.675,00	2.600.675,00	2.600.675,00	2.600.675,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.840.000,00	19.460.000,00	21.840.000,00	19.460.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.065.136,00	1.065.136,00	1.065.136,00	1.065.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.065.136,00	1.065.136,00	1.065.136,00	1.065.136,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.237.538,00	30.093.340,00	32.237.538,00	30.093.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.476.475,00	1.476.475,00	1.476.475,00	1.476.475,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.590.063,00	7.561.065,00	7.590.063,00	7.561.065,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.341.000,00	7.341.000,00	7.341.000,00	7.341.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.830.000,00	13.714.800,00	15.830.000,00	13.714.800,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.540.467,00	133.175.405,00	137.540.467,00	133.175.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.038.750,00	3.030.000,00	3.038.750,00	3.030.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.042.602,00	22.686.290,00	27.042.602,00	22.686.290,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.459.115,00	107.459.115,00	107.459.115,00	107.459.115,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.095.000,00	45.915.987,00	49.095.000,00	45.915.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.095.000,00	45.915.987,00	49.095.000,00	45.915.987,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	238.670.000,00	189.654.500,00	218.820.000,00	169.894.500,00	19.850.000,00	19.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	238.670.000,00	189.654.500,00	218.820.000,00	169.894.500,00	19.850.000,00	19.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	238.670.000,00	189.654.500,00	218.820.000,00	169.894.500,00	19.850.000,00	19.760.000,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	340.375.150,00	334.855.376,00	340.375.150,00	334.855.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	340.375.150,00	334.855.376,00	340.375.150,00	334.855.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	340.375.150,00	334.855.376,00	340.375.150,00	334.855.376,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	730.362.790,00	623.606.737,00	730.362.790,00	623.606.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	730.362.790,00	623.606.737,00	730.362.790,00	623.606.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	173.245.415,00	154.519.115,00	173.245.415,00	154.519.115,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	47.817.375,00	46.793.475,00	47.817.375,00	46.793.475,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	509.300.000,00	422.294.147,00	509.300.000,00	422.294.147,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	352.930.545,00	252.148.573,00	290.303.595,00	211.258.573,00	62.626.950,00	40.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	352.930.545,00	252.148.573,00	290.303.595,00	211.258.573,00	62.626.950,00	40.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	194.550.000,00	109.300.000,00	172.950.000,00	109.300.000,00	21.600.000,00	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	158.380.545,00	142.848.573,00	117.353.595,00	101.958.573,00	41.026.950,00	40.890.000,00	0	0	0	0
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.261.160.382,00	3.228.792.212,00	3.113.735.632,00	3.081.422.464,00	147.424.750,00	147.369.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.261.160.382,00	3.228.792.212,00	3.113.735.632,00	3.081.422.464,00	147.424.750,00	147.369.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.440.826.592,00	2.421.184.786,00	2.440.826.592,00	2.421.184.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.645.190,00	6.557.400,00	6.645.190,00	6.557.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.187.406,00	1.155.600,00	1.187.406,00	1.155.600,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.079.646,00	2.044.850,00	2.079.646,00	2.044.850,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.089.025,00	2.083.625,00	2.089.025,00	2.083.625,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.289.113,00	1.273.325,00	1.289.113,00	1.273.325,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.216.104.999,00	2.203.258.579,00	2.216.104.999,00	2.203.258.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.106.383.160,00	2.097.775.236,00	2.106.383.160,00	2.097.775.236,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.240.000,00	102.076.000,00	106.240.000,00	102.076.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.704.383,00	1.634.225,00	1.704.383,00	1.634.225,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.777.456,00	1.773.118,00	1.777.456,00	1.773.118,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.716.536,00	18.637.750,00	18.716.536,00	18.637.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.716.536,00	18.637.750,00	18.716.536,00	18.637.750,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.274.344,00	89.456.107,00	91.274.344,00	89.456.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.855.655,00	1.845.000,00	1.855.655,00	1.845.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.459.389,00	9.454.327,00	9.459.389,00	9.454.327,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.007.300,00	2.007.300,00	2.007.300,00	2.007.300,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.952.000,00	76.149.480,00	77.952.000,00	76.149.480,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.981.523,00	59.109.500,00	61.981.523,00	59.109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.143.250,00	1.812.000,00	4.143.250,00	1.812.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.424.515,00	54.884.500,00	55.424.515,00	54.884.500,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.413.758,00	2.413.000,00	2.413.758,00	2.413.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.104.000,00	44.165.450,00	46.104.000,00	44.165.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.760.000,00	36.828.950,00	38.760.000,00	36.828.950,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.280.000,00	5.276.500,00	5.280.000,00	5.276.500,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.064.000,00	2.060.000,00	2.064.000,00	2.060.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	248.893.340,00	245.837.198,00	101.468.590,00	98.467.450,00	147.424.750,00	147.369.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13.843.590,00	13.814.850,00	13.843.590,00	13.814.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.843.590,00	13.814.850,00	13.843.590,00	13.814.850,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	235.049.750,00	232.022.348,00	87.625.000,00	84.652.600,00	147.424.750,00	147.369.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	235.049.750,00	232.022.348,00	87.625.000,00	84.652.600,00	147.424.750,00	147.369.748,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	540.431.213,00	532.696.973,00	540.431.213,00	532.696.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	12.918.444,00	12.747.970,00	12.918.444,00	12.747.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6.757.400,00	6.683.838,00	6.757.400,00	6.683.838,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	6.161.044,00	6.064.132,00	6.161.044,00	6.064.132,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	527.512.769,00	519.949.003,00	527.512.769,00	519.949.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	527.512.769,00	519.949.003,00	527.512.769,00	519.949.003,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	24.129.499,00	22.247.680,00	24.129.499,00	22.247.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	24.129.499,00	22.247.680,00	24.129.499,00	22.247.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	7.116.186,00	6.828.256,00	7.116.186,00	6.828.256,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	17.013.313,00	15.419.424,00	17.013.313,00	15.419.424,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	6.879.738,00	6.825.575,00	6.879.738,00	6.825.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	6.879.738,00	6.825.575,00	6.879.738,00	6.825.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	6.879.738,00	6.825.575,00	6.879.738,00	6.825.575,00	0	0	0	0	0	0
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.053.545.728,00	3.944.142.918,00	3.923.572.061,00	3.814.837.617,00	129.973.667,00	129.305.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.053.545.728,00	3.944.142.918,00	3.923.572.061,00	3.814.837.617,00	129.973.667,00	129.305.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.449.634.266,00	2.431.866.825,00	2.418.538.128,00	2.400.970.525,00	31.096.138,00	30.896.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.011.112,00	8.982.237,00	9.011.112,00	8.982.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.634.286,00	1.605.586,00	1.634.286,00	1.605.586,00	0	0	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.534.865,00	1.534.865,00	1.534.865,00	1.534.865,00	0	0	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.560.225,00	2.560.050,00	2.560.225,00	2.560.050,00	0	0	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.677.200,00	1.677.200,00	1.677.200,00	1.677.200,00	0	0	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.604.536,00	1.604.536,00	1.604.536,00	1.604.536,00	0	0	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.144.478.745,00	2.144.478.709,00	2.144.478.745,00	2.144.478.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.040.183.509,00	2.040.183.509,00	2.040.183.509,00	2.040.183.509,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.456.000,00	100.456.000,00	100.456.000,00	100.456.000,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.045.350,00	2.045.350,00	2.045.350,00	2.045.350,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.793.886,00	1.793.850,00	1.793.886,00	1.793.850,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.901.200,00	10.976.200,00	12.901.200,00	10.976.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.901.200,00	10.976.200,00	12.901.200,00	10.976.200,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.434.241,00	111.574.882,00	112.434.241,00	111.574.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.379.601,00	2.379.601,00	2.379.601,00	2.379.601,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.106.640,00	2.106.600,00	2.106.640,00	2.106.600,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.948.000,00	107.088.681,00	107.948.000,00	107.088.681,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.096.138,00	30.896.300,00	0,00	0,00	31.096.138,00	30.896.300,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.096.138,00	30.896.300,00	0	0	31.096.138,00	30.896.300,00	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.985.338,00	75.001.000,00	86.985.338,00	75.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.794.535,00	64.790.000,00	64.794.535,00	64.790.000,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.992.710,00	9.014.000,00	20.992.710,00	9.014.000,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.198.093,00	1.197.000,00	1.198.093,00	1.197.000,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.727.492,00	49.957.497,00	52.727.492,00	49.957.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.632.000,00	48.877.497,00	51.632.000,00	48.877.497,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.095.492,00	1.080.000,00	1.095.492,00	1.080.000,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	74.999.800,00	59.899.800,00	74.999.800,00	59.899.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	74.999.800,00	59.899.800,00	74.999.800,00	59.899.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	74.999.800,00	59.899.800,00	74.999.800,00	59.899.800,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	37.924.950,00	36.174.650,00	37.924.950,00	36.174.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	37.924.950,00	36.174.650,00	37.924.950,00	36.174.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	37.924.950,00	36.174.650,00	37.924.950,00	36.174.650,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	65.704.475,00	65.538.975,00	65.704.475,00	65.538.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	65.704.475,00	65.538.975,00	65.704.475,00	65.538.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	46.250.000,00	46.104.500,00	46.250.000,00	46.104.500,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19.454.475,00	19.434.475,00	19.454.475,00	19.434.475,00	0	0	0	0
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.425.282.237,00	1.350.662.668,00	1.326.404.708,00	1.252.253.667,00	98.877.529,00	98.409.001,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.425.282.237,00	1.350.662.668,00	1.326.404.708,00	1.252.253.667,00	98.877.529,00	98.409.001,00	0,00	0,00
2.13	1.06.2.13.0.00.02.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.425.282.237,00	1.350.662.668,00	1.326.404.708,00	1.252.253.667,00	98.877.529,00	98.409.001,00	0	0
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.595.011.872,00	4.369.778.497,00	4.466.940.872,00	4.242.927.007,00	128.071.000,00	126.851.490,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.595.011.872,00	4.369.778.497,00	4.466.940.872,00	4.242.927.007,00	128.071.000,00	126.851.490,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	162.274.950,00	162.274.950,00	162.274.950,00	162.274.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	162.274.950,00	162.274.950,00	162.274.950,00	162.274.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	73.200.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	89.074.950,00	89.074.950,00	89.074.950,00	89.074.950,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.436.136.922,00	3.210.903.547,00	3.308.065.922,00	3.084.052.057,00	128.071.000,00	126.851.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	919.837.440,00	905.879.575,00	919.837.440,00	905.879.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBP	329.281.690,00	315.374.925,00	329.281.690,00	315.374.925,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	167.952.750,00	167.951.800,00	167.952.750,00	167.951.800,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.400.000,00	300.350.000,00	300.400.000,00	300.350.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	122.203.000,00	122.202.850,00	122.203.000,00	122.202.850,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.627.234.700,00	1.417.314.700,00	1.627.234.700,00	1.417.314.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.207.999.700,00	998.199.700,00	1.207.999.700,00	998.199.700,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	419.235.000,00	419.115.000,00	419.235.000,00	419.115.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	816.574.782,00	815.219.272,00	688.503.782,00	688.367.782,00	128.071.000,00	126.851.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	802.174.782,00	800.819.272,00	674.103.782,00	673.967.782,00	128.071.000,00	126.851.490,00	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	72.490.000,00	72.490.000,00	72.490.000,00	72.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	72.490.000,00	72.490.000,00	72.490.000,00	72.490.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	996.600.000,00	996.600.000,00	996.600.000,00	996.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	996.600.000,00	996.600.000,00	996.600.000,00	996.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.1.06.01.0000	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	996.600.000,00	996.600.000,00	996.600.000,00	996.600.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.519.001.524,00	4.478.138.458,00	3.998.584.253,00	3.981.227.958,00	520.417.271,00	496.910.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	4.519.001.524,00	4.478.138.458,00	3.998.584.253,00	3.981.227.958,00	520.417.271,00	496.910.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.512.216.320,00	3.493.006.107,00	3.488.799.169,00	3.472.995.607,00	23.417.151,00	20.010.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.828.525,00	9.828.525,00	9.828.525,00	9.828.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.753.900,00	1.753.900,00	1.753.900,00	1.753.900,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.695.200,00	1.695.200,00	1.695.200,00	1.695.200,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.571.650,00	1.571.650,00	1.571.650,00	1.571.650,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.491.400,00	1.491.400,00	1.491.400,00	1.491.400,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.563.850,00	1.563.850,00	1.563.850,00	1.563.850,00	0	0	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.752.525,00	1.752.525,00	1.752.525,00	1.752.525,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.102.444.258,00	3.092.949.555,00	3.102.444.258,00	3.092.949.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.981.015.138,00	2.971.646.960,00	2.981.015.138,00	2.971.646.960,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	118.663.820,00	118.537.295,00	118.663.820,00	118.537.295,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.441.200,00	1.441.200,00	1.441.200,00	1.441.200,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.324.100,00	1.324.100,00	1.324.100,00	1.324.100,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.359.000,00	31.939.000,00	33.359.000,00	31.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.359.000,00	31.939.000,00	33.359.000,00	31.939.000,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.058.359,00	89.052.788,00	89.058.359,00	89.052.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.795.709,00	7.795.138,00	7.795.709,00	7.795.138,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.396.650,00	5.396.650,00	5.396.650,00	5.396.650,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.866.000,00	75.861.000,00	75.866.000,00	75.861.000,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.417.151,00	20.010.500,00	0,00	0,00	23.417.151,00	20.010.500,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.417.151,00	20.010.500,00	0	0	23.417.151,00	20.010.500,00	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.899.027,00	203.044.034,00	207.899.027,00	203.044.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	186.585.525,00	181.741.200,00	186.585.525,00	181.741.200,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.720.300,00	14.718.040,00	14.720.300,00	14.718.040,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.593.202,00	6.584.794,00	6.593.202,00	6.584.794,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.210.000,00	46.181.705,00	46.210.000,00	46.181.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.790.000,00	35.761.705,00	35.790.000,00	35.761.705,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	889.426.396,00	867.896.280,00	392.426.276,00	390.996.280,00	497.000.120,00	476.900.000,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	662.008.670,00	641.859.850,00	165.008.550,00	164.959.850,00	497.000.120,00	476.900.000,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	662.008.670,00	641.859.850,00	165.008.550,00	164.959.850,00	497.000.120,00	476.900.000,00	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	53.949.475,00	52.845.075,00	53.949.475,00	52.845.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	53.949.475,00	52.845.075,00	53.949.475,00	52.845.075,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	170.056.901,00	169.841.805,00	170.056.901,00	169.841.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.458.600,00	5.458.600,00	5.458.600,00	5.458.600,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	164.598.301,00	164.383.205,00	164.598.301,00	164.383.205,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.411.350,00	3.349.550,00	3.411.350,00	3.349.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.411.350,00	3.349.550,00	3.411.350,00	3.349.550,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	117.358.808,00	117.236.071,00	117.358.808,00	117.236.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	117.358.808,00	117.236.071,00	117.358.808,00	117.236.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	117.358.808,00	117.236.071,00	117.358.808,00	117.236.071,00	0	0	0	0
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.598.909.604,00	2.592.873.102,00	2.598.909.604,00	2.592.873.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.598.909.604,00	2.592.873.102,00	2.598.909.604,00	2.592.873.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.054.450.454,00	2.052.621.685,00	2.054.450.454,00	2.052.621.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.313.425,00	5.313.175,00	5.313.425,00	5.313.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.391.475,00	1.391.475,00	1.391.475,00	1.391.475,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.184.600,00	1.184.600,00	1.184.600,00	1.184.600,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.417.750,00	1.417.750,00	1.417.750,00	1.417.750,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.319.600,00	1.319.350,00	1.319.600,00	1.319.350,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.834.964.344,00	1.834.964.002,00	1.834.964.344,00	1.834.964.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.746.761.594,00	1.746.761.252,00	1.746.761.594,00	1.746.761.252,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.379.750,00	85.379.750,00	85.379.750,00	85.379.750,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2.823.000,00	2.823.000,00	2.823.000,00	2.823.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.509.850,00	20.509.850,00	20.509.850,00	20.509.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.509.850,00	20.509.850,00	20.509.850,00	20.509.850,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.072.352,00	57.012.653,00	57.072.352,00	57.012.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.917.702,00	7.917.702,00	7.917.702,00	7.917.702,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.949.650,00	9.949.550,00	9.949.650,00	9.949.550,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.205.000,00	39.145.401,00	39.205.000,00	39.145.401,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.340.483,00	85.704.658,00	87.340.483,00	85.704.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.231.000,00	77.625.000,00	79.231.000,00	77.625.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.351.232,00	7.342.500,00	7.351.232,00	7.342.500,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	758.251,00	737.158,00	758.251,00	737.158,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.250.000,00	49.117.347,00	49.250.000,00	49.117.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.250.000,00	49.117.347,00	49.250.000,00	49.117.347,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	214.729.450,00	214.624.450,00	214.729.450,00	214.624.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	214.729.450,00	214.624.450,00	214.729.450,00	214.624.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	214.729.450,00	214.624.450,00	214.729.450,00	214.624.450,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	329.729.700,00	325.626.967,00	329.729.700,00	325.626.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	329.729.700,00	325.626.967,00	329.729.700,00	325.626.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	329.729.700,00	325.626.967,00	329.729.700,00	325.626.967,00	0	0	0	0
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.134.572.976,00	4.123.153.339,00	4.134.572.976,00	4.123.153.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.134.572.976,00	4.123.153.339,00	4.134.572.976,00	4.123.153.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.734.613.160,00	3.723.992.339,00	3.734.613.160,00	3.723.992.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.144.736,00	7.144.736,00	7.144.736,00	7.144.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.383.100,00	1.383.100,00	1.383.100,00	1.383.100,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.402.350,00	1.402.350,00	1.402.350,00	1.402.350,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.061.100,00	1.061.100,00	1.061.100,00	1.061.100,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.407.350,00	1.407.350,00	1.407.350,00	1.407.350,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.890.836,00	1.890.836,00	1.890.836,00	1.890.836,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.436.187.307,00	3.435.758.796,00	3.436.187.307,00	3.435.758.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.306.575.957,00	3.306.147.446,00	3.306.575.957,00	3.306.147.446,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127.692.000,00	127.692.000,00	127.692.000,00	127.692.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.919.350,00	1.919.350,00	1.919.350,00	1.919.350,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.510.000,00	30.440.000,00	30.510.000,00	30.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.510.000,00	30.440.000,00	30.510.000,00	30.440.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.043.350,00	2.043.350,00	2.043.350,00	2.043.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.043.350,00	2.043.350,00	2.043.350,00	2.043.350,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.250.080,00	41.250.080,00	41.250.080,00	41.250.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.465.630,00	9.465.630,00	9.465.630,00	9.465.630,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.209.450,00	8.209.450,00	8.209.450,00	8.209.450,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.575.000,00	23.575.000,00	23.575.000,00	23.575.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.529.050,00	171.445.700,00	179.529.050,00	171.445.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	143.288.750,00	143.280.000,00	143.288.750,00	143.280.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.240.300,00	28.165.700,00	36.240.300,00	28.165.700,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.948.637,00	35.909.677,00	37.948.637,00	35.909.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.150.000,00	27.111.090,00	29.150.000,00	27.111.090,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.798.637,00	8.798.587,00	8.798.637,00	8.798.587,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	5.091.500,00	5.031.500,00	5.091.500,00	5.031.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5.091.500,00	5.031.500,00	5.091.500,00	5.031.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	5.091.500,00	5.031.500,00	5.091.500,00	5.031.500,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	4.064.000,00	4.009.000,00	4.064.000,00	4.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.064.000,00	4.009.000,00	4.064.000,00	4.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	4.064.000,00	4.009.000,00	4.064.000,00	4.009.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	75.945.277,00	75.896.161,00	75.945.277,00	75.896.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.945.277,00	75.896.161,00	75.945.277,00	75.896.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	75.945.277,00	75.896.161,00	75.945.277,00	75.896.161,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	314.859.039,00	314.224.339,00	314.859.039,00	314.224.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	314.859.039,00	314.224.339,00	314.859.039,00	314.224.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	13.943.266,00	13.928.566,00	13.943.266,00	13.928.566,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	300.915.773,00	300.295.773,00	300.915.773,00	300.295.773,00	0	0	0	0
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.834.346.961,00	1.819.917.630,00	1.692.600.554,00	1.678.425.228,00	141.746.407,00	141.492.402,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.834.346.961,00	1.819.917.630,00	1.692.600.554,00	1.678.425.228,00	141.746.407,00	141.492.402,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.560.954.054,00	1.549.794.581,00	1.560.954.054,00	1.549.794.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.070.300,00	11.070.300,00	11.070.300,00	11.070.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.259.150,00	2.259.150,00	2.259.150,00	2.259.150,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.222.550,00	2.222.550,00	2.222.550,00	2.222.550,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.352.150,00	1.352.150,00	1.352.150,00	1.352.150,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.352.150,00	1.352.150,00	1.352.150,00	1.352.150,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.352.150,00	1.352.150,00	1.352.150,00	1.352.150,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.532.150,00	2.532.150,00	2.532.150,00	2.532.150,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.335.812.163,00	1.332.737.163,00	1.335.812.163,00	1.332.737.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.223.409.713,00	1.223.409.713,00	1.223.409.713,00	1.223.409.713,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.762.500,00	105.982.500,00	106.762.500,00	105.982.500,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.107.050,00	1.107.050,00	1.107.050,00	1.107.050,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4.532.900,00	2.237.900,00	4.532.900,00	2.237.900,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.231.850,00	24.081.850,00	24.231.850,00	24.081.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.151.850,00	1.151.850,00	1.151.850,00	1.151.850,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.080.000,00	22.930.000,00	23.080.000,00	22.930.000,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.028.300,00	1.028.300,00	1.028.300,00	1.028.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.028.300,00	1.028.300,00	1.028.300,00	1.028.300,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.321.950,00	48.536.950,00	50.321.950,00	48.536.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.981.200,00	4.981.200,00	4.981.200,00	4.981.200,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.715.300,00	1.715.300,00	1.715.300,00	1.715.300,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.077.450,00	4.077.450,00	4.077.450,00	4.077.450,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.548.000,00	37.763.000,00	39.548.000,00	37.763.000,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.895.201,00	86.878.412,00	89.895.201,00	86.878.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.307.220,00	53.800.000,00	54.307.220,00	53.800.000,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.087.992,00	30.578.423,00	33.087.992,00	30.578.423,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.499.989,00	2.499.989,00	2.499.989,00	2.499.989,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.594.290,00	45.461.606,00	48.594.290,00	45.461.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.797.940,00	20.665.256,00	23.797.940,00	20.665.256,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.796.350,00	24.796.350,00	24.796.350,00	24.796.350,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.136.400,00	2.136.400,00	2.136.400,00	2.136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.136.400,00	2.136.400,00	2.136.400,00	2.136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.136.400,00	2.136.400,00	2.136.400,00	2.136.400,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	218.562.157,00	215.742.299,00	76.815.750,00	74.249.897,00	141.746.407,00	141.492.402,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	218.562.157,00	215.742.299,00	76.815.750,00	74.249.897,00	141.746.407,00	141.492.402,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	206.174.607,00	203.369.749,00	64.428.200,00	61.877.347,00	141.746.407,00	141.492.402,00	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	5.977.750,00	5.962.750,00	5.977.750,00	5.962.750,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	6.409.800,00	6.409.800,00	6.409.800,00	6.409.800,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	46.929.200,00	46.484.200,00	46.929.200,00	46.484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.929.200,00	46.484.200,00	46.929.200,00	46.484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9.004.250,00	9.004.250,00	9.004.250,00	9.004.250,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	30.631.500,00	30.631.500,00	30.631.500,00	30.631.500,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	7.293.450,00	6.848.450,00	7.293.450,00	6.848.450,00	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	5.765.150,00	5.760.150,00	5.765.150,00	5.760.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.765.150,00	5.760.150,00	5.765.150,00	5.760.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	5.765.150,00	5.760.150,00	5.765.150,00	5.760.150,00	0	0	0	0
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.789.764.973,00	4.759.950.134,00	4.448.495.089,00	4.426.735.635,00	341.269.884,00	333.214.499,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN	4.789.764.973,00	4.759.950.134,00	4.448.495.089,00	4.426.735.635,00	341.269.884,00	333.214.499,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.956.282.252,00	1.951.062.031,00	1.956.282.252,00	1.951.062.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.274.508,00	14.274.300,00	14.274.508,00	14.274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.274.508,00	14.274.300,00	14.274.508,00	14.274.300,00	0	0	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.902.982.138,00	1.897.763.438,00	1.902.982.138,00	1.897.763.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.750.120.338,00	1.748.458.638,00	1.750.120.338,00	1.748.458.638,00	0	0	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.861.800,00	149.304.800,00	152.861.800,00	149.304.800,00	0	0	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.617.000,00	14.617.000,00	14.617.000,00	14.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	0	0	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.742.000,00	8.742.000,00	8.742.000,00	8.742.000,00	0	0	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.408.606,00	24.407.293,00	24.408.606,00	24.407.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.408.606,00	24.407.293,00	24.408.606,00	24.407.293,00	0	0	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	126.831.672,00	126.127.400,00	126.831.672,00	126.127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	126.831.672,00	126.127.400,00	126.831.672,00	126.127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	70.239.601,00	69.535.350,00	70.239.601,00	69.535.350,00	0	0	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	56.592.071,00	56.592.050,00	56.592.071,00	56.592.050,00	0	0	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.669.491.219,00	2.646.885.273,00	2.328.221.335,00	2.313.670.774,00	341.269.884,00	333.214.499,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	487.397.308,00	468.025.273,00	146.127.424,00	134.810.774,00	341.269.884,00	333.214.499,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	487.397.308,00	468.025.273,00	146.127.424,00	134.810.774,00	341.269.884,00	333.214.499,00	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.799.856.306,00	1.796.627.500,00	1.799.856.306,00	1.796.627.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	122.411.112,00	120.261.928,00	122.411.112,00	120.261.928,00	0	0	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.677.445.194,00	1.676.365.572,00	1.677.445.194,00	1.676.365.572,00	0	0	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	382.237.605,00	382.232.500,00	382.237.605,00	382.232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	382.237.605,00	382.232.500,00	382.237.605,00	382.232.500,00	0	0	0	0
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	37.159.830,00	35.875.430,00	37.159.830,00	35.875.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	37.159.830,00	35.875.430,00	37.159.830,00	35.875.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	37.159.830,00	35.875.430,00	37.159.830,00	35.875.430,00	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	24.736.850,00	23.371.850,00	24.736.850,00	23.371.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.736.850,00	23.371.850,00	24.736.850,00	23.371.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	24.736.850,00	23.371.850,00	24.736.850,00	23.371.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24.736.850,00	23.371.850,00	24.736.850,00	23.371.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	24.736.850,00	23.371.850,00	24.736.850,00	23.371.850,00	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	27.418.800,00	27.418.800,00	27.418.800,00	27.418.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.418.800,00	27.418.800,00	27.418.800,00	27.418.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	27.418.800,00	27.418.800,00	27.418.800,00	27.418.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.418.800,00	27.418.800,00	27.418.800,00	27.418.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.418.800,00	27.418.800,00	27.418.800,00	27.418.800,00	0	0	0	0
2.22	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.22.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	316.131.467,00	316.129.917,00	316.131.467,00	316.129.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.22.02	DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAHA DAN KEBUDAYAAN	316.131.467,00	316.129.917,00	316.131.467,00	316.129.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	316.131.467,00	316.129.917,00	316.131.467,00	316.129.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.680.142,00	140.678.592,00	140.680.142,00	140.678.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	140.680.142,00	140.678.592,00	140.680.142,00	140.678.592,00	0	0	0	0
2.22	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.451.325,00	175.451.325,00	175.451.325,00	175.451.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.2.19.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	175.451.325,00	175.451.325,00	175.451.325,00	175.451.325,00	0	0	0	0
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.393.104.133,00	1.374.101.701,00	1.241.304.133,00	1.224.806.701,00	151.800.000,00	149.295.000,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.393.104.133,00	1.374.101.701,00	1.241.304.133,00	1.224.806.701,00	151.800.000,00	149.295.000,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.393.104.133,00	1.374.101.701,00	1.241.304.133,00	1.224.806.701,00	151.800.000,00	149.295.000,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	597.232.246,00	586.045.627,00	445.432.246,00	436.750.627,00	151.800.000,00	149.295.000,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	277.414.834,00	268.801.627,00	277.414.834,00	268.801.627,00	0	0	0	0
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	118.338.200,00	118.271.400,00	118.338.200,00	118.271.400,00	0	0	0	0
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	201.479.212,00	198.972.600,00	49.679.212,00	49.677.600,00	151.800.000,00	149.295.000,00	0	0
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	795.871.887,00	788.056.074,00	795.871.887,00	788.056.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	189.166.206,00	183.184.274,00	189.166.206,00	183.184.274,00	0	0	0	0
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	512.674.804,00	510.858.200,00	512.674.804,00	510.858.200,00	0	0	0	0
2.23	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	94.030.877,00	94.013.600,00	94.030.877,00	94.013.600,00	0	0	0	0
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.244.214.177,00	2.213.172.304,00	2.234.859.427,00	2.205.680.304,00	9.354.750,00	7.492.000,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.244.214.177,00	2.213.172.304,00	2.234.859.427,00	2.205.680.304,00	9.354.750,00	7.492.000,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.146.304.976,00	2.117.488.838,00	2.136.950.226,00	2.109.996.838,00	9.354.750,00	7.492.000,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.834.890,00	35.557.400,00	35.834.890,00	35.557.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.834.890,00	35.557.400,00	35.834.890,00	35.557.400,00	0	0	0	0
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.884.735.599,00	1.876.266.186,00	1.884.735.599,00	1.876.266.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.765.875.240,00	1.757.423.886,00	1.765.875.240,00	1.757.423.886,00	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116.460.200,00	116.460.000,00	116.460.200,00	116.460.000,00	0	0	0	0
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.400.159,00	2.382.300,00	2.400.159,00	2.382.300,00	0	0	0	0
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.971.220,00	24.471.050,00	25.971.220,00	24.471.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.971.220,00	24.471.050,00	25.971.220,00	24.471.050,00	0	0	0	0
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.406.182,00	9.396.850,00	9.406.182,00	9.396.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.486.182,00	4.476.850,00	4.486.182,00	4.476.850,00	0	0	0	0
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	0	0	0	0
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.354.750,00	7.492.000,00	0,00	0,00	9.354.750,00	7.492.000,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.354.750,00	7.492.000,00	0	0	9.354.750,00	7.492.000,00	0	0
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.422.335,00	107.629.152,00	117.422.335,00	107.629.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.422.335,00	107.629.152,00	117.422.335,00	107.629.152,00	0	0	0	0
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.580.000,00	56.676.200,00	63.580.000,00	56.676.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.580.000,00	56.676.200,00	63.580.000,00	56.676.200,00	0	0	0	0
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	97.909.201,00	95.683.466,00	97.909.201,00	95.683.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	36.189.984,00	36.151.950,00	36.189.984,00	36.151.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	36.189.984,00	36.151.950,00	36.189.984,00	36.151.950,00	0	0	0	0
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	61.719.217,00	59.531.516,00	61.719.217,00	59.531.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	61.719.217,00	59.531.516,00	61.719.217,00	59.531.516,00	0	0	0	0
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	32.695.581.739,00	31.608.953.560,00	29.265.603.538,00	28.632.305.055,00	3.429.978.201,00	2.976.648.505,00	0	0
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.600.864.546,00	5.527.497.046,00	5.320.861.725,00	5.247.671.516,00	280.002.821,00	279.825.530,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN	5.600.864.546,00	5.527.497.046,00	5.320.861.725,00	5.247.671.516,00	280.002.821,00	279.825.530,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.579.705.329,00	2.543.653.378,00	2.564.712.210,00	2.528.742.298,00	14.993.119,00	14.911.080,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.413.456,00	1.390.800,00	1.413.456,00	1.390.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.413.456,00	1.390.800,00	1.413.456,00	1.390.800,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.327.967.153,00	2.303.230.938,00	2.327.967.153,00	2.303.230.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.196.963.978,00	2.190.453.938,00	2.196.963.978,00	2.190.453.938,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	131.003.175,00	112.777.000,00	131.003.175,00	112.777.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.380.000,00	21.335.000,00	21.380.000,00	21.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.380.000,00	21.335.000,00	21.380.000,00	21.335.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.672.862,00	1.642.600,00	1.672.862,00	1.642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.672.862,00	1.642.600,00	1.672.862,00	1.642.600,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.130.880,00	96.105.779,00	96.130.880,00	96.105.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.706.906,00	2.705.000,00	2.706.906,00	2.705.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.387.374,00	7.370.500,00	7.387.374,00	7.370.500,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.007.600,00	8.007.600,00	8.007.600,00	8.007.600,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.029.000,00	78.022.679,00	78.029.000,00	78.022.679,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.143.119,00	16.061.080,00	1.150.000,00	1.150.000,00	14.993.119,00	14.911.080,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.143.119,00	16.061.080,00	1.150.000,00	1.150.000,00	14.993.119,00	14.911.080,00	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.233.475,00	26.160.243,00	26.233.475,00	26.160.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.491.775,00	2.490.500,00	2.491.775,00	2.490.500,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.240.200,00	22.168.243,00	22.240.200,00	22.168.243,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.501.500,00	1.501.500,00	1.501.500,00	1.501.500,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.764.384,00	77.726.938,00	88.764.384,00	77.726.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.529.857,00	69.347.138,00	74.529.857,00	69.347.138,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.829.527,00	4.984.800,00	10.829.527,00	4.984.800,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.760.000,00	2.750.000,00	2.760.000,00	2.750.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.870.713.073,00	2.864.974.827,00	2.654.325.073,00	2.648.672.827,00	216.388.000,00	216.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	319.700.000,00	319.461.780,00	103.312.000,00	103.159.780,00	216.388.000,00	216.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	319.700.000,00	319.461.780,00	103.312.000,00	103.159.780,00	216.388.000,00	216.302.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.551.013.073,00	2.545.513.047,00	2.551.013.073,00	2.545.513.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.551.013.073,00	2.545.513.047,00	2.551.013.073,00	2.545.513.047,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	150.446.144,00	118.868.841,00	101.824.442,00	70.256.391,00	48.621.702,00	48.612.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	150.446.144,00	118.868.841,00	101.824.442,00	70.256.391,00	48.621.702,00	48.612.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	150.446.144,00	118.868.841,00	101.824.442,00	70.256.391,00	48.621.702,00	48.612.450,00	0	0	0	0
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.558.616.296,00	2.463.684.599,00	2.379.616.296,00	2.294.363.599,00	179.000.000,00	169.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.558.616.296,00	2.463.684.599,00	2.379.616.296,00	2.294.363.599,00	179.000.000,00	169.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.741.148.048,00	1.724.152.201,00	1.741.148.048,00	1.724.152.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.287.714,00	19.287.714,00	19.287.714,00	19.287.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.581.620,00	3.581.620,00	3.581.620,00	3.581.620,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.472.786,00	1.472.786,00	1.472.786,00	1.472.786,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.630.620,00	3.630.620,00	3.630.620,00	3.630.620,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.388.420,00	3.388.420,00	3.388.420,00	3.388.420,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.587.320,00	3.587.320,00	3.587.320,00	3.587.320,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.626.948,00	3.626.948,00	3.626.948,00	3.626.948,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.536.789.321,00	1.532.481.120,00	1.536.789.321,00	1.532.481.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.438.684.195,00	1.438.075.994,00	1.438.684.195,00	1.438.075.994,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.105.126,00	94.405.126,00	98.105.126,00	94.405.126,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.931.450,00	12.101.450,00	15.931.450,00	12.101.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.931.450,00	12.101.450,00	15.931.450,00	12.101.450,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.846.750,00	3.846.750,00	3.846.750,00	3.846.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.846.750,00	3.846.750,00	3.846.750,00	3.846.750,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.212.073,00	64.562.873,00	65.212.073,00	64.562.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.413.471,00	1.413.471,00	1.413.471,00	1.413.471,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.960.602,00	3.960.602,00	3.960.602,00	3.960.602,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.963.000,00	56.313.800,00	56.963.000,00	56.313.800,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.700.740,00	22.120.264,00	23.700.740,00	22.120.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.823.250,00	1.820.000,00	1.823.250,00	1.820.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.132.206,00	18.554.980,00	20.132.206,00	18.554.980,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.745.284,00	1.745.284,00	1.745.284,00	1.745.284,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.380.000,00	69.752.030,00	76.380.000,00	69.752.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.260.000,00	68.632.030,00	75.260.000,00	68.632.030,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	817.468.248,00	739.532.398,00	638.468.248,00	570.211.398,00	179.000.000,00	169.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	817.468.248,00	739.532.398,00	638.468.248,00	570.211.398,00	179.000.000,00	169.321.000,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	250.000.000,00	175.281.000,00	71.000.000,00	5.960.000,00	179.000.000,00	169.321.000,00	0	0
3.26	2.22.3.26.0.00.03.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	567.468.248,00	564.251.398,00	567.468.248,00	564.251.398,00	0	0	0	0
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	21.732.306.529,00	20.842.253.203,00	20.097.058.128,00	19.630.366.023,00	1.635.248.401,00	1.211.887.180,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	21.732.306.529,00	20.842.253.203,00	20.097.058.128,00	19.630.366.023,00	1.635.248.401,00	1.211.887.180,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.334.270.458,00	13.289.294.629,00	13.314.937.864,00	13.269.964.629,00	19.332.594,00	19.330.000,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.436.350,00	11.434.250,00	11.436.350,00	11.434.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.385.750,00	1.385.750,00	1.385.750,00	1.385.750,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.615.450,00	1.614.400,00	1.615.450,00	1.614.400,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.711.950,00	2.710.900,00	2.711.950,00	2.710.900,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.523.300,00	1.523.300,00	1.523.300,00	1.523.300,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.578.200,00	2.578.200,00	2.578.200,00	2.578.200,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.621.700,00	1.621.700,00	1.621.700,00	1.621.700,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.050.992.073,00	13.027.896.916,00	13.050.992.073,00	13.027.896.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.866.641.873,00	12.852.328.716,00	12.866.641.873,00	12.852.328.716,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	181.120.000,00	172.338.000,00	181.120.000,00	172.338.000,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.261.250,00	1.261.250,00	1.261.250,00	1.261.250,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.968.950,00	1.968.950,00	1.968.950,00	1.968.950,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.421.750,00	23.421.750,00	23.421.750,00	23.421.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.385.750,00	1.385.750,00	1.385.750,00	1.385.750,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.036.000,00	22.036.000,00	22.036.000,00	22.036.000,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.456.056,00	70.263.129,00	54.123.462,00	50.933.129,00	19.332.594,00	19.330.000,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.620.800,00	1.477.000,00	2.620.800,00	1.477.000,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.459.106,00	26.455.680,00	7.126.512,00	7.125.680,00	19.332.594,00	19.330.000,00	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.316.150,00	3.316.150,00	3.316.150,00	3.316.150,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.060.000,00	39.014.299,00	41.060.000,00	39.014.299,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.645.729,00	52.491.129,00	65.645.729,00	52.491.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.695.120,00	6.690.000,00	6.695.120,00	6.690.000,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.589.800,00	44.440.320,00	57.589.800,00	44.440.320,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.360.809,00	1.360.809,00	1.360.809,00	1.360.809,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.153.000,00	102.621.955,00	108.153.000,00	102.621.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.820.000,00	96.292.955,00	101.820.000,00	96.292.955,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.333.000,00	6.329.000,00	6.333.000,00	6.329.000,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.068.202.098,00	1.026.547.680,00	941.402.098,00	904.797.680,00	126.800.000,00	121.750.000,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	183.816.750,00	172.380.150,00	183.816.750,00	172.380.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	183.816.750,00	172.380.150,00	183.816.750,00	172.380.150,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	85.344.750,00	79.690.590,00	85.344.750,00	79.690.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	85.344.750,00	79.690.590,00	85.344.750,00	79.690.590,00	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	799.040.598,00	774.476.940,00	672.240.598,00	652.726.940,00	126.800.000,00	121.750.000,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	799.040.598,00	774.476.940,00	672.240.598,00	652.726.940,00	126.800.000,00	121.750.000,00	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.334.452.316,00	5.033.819.988,00	4.183.141.068,00	4.002.370.808,00	1.151.311.248,00	1.031.449.180,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	2.621.280.501,00	2.458.061.886,00	1.716.127.253,00	1.566.612.706,00	905.153.248,00	891.449.180,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	141.242.000,00	138.850.000,00	141.242.000,00	138.850.000,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	945.527.230,00	882.819.742,00	945.527.230,00	882.819.742,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	564.689.745,00	555.235.630,00	64.232.495,00	64.136.450,00	500.457.250,00	491.099.180,00	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	507.813.126,00	456.439.176,00	103.117.128,00	56.089.176,00	404.695.998,00	400.350.000,00	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	462.008.400,00	424.717.338,00	462.008.400,00	424.717.338,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.989.078.526,00	1.878.439.752,00	1.742.920.526,00	1.738.439.752,00	246.158.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.795.750.526,00	1.685.539.752,00	1.688.770.526,00	1.684.489.752,00	106.980.000,00	1.050.000,00	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	193.328.000,00	192.900.000,00	54.150.000,00	53.950.000,00	139.178.000,00	138.950.000,00	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	724.093.289,00	697.318.350,00	724.093.289,00	697.318.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	724.093.289,00	697.318.350,00	724.093.289,00	697.318.350,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	647.113.659,00	335.827.200,00	309.309.100,00	296.469.200,00	337.804.559,00	39.358.000,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	647.113.659,00	335.827.200,00	309.309.100,00	296.469.200,00	337.804.559,00	39.358.000,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	647.113.659,00	335.827.200,00	309.309.100,00	296.469.200,00	337.804.559,00	39.358.000,00	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	116.350.550,00	109.828.050,00	116.350.550,00	109.828.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	116.350.550,00	109.828.050,00	116.350.550,00	109.828.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	116.350.550,00	109.828.050,00	116.350.550,00	109.828.050,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.231.917.448,00	1.046.935.656,00	1.231.917.448,00	1.046.935.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.231.917.448,00	1.046.935.656,00	1.231.917.448,00	1.046.935.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	419.477.948,00	369.971.156,00	419.477.948,00	369.971.156,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	236.415.500,00	210.815.500,00	236.415.500,00	210.815.500,00	0	0	0	0
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	576.024.000,00	466.149.000,00	576.024.000,00	466.149.000,00	0	0	0	0
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.007.880.181,00	1.982.131.634,00	1.200.183.202,00	1.192.579.839,00	807.696.979,00	789.551.795,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.007.880.181,00	1.982.131.634,00	1.200.183.202,00	1.192.579.839,00	807.696.979,00	789.551.795,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	15.503.000,00	12.943.000,00	15.503.000,00	12.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	15.503.000,00	12.943.000,00	15.503.000,00	12.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	15.503.000,00	12.943.000,00	15.503.000,00	12.943.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	640.171.777,00	634.488.189,00	84.692.798,00	80.110.275,00	555.478.979,00	554.377.914,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	640.171.777,00	634.488.189,00	84.692.798,00	80.110.275,00	555.478.979,00	554.377.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	640.171.777,00	634.488.189,00	84.692.798,00	80.110.275,00	555.478.979,00	554.377.914,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.037.719.478,00	1.037.489.478,00	1.037.719.478,00	1.037.489.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.037.719.478,00	1.037.489.478,00	1.037.719.478,00	1.037.489.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.037.719.478,00	1.037.489.478,00	1.037.719.478,00	1.037.489.478,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	314.485.926,00	297.210.967,00	62.267.926,00	62.037.086,00	252.218.000,00	235.173.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	314.485.926,00	297.210.967,00	62.267.926,00	62.037.086,00	252.218.000,00	235.173.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	305.076.416,00	287.821.457,00	52.858.416,00	52.647.576,00	252.218.000,00	235.173.881,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	9.409.510,00	9.389.510,00	9.409.510,00	9.389.510,00	0	0	0	0	0	0
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	785.387.363,00	782.956.163,00	257.357.363,00	256.893.163,00	528.030.000,00	526.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	785.387.363,00	782.956.163,00	257.357.363,00	256.893.163,00	528.030.000,00	526.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	774.182.963,00	771.791.763,00	246.152.963,00	245.728.763,00	528.030.000,00	526.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	774.182.963,00	771.791.763,00	246.152.963,00	245.728.763,00	528.030.000,00	526.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	694.711.111,00	692.619.911,00	166.681.111,00	166.556.911,00	528.030.000,00	526.063.000,00	0	0	0	0
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	79.471.852,00	79.171.852,00	79.471.852,00	79.171.852,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	11.204.400,00	11.164.400,00	11.204.400,00	11.164.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	11.204.400,00	11.164.400,00	11.204.400,00	11.164.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	11.204.400,00	11.164.400,00	11.204.400,00	11.164.400,00	0	0	0	0	0	0
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	10.526.824,00	10.430.915,00	10.526.824,00	10.430.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.02.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.526.824,00	10.430.915,00	10.526.824,00	10.430.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.02.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	10.526.824,00	10.430.915,00	10.526.824,00	10.430.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.02.0000	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.526.824,00	10.430.915,00	10.526.824,00	10.430.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.02.0000	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	10.526.824,00	10.430.915,00	10.526.824,00	10.430.915,00	0	0	0	0	0	0
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	45.913.493.574,00	44.025.655.646,00	43.534.347.114,00	41.681.588.649,00	2.379.146.460,00	2.344.066.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	20.005.640.508,00	19.257.525.678,00	18.219.416.374,00	17.485.795.681,00	1.786.224.134,00	1.771.729.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	20.005.640.508,00	19.257.525.678,00	18.219.416.374,00	17.485.795.681,00	1.786.224.134,00	1.771.729.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.850.017.871,00	17.257.014.892,00	16.063.793.737,00	15.485.284.895,00	1.786.224.134,00	1.771.729.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.960.300,00	37.929.800,00	38.960.300,00	37.929.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.975.350,00	20.945.350,00	21.975.350,00	20.945.350,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.410.900,00	2.410.900,00	2.410.900,00	2.410.900,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.032.750,00	6.032.450,00	6.032.750,00	6.032.450,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.735.475,00	2.735.475,00	2.735.475,00	2.735.475,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.805.825,00	5.805.625,00	5.805.825,00	5.805.625,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.233.242.600,00	8.107.566.810,00	8.233.242.600,00	8.107.566.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.589.858.850,00	7.583.548.610,00	7.589.858.850,00	7.583.548.610,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	635.888.300,00	516.534.300,00	635.888.300,00	516.534.300,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.048.550,00	4.048.550,00	4.048.550,00	4.048.550,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.446.900,00	3.435.350,00	3.446.900,00	3.435.350,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.729.900,00	50.629.900,00	52.729.900,00	50.629.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.154.750,00	1.154.750,00	1.154.750,00	1.154.750,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.575.150,00	49.475.150,00	51.575.150,00	49.475.150,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.616.500,00	5.616.500,00	5.616.500,00	5.616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.616.500,00	5.616.500,00	5.616.500,00	5.616.500,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.516.036,00	587.491.284,00	606.516.036,00	587.491.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.183.614,00	18.182.318,00	18.183.614,00	18.182.318,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.069.886,00	21.066.594,00	21.069.886,00	21.066.594,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.440.000,00	198.440.000,00	198.440.000,00	198.440.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.819.608,00	38.720.158,00	38.819.608,00	38.720.158,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.011.628,00	37.591.484,00	44.011.628,00	37.591.484,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.617.000,00	272.116.430,00	284.617.000,00	272.116.430,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.374.300,00	1.374.300,00	1.374.300,00	1.374.300,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244.704.845,00	243.301.997,00	0,00	0,00	244.704.845,00	243.301.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	188.884.175,00	187.569.000,00	0	0	188.884.175,00	187.569.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.820.670,00	55.732.997,00	0	0	55.820.670,00	55.732.997,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.781.719.577,00	1.658.786.635,00	1.781.719.577,00	1.658.786.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.373.174.800,00	1.328.216.725,00	1.373.174.800,00	1.328.216.725,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.774.207,00	309.799.824,00	387.774.207,00	309.799.824,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.770.570,00	20.770.086,00	20.770.570,00	20.770.086,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	931.972.400,00	914.658.206,00	931.972.400,00	914.658.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.683.400,00	144.594.078,00	154.683.400,00	144.594.078,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	479.662.000,00	473.022.628,00	479.662.000,00	473.022.628,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.570.000,00	6.566.000,00	6.570.000,00	6.566.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.217.000,00	130.197.000,00	130.217.000,00	130.197.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.640.000,00	153.078.500,00	153.640.000,00	153.078.500,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	534.912.969,00	475.147.821,00	534.912.969,00	475.147.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	422.638.609,00	372.779.942,00	422.638.609,00	372.779.942,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	62.274.360,00	62.274.360,00	62.274.360,00	62.274.360,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000,00	40.093.519,00	50.000.000,00	40.093.519,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah	3.638.496.432,00	3.419.281.787,00	2.096.977.143,00	1.890.853.787,00	1.541.519.289,00	1.528.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.897.717.703,00	1.840.906.994,00	1.222.980.304,00	1.169.240.994,00	674.737.399,00	671.666.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.740.778.729,00	1.578.374.793,00	873.996.839,00	721.612.793,00	866.781.890,00	856.762.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	293.128.012,00	269.182.973,00	293.128.012,00	269.182.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	137.911.350,00	120.945.711,00	137.911.350,00	120.945.711,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	93.757.500,00	89.026.254,00	93.757.500,00	89.026.254,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	41.514.762,00	41.161.608,00	41.514.762,00	41.161.608,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	19.944.400,00	18.049.400,00	19.944.400,00	18.049.400,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.488.018.300,00	1.487.421.179,00	1.488.018.300,00	1.487.421.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	10.503.600,00	10.383.600,00	10.503.600,00	10.383.600,00	0	0	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	1.466.262.150,00	1.465.845.029,00	1.466.262.150,00	1.465.845.029,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	11.252.550,00	11.192.550,00	11.252.550,00	11.192.550,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.804.116.652,00	1.654.291.046,00	1.804.116.652,00	1.654.291.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	685.127.140,00	630.076.563,00	685.127.140,00	630.076.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	7.256.650,00	7.071.852,00	7.256.650,00	7.071.852,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.648.950,00	1.648.950,00	1.648.950,00	1.648.950,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	676.221.540,00	621.355.761,00	676.221.540,00	621.355.761,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	964.867.962,00	932.844.856,00	964.867.962,00	932.844.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	881.025.980,00	878.961.430,00	881.025.980,00	878.961.430,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	40.182.182,00	35.473.626,00	40.182.182,00	35.473.626,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	43.659.800,00	18.409.800,00	43.659.800,00	18.409.800,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	152.897.800,00	90.145.877,00	152.897.800,00	90.145.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	119.088.250,00	69.198.727,00	119.088.250,00	69.198.727,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	Facilitasi Bantuan Hukum	31.809.450,00	18.947.050,00	31.809.450,00	18.947.050,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	2.000.100,00	2.000.100,00	2.000.100,00	2.000.100,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04	Facilitasi Kerja Sama Daerah	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00	1.223.750,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	351.505.985,00	346.219.740,00	351.505.985,00	346.219.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	6.983.950,00	6.983.950,00	6.983.950,00	6.983.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1.616.050,00	1.616.050,00	1.616.050,00	1.616.050,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2.142.150,00	2.142.150,00	2.142.150,00	2.142.150,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3.225.750,00	3.225.750,00	3.225.750,00	3.225.750,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	16.715.186,00	16.050.186,00	16.715.186,00	16.050.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	5.445.350,00	5.375.350,00	5.445.350,00	5.375.350,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5.518.750,00	4.943.750,00	5.518.750,00	4.943.750,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5.751.086,00	5.731.086,00	5.751.086,00	5.731.086,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	268.452.149,00	263.925.904,00	268.452.149,00	263.925.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	42.651.100,00	40.651.100,00	42.651.100,00	40.651.100,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	222.479.149,00	219.952.904,00	222.479.149,00	219.952.904,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3.321.900,00	3.321.900,00	3.321.900,00	3.321.900,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	59.354.700,00	59.259.700,00	59.354.700,00	59.259.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	56.810.400,00	56.715.400,00	56.810.400,00	56.715.400,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2.544.300,00	2.544.300,00	2.544.300,00	2.544.300,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	25.907.853.066,00	24.768.129.968,00	25.314.930.740,00	24.195.792.968,00	592.922.326,00	572.337.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	25.907.853.066,00	24.768.129.968,00	25.314.930.740,00	24.195.792.968,00	592.922.326,00	572.337.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.520.977.366,00	18.002.123.295,00	17.928.055.040,00	17.429.786.295,00	592.922.326,00	572.337.000,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.856.025,00	7.367.800,00	7.856.025,00	7.367.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.543.925,00	1.441.500,00	1.543.925,00	1.441.500,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.314.150,00	1.260.000,00	1.314.150,00	1.260.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.107.725,00	1.036.250,00	1.107.725,00	1.036.250,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.183.375,00	1.069.650,00	1.183.375,00	1.069.650,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.394.675,00	1.324.500,00	1.394.675,00	1.324.500,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.312.175,00	1.235.900,00	1.312.175,00	1.235.900,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.619.911.218,00	2.617.315.718,00	2.619.911.218,00	2.617.315.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.473.852.568,00	2.473.574.868,00	2.473.852.568,00	2.473.574.868,00	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144.099.450,00	141.839.050,00	144.099.450,00	141.839.050,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.959.200,00	1.901.800,00	1.959.200,00	1.901.800,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.069.475,00	29.045.450,00	29.069.475,00	29.045.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.069.475,00	29.045.450,00	29.069.475,00	29.045.450,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.390.408,00	63.492.406,00	82.390.408,00	63.492.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.336.400,00	3.235.000,00	3.336.400,00	3.235.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.333.484,00	11.228.000,00	11.333.484,00	11.228.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.372.524,00	16.775.000,00	19.372.524,00	16.775.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.550.000,00	2.525.200,00	2.550.000,00	2.525.200,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.798.000,00	29.729.206,00	45.798.000,00	29.729.206,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	605.924.101,00	584.217.000,00	13.001.775,00	11.880.000,00	592.922.326,00	572.337.000,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.373.196,00	17.278.000,00	121.550,00	120.000,00	17.251.646,00	17.158.000,00	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	588.550.905,00	566.939.000,00	12.880.225,00	11.760.000,00	575.670.680,00	555.179.000,00	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	903.996.794,00	830.645.336,00	903.996.794,00	830.645.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.707.750,00	84.490.950,00	103.707.750,00	84.490.950,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.166.769,00	152.683.231,00	179.166.769,00	152.683.231,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	621.122.275,00	593.471.155,00	621.122.275,00	593.471.155,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.287.160,00	530.797.511,00	585.287.160,00	530.797.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.098.000,00	147.932.432,00	151.098.000,00	147.932.432,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.600.000,00	91.700.525,00	97.600.000,00	91.700.525,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.599.160,00	28.332.000,00	28.599.160,00	28.332.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.490.000,00	244.121.554,00	279.490.000,00	244.121.554,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.500.000,00	18.711.000,00	28.500.000,00	18.711.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12.050.982.965,00	11.725.016.447,00	12.050.982.965,00	11.725.016.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.349.104.390,00	11.324.223.585,00	11.349.104.390,00	11.324.223.585,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	367.438.575,00	66.484.000,00	367.438.575,00	66.484.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	334.440.000,00	334.308.862,00	334.440.000,00	334.308.862,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.635.559.220,00	1.614.225.627,00	1.635.559.220,00	1.614.225.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	261.982.825,00	261.672.150,00	261.982.825,00	261.672.150,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	39.313.000,00	36.962.500,00	39.313.000,00	36.962.500,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.334.263.395,00	1.315.590.977,00	1.334.263.395,00	1.315.590.977,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.386.875.700,00	6.766.006.673,00	7.386.875.700,00	6.766.006.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	573.752.475,00	489.865.640,00	573.752.475,00	489.865.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.573.675,00	2.552.250,00	2.573.675,00	2.552.250,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	455.902.700,00	388.515.190,00	455.902.700,00	388.515.190,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	115.276.100,00	98.798.200,00	115.276.100,00	98.798.200,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	389.306.325,00	331.010.550,00	389.306.325,00	331.010.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	19.327.300,00	4.374.950,00	19.327.300,00	4.374.950,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	13.415.100,00	8.288.000,00	13.415.100,00	8.288.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	128.994.525,00	104.968.460,00	128.994.525,00	104.968.460,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	111.225.350,00	102.415.400,00	111.225.350,00	102.415.400,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	5.756.300,00	5.673.500,00	5.756.300,00	5.673.500,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	110.587.750,00	105.290.240,00	110.587.750,00	105.290.240,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	154.524.550,00	105.002.400,00	154.524.550,00	105.002.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	63.907.400,00	27.596.950,00	63.907.400,00	27.596.950,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	63.211.200,00	51.923.900,00	63.211.200,00	51.923.900,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14.674.450,00	12.865.600,00	14.674.450,00	12.865.600,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	12.731.500,00	12.615.950,00	12.731.500,00	12.615.950,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.548.686.125,00	1.424.159.691,00	1.548.686.125,00	1.424.159.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.486.461.000,00	1.421.269.691,00	1.486.461.000,00	1.421.269.691,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.615.000,00	1.600.000,00	1.615.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60.610.125,00	1.290.000,00	60.610.125,00	1.290.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.911.468.250,00	2.894.070.700,00	2.911.468.250,00	2.894.070.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	15.050.000,00	15.020.000,00	15.050.000,00	15.020.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	9.593.400,00	9.493.200,00	9.593.400,00	9.493.200,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	2.886.824.850,00	2.869.557.500,00	2.886.824.850,00	2.869.557.500,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	1.809.137.975,00	1.521.897.692,00	1.809.137.975,00	1.521.897.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.529.958.000,00	1.244.144.368,00	1.529.958.000,00	1.244.144.368,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5.861.975,00	5.653.200,00	5.861.975,00	5.653.200,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	273.318.000,00	272.100.124,00	273.318.000,00	272.100.124,00	0	0	0	0	0	0
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	249.156.609.654,00	226.157.524.382,00	77.719.269.691,00	70.324.655.517,00	588.519.791,00	584.578.964,00	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	165.792.215.263,00	151.867.177.699,00
5.01			PERENCANAAN	4.717.109.728,00	4.574.083.164,00	4.675.250.820,00	4.532.234.104,00	41.858.908,00	41.849.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.717.109.728,00	4.574.083.164,00	4.675.250.820,00	4.532.234.104,00	41.858.908,00	41.849.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.443.386.329,00	3.415.438.140,00	3.401.527.421,00	3.373.589.080,00	41.858.908,00	41.849.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.396.250,00	17.396.250,00	17.396.250,00	17.396.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.044.755.793,00	3.041.420.293,00	3.044.755.793,00	3.041.420.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.917.411.050,00	2.917.411.050,00	2.917.411.050,00	2.917.411.050,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121.545.993,00	118.210.493,00	121.545.993,00	118.210.493,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	2.899.375,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.510.950,00	18.500.450,00	18.510.950,00	18.500.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.510.950,00	18.500.450,00	18.510.950,00	18.500.450,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.588.400,00	3.577.900,00	3.588.400,00	3.577.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.588.400,00	3.577.900,00	3.588.400,00	3.577.900,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.184.039,00	110.697.312,00	116.184.039,00	110.697.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.790.924,00	1.790.924,00	1.790.924,00	1.790.924,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.937.115,00	14.804.815,00	14.937.115,00	14.804.815,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.140.000,00	11.137.500,00	11.140.000,00	11.137.500,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.316.000,00	82.964.073,00	88.316.000,00	82.964.073,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.858.908,00	41.849.060,00	0,00	0,00	41.858.908,00	41.849.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	24.375.000,00	24.366.360,00	0	0	24.375.000,00	24.366.360,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.483.908,00	17.482.700,00	0	0	17.483.908,00	17.482.700,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.826.989,00	113.329.316,00	121.826.989,00	113.329.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.246.500,00	61.238.000,00	61.246.500,00	61.238.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.923.004,00	50.436.231,00	58.923.004,00	50.436.231,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.657.485,00	1.655.085,00	1.657.485,00	1.655.085,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.265.000,00	68.667.559,00	79.265.000,00	68.667.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.885.000,00	67.352.559,00	77.885.000,00	67.352.559,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.380.000,00	1.315.000,00	1.380.000,00	1.315.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	822.345.413,00	733.317.688,00	822.345.413,00	733.317.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	822.345.413,00	733.317.688,00	822.345.413,00	733.317.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	19.082.300,00	17.697.300,00	19.082.300,00	17.697.300,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	9.522.625,00	0,00	9.522.625,00	0	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	42.874.911,00	41.022.411,00	42.874.911,00	41.022.411,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	750.865.577,00	674.597.977,00	750.865.577,00	674.597.977,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	451.377.986,00	425.327.336,00	451.377.986,00	425.327.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	116.384.350,00	92.862.251,00	116.384.350,00	92.862.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.023.600,00	42.271.301,00	46.023.600,00	42.271.301,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.360.750,00	50.590.950,00	70.360.750,00	50.590.950,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	191.359.300,00	189.897.245,00	191.359.300,00	189.897.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	170.888.900,00	169.644.695,00	170.888.900,00	169.644.695,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.470.400,00	20.252.550,00	20.470.400,00	20.252.550,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	143.634.336,00	142.567.840,00	143.634.336,00	142.567.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.317.093,00	20.030.897,00	20.317.093,00	20.030.897,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.317.243,00	122.536.943,00	123.317.243,00	122.536.943,00	0	0	0	0	0	0
5.02			KEUANGAN	239.675.224.696,00	216.908.470.978,00	68.589.379.101,00	61.426.981.578,00	237.025.423,00	233.199.499,00	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	165.792.215.263,00	151.867.177.699,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	234.631.498.682,00	211.981.053.916,00	63.658.664.332,00	56.611.098.835,00	124.014.178,00	121.665.180,00	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	165.792.215.263,00	151.867.177.699,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.310.836.700,00	44.311.726.179,00	51.186.822.522,00	44.190.060.999,00	124.014.178,00	121.665.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.686.024,00	10.271.570,00	13.686.024,00	10.271.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	849.068,00	194.068,00	849.068,00	194.068,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.136.975,00	1.124.725,00	1.136.975,00	1.124.725,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.341.200,00	1.179.552,00	1.341.200,00	1.179.552,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.931.425,00	1.860.425,00	1.931.425,00	1.860.425,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.950.525,00	4.819.000,00	6.950.525,00	4.819.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	701.031,00	318.000,00	701.031,00	318.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	775.800,00	775.800,00	775.800,00	775.800,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.375.513.076,00	42.408.943.233,00	49.375.513.076,00	42.408.943.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.083.138.525,00	42.123.026.018,00	49.083.138.525,00	42.123.026.018,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	286.300.889,00	280.682.100,00	286.300.889,00	280.682.100,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.371.750,00	4.271.140,00	4.371.750,00	4.271.140,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.036.706,00	318.000,00	1.036.706,00	318.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	665.206,00	645.975,00	665.206,00	645.975,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.830.025,00	18.242.625,00	18.830.025,00	18.242.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.830.025,00	18.242.625,00	18.830.025,00	18.242.625,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.650.986,00	199.995.961,00	203.650.986,00	199.995.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.236.750,00	5.231.000,00	5.236.750,00	5.231.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.940.236,00	45.486.211,00	45.940.236,00	45.486.211,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.243.450,00	5.250.000,00	5.243.450,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.224.000,00	144.035.300,00	147.224.000,00	144.035.300,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.014.178,00	121.665.180,00	0,00	0,00	124.014.178,00	121.665.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.214.178,00	66.315.180,00	0	0	68.214.178,00	66.315.180,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.800.000,00	55.350.000,00	0	0	55.800.000,00	55.350.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.409.170.826,00	1.400.346.874,00	1.409.170.826,00	1.400.346.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.341.011.500,00	1.333.502.000,00	1.341.011.500,00	1.333.502.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.449.800,00	58.164.824,00	59.449.800,00	58.164.824,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.709.526,00	8.680.050,00	8.709.526,00	8.680.050,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.971.585,00	152.260.736,00	165.971.585,00	152.260.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.241.065,00	100.710.736,00	108.241.065,00	100.710.736,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.630.000,00	36.550.000,00	36.630.000,00	36.550.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.100.520,00	15.000.000,00	21.100.520,00	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	182.891.652.043,00	167.291.934.395,00	12.042.831.871,00	12.043.644.494,00	0,00	0,00	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	165.792.215.263,00	151.867.177.699,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	995.918.579,00	930.645.523,00	995.918.579,00	930.645.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	29.020.971,00	28.853.125,00	29.020.971,00	28.853.125,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	29.290.534,00	29.008.650,00	29.290.534,00	29.008.650,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	441.012.675,00	412.330.993,00	441.012.675,00	412.330.993,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.772.512,00	432.956.855,00	446.772.512,00	432.956.855,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	49.821.887,00	27.495.900,00	49.821.887,00	27.495.900,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	10.643.827.308,00	11.530.616.826,00	10.643.827.308,00	10.728.194.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.422.252,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	113.008.499,00	112.804.420,00	113.008.499,00	112.804.420,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	54.989.806,00	54.376.071,00	54.989.806,00	54.376.071,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	10.395.326.901,00	11.286.609.516,00	10.395.326.901,00	10.484.187.264,00	0	0	0	0	0	802.422.252,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31.058.520,00	30.778.905,00	31.058.520,00	30.778.905,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	49.443.582,00	46.047.914,00	49.443.582,00	46.047.914,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	403.085.984,00	384.804.397,00	403.085.984,00	384.804.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	38.521.107,00	38.162.467,00	38.521.107,00	38.162.467,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70.890.894,00	64.319.830,00	70.890.894,00	64.319.830,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	239.864.171,00	235.355.700,00	239.864.171,00	235.355.700,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	53.809.812,00	46.966.400,00	53.809.812,00	46.966.400,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	170.848.820.172,00	154.445.867.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	165.792.215.263,00	151.064.755.447,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	165.792.215.263,00	151.064.755.447,00	0	0	0	0	0	0	165.792.215.263,00	151.064.755.447,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	0	0	0	0	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	429.009.939,00	377.393.342,00	429.009.939,00	377.393.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	429.009.939,00	377.393.342,00	429.009.939,00	377.393.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	16.802.888,00	15.330.915,00	16.802.888,00	15.330.915,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.495.424,00	5.157.074,00	5.495.424,00	5.157.074,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	226.747.595,00	196.798.285,00	226.747.595,00	196.798.285,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	110.451.743,00	96.374.000,00	110.451.743,00	96.374.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	25.086.539,00	24.902.368,00	25.086.539,00	24.902.368,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.425.750,00	38.830.700,00	44.425.750,00	38.830.700,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.043.726.014,00	4.927.417.062,00	4.930.714.769,00	4.815.882.743,00	113.011.245,00	111.534.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.894.526.824,00	3.863.499.492,00	3.806.229.094,00	3.775.477.172,00	88.297.730,00	88.022.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.465.912,00	16.781.091,00	18.465.912,00	16.781.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.899.950,00	2.830.129,00	2.899.950,00	2.830.129,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.341.404,00	1.216.404,00	1.341.404,00	1.216.404,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.341.404,00	1.216.404,00	1.341.404,00	1.216.404,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.453.550,00	7.088.550,00	8.453.550,00	7.088.550,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.899.950,00	2.899.950,00	2.899.950,00	2.899.950,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.529.654,00	1.529.654,00	1.529.654,00	1.529.654,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.289.437.598,00	3.275.131.155,00	3.289.437.598,00	3.275.131.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.133.374.558,00	3.128.873.115,00	3.133.374.558,00	3.128.873.115,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.311.199,00	141.536.199,00	151.311.199,00	141.536.199,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.718.009,00	1.708.009,00	1.718.009,00	1.708.009,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.668.491,00	1.658.491,00	1.668.491,00	1.658.491,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.365.341,00	1.355.341,00	1.365.341,00	1.355.341,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.670.994,00	23.530.994,00	23.670.994,00	23.530.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.424.659,00	1.419.659,00	1.424.659,00	1.419.659,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.246.335,00	22.111.335,00	22.246.335,00	22.111.335,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.563.346,00	1.438.346,00	1.563.346,00	1.438.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.05.0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.563.346,00	1.438.346,00	1.563.346,00	1.438.346,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.002.316,00	268.094.969,00	270.002.316,00	268.094.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.755.775,00	1.755.775,00	1.755.775,00	1.755.775,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.451.511,00	8.416.790,00	8.451.511,00	8.416.790,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.516.030,00	3.515.730,00	3.516.030,00	3.515.730,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.579.000,00	254.406.674,00	254.579.000,00	254.406.674,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.710.925,00	88.136.245,00	413.195,00	113.925,00	88.297.730,00	88.022.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.675.075,00	53.674.745,00	113.925,00	113.925,00	53.561.150,00	53.560.820,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.035.850,00	34.461.500,00	299.270,00	0	34.736.580,00	34.461.500,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.526.203,00	83.505.981,00	86.526.203,00	83.505.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.406.623,00	64.406.623,00	64.406.623,00	64.406.623,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.260.900,00	16.250.653,00	19.260.900,00	16.250.653,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.858.680,00	2.848.705,00	2.858.680,00	2.848.705,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.149.530,00	106.880.711,00	116.149.530,00	106.880.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.910.000,00	76.659.191,00	80.910.000,00	76.659.191,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.965.760,00	0,00	4.965.760,00	0	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.142.250,00	4.115.000,00	4.142.250,00	4.115.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.131.520,00	26.106.520,00	26.131.520,00	26.106.520,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.149.199.190,00	1.063.917.570,00	1.124.485.675,00	1.040.405.571,00	24.713.515,00	23.511.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.149.199.190,00	1.063.917.570,00	1.124.485.675,00	1.040.405.571,00	24.713.515,00	23.511.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	11.465.994,00	8.315.219,00	11.465.994,00	8.315.219,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	154.553.332,00	152.183.673,00	154.553.332,00	152.183.673,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	21.121.185,00	18.549.077,00	21.121.185,00	18.549.077,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	237.837.352,00	224.035.132,00	237.837.352,00	224.035.132,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	51.768.675,00	51.751.435,00	51.768.675,00	51.751.435,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3.047.928,00	3.036.289,00	3.047.928,00	3.036.289,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.472.918,00	10.423.555,00	12.472.918,00	10.423.555,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	3.631.466,00	2.756.466,00	3.631.466,00	2.756.466,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	269.593.271,00	220.088.271,00	269.593.271,00	220.088.271,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	18.047.755,00	17.322.755,00	18.047.755,00	17.322.755,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	177.913.791,00	177.853.791,00	177.913.791,00	177.853.791,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.930.073,00	10.150.073,00	10.930.073,00	10.150.073,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	9.395.568,00	7.375.568,00	9.395.568,00	7.375.568,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.660.536,00	12.849.436,00	15.660.536,00	12.849.436,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	151.759.346,00	147.226.830,00	127.045.831,00	123.714.831,00	24.713.515,00	23.511.999,00	0	0	0	0
5.03			KEPEGAWAIAN	4.693.374.080,00	4.605.648.390,00	4.383.738.620,00	4.296.117.985,00	309.635.460,00	309.530.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.693.374.080,00	4.605.648.390,00	4.383.738.620,00	4.296.117.985,00	309.635.460,00	309.530.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.688.291.981,00	3.658.891.164,00	3.378.656.521,00	3.349.360.759,00	309.635.460,00	309.530.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.388.410,00	20.373.410,00	20.388.410,00	20.373.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.482.852,00	9.467.852,00	9.482.852,00	9.467.852,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.905.558,00	10.905.558,00	10.905.558,00	10.905.558,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.921.829.750,00	2.906.011.206,00	2.921.829.750,00	2.906.011.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.775.642.998,00	2.774.366.454,00	2.775.642.998,00	2.774.366.454,00	0	0	0	0	0	0

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133.834.550,00	119.292.550,00	133.834.550,00	119.292.550,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.876.757,00	2.876.757,00	2.876.757,00	2.876.757,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.475.445,00	9.475.445,00	9.475.445,00	9.475.445,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.593.874,00	23.593.874,00	23.593.874,00	23.593.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.593.874,00	23.593.874,00	23.593.874,00	23.593.874,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.846.181,00	2.846.181,00	2.846.181,00	2.846.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.846.181,00	2.846.181,00	2.846.181,00	2.846.181,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.343.550,00	150.948.147,00	160.343.550,00	150.948.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.893.650,00	5.380.220,00	12.893.650,00	5.380.220,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.494.350,00	30.485.550,00	30.494.350,00	30.485.550,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.534.550,00	9.534.550,00	9.534.550,00	9.534.550,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.421.000,00	105.547.827,00	107.421.000,00	105.547.827,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	309.635.460,00	309.530.405,00	0,00	0,00	309.635.460,00	309.530.405,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	309.635.460,00	309.530.405,00	0	0	309.635.460,00	309.530.405,00	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.535.756,00	140.889.214,00	143.535.756,00	140.889.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.882.562,00	103.877.062,00	103.882.562,00	103.877.062,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.870.890,00	34.803.800,00	34.870.890,00	34.803.800,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.782.304,00	2.208.352,00	4.782.304,00	2.208.352,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.119.000,00	104.698.727,00	106.119.000,00	104.698.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.190.000,00	70.425.191,00	71.190.000,00	70.425.191,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.320.000,00	19.320.000,00	19.320.000,00	19.320.000,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.609.000,00	14.953.536,00	15.609.000,00	14.953.536,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.005.082.099,00	946.757.226,00	1.005.082.099,00	946.757.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	187.102.769,00	167.306.649,00	187.102.769,00	167.306.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	136.694.247,00	118.366.164,00	136.694.247,00	118.366.164,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	13.337.850,00	11.945.513,00	13.337.850,00	11.945.513,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	10.179.000,00	10.179.000,00	10.179.000,00	10.179.000,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.927.838,00	12.913.138,00	12.927.838,00	12.913.138,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	13.963.834,00	13.902.834,00	13.963.834,00	13.902.834,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	169.004.658,00	145.002.158,00	169.004.658,00	145.002.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	4.859.403,00	4.509.403,00	4.859.403,00	4.509.403,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	164.145.255,00	140.492.755,00	164.145.255,00	140.492.755,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	552.326.150,00	543.021.100,00	552.326.150,00	543.021.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	78.546.600,00	73.538.400,00	78.546.600,00	73.538.400,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	466.279.550,00	461.982.700,00	466.279.550,00	461.982.700,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	96.648.522,00	91.427.319,00	96.648.522,00	91.427.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.956.106,00	9.515.406,00	10.956.106,00	9.515.406,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.908.778,00	34.997.878,00	35.908.778,00	34.997.878,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	18.163.163,00	16.684.110,00	18.163.163,00	16.684.110,00	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	31.620.475,00	30.229.925,00	31.620.475,00	30.229.925,00	0	0	0	0	0
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	70.901.150,00	69.321.850,00	70.901.150,00	69.321.850,00	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.5.03.02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	70.901.150,00	69.321.850,00	70.901.150,00	69.321.850,00	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	70.901.150,00	69.321.850,00	70.901.150,00	69.321.850,00	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	24.375.400,00	24.075.800,00	24.375.400,00	24.075.800,00	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.05	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	24.375.400,00	24.075.800,00	24.375.400,00	24.075.800,00	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	46.525.750,00	45.246.050,00	46.525.750,00	45.246.050,00	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.5.03.02.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	46.525.750,00	45.246.050,00	46.525.750,00	45.246.050,00	0	0	0	0	0	0
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.412.682.618,00	7.642.719.236,00	7.397.367.160,00	6.636.210.496,00	1.015.315.458,00	1.006.508.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	8.412.682.618,00	7.642.719.236,00	7.397.367.160,00	6.636.210.496,00	1.015.315.458,00	1.006.508.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH	8.412.682.618,00	7.642.719.236,00	7.397.367.160,00	6.636.210.496,00	1.015.315.458,00	1.006.508.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.690.442.934,00	6.377.740.315,00	5.675.127.476,00	5.371.231.575,00	1.015.315.458,00	1.006.508.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.795.276,00	15.795.276,00	15.795.276,00	15.795.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.252.931.691,00	4.237.237.164,00	4.252.931.691,00	4.237.237.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.117.762.287,00	4.111.872.760,00	4.117.762.287,00	4.111.872.760,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.400.000,00	119.340.000,00	128.400.000,00	119.340.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.256.468,00	1.511.468,00	2.256.468,00	1.511.468,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.160.300,00	20.160.300,00	20.160.300,00	20.160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.160.300,00	20.160.300,00	20.160.300,00	20.160.300,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	988.804.000,00	723.914.262,00	988.804.000,00	723.914.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	988.804.000,00	723.914.262,00	988.804.000,00	723.914.262,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.226.243,00	171.225.243,00	171.226.243,00	171.225.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.697.100,00	2.697.100,00	2.697.100,00	2.697.100,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.670.793,00	30.669.793,00	30.670.793,00	30.669.793,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.674.350,00	23.674.350,00	23.674.350,00	23.674.350,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.184.000,00	114.184.000,00	114.184.000,00	114.184.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	874.105.458,00	866.508.740,00	0,00	0,00	874.105.458,00	866.508.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.141.866,00	239.871.340,00	0	0	242.141.866,00	239.871.340,00	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	161.920.020,00	161.599.000,00	0	0	161.920.020,00	161.599.000,00	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	470.043.572,00	465.038.400,00	0	0	470.043.572,00	465.038.400,00	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.904.966,00	91.443.810,00	103.904.966,00	91.443.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.823.400,00	40.362.244,00	52.823.400,00	40.362.244,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.081.566,00	3.081.566,00	3.081.566,00	3.081.566,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.515.000,00	251.455.520,00	122.305.000,00	111.455.520,00	141.210.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.305.000,00	111.455.520,00	122.305.000,00	111.455.520,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.210.000,00	140.000.000,00	0	0	141.210.000,00	140.000.000,00	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.508.923.756,00	1.102.463.193,00	1.508.923.756,00	1.102.463.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.219.121.416,00	945.007.616,00	1.219.121.416,00	945.007.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	77.217.932,00	55.997.932,00	77.217.932,00	55.997.932,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	247.359.901,00	247.231.101,00	247.359.901,00	247.231.101,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	242.196.708,00	235.571.708,00	242.196.708,00	235.571.708,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	307.907.015,00	81.632.015,00	307.907.015,00	81.632.015,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	180.944.880,00	179.079.880,00	180.944.880,00	179.079.880,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	163.494.980,00	145.494.980,00	163.494.980,00	145.494.980,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	289.802.340,00	157.455.577,00	289.802.340,00	157.455.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	21.179.970,00	20.498.207,00	21.179.970,00	20.498.207,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	268.622.370,00	136.957.370,00	268.622.370,00	136.957.370,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	213.315.928,00	162.515.728,00	213.315.928,00	162.515.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	27.131.360,00	6.731.360,00	27.131.360,00	6.731.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	27.131.360,00	6.731.360,00	27.131.360,00	6.731.360,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	186.184.568,00	155.784.368,00	186.184.568,00	155.784.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	141.113.265,00	117.888.065,00	141.113.265,00	117.888.065,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.489.420,00	19.489.420,00	20.489.420,00	19.489.420,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.5.03.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24.581.883,00	18.406.883,00	24.581.883,00	18.406.883,00	0	0	0	0	0	0
7			UNSUR KEWILAYAHAN	23.554.527.557,00	23.073.580.285,00	22.546.541.890,00	22.085.401.857,00	1.007.985.667,00	988.178.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	23.554.527.557,00	23.073.580.285,00	22.546.541.890,00	22.085.401.857,00	1.007.985.667,00	988.178.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN NUBATUKAN	6.762.219.329,00	6.568.652.075,00	6.703.907.771,00	6.511.163.825,00	58.311.558,00	57.488.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.359.142.186,00	6.324.492.058,00	6.321.630.628,00	6.287.003.808,00	37.511.558,00	37.488.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.707.900,00	10.623.900,00	10.707.900,00	10.623.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	423.800,00	339.800,00	423.800,00	339.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.554.450,00	1.554.450,00	1.554.450,00	1.554.450,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.663.400,00	1.663.400,00	1.663.400,00	1.663.400,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.871.450,00	6.871.450,00	6.871.450,00	6.871.450,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.868.660.076,00	5.849.666.590,00	5.868.660.076,00	5.849.666.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.511.940.851,00	5.502.067.365,00	5.511.940.851,00	5.502.067.365,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	354.457.575,00	345.337.575,00	354.457.575,00	345.337.575,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	597.575,00	597.575,00	597.575,00	597.575,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.664.075,00	1.664.075,00	1.664.075,00	1.664.075,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.436.775,00	1.436.775,00	1.436.775,00	1.436.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	742.775,00	742.775,00	742.775,00	742.775,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.278.629,00	34.259.680,00	37.278.629,00	34.259.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.097.155,00	117.455,00	2.097.155,00	117.455,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.383.474,00	9.383.474,00	9.383.474,00	9.383.474,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.555.000,00	6.216.050,00	6.555.000,00	6.216.050,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.243.000,00	18.542.701,00	19.243.000,00	18.542.701,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.511.558,00	37.488.250,00	0,00	0,00	37.511.558,00	37.488.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.511.558,00	37.488.250,00	0	0	37.511.558,00	37.488.250,00	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.602.248,00	346.307.035,00	354.602.248,00	346.307.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	324.862.000,00	324.860.000,00	324.862.000,00	324.860.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.048.600,00	18.755.387,00	27.048.600,00	18.755.387,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.691.648,00	2.691.648,00	2.691.648,00	2.691.648,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.945.000,00	44.709.828,00	48.945.000,00	44.709.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.945.000,00	44.709.828,00	48.945.000,00	44.709.828,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	300.211.943,00	143.379.267,00	279.411.943,00	123.379.267,00	20.800.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.356.943,00	12.237.443,00	12.356.943,00	12.237.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.356.943,00	12.237.443,00	12.356.943,00	12.237.443,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	287.855.000,00	131.141.824,00	267.055.000,00	111.141.824,00	20.800.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	287.855.000,00	131.141.824,00	267.055.000,00	111.141.824,00	20.800.000,00	20.000.000,00	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.144.150,00	36.211.650,00	37.144.150,00	36.211.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.144.150,00	36.211.650,00	37.144.150,00	36.211.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.098.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12.068.900,00	11.799.400,00	12.068.900,00	11.799.400,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.977.250,00	22.314.250,00	22.977.250,00	22.314.250,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.833.000,00	3.650.000,00	3.833.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.833.000,00	3.650.000,00	3.833.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.833.000,00	3.650.000,00	3.833.000,00	3.650.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.040.350,00	45.909.100,00	46.040.350,00	45.909.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	46.040.350,00	45.909.100,00	46.040.350,00	45.909.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17.564.100,00	17.564.100,00	17.564.100,00	17.564.100,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.476.250,00	28.345.000,00	28.476.250,00	28.345.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.847.700,00	15.010.000,00	15.847.700,00	15.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.847.700,00	15.010.000,00	15.847.700,00	15.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.135.000,00	5.135.000,00	5.135.000,00	5.135.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000,00	1.825.000,00	2.000.000,00	1.825.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.675.000,00	3.650.000,00	3.675.000,00	3.650.000,00	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.037.700,00	4.400.000,00	5.037.700,00	4.400.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001		KELURAHAN LEWOLEBA BARAT	530.516.016,00	495.075.368,00	369.680.252,00	334.385.515,00	160.835.764,00	160.689.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.916.016,00	11.948.242,00	13.911.016,00	7.943.389,00	4.005.000,00	4.004.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.412.631,00	3.412.631,00	3.412.631,00	3.412.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.457.631,00	2.457.631,00	2.457.631,00	2.457.631,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.005.000,00	4.004.853,00	0,00	0,00	4.005.000,00	4.004.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.005.000,00	4.004.853,00	0	0	4.005.000,00	4.004.853,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.398.385,00	1.150.000,00	6.398.385,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	279.565,00	230.000,00	279.565,00	230.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.118.820,00	920.000,00	6.118.820,00	920.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.100.000,00	3.380.758,00	4.100.000,00	3.380.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.100.000,00	3.380.758,00	4.100.000,00	3.380.758,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	512.600.000,00	483.127.126,00	355.769.236,00	326.442.126,00	156.830.764,00	156.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	512.600.000,00	483.127.126,00	355.769.236,00	326.442.126,00	156.830.764,00	156.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	156.830.764,00	156.685.000,00	0	0	156.830.764,00	156.685.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	355.769.236,00	326.442.126,00	355.769.236,00	326.442.126,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002		KELURAHAN LEWOLEBA	510.802.848,00	476.744.412,00	390.134.042,00	358.386.900,00	120.668.806,00	118.357.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.402.848,00	16.059.776,00	17.402.848,00	16.059.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.874.463,00	2.873.633,00	2.874.463,00	2.873.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.877.213,00	1.876.383,00	1.877.213,00	1.876.383,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	997.250,00	997.250,00	997.250,00	997.250,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.748.385,00	5.716.920,00	5.748.385,00	5.716.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	279.565,00	270.000,00	279.565,00	270.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.468.820,00	5.446.920,00	5.468.820,00	5.446.920,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.780.000,00	7.469.223,00	8.780.000,00	7.469.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.780.000,00	7.469.223,00	8.780.000,00	7.469.223,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	493.400.000,00	460.684.636,00	372.731.194,00	342.327.124,00	120.668.806,00	118.357.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	493.400.000,00	460.684.636,00	372.731.194,00	342.327.124,00	120.668.806,00	118.357.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120.668.806,00	118.357.512,00	0	0	120.668.806,00	118.357.512,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	372.731.194,00	342.327.124,00	372.731.194,00	342.327.124,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003		KELURAHAN SELANDORO	488.889.570,00	460.001.316,00	326.889.784,00	298.121.316,00	161.999.786,00	161.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.489.570,00	4.607.539,00	10.489.570,00	4.607.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.380.270,00	2.360.539,00	2.380.270,00	2.360.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.501.720,00	1.488.989,00	1.501.720,00	1.488.989,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	878.550,00	871.550,00	878.550,00	871.550,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.209.300,00	2.247.000,00	4.209.300,00	2.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	243.100,00	240.000,00	243.100,00	240.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.966.200,00	2.007.000,00	3.966.200,00	2.007.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	478.400.000,00	455.393.777,00	316.400.214,00	293.513.777,00	161.999.786,00	161.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	478.400.000,00	455.393.777,00	316.400.214,00	293.513.777,00	161.999.786,00	161.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	161.999.786,00	161.880.000,00	0	0	161.999.786,00	161.880.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	316.400.214,00	293.513.777,00	316.400.214,00	293.513.777,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004		KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH	461.561.905,00	418.224.922,00	354.920.375,00	315.259.966,00	106.641.530,00	102.964.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.961.905,00	9.989.136,00	11.961.905,00	9.989.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.432.255,00	1.432.255,00	1.432.255,00	1.432.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	672.255,00	672.255,00	672.255,00	672.255,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.129.650,00	6.419.350,00	7.129.650,00	6.419.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	607.750,00	600.000,00	607.750,00	600.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.521.900,00	5.819.350,00	6.521.900,00	5.819.350,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.400.000,00	2.137.531,00	3.400.000,00	2.137.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.400.000,00	2.137.531,00	3.400.000,00	2.137.531,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	449.600.000,00	408.235.786,00	342.958.470,00	305.270.830,00	106.641.530,00	102.964.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	449.600.000,00	408.235.786,00	342.958.470,00	305.270.830,00	106.641.530,00	102.964.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	106.641.530,00	102.964.956,00	0	0	106.641.530,00	102.964.956,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	342.958.470,00	305.270.830,00	342.958.470,00	305.270.830,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005		KELURAHAN LEWOLEBA TIMUR	506.229.466,00	489.480.120,00	383.415.883,00	367.028.870,00	122.813.583,00	122.451.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.806.561,00	20.992.537,00	15.274.661,00	12.483.287,00	8.531.900,00	8.509.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.213.226,00	2.213.226,00	2.213.226,00	2.213.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.338.226,00	1.338.226,00	1.338.226,00	1.338.226,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.531.900,00	8.509.250,00	0,00	0,00	8.531.900,00	8.509.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.531.900,00	8.509.250,00	0	0	8.531.900,00	8.509.250,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.777.155,00	5.805.385,00	6.777.155,00	5.805.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	255.255,00	254.480,00	255.255,00	254.480,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.521.900,00	5.550.905,00	6.521.900,00	5.550.905,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.284.280,00	4.464.676,00	6.284.280,00	4.464.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.284.280,00	4.464.676,00	6.284.280,00	4.464.676,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	482.422.905,00	468.487.583,00	368.141.222,00	354.545.583,00	114.281.683,00	113.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	482.422.905,00	468.487.583,00	368.141.222,00	354.545.583,00	114.281.683,00	113.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	114.281.683,00	113.942.000,00	0	0	114.281.683,00	113.942.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	368.141.222,00	354.545.583,00	368.141.222,00	354.545.583,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006		KELURAHAN LEWOLEBA UTARA	466.295.579,00	439.793.411,00	334.762.820,00	314.411.411,00	131.532.759,00	125.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.548.579,00	14.420.561,00	16.571.902,00	14.420.561,00	5.976.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.731.338,00	2.671.376,00	2.731.338,00	2.671.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.856.338,00	1.796.626,00	1.856.338,00	1.796.626,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	875.000,00	874.750,00	875.000,00	874.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.976.677,00	0,00	0,00	0,00	5.976.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.976.677,00	0,00	0	0	5.976.677,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.507.870,00	5.727.930,00	6.507.870,00	5.727.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	607.750,00	600.000,00	607.750,00	600.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.900.120,00	5.127.930,00	5.900.120,00	5.127.930,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.332.694,00	6.021.255,00	7.332.694,00	6.021.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.332.694,00	6.021.255,00	7.332.694,00	6.021.255,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	443.747.000,00	425.372.850,00	318.190.918,00	299.990.850,00	125.556.082,00	125.382.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	443.747.000,00	425.372.850,00	318.190.918,00	299.990.850,00	125.556.082,00	125.382.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	125.556.082,00	125.382.000,00	0	0	125.556.082,00	125.382.000,00	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	318.190.918,00	299.990.850,00	318.190.918,00	299.990.850,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007		KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN	438.085.526,00	399.085.503,00	292.903.645,00	260.120.896,00	145.181.881,00	138.964.607,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.841.264,00	12.727.479,00	11.052.498,00	8.938.854,00	3.788.766,00	3.788.625,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.417.233,00	2.417.233,00	2.417.233,00	2.417.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.267.233,00	1.267.233,00	1.267.233,00	1.267.233,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.788.766,00	3.788.625,00	0,00	0,00	3.788.766,00	3.788.625,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.788.766,00	3.788.625,00	0	0	3.788.766,00	3.788.625,00	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.568.150,00	2.190.500,00	2.568.150,00	2.190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	364.650,00	360.000,00	364.650,00	360.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.203.500,00	1.830.500,00	2.203.500,00	1.830.500,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.067.115,00	4.331.121,00	6.067.115,00	4.331.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.067.115,00	4.331.121,00	6.067.115,00	4.331.121,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	423.244.262,00	386.358.024,00	281.851.147,00	251.182.042,00	141.393.115,00	135.175.982,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	423.244.262,00	386.358.024,00	281.851.147,00	251.182.042,00	141.393.115,00	135.175.982,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	141.393.115,00	135.175.982,00	0	0	141.393.115,00	135.175.982,00	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0007	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.851.147,00	251.182.042,00	281.851.147,00	251.182.042,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN LEBATUKAN	1.828.830.092,00	1.822.820.620,00	1.828.830.092,00	1.822.820.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.776.054.650,00	1.770.045.178,00	1.776.054.650,00	1.770.045.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.266.662,00	9.266.662,00	9.266.662,00	9.266.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	974.562,00	974.562,00	974.562,00	974.562,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.991.796,00	1.991.796,00	1.991.796,00	1.991.796,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.385.811,00	2.385.811,00	2.385.811,00	2.385.811,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.588.856,00	2.588.856,00	2.588.856,00	2.588.856,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	710.001,00	710.001,00	710.001,00	710.001,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	615.636,00	615.636,00	615.636,00	615.636,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.656.460.525,00	1.650.837.187,00	1.656.460.525,00	1.650.837.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.580.533.375,00	1.574.910.037,00	1.580.533.375,00	1.574.910.037,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.978.400,00	74.978.400,00	74.978.400,00	74.978.400,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	948.750,00	948.750,00	948.750,00	948.750,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.600.050,00	17.600.050,00	17.600.050,00	17.600.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.600.050,00	17.600.050,00	17.600.050,00	17.600.050,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.025.986,00	12.025.986,00	12.025.986,00	12.025.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	913.125,00	913.125,00	913.125,00	913.125,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.698.611,00	6.698.611,00	6.698.611,00	6.698.611,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.414.250,00	4.414.250,00	4.414.250,00	4.414.250,00	0	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.891.427,00	32.891.427,00	32.891.427,00	32.891.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.407.750,00	29.407.750,00	29.407.750,00	29.407.750,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.050.460,00	3.050.460,00	3.050.460,00	3.050.460,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	433.217,00	433.217,00	433.217,00	433.217,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.810.000,00	47.423.866,00	47.810.000,00	47.423.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.970.000,00	44.583.866,00	44.970.000,00	44.583.866,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.726.392,00	35.726.392,00	35.726.392,00	35.726.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.300.928,00	33.300.928,00	33.300.928,00	33.300.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.300.928,00	12.300.928,00	12.300.928,00	12.300.928,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.425.464,00	2.425.464,00	2.425.464,00	2.425.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.425.464,00	2.425.464,00	2.425.464,00	2.425.464,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	979.050,00	979.050,00	979.050,00	979.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	979.050,00	979.050,00	979.050,00	979.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	979.050,00	979.050,00	979.050,00	979.050,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN OMESURI	1.488.796.880,00	1.481.397.361,00	1.488.796.880,00	1.481.397.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.430.696.880,00	1.423.297.361,00	1.430.696.880,00	1.423.297.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.331.350,00	13.331.350,00	13.331.350,00	13.331.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.788.950,00	1.788.950,00	1.788.950,00	1.788.950,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.577.450,00	1.577.450,00	1.577.450,00	1.577.450,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.577.450,00	1.577.450,00	1.577.450,00	1.577.450,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.900.750,00	1.900.750,00	1.900.750,00	1.900.750,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.372.750,00	1.372.750,00	1.372.750,00	1.372.750,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.544.000,00	1.544.000,00	1.544.000,00	1.544.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.261.901.745,00	1.261.901.745,00	1.261.901.745,00	1.261.901.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.194.673.995,00	1.194.673.995,00	1.194.673.995,00	1.194.673.995,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.130.000,00	65.130.000,00	65.130.000,00	65.130.000,00	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.055.750,00	1.055.750,00	1.055.750,00	1.055.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.531.500,00	13.531.500,00	13.531.500,00	13.531.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.162.750,00	1.162.750,00	1.162.750,00	1.162.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.368.750,00	12.368.750,00	12.368.750,00	12.368.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.107.400,00	22.106.570,00	22.107.400,00	22.106.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.800.888,00	3.800.888,00	3.800.888,00	3.800.888,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.045.362,00	9.044.532,00	9.045.362,00	9.044.532,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.261.150,00	6.261.150,00	6.261.150,00	6.261.150,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.934.885,00	78.594.985,00	79.934.885,00	78.594.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.624.600,00	70.624.600,00	70.624.600,00	70.624.600,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.486.900,00	6.147.000,00	7.486.900,00	6.147.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.823.385,00	1.823.385,00	1.823.385,00	1.823.385,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.890.000,00	33.831.211,00	39.890.000,00	33.831.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.890.000,00	33.831.211,00	39.890.000,00	33.831.211,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.610.000,00	6.610.000,00	6.610.000,00	6.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.665.750,00	5.665.750,00	5.665.750,00	5.665.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.665.750,00	5.665.750,00	5.665.750,00	5.665.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	944.250,00	944.250,00	944.250,00	944.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	944.250,00	944.250,00	944.250,00	944.250,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.677.500,00	12.677.500,00	12.677.500,00	12.677.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.677.500,00	12.677.500,00	12.677.500,00	12.677.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.677.500,00	12.677.500,00	12.677.500,00	12.677.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.082.500,00	2.082.500,00	2.082.500,00	2.082.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.082.500,00	2.082.500,00	2.082.500,00	2.082.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.082.500,00	2.082.500,00	2.082.500,00	2.082.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.755.500,00	28.755.500,00	28.755.500,00	28.755.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.755.500,00	28.755.500,00	28.755.500,00	28.755.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.130.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	17.625.500,00	17.625.500,00	17.625.500,00	17.625.500,00	0	0	0	0	0	0

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.974.500,00	7.974.500,00	7.974.500,00	7.974.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.974.500,00	7.974.500,00	7.974.500,00	7.974.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.042.500,00	5.042.500,00	5.042.500,00	5.042.500,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.932.000,00	2.932.000,00	2.932.000,00	2.932.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN BUYASURI	1.481.608.231,00	1.476.828.955,00	1.481.608.231,00	1.476.828.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.420.063.231,00	1.415.373.955,00	1.420.063.231,00	1.415.373.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.204.650,00	11.064.650,00	12.204.650,00	11.064.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.590.150,00	1.510.150,00	1.590.150,00	1.510.150,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.769.500,00	1.519.500,00	1.769.500,00	1.519.500,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.752.000,00	1.672.000,00	1.752.000,00	1.672.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.105.700,00	1.855.700,00	2.105.700,00	1.855.700,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.323.400,00	2.073.400,00	2.323.400,00	2.073.400,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.773.200,00	1.693.200,00	1.773.200,00	1.693.200,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	890.700,00	740.700,00	890.700,00	740.700,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.290.764.759,00	1.289.844.413,00	1.290.764.759,00	1.289.844.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.221.526.559,00	1.220.686.213,00	1.221.526.559,00	1.220.686.213,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67.880.000,00	67.880.000,00	67.880.000,00	67.880.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.358.200,00	1.278.200,00	1.358.200,00	1.278.200,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.983.700,00	11.933.700,00	11.983.700,00	11.933.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.059.500,00	1.009.500,00	1.059.500,00	1.009.500,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.924.200,00	10.924.200,00	10.924.200,00	10.924.200,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.655.522,00	15.615.439,00	15.655.522,00	15.615.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.418.522,00	4.418.439,00	4.418.522,00	4.418.439,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.277.000,00	3.277.000,00	3.277.000,00	3.277.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.960.000,00	7.920.000,00	7.960.000,00	7.920.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.984.600,00	66.469.650,00	67.984.600,00	66.469.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.041.800,00	64.041.800,00	64.041.800,00	64.041.800,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.942.800,00	2.427.850,00	3.942.800,00	2.427.850,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.470.000,00	20.446.103,00	21.470.000,00	20.446.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.470.000,00	20.446.103,00	21.470.000,00	20.446.103,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.026.450,00	9.026.450,00	9.026.450,00	9.026.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.901.500,00	8.901.500,00	8.901.500,00	8.901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.901.500,00	8.901.500,00	8.901.500,00	8.901.500,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.307.450,00	8.277.450,00	8.307.450,00	8.277.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.307.450,00	8.277.450,00	8.307.450,00	8.277.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.307.450,00	8.277.450,00	8.307.450,00	8.277.450,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.990.700,00	1.990.700,00	1.990.700,00	1.990.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.990.700,00	1.990.700,00	1.990.700,00	1.990.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.990.700,00	1.990.700,00	1.990.700,00	1.990.700,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.968.400,00	32.908.400,00	32.968.400,00	32.908.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.968.400,00	32.908.400,00	32.968.400,00	32.908.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.955.000,00	15.955.000,00	15.955.000,00	15.955.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	17.013.400,00	16.953.400,00	17.013.400,00	16.953.400,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.252.000,00	9.252.000,00	9.252.000,00	9.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.252.000,00	9.252.000,00	9.252.000,00	9.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.153.200,00	5.153.200,00	5.153.200,00	5.153.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.098.800,00	4.098.800,00	4.098.800,00	4.098.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		KECAMATAN ATADEI	1.971.002.711,00	1.959.412.542,00	1.971.002.711,00	1.959.412.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.937.017.707,00	1.925.527.538,00	1.937.017.707,00	1.925.527.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.058.200,00	5.008.200,00	5.058.200,00	5.008.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.108.200,00	3.058.200,00	3.108.200,00	3.058.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.814.541.057,00	1.806.360.188,00	1.814.541.057,00	1.806.360.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.742.544.857,00	1.734.413.988,00	1.742.544.857,00	1.734.413.988,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.410.000,00	68.410.000,00	68.410.000,00	68.410.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.586.200,00	3.536.200,00	3.586.200,00	3.536.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.923.400,00	17.723.400,00	20.923.400,00	17.723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.923.400,00	17.723.400,00	20.923.400,00	17.723.400,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.169.750,00	11.169.750,00	11.169.750,00	11.169.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.779.750,00	1.779.750,00	1.779.750,00	1.779.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.918.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.270.300,00	43.250.000,00	43.270.300,00	43.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.858.600,00	39.850.000,00	39.858.600,00	39.850.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.411.700,00	3.400.000,00	3.411.700,00	3.400.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.055.000,00	42.016.000,00	42.055.000,00	42.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.055.000,00	42.016.000,00	42.055.000,00	42.016.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.240.900,00	13.140.900,00	13.240.900,00	13.140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.240.900,00	13.140.900,00	13.240.900,00	13.140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.240.900,00	8.240.900,00	8.240.900,00	8.240.900,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.200.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00	4.150.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	800.000,00	750.000,00	800.000,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.321.454,00	17.321.454,00	17.321.454,00	17.321.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.321.454,00	17.321.454,00	17.321.454,00	17.321.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.721.454,00	3.721.454,00	3.721.454,00	3.721.454,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.822.650,00	1.822.650,00	1.822.650,00	1.822.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.822.650,00	1.822.650,00	1.822.650,00	1.822.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.822.650,00	1.822.650,00	1.822.650,00	1.822.650,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		KECAMATAN NAGAWUTUNG	1.968.328.928,00	1.958.479.371,00	1.968.328.928,00	1.958.479.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.908.800.314,00	1.898.954.571,00	1.908.800.314,00	1.898.954.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.944.400,00	6.919.200,00	6.944.400,00	6.919.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.135.650,00	1.135.400,00	1.135.650,00	1.135.400,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.120.650,00	1.119.200,00	1.120.650,00	1.119.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.302.450,00	1.283.900,00	1.302.450,00	1.283.900,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.017.950,00	2.017.950,00	2.017.950,00	2.017.950,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.367.700,00	1.362.750,00	1.367.700,00	1.362.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.751.289.094,00	1.747.807.261,00	1.751.289.094,00	1.747.807.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.683.015.344,00	1.679.536.261,00	1.683.015.344,00	1.679.536.261,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67.021.050,00	67.019.000,00	67.021.050,00	67.019.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.252.700,00	1.252.000,00	1.252.700,00	1.252.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.173.200,00	16.173.200,00	16.173.200,00	16.173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.173.200,00	16.173.200,00	16.173.200,00	16.173.200,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.776.845,00	29.575.560,00	29.776.845,00	29.575.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	933.545,00	748.060,00	933.545,00	748.060,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.922.850,00	2.922.850,00	2.922.850,00	2.922.850,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.205.450,00	1.205.450,00	1.205.450,00	1.205.450,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.715.000,00	24.699.200,00	24.715.000,00	24.699.200,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.381.775,00	62.541.400,00	66.381.775,00	62.541.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59.450.275,00	59.446.400,00	59.450.275,00	59.446.400,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.931.500,00	3.095.000,00	6.931.500,00	3.095.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.235.000,00	35.937.950,00	38.235.000,00	35.937.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.515.000,00	30.217.950,00	32.515.000,00	30.217.950,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.714.782,00	12.714.050,00	12.714.782,00	12.714.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.714.782,00	12.714.050,00	12.714.782,00	12.714.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.112.050,00	7.112.050,00	7.112.050,00	7.112.050,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.602.732,00	5.602.000,00	5.602.732,00	5.602.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.522.882,00	18.519.800,00	18.522.882,00	18.519.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.522.882,00	18.519.800,00	18.522.882,00	18.519.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.566.532,00	10.565.800,00	10.566.532,00	10.565.800,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.956.350,00	7.954.000,00	7.956.350,00	7.954.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.157.700,00	2.157.700,00	2.157.700,00	2.157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.157.700,00	2.157.700,00	2.157.700,00	2.157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.157.700,00	2.157.700,00	2.157.700,00	2.157.700,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.517.700,00	14.517.700,00	14.517.700,00	14.517.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.517.700,00	14.517.700,00	14.517.700,00	14.517.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.517.700,00	14.517.700,00	14.517.700,00	14.517.700,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.615.550,00	11.615.550,00	11.615.550,00	11.615.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.615.550,00	11.615.550,00	11.615.550,00	11.615.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.815.550,00	9.815.550,00	9.815.550,00	9.815.550,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		KECAMATAN ILE APE	1.699.454.099,00	1.697.627.864,00	1.699.454.099,00	1.697.627.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.639.621.799,00	1.637.796.614,00	1.639.621.799,00	1.637.796.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.715.000,00	11.692.000,00	11.715.000,00	11.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.181.900,00	1.181.900,00	1.181.900,00	1.181.900,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.146.400,00	1.146.400,00	1.146.400,00	1.146.400,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.233.500,00	1.233.500,00	1.233.500,00	1.233.500,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.140.500,00	1.140.500,00	1.140.500,00	1.140.500,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.928.750,00	3.905.900,00	3.928.750,00	3.905.900,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.083.950,00	3.083.800,00	3.083.950,00	3.083.800,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.500.867.340,00	1.499.145.989,00	1.500.867.340,00	1.499.145.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.421.240.290,00	1.419.518.939,00	1.421.240.290,00	1.419.518.939,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.630.000,00	76.630.000,00	76.630.000,00	76.630.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.997.050,00	2.997.050,00	2.997.050,00	2.997.050,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.023.400,00	22.018.400,00	22.023.400,00	22.018.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	976.450,00	976.450,00	976.450,00	976.450,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.046.950,00	21.041.950,00	21.046.950,00	21.041.950,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.765.070,00	39.752.070,00	39.765.070,00	39.752.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.562.529,00	2.562.529,00	2.562.529,00	2.562.529,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.471.741,00	7.469.641,00	7.471.741,00	7.469.641,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.950.800,00	4.950.500,00	4.950.800,00	4.950.500,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.780.000,00	24.769.400,00	24.780.000,00	24.769.400,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.650.989,00	46.615.989,00	46.650.989,00	46.615.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.064.850,00	40.064.850,00	40.064.850,00	40.064.850,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.861.972,00	4.826.972,00	4.861.972,00	4.826.972,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.724.167,00	1.724.167,00	1.724.167,00	1.724.167,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.600.000,00	18.572.166,00	18.600.000,00	18.572.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.600.000,00	18.572.166,00	18.600.000,00	18.572.166,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.625.400,00	5.625.400,00	5.625.400,00	5.625.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.940.850,00	2.940.850,00	2.940.850,00	2.940.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.434.150,00	1.434.150,00	1.434.150,00	1.434.150,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.506.700,00	1.506.700,00	1.506.700,00	1.506.700,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.684.550,00	2.684.550,00	2.684.550,00	2.684.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.684.550,00	2.684.550,00	2.684.550,00	2.684.550,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.365.750,00	9.364.700,00	9.365.750,00	9.364.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.365.750,00	9.364.700,00	9.365.750,00	9.364.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.365.750,00	9.364.700,00	9.365.750,00	9.364.700,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.003.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.003.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.003.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.060.600,00	29.060.600,00	29.060.600,00	29.060.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.060.600,00	29.060.600,00	29.060.600,00	29.060.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.465.600,00	14.465.600,00	14.465.600,00	14.465.600,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.777.550,00	13.777.550,00	13.777.550,00	13.777.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.777.550,00	13.777.550,00	13.777.550,00	13.777.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.467.350,00	2.467.350,00	2.467.350,00	2.467.350,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.778.650,00	4.778.650,00	4.778.650,00	4.778.650,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.063.650,00	2.063.650,00	2.063.650,00	2.063.650,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.998.550,00	1.998.550,00	1.998.550,00	1.998.550,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.469.350,00	2.469.350,00	2.469.350,00	2.469.350,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		KECAMATAN WULANDONI	1.442.692.617,00	1.423.116.439,00	1.442.692.617,00	1.423.116.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.373.496.852,00	1.353.920.674,00	1.373.496.852,00	1.353.920.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.971.600,00	9.971.600,00	9.971.600,00	9.971.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.588.300,00	1.588.300,00	1.588.300,00	1.588.300,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.003.200,00	1.003.200,00	1.003.200,00	1.003.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.491.600,00	1.491.600,00	1.491.600,00	1.491.600,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.135.500,00	1.135.500,00	1.135.500,00	1.135.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.180.800,00	2.180.800,00	2.180.800,00	2.180.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.471.700,00	1.471.700,00	1.471.700,00	1.471.700,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.262.174.165,00	1.247.499.217,00	1.262.174.165,00	1.247.499.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.192.896.675,00	1.178.571.727,00	1.192.896.675,00	1.178.571.727,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67.880.000,00	67.530.000,00	67.880.000,00	67.530.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	604.150,00	604.150,00	604.150,00	604.150,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	793.340,00	793.340,00	793.340,00	793.340,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.355.750,00	12.355.750,00	12.355.750,00	12.355.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.599.750,00	11.599.750,00	11.599.750,00	11.599.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.101.887,00	18.101.887,00	18.101.887,00	18.101.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.172.987,00	3.172.987,00	3.172.987,00	3.172.987,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.008.900,00	1.008.900,00	1.008.900,00	1.008.900,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.920.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.333.450,00	40.529.850,00	45.333.450,00	40.529.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.561.950,00	30.758.350,00	35.561.950,00	30.758.350,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.771.500,00	9.771.500,00	9.771.500,00	9.771.500,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.560.000,00	25.462.370,00	25.560.000,00	25.462.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.560.000,00	25.462.370,00	25.560.000,00	25.462.370,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.336.915,00	19.336.915,00	19.336.915,00	19.336.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.311.000,00	13.311.000,00	13.311.000,00	13.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.311.000,00	13.311.000,00	13.311.000,00	13.311.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.025.915,00	6.025.915,00	6.025.915,00	6.025.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.025.915,00	6.025.915,00	6.025.915,00	6.025.915,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.340.750,00	12.340.750,00	12.340.750,00	12.340.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.340.750,00	12.340.750,00	12.340.750,00	12.340.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.340.750,00	12.340.750,00	12.340.750,00	12.340.750,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.209.250,00	2.209.250,00	2.209.250,00	2.209.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.209.250,00	2.209.250,00	2.209.250,00	2.209.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.209.250,00	2.209.250,00	2.209.250,00	2.209.250,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.632.600,00	29.632.600,00	29.632.600,00	29.632.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.632.600,00	29.632.600,00	29.632.600,00	29.632.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.205.000,00	16.205.000,00	16.205.000,00	16.205.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.427.600,00	13.427.600,00	13.427.600,00	13.427.600,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.676.250,00	5.676.250,00	5.676.250,00	5.676.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.676.250,00	5.676.250,00	5.676.250,00	5.676.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.498.050,00	3.498.050,00	3.498.050,00	3.498.050,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.178.200,00	2.178.200,00	2.178.200,00	2.178.200,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		KECAMATAN ILE APE TIMUR	1.509.213.760,00	1.506.840.006,00	1.509.213.760,00	1.506.840.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.457.781.061,00	1.455.438.756,00	1.457.781.061,00	1.455.438.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.642.454,00	9.542.450,00	9.642.454,00	9.542.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.176.004,00	1.176.000,00	1.176.004,00	1.176.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	945.500,00	945.500,00	945.500,00	945.500,00	0	0	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.701.750,00	1.701.750,00	1.701.750,00	1.701.750,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.338.400,00	1.288.400,00	1.338.400,00	1.288.400,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.714.400,00	1.714.400,00	1.714.400,00	1.714.400,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.722.650,00	1.722.650,00	1.722.650,00	1.722.650,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.043.750,00	993.750,00	1.043.750,00	993.750,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.319.905.497,00	1.319.103.999,00	1.319.905.497,00	1.319.103.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.246.253.043,00	1.245.451.545,00	1.246.253.043,00	1.245.451.545,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.368.650,00	70.368.650,00	70.368.650,00	70.368.650,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	985.404,00	985.404,00	985.404,00	985.404,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.298.400,00	2.298.400,00	2.298.400,00	2.298.400,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.119.250,00	18.319.250,00	19.119.250,00	18.319.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.119.250,00	18.319.250,00	19.119.250,00	18.319.250,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.584.452,00	7.584.400,00	7.584.452,00	7.584.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.233.848,00	1.233.800,00	1.233.848,00	1.233.800,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.329.554,00	2.329.550,00	2.329.554,00	2.329.550,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.221.050,00	1.221.050,00	1.221.050,00	1.221.050,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.980.408,00	69.751.100,00	69.980.408,00	69.751.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59.484.025,00	59.480.000,00	59.484.025,00	59.480.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.880.000,00	9.655.000,00	9.880.000,00	9.655.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	616.383,00	616.100,00	616.383,00	616.100,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.535.000,00	30.123.557,00	30.535.000,00	30.123.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.535.000,00	30.123.557,00	30.535.000,00	30.123.557,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.166.949,00	21.165.750,00	21.166.949,00	21.165.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.547.449,00	16.546.250,00	16.547.449,00	16.546.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.713.750,00	7.713.750,00	7.713.750,00	7.713.750,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.833.699,00	8.832.500,00	8.833.699,00	8.832.500,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.619.500,00	4.619.500,00	4.619.500,00	4.619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.619.500,00	4.619.500,00	4.619.500,00	4.619.500,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.523.000,00	7.498.000,00	7.523.000,00	7.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.523.000,00	7.498.000,00	7.523.000,00	7.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.723.000,00	5.698.000,00	5.723.000,00	5.698.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.176.500,00	2.176.500,00	2.176.500,00	2.176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.176.500,00	2.176.500,00	2.176.500,00	2.176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.176.500,00	2.176.500,00	2.176.500,00	2.176.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.425.250,00	13.425.250,00	13.425.250,00	13.425.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.425.250,00	13.425.250,00	13.425.250,00	13.425.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.425.250,00	13.425.250,00	13.425.250,00	13.425.250,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.141.000,00	7.135.750,00	7.141.000,00	7.135.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.141.000,00	7.135.750,00	7.141.000,00	7.135.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.341.000,00	6.335.750,00	6.341.000,00	6.335.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.407.457.678,00	3.395.296.020,00	3.407.457.678,00	3.395.296.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.407.457.678,00	3.395.296.020,00	3.407.457.678,00	3.395.296.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.407.457.678,00	3.395.296.020,00	3.407.457.678,00	3.395.296.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.912.992.084,00	1.902.298.480,00	1.912.992.084,00	1.902.298.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.256.700,00	6.933.000,00	7.256.700,00	6.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.209.450,00	1.155.500,00	1.209.450,00	1.155.500,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.209.450,00	1.155.500,00	1.209.450,00	1.155.500,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.209.450,00	1.155.500,00	1.209.450,00	1.155.500,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.209.450,00	1.155.500,00	1.209.450,00	1.155.500,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.209.450,00	1.155.500,00	1.209.450,00	1.155.500,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.209.450,00	1.155.500,00	1.209.450,00	1.155.500,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.689.008.746,00	1.683.391.449,00	1.689.008.746,00	1.683.391.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.575.612.096,00	1.570.064.499,00	1.575.612.096,00	1.570.064.499,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.772.100,00	111.737.250,00	111.772.100,00	111.737.250,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.624.550,00	1.589.700,00	1.624.550,00	1.589.700,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.545.900,00	21.534.150,00	21.545.900,00	21.534.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.545.900,00	21.534.150,00	21.545.900,00	21.534.150,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.413.702,00	54.336.530,00	54.413.702,00	54.336.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.260.454,00	1.250.000,00	1.260.454,00	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.498,00	5.048.000,00	5.100.498,00	5.048.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.131.750,00	4.131.750,00	4.131.750,00	4.131.750,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.921.000,00	43.906.780,00	43.921.000,00	43.906.780,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.240.236,00	47.322.600,00	51.240.236,00	47.322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.407.750,00	29.400.000,00	29.407.750,00	29.400.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.651.250,00	16.742.600,00	20.651.250,00	16.742.600,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.181.236,00	1.180.000,00	1.181.236,00	1.180.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.526.800,00	88.780.751,00	89.526.800,00	88.780.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.526.800,00	88.780.751,00	89.526.800,00	88.780.751,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	120.178.946,00	119.061.456,00	120.178.946,00	119.061.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Kelompok Belanja							
						Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
						Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	120.178.946,00	119.061.456,00	120.178.946,00	119.061.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9.157.200,00	8.145.700,00	9.157.200,00	8.145.700,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	111.021.746,00	110.915.756,00	111.021.746,00	110.915.756,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	642.260.448,00	642.089.584,00	642.260.448,00	642.089.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	642.260.448,00	642.089.584,00	642.260.448,00	642.089.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	642.260.448,00	642.089.584,00	642.260.448,00	642.089.584,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.514.250,00	5.478.000,00	5.514.250,00	5.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.514.250,00	5.478.000,00	5.514.250,00	5.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.514.250,00	5.478.000,00	5.514.250,00	5.478.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	51.134.500,00	51.068.000,00	51.134.500,00	51.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	51.134.500,00	51.068.000,00	51.134.500,00	51.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	51.134.500,00	51.068.000,00	51.134.500,00	51.068.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	675.377.450,00	675.300.500,00	675.377.450,00	675.300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	675.377.450,00	675.300.500,00	675.377.450,00	675.300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15.333.275,00	15.296.500,00	15.333.275,00	15.296.500,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	660.044.175,00	660.004.000,00	660.044.175,00	660.004.000,00	0	0	0	0	0	0
			Jumlah	823.493.539.413,00	785.510.494.976,81	601.341.218.913,00	580.215.271.609,81	51.303.500.328,00	50.046.933.466,00	5.056.604.909,00	3.381.112.202,00	165.792.215.263,00	151.867.177.699,00

CAPAIAN IKK OUTCOME LPPD KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Keterangan
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	4878	4990	97,755511	%	-
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	26245	26245	100	%	-
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	734	734	100	%	-
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	243	439	55,3530752	%	-
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	746	1496	49,8663102	%	-
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	2	1593	0,1255493	%	-
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2375	6742	35,2269356	%	-
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	2045	2278	89,7717296	%	-
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	225	268	83,9552239	%	-
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	4124	4124	100	%	-
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2155	2155	100	%	-
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	789	7409	10,6492104	%	-
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1042	1681	61,9869126	%	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Keterangan
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2114	2222	95,139514	%	-
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1554	1681	92,4449732	%	-
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	7869	8998	87,4527673	%	-
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	12607	12607	100	%	-
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	21072	21072	100	%	-
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	16744	17166	97,5416521	%	-
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	113,28	211,3	53,6109796	%	-
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	0	43	-	%	-
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	336,846	633,605	53,1634062	%	-
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	153116	153116	100	%	-
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	37786	37893	99,7176259	%	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Keterangan
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	12,57	33,05	38,0332829	%	-
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	10,34	96,35	10,7317073	%	-
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	750	750	100	%	-
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	1	1	100	%	-
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	43	50	86	%	-
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	2	2	100	%	-
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	0	1	-	%	Tahun 2025 tidak direncanakan pembangunan
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	20	6485	0,308404	%	-
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	1	1	100	%	-
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	1	3	33,3333333	%	-
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	8	8	100	%	-
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	4	4	100	%	-
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	153116	153116	100	%	-
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	18	18	100	%	-
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	10	10	100	%	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Keterangan
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	956	956	100	%	-
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	262	262	100	-	-
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	8319	8319	100	-	-
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1	1	100	-	-
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	5	5	100	-	-
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	104234	111537	93,452397	-	-
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	6	6	100	%	-
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	95	231	41,1255411	%	-
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	0	1	-	%	-
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	32	32	100	%	-
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	29	29	100	%	-
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	0	31,38	-	%	-
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	3654778	11948494,01	30,5877711	%	-
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	894709963	1268040000	70,5584968	%	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Keterangan
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamankan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1	6	16,6666667	%	-
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	8	10	80	%	-
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	12,4	17,82	69,5847363	%	-
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	41805	46573	89,7623086	%	-
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	14857	43253	34,3490625	%	-
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	2	2	100	%	-
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	107435	109864	97,7890847	%	-
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	1006	1006	100	%	-
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	1128	1128	100	%	Akta Perkawinan: 628 dan Buku Nikah: 500
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	9	9	100	%	-
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	35	47	74,4680851	%	-
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	36	79	45,5696203	%	-
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	0	17	-	%	Di Tahun 2025 terhadap Kerja Sama Desa telah dilakukan sosialisasi kerja sama antar desa di 8 titik untuk 17 Kerja Sama. Namun belum sampai pada tahap penandatanganan.
2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2,68	2,67	100,3745318	%	-
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	6437	16936	38,007794	%	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Keterangan
2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	26,9	22	122,2727273	%	-
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	-	0,64	-	0,64	Rasio	-
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0,37	-	0,37	Rasio	-
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	0	9	-	%	-
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	26	39	66,6666667	%	-
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	81	81	100	%	-
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	98964	98964	100	%	Seluruh penduduk usia 16-64 sebanyak 98.964 menjadi target sasaran penyebaran informasi publik dengan jumlah penerima mencapai 126.968
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	25584359350	25019291950	2,2585267	%	-
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	3714	5859	63,3896569	%	-
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	37494030120	35627383909	5,2393581	%	-
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	37494030120	39335000000	95,3197664	%	-
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	45	804	5,5970149	%	-
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	489	41236	1,185857	-	-
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	0	1	-	%	-
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	0	24	-	%	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Keterangan
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	497	497	100	%	-
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	804	918	87,5816993	%	-
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	2	2	100	%	-
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	331	428	-22,6635514	%	-
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0,15 \times \text{Pra Membaca}) + (0,50 \times \text{Saat Membaca}) + (0,35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	62,34	-	62,34	Nilai	-
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	-	3,28	-	3,28	Nilai	-
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	-	50	-	50	%	-
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	7265,29	9000	80,7254444	%	-
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	33,38	-	33,38	Kg / Kap / Tahun	Angka Konsumsi Ikan yang digunakan adalah berdasarkan data Susenas Tahun 2024 dari BPS. AKI adalah Rata-rata Konsumsi Ikan Dalam Rumah Tangga. AKI Tahun 2025 masih dalam tahapan perhitungan tingkat Provinsi.
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	1390000000	37494030120	3,7072569	%	-
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	207	1068	-80,6179775	%	-
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	42265	36831	14,7538758	%	-
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	49686,2	49329,01	0,7240972	%	-
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	13880,26	15005,12	-7,4965079	%	-
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	2792,074	2346,72	18,9777221	%	-
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMSI))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	841,2	841,2	100	%	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Keterangan
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	249	2610	9,5402299	%	-
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	-	0	-	-	%	Belum ada dokumen RPIK Kabupaten
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	9	942	0,955414	%	-
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	1020	866	17,7829099	%	-
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	3927650000	37494030120	10,475401	%	-
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17	17	100	%	17 Program Prioritas Presiden terdapat dalam 87 Program dan 194 Kegiatan dalam APBD
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3,26242E+11	8,23494E+11	39,6167985	%	-
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	38824666931	8,06998E+11	4,8109997	%	-
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	3,33156E+11	7,76186E+11	42,9222195	%	-
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	85746049820	6,57377E+11	13,043658	%	Alokasi terhadap Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik masih di bawah 40%. Hal ini karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Pusat (Inpres Nomor 1 Tahun 2025) yang berpengaruh terhadap alokasi transfer ke Daerah.
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1538	2972	51,7496635	%	-
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	81	81	100	%	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Keterangan
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	4	-	4	Nilai	-
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	3	-	3	Nilai	Hasil Penilaian yang digunakan menggunakan penilaian di Tahun 2024. Penilaian Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan perubahan pedoman evaluasi kapabilitas APIP. Evaluasi kapabilitas APIP berikutnya akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	4	-	4	Nilai	-
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	620	796	77,8894472	%	-
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	22,22	-	22,22	Poin	-
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	24,81	-	24,81	Poin	-
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	15	-	15	Poin	-
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1	-	1	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu	-
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	5	10	50	%	-
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	77,55	-	77,55	Nilai	-



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Trans Lembata No.- Telp./Fax. (0383) 2343359

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Lembata untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Lembata.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Lewoleba, 26 Maret 2026
INSPEKTUR DAERAH,



PATRISIUS EMI UJAN, S.SOS.MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680610 199703 1 009